



PERGUMULAN IDENTITAS KUASA DAN KEDAULATAN DALAM PERBINCANGAN SEJARAH

KUMPULAN MAKALAH KONFERENSI NASIONAL SEJARAH IX



**Pergumulan Identitas,
Kuasa dan Kedaulatan
Dalam Perbincangan Sejarah**
Kumpulan Makalah Konferensi Nasional Sejarah IX



**Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
2013**

**Pergumulan Identitas,
Kuasa dan Kedaulatan
Dalam Perbincangan Sejarah**
Kumpulan Makalah Konferensi Nasional Sejarah IX

Penulis:

Dr.phil.Ichwan Azhari
Budi Agustono, Dr.
Haliadi Sadi, M.Hum.
Mestika Zed, Prof. Dr,
Djoko Marihandono, Prof. Dr.
Agus Mulyana
G. Ambar wulan, Dr.
Mohammad Iskandar
Djoko Suryo
Miftahul Falah
Ani Ismarini
Rosmaida Sinaga
Muhamad Hisyam
Siti Junaeda, M.Hum.
Ratna, M.S. Dra.
Cokorda Istri Suryawati, M.S.Dra.
John.A. Pattikayhatu, Prof. Dr.

Editor :

Kasijanto Sostrodinomo, M.Hum.
Dr. Muhammad Hisyam

Tata Letak & Desain:

Tasman

Penerbit :

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG:

Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari penerbit

Tahun 2013

ISBN : 978-602-1289-04-4



PENGANTAR

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini diangkat dari makalah-makalah yang dipresentasikan dan didiskusikan pada Forum Konferensi Nasional Sejarah IX yang berlangsung tanggal 5 sampai 8 bulan Juli 2011 di Jakarta. Makalah-makalah yang dipilih dalam buku ini adalah yang berhubungan dengan topik sebagaimana termaktub dalam judul buku ini, **Pergumulan Identitas, Kuasa dan Kedaulatan Dalam Perbincangan Sejarah**. Dalam judul ini terangkum pengertian bahwa kebangsaan atau nasionalisme sebagai fondasi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkembang dalam sejarah, mulai dari kesadaran tentang konsep diri dan kian, tumbuh menjadi kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan. Untuk mencapai cita-cita itu perjuangan dan strateginya harus dirumuskan, dan ketika kemerdekaan itu tercapai, masalah penataan negara dan pemerintahannya berdialektika antara demokrasi sebagai konsep universal dengan ekologi sosial budaya sebagai realitas lokal.

Dialektika itu menghasilkan dinamika sistem kekuasaan yang berubah, tetapi dalam perubahan itu konsep demokrasi dipakai terus menerus, walaupun praktiknya berbeda-beda. Dari demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin, lalu demokrasi Pancasila hingga sekarang demokrasi tanpa embel-embel dalam semangat reformasi, konsep kebangsaan tetap relevan. Ketika sistem kekuasaan disebut demokrasi liberal, kebangsaan adalah pengikat bermacam-macam identitas primordial, ketika sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila diterapkan kebangsaan adalah ideologi dan alat kekuasaan. Kebangsaan dikooptasi oleh kekuasaan, dipupuk dari kesadaran kesejarahan menjadi ideologi untuk menopang dan memperkokoh kekuasaan. Dan di masa kini kebangsaan seakan kehilangan maknanya ketika konsep supremasi hukum menjadi pilar bagi sehatnya demokrasi.

Sebetulnya kebangsaan atau nasionalisme tetap relevan dalam kondisi apapun, tetapi pelemahan yang sekarang terjadi merupakan akibat atau efek dari dijadikannya kebangsaan sebagai ideologi yang pemaknaannya didominasi kekuasaan selama 38 tahun (dari dekrit 1959 sampai reformasi 1998). Karena sistem kekuasaan membentuk negara hegemonik, dan demokrasi yang diatasnamakan kekuasaan itu membelenggu kemerdekaan, maka kebangsaan yang larut bersamanya turut tercelup dalam citra negatif itu. Apa lagi ketika sistem itu berujung pada krisis multi dimensional, maka kebangsaanpun dirasakan ikut bertanggungjawab atasnya. Ketika inilah dirasakan pentingnya pendidikan sejarah, bukan saja untuk membangkitkan kembali kesadaran kebangsaan yang telah kehilangan maknanya melainkan terutama untuk generasi muda yang masa depannya masih panjang yang berarti juga masa depan NKRI. Kalau dahulu kebangsaan dipakai untuk menghidupkan perjuangan kemerdekaan, kini kebangsaan dipakai untuk mengisi dan memelihara kemerdekaan sehingga negara bangsa yang dengan susah payah diperjuangkan itu tidak hanya tetap eksis, melainkan bertambah maju dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Dengan begini kebangsaan adalah jiwa yang harus tetap terpelihara. Globalisasi tidak menyebabkan rasa kebangsaan hilang, tetapi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing.

Agar pendidikan sejarah mampu menciptakan kesadaran sejarah yang otentik, sejarah harus ditulis secara benar, objektif, ilmiah dan memperkuat kebangsaan Indonesia. Walaupun demikian, sejarah tidak hanya ditulis atas nama kebangsaan dalam skop nasional, elitis, dan politis, tetapi juga memperhitungkan factor lokal, arus bawah dan multidimensional. Tetapi sejarah lokal harus menghindarkan diri dari pandangan etno sentris dan regional sentris yang cenderung dipakai untuk menciptakan identitas lokal supaya dapat membenarkan klaim dan legitimasi atas kekuasaan daerah karena kepentingan golongan atau elite tertentu. Sejarah dipakai untuk membenarkan klaim etnik dan kultur tertentu atas nama hak memperoleh kekuasaan, dengan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara secara luas. Jadilah sejarah yang demikian



itu sebagai sejarah daerah dalam pengertian politik, bukan sejarah lokal sebagaimana dimaksudkan oleh ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah di sekolah semestinya memiliki otonomi tersendiri, lepas dari pencampurannya dengan ilmu lain. Dengan otonomi itu sejarah tidak terbandingkan dengan ilmu lain, sehingga konsentrasinya dapat menimbulkan minat dan pengaruhnya terhadap pembangunan karakter, karena bagaimanapun pendidikan sejarah tidak hanya untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, tetapi juga membangun karakter. Pendidikan sejarah selama ini tidak memperoleh perhatian dari peserta didik lantaran terbandingkan dengan sosiologi, geografi dan demografi, disamping penulisan bahan ajar sejarah dan metode pembelajaran yang monoton. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan strategi pedagogi dan pemanfaatan teknologi baru yang terus bertumbuh dan merebut minat masyarakat luas. Itulah teknologi media dan informatika. Karena itu, pendidikan sejarah kalau ingin merebut perhatian peserta anak didik semestinya memanfaatkan juga kemajuan teknologi itu.

Pendidikan sejarah yang dapat menumbuhkan karakter bangsa dan rasa kebangsaan adalah pendidikan sejarah yang bebas dari perpektif kolonialisme. Ketika awal masa kemerdekaan sejarah Indonesia masih ditulis dengan pengaruh yang kuat dari sejarah yang ditulis oleh sejarawan Belanda yang perpektifnya memperlakukan bangsa anak negeri sebagai pelengkap sejarah mereka, maka diperlukan emansipasi sejarah dari pandangan kolonialis itu. Kesadaran muncul agar bangsa Indonesia menulis sejarahnya sendiri, yaitu sejarah yang memerankan bangsa Indonesia sebagai pelaku, ditulis dari dalam perpektif orang Indonesia sendiri, disamping mengikuti kaidah-kaidah penulisan sejarah kritis, akademis dan memiliki visi teoretis yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Maka lahirlah sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris. Sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris inilah yang diharapkan dapat membentuk bangsa yang berkarakter dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

Tetapi sejarah memang bukan hanya dipakai untuk pendidikan. Ia adalah ilmu pengetahuan yang pada sifat dasarnya harus terus berkembang.

Karena itu masa demi masa, ilmu sejarah terus berkembang. Perkembangan itu menuju diferensiasi dan kedalaman isi, baik isu yang menjadi subjek kajiannya, metodologinya maupun lapis sosial yang menjadi sasaran telaah ilmu ini. Ada sejarah genre baru, disamping yang telah lama berkembang semisal sejarah sosial, sejarah sastra dan sejarah kebudayaan, juga lahir yang baru: sejarah maritim, sejarah hukum, sejarah lingkungan, dan juga sejarah total. Tentu ada lagi sejarah-sejarah lainnya yang sekarang mungkin sedang bersemi dan yang akan berkembang pada masa yang akan datang. Sebagai sejarawan kreativitas dituntut untuk melahirkan sejarah-sejarah genre baru dan menjadi pelaku dalam perkembangan itu. Tetapi buku ini tidak hanya untuk pemerhati sejarah dan sejarawan. Sebagai bahan bacaan, buku ini ditujukan untuk semua pembaca, apapun latar belakang perhatian dan profesinya.

Editor



SAMBUTAN

DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Buku Pergumulan Identitas, Kuasa dan Kedaulatan Dalam Perbincangan Sejarah dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan makalah Konferensi Sejarah Nasional 2011. Diterbitkannya buku ini sebagai upaya publikasi hasil konferensi agar dapat dibaca oleh khalayak yang berminat pada sejarah. Penerbitan ini juga merupakan bentuk dokumentasi ide-ide yang tertuang dalam Konferensi Sejarah Nasional 2011, dari para penulis yang sebagian besar berasal dari kalangan akademisi.

Kumpulan makalah dalam buku ini membahas berbagai tema yang berkenaan dengan Sejarah Indonesia (historisitas). Tema mengenai Identitas, Kuasa dan Kedaulatan merupakan tema yang selalu menarik untuk dibahas dalam kerangka kesejarahan, yang berkaitan erat dengan pertumbuhan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kita dapat bercermin pada perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, sampai sejauh mana kehidupan berbangsa kita sudah dapat dinilai semakin demokratis.

Perkembangan sejarah Indonesia juga semakin berkembang sejalan dengan makin banyaknya penelitian dan penulisan sejarah lokal. Setiap daerah memiliki pengalaman dan peristiwa sejarahnya sendiri yang menjadi bagian dari sejarah nasional kita. Penulisan sejarah (historiografi) Indonesia menjadi semakin bervariasi dan semakin kaya dibandingkan penulisan sejarah pada masa 20 tahun yang lampau.

Historiografi ini berkaitan erat dengan tema makalah berikutnya berkenaan dengan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah berkaitan erat dengan pembangunan karakter dan identitas kebangsaan. Berbagai peristiwa bersejarah menjadi bagian dari pendidikan untuk generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya, dan dapat digunakan untuk

menamamkan rasa cinta tanah air. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar sejarah menjadi satu hal yang menarik perhatian generasi muda dan tidak hanya sekedar berkaitan dengan angka tahun dan peristiwa, tapi lebih jauh lagi pada kenapa satu peristiwa terjadi dengan pembahasan yang kritis dalam bentuk paparan yang diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda.

Dalam sejarah menjelaskan berbagai macam tema dalam penulisan sejarah melalui berbagai peristiwa sejarah, seperti sejarah lokal, sejarah lisan, sejarah politik dan pemerintahan dan tema sejarah lainnya.

Semoga upaya pendokumentasian kumpulan makalah ini dapat membawa manfaat khususnya bagi generasi muda dan khalayak yang menaruh minat pada sejarah bangsanya sendiri. Buku ini diharapkan dibaca secara luas oleh masyarakat Indonesia layaknya sebuah album perjalanan bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2013

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

Endjat Djaenuderajat



DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN I:

KONSTRUKSI IDENTITAS, OTONOMI DAN PEMEKARAN

1. Ichwan Azhari: Konstruksi Batak dan Tapanuli Dalam Ruang Administratif di Sumatera Utara Sejak Abad 19.....	1
2. Budi Agustono: Etnik Pakpak Membelah Wilayahnya Sendiri: Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat.....	15
3. Haliadi-Sadi: Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah di Poso: Antara Otonomi dan Pemikiran Kekuasaan Lokal.....	31

BAGIAN II:

KEDAULATAN DAN STRATEGI PERTAHANAN-KEMAMAN

1. Mestika Zed: Utang Republik Utang Regim, Ironisme Sejarah Negeri yang Terjerat Utang.....	47
2. Djoko Marihandono: Reorganisasi Militer Belanda-Perancis di Hindia Timur Pada Awal abad XIX.....	69
3. Agus Mulyana: Aspek Pertahanan Pembangunan Jalan Kereta Api Lajur Rancaekek – Sumedang (1917-1921).....	91
4. Dr. G. Ambar Wulan: Pengelolaan Keamanan Dalam Negeri di Masa Revolusi, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Intelijen Kepolisian RI 1945-1949.....	99

5. Mohammad Iskandar: Aksi-Aksi Kolektif Pada Masa Bersiap, Kasus Ce Mamat..... 111

BAGIAN III:

PERUBAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Djoko Suryo: Dari Vorstenlanden ke DIY: Kesenambungan dan Perubahan 129
2. Miftahul Falah: Kota Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, 18820-1942..... 169
3. Ani Ismarini: Dari Ujungberung ke Bandung: Perubahan Wilayah Administratif 1871-1942 189
4. Rosmaida Sinaga: Penataan Wilayah Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (west Papua) 1898-1962. 203

BAGIAN IV:

TOKOH, PEMIKIRAN DAN PERJUANGANNYA

1. Muhamad Hisyam: Kibagus Hadikusumo dan Broblem Relasi Agama-Negara..... 223
2. Siti Junaeda: Gagasan Kebangsaan Nadjmoeddin Daeng Malewa di Sulawesi Selatan 1907-1947 249
3. Ratna: Sang “Bengal” dari Serdang Politik Civil Disobedience Sultan Sulaiman Shariful Alamshah (1880-1942)..... 267
4. Cokorda Istri Suryawati: Kepemimpinan Perempuan Pejuang Bali Ida I Dewa Agung Istri Kanya Pada Masa Kolonial 385
5. John.A. Pattikayhatu: Tokoh Perjuangan Kemerdekaan Willem Reawaru dan Peristiwa RMS di Maluku. 301





BAGIAN PERTAMA
KONSTRUKSI IDENTITAS, OTONOMI
DAN PEMEKARAN



Konstruksi ‘Batak’ dan ‘Tapanuli’ dalam Ruang Administratif di Sumatra Utara Sejak Abad Ke-19

ICHWAN AZHARI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Tulisan ringkas ini didasarkan pada suatu penelitian yang berlangsung selama dua bulan— September hingga November 2010—di kantor arsip misionaris RMG di Wuppertal, Barmen, Jerman.¹ Selain meneliti di kantor arsip tersebut, penulis juga melengkapi data di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Den Haag, Negeri Belanda; dan mewawancarai sejumlah pakar Batak di Negeri Belanda dan Jerman, antara lain Johan Angerler dan Lothar Schreiner. Selain beberapa acuan yang disebutkan, seluruh uraian dan analisis dalam tulisan ini sepenuhnya temuan penulis selama penelitian.

BATAK SEBAGAI KONSTRUKSI PENDUDUK PESISIR

Awalnya, kata *batak* diambil oleh musafir yang menjelajah ke Sumatra dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama *bata*. Namun, nama yang diberikan kepada penduduk pesisir itu berkonotasi negatif bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan.

Pada sumber-sumber manuskrip Melayu klasik, seperti manuskrip abad ke-17 koleksi Leiden juga ditemukan kata *batak* di kalangan orang Melayu di Malaysia, sebagai label untuk penduduk yang tinggal di rimba

¹Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertukaran Akademis (DAAD) pemerintah Jerman yang telah membiayai penelitian ini.

pedalaman Semenanjung Malaka. Dalam manuskrip *Hikayat Hang Tuah*, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), Putri Gunung Ledang yang sangat dihina dan direndahkan melarikan diri ke hulu sungai dan dalam teks itu disebutkan "masuk ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri Batak. Maka diambil oleh segala menteri Batak itu, dirajakannya Putri Gunung Ledang itu dalam negeri Batak itu."

Tidak hanya di Malaysia, penduduk pesisir di Filipina juga menyebut *batak* sebagai stereotipe atau label negatif bagi penduduk pedalaman. Oleh karena itu cukup beralasan dan tidak mengherankan bila peneliti Batak terkenal asal Belanda, Van der Tuuk, pernah risau dan mengingatkan kepada para misionaris Jerman agar tidak menggunakan sebutan *batak* untuk nama etnik karena citra negatif yang terkandung pada kata itu. Di Malaysia dan Filipina, penduduk yang diberi label *batak* tidak mau menggunakannya sebagai sebutan etnik mereka karena konotasinya yang merendahkan itu. Di Sumatra Utara, label itu terus dipakai karena peran misionaris Jerman dan pemerintah kolonial Belanda yang memberi konstruksi dan makna baru atas kata itu.

BATAK DALAM KONSTRUKSI PETA GEOGRAFIS

Para misionaris pada awalnya ragu menggunakan kata *batak* sebagai nama etnik. Hal itu karena kata *batak* tidak dikenal oleh orang Batak sendiri ketika para misionaris datang dan melakukan penelitian awal. Para misionaris menggunakan kata *bata* sebagai satu kesatuan dengan *lander*, sehingga menjadi *bata lander*, yang berarti 'tanah batak', merupakan nama yang lebih menunjuk ke kawasan geografis dan bukan kawasan budaya atau suku. Kawasan geografis (*lander*) ini yang kemudian dirujuk sebagai kawasan wilayah administratif dan politik oleh pemerintah kolonial. Pada arsip misionaris yang menyimpan sekitar 100 ribu koleksi yang berisi informasi penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikiran di Tanah Batak sejak pertengahan abad ke-19 itu terdapat puluhan peta, baik peta *bata lander* yang dibuat peneliti Jerman terkenal Junghuhn (1847), maupun peta lain sebelum dan setelah itu.



Peta-peta tersebut memperlihatkan ada kebingungan para musafir Barat dan misionaris Jerman dalam meletakkan dan mengkonstruksi secara tepat kata *batak* yang berasal dari luar untuk diberikan kepada kelompok etnik yang heterogen yang sesungguhnya tidak mengenal kata itu dalam warisan sejarahnya. Dalam peta-peta kuno itu kata *Bata Lander* (tanah batak) hanya digunakan sebagai judul peta tetapi di dalamnya hanya terdapat nama-nama Toba, Silindung, Rajah, Pac Pac, dan Karo, sedangkan sebutan *batak* tidak ada sama sekali—seperti terlihat pada peta berbahasa Belanda, *Batak Landen*, yang dicetak di Batavia (1862). Juga pada peta yang dibuat musafir Jerman, D. B. Hagen (1883), berjudul *Der Nordlichen Battalander* (Tanah Batak Utara), hanya disebutkan kawasan sekitar Toba Pulo (Samosir) serta kawasan sekitar Aek Silalahi. Pada 1878, lembaga kantor pusat misionaris Jerman di Barmen menyebarluaskan peta resmi misionaris yang dicetak dalam bentuk buku berjudul *Mission Atlas* (1878). Dalam buku itu terdapat delapan peta, antara lain berjudul *Die Sudlichen Batta-lander auf Sumatra* (Tanah Batak Selatan di Sumatra). Judul-judul peta *Der Nordlichen Battalander* dan *Die Sudlichen Batta-lander* merupakan titik awal konstruksi Batak Utara dan Batak Selatan yang dibangun oleh para misionaris Jerman dan kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Konstruksi itu berpengaruh hingga sekarang.

Dalam koleksi Arsip Wuppertal tersimpan peta wilayah Batak berbahasa Inggris yang tampaknya dicetak untuk komunitas yang lebih luas di luar Jerman. Kata *batak* di dalam peta itu digunakan sebagai pembatas kawasan Aceh dengan Minangkabau. Agaknya peta itu dibuat sebelum peta Junghuhn terbit karena Danau Toba dalam peta itu tidak tercantum. Hal itu menunjukkan bahwa pembuat peta mendasarkan datanya pada wawancara dan bukan kunjungan langsung—berbeda dengan Junghuhn yang datang langsung ke Danau Toba, melukis dan memasukkan danau itu ke dalam petanya yang berbahasa Jerman. Dalam peta berbahasa Inggris berjudul *The Map of Sumatra*, kawasan Batak dibagi menjadi tiga bagian; pertama, diawali dengan kata-kata “Here the Batta country begins” yang



dimulai dari hulu Sungai Singkil di perbatasan Aceh. Bagian kedua disebut “Country of the Battas” meliputi dataran tinggi tanah Batak yang sekarang. Bagian ketiga, “Here the Batta country ends” meliputi daerah perbatasan Natal termasuk Angkola dan Mandailing.

Kebingungan para misionaris Jerman mengkonstruksi kata *batak* sebagai nama suku juga tampak pada peta misionaris Jerman sendiri yang sama sekali tidak menggunakan kata *batta lander* sebagai judul peta dan membuang semua kata *batak* pada edisi penerbitan peta itu dalam laporan tahunan misionaris. Padahal sebelumnya mereka telah menggunakan nama *Batak* atau *Batta* dalam peta-peta mereka. Peta yang menghilangkan kata *batak* itu direproduksi oleh misionaris Jerman dan diterbitkan dalam *RMG Berichte* (majalah bulanan misionaris), Agustus 1878, berjudul “Die Landschaft Toba auf Sumatra (Von Silindung bis zum Tao).” Dalam peta itu, Danau (Tao) Toba belum tercantum; yang disebut adalah Tao Si Lalahi, Tao Muara, dan Tao Balige.

KONSTRUKSI BATAK SEBAGAI NAMA ETNIK DAN WILAYAH

Kata *batak* yang semula digunakan sebagai ejekan negatif penduduk pesisir kepada penduduk pedalaman dan kemudian menjadi nama kawasan geografis penduduk dataran tinggi Sumatra Utara yang heterogen dan memiliki sebutan sendiri pada awal abad ke-20, bergeser menjadi nama etnik dan identitas yang terus mengalami perubahan. Setelah misionaris Jerman menggunakan kata *batak* sebagai nama etnik, pihak pemerintah Belanda juga memanfaatkan konsep Jerman itu dalam pengembangan dan perluasan basis kolonialisme mereka.

Bahkan kata *batak* digunakan sebagai nama etnik para elite di Tapanuli Selatan yang beragama Islam. Dalam sebuah majalah yang diterbitkan di Kotanopan, Tapanuli Selatan, pada 1922 oleh pemimpin Mandailing seperti Sutan Naposo, Gunung Mulia, dan lain-lain, menggunakan kata *batak* sebagai identitas, bahkan media mereka disebut *Organ dari Bataksche-Studiefonds*, dan uniknya mereka tidak mencantumkan nama



marga Mandailing di belakang nama lahir.

Saat Keresidenan Tapanuli dibentuk pemerintah kolonial Belanda, identitas Batak antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan memasuki atmosfir baru. Menurut orang Tapanuli Selatan, Batak identik sebagai orang Tapanuli yang beragama Kristen dan mereka yang di selatan menolak disebut sebagai bagian dari Batak. Namun penolakan yang berlatar agama dan politik itu tidak menghilangkan konstruksi misionaris Jerman dan kolonial Belanda yang lebih dulu masuk dan menyebut mereka bagian dari Batak yang tinggal di daerah selatan.

Di Tapanuli Utara, di kalangan orang Batak sendiri juga terjadi pergumulan pemikiran berkaitan dengan identitas kata *batak* ini. Dalam koleksi arsip misionaris Jerman, terdapat teks tulisan tangan dan penerbitan pemikir awal Batak yang mencoba merumuskan apa itu “batak” menurut orang Batak sendiri. Namun, bias misionaris dan kolonial tampak dalam pergumulan pemikiran orang Batak ini.

Konsep misionaris Jerman yang semula menggunakan kata *batak* untuk menyebut kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan Tapanuli Utara, dipakai Belanda lebih lanjut untuk menguatkan cengkeraman ideologi kolonial. Perlahan-lahan konsep Batak digunakan secara meluas oleh Belanda termasuk sebagai pernyataan identitas oleh penduduk di luar daerah Toba. Peneliti Belanda kemudian juga merumuskan konsep subsuku Batak dalam antropologi kolonial yang membagi etnik Batak dalam beberapa subsuku seperti Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun serta Batak Pak Pak (Joustra 1910). Konstruksi Belanda tentang subetnik Batak itu sama sekali tidak diperkenalkan apalagi dipakai para misionaris Jerman selama lebih 50 tahun keberadaan mereka di Tanah Batak.

Dalam antropologi di Indonesia, konsep subsuku Batak versi Belanda itu kemudian disalin oleh Payung Bangun dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* suntingan Koentjaraningrat (terbit pertama kali 1971). Konsep subsuku Batak merupakan konstruksi kolonial yang dalam

perjalanan sejarah terbukti tidak tepat dan ditolak sendiri oleh kelompok etnik yang dikenai label Batak tersebut.

Kini, orang Karo, Pak Pak, Simalungun serta Mandailing menolak disebut Batak yang dikonstruksi antropologi kolonial. Peneliti dari generasi baru Prancis, Daniel Perred, yang baru-baru ini menerjemahkan disertasinya dalam bahasa Indonesia (2010), juga melihat kesulitan dalam menggunakan konsep Batak sebagai nama etnik dan menempatkan mereka dalam wilayah administratif kolonial. Oleh karena itu jalan yang ditempuh Perred adalah menggunakan kata *batak* sebagai konsep kultural atau budaya alih-alih nama kelompok etnik. Boleh jadi hal ini juga merupakan konstruksi baru yang dirumuskan Perred.

TAPANULI SEBAGAI KONSTRUKSI KOLONIAL

Di tengah-tengah proses pencarian konsep Batak sebagai wilayah geografis atau sebagai nama etnik, baik dilakukan oleh pihak luar (misionaris Jerman, pemerintah kolonial Belanda, ataupun orang “Batak” sendiri), dalam proses kolonialisasi kawasan itu dimasukkan ke dalam satu wilayah administratif politik kolonial yang disebut Keresidenan Tapanuli yang mula-mula beribukota Air Bangis—ke arah Sumatra Barat—kemudian ke Sibolga. Tapanuli, yang dalam peta-peta lama Jerman dan Belanda merupakan nama kawasan tidak begitu penting di pesisir barat dekat Sibolga, dikonstruksi oleh pemerintah kolonial menjadi sebutan sebuah keresidenan baru.

Penggunaan sebutan Tapanuli menjadi nama wilayah administratif politik kolonial yang ingin menyatukan daerah utara-selatan merupakan jalan keluar kesulitan yang dihadapi Belanda dalam mengkonstruksi nama wilayah administratif yang mereka pikirkan sebagai Batak. Sebelum dipakai menjadi nama keresidenan, tidak satu pun peta Jerman dan Belanda yang menggunakan konsep Tapanuli sebagai nama untuk dua kawasan utara-selatan ini.



Dalam peta yang dimuat dalam buku memperingati 50 tahun misionaris di Batak, *50 Jahre Batakmission (Sumatra)* (Warneck 1912), sebutan Tapanuli, seperti juga Batak, sama sekali tidak dicantumkan. Pada peta berjudul “Die Batak-Lande auf Sumatra” (Tanah Batak di Sumatra) dengan skala 1:600.000 dalam buku itu, Batak yang dimaksudkan merupakan peleburan kawasan mulai dari Sidikalang sampai Batang Toru. Bahkan nama-nama seperti Mandailing, Angkola, Padang Bolak, Silindung, ataupun Toba sebagai kawasan subkultur, yang selalu tampil dalam peta-peta misionaris sebelumnya, tidak ditampilkan. Pencantuman Toba dan Samosir lebih memperlihatkan nama danau dan pulau.

Akan tetapi penulisan nama-nama Sim Sim, Pak Pak, Purba, Rajah, Pane, Si Balungun, Asahan, Tano Djawa, dan Si Antar dalam peta itu yang seluruhnya menggunakan huruf kapital, sehingga memberi kesan tegas, dapat ditafsirkan bahwa sebutan itu mengacu bukan *Batak-Lande* atau Tanah Batak. Dalam wilayah administratif politik kolonial tersebut, “Batak” (dari wilayah Silindung, Humbang, Toba sampai Samosir) digabung dengan mereka yang dalam peta kolonial masuk dalam wilayah Angkola, Sipirok, Padang Bolak serta Mandailing. Peta ini memperlihatkan hingga 1911 konsep Tapanuli sebagai nama kawasan tidak pernah muncul bahkan dalam angan-angan para misionaris Jerman melalui peta yang mereka konstruksi sendiri.

POLARISASI ADMINISTRATIF “BATAK UTARA” DAN “BATAK SELATAN”

Konstruksi “Batak” sebagai nama etnik kemudian memasuki kategori yang lebih terpolarisasi menjadi dua kutub dalam wilayah administratif kolonial yang disebut Keresidenan Tapanuli dengan ibu kota Sibolga. Polarisasi itu memunculkan dua wilayah yakni “Batak” di utara (Silindung sampai Samosir) dan “Batak” di selatan yang menolak menamakan diri sebagai “Batak” (wilayahnya meliputi Angkola sampai Mandailing). Polarisasi yang terbentuk karena alasan perbedaan kultural,

geografis, sejarah, dan terutama agama itu (utara didominasi Kristen sedangkan selatan Islam), merupakan permasalahan besar dalam integrasi “Batak” pada wilayah administratif kolonial bernama Keresidenan Tapanuli tersebut. Sebagaimana disebutkan dengan baik oleh Lance Castles (2001), “Batak” di utara dan di selatan dalam Keresidenan Tapanuli yang juga dimaksudkan untuk mempersatukan Utara-Selatan itu malah melahirkan pemisahan yang sangat tajam.

Ketika Keresidenan Tapanuli bubar seiring runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda, polarisasi Utara-Selatan mengambil bentuk baru dalam wilayah Indonesia Merdeka, dengan mengambil nama yang diwariskan Belanda yakni Tapanuli. Muncul dua kabupaten besar yaitu Tapanuli Selatan dengan ibu kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Utara beribu kota Tarutung. Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara mengkristalkan dua perbedaan wilayah administratif yang gagal dipersatukan Belanda. Namun, penggunaan Tapanuli sebagai nama kabupaten yang berasal dari konstruksi Belanda dalam perkembangan, setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan, tidak dapat terus dipertahankan. Ketika Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi empat kabupaten hanya kabupaten induk saja yang masih menggunakan nama Tapanuli yakni Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara tiga wilayah lainnya menggunakan sebutan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba-Samosir, dan Kabupaten Samosir.

Wilayah hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan juga tidak menggunakan nama Tapanuli, kecuali kabupaten induk Tapanuli Selatan, yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Juga muncul gagasan untuk mengganti nama kabupaten induk Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten Angkola Sipirok (Harahap 2009). Jika ini terjadi, sebutan Tapanuli untuk nama kawasan yang dikonstruksi kolonial tidak berlaku lagi di seluruh Tapanuli Selatan. Juga nama kabupaten induk Tapanuli Utara diperkirakan akan lenyap jika kawasan ini nanti diloloskan menjadi Provinsi Tapanuli.



DALAM USULAN PROVINSI TAPANULI

Usulan menjadikan Tapanuli sebagai provinsi baru memperlihatkan upaya menemukan nama bagi wilayah administratif yang secara etnik dan kultural disebut “Batak”². Kesulitan pencarian nama yang tidak bisa dipecahkan misionaris Jerman selama puluhan tahun itu kemudian dicarikan jalan keluar oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membentuk (sebutan) Keresidenan Tapanuli, dan kini dilanjutkan oleh para penggagas Provinsi Tapanuli. Jika rencana pembentukan Provinsi Tapanuli pada awalnya meliputi seluruh wilayah kabupaten di eks-keresidenan Tapanuli, dan merupakan upaya pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi pantai barat Sumatra Utara, maka dalam gagasan selanjutnya wilayah pendukung provinsi yang diusulkan itu hanya sebatas Kabupaten Tapanuli Utara. Berhubung syarat pembentukan provinsi baru harus didukung oleh minimal lima kabupaten, sementara Tapanuli Utara hanya memiliki empat kabupaten, maka para penggagas melakukan manuver politik sehingga mendapat tambahan dukungan dari Kabupaten Nias Selatan.

Dalam proses pembentukan wilayah politik tersebut, orang-orang Batak di utara sangat setuju menggunakan nama yang dikonstruksi oleh kolonial Belanda yakni Tapanuli. Dalam ruang administratif itu baik sejak pada masa Keresidenan Tapanuli, masa Indonesia Merdeka, maupun hingga pembentukan daerah pemekaran baru, kata *batak* tidak digunakan bahkan sengaja dihindari sebagai nama wilayah administratif. Yang diusulkan dalam pemekaran itu adalah Toba-Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir sebagai nama kabupaten baru dalam provinsi yang direncanakan.

Di daerah “Batak Selatan” yang mayoritas penduduknya etnik Mandailing juga terjadi penolakan penggunaan kata *batak*, sebagian mencoba berkompromi menerima “Tapanuli” sebagai sebutan wilayah administratif. Ketika berlangsung pemekaran wilayah sejak undang-undang otonomi daerah ditetapkan, orang Mandailing tidak ragu-ragu menggunakan nama etniknya sebagai sebutan kabupaten yakni Kabupaten

Mandailing Natal. Natal merupakan kawasan di pantai barat Mandailing tempat etnik Natal berada. Dengan demikian, sebutan Kabupaten Mandailing Natal mencakup sekaligus wilayah dua etnik pada dua wilayah yang berdampingan.

Ketika rencana pembentukan Provinsi Tapanuli digulirkan oleh kelompok “Batak Utara,” maka kelompok “Batak Selatan”—seperti diduga—menolak bergabung dalam provinsi yang direncanakan itu. Masyarakat “Batak Selatan” juga merencanakan membentuk provinsi baru yang sempat diberi nama Provinsi Tapanuli Bagian Selatan namun kemudian usulan nama itu diubah karena Tapanuli telah diajukan sebagai nama provinsi baru yang juga sedang dalam proses pengusulan. Kini nama yang disepakati untuk nama provinsi baru di wilayah “Batak Selatan” itu adalah Provinsi Sumatra Tengah. Dengan demikian, wilayah “Batak Selatan” memutuskan hubungan dengan (sebutan) Tapanuli konstruksi kolonial yang kini dipertahankan sebagai nama provinsi baru yang diusulkan oleh “Batak Utara.”

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa Batak sebagai nama etnik (suku) tidak berasal dari orang Batak sendiri, tetapi diciptakan atau dikonstruksi oleh para musafir Barat yang dikukuhkan oleh misionaris Jerman yang datang ke Tanah Batak sejak kurun 1860-an. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengadopsi nama Batak yang digunakan oleh para misionaris Jerman itu dengan makna yang tidak lagi berkonotasi negatif. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaha (tulisan tangan asli Batak) tidak ditemukan kata *batak* untuk menyebut diri orang atau etnik Batak. Dengan demikian, nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak melainkan sesuatu yang diciptakan dan diberikan dari luar.

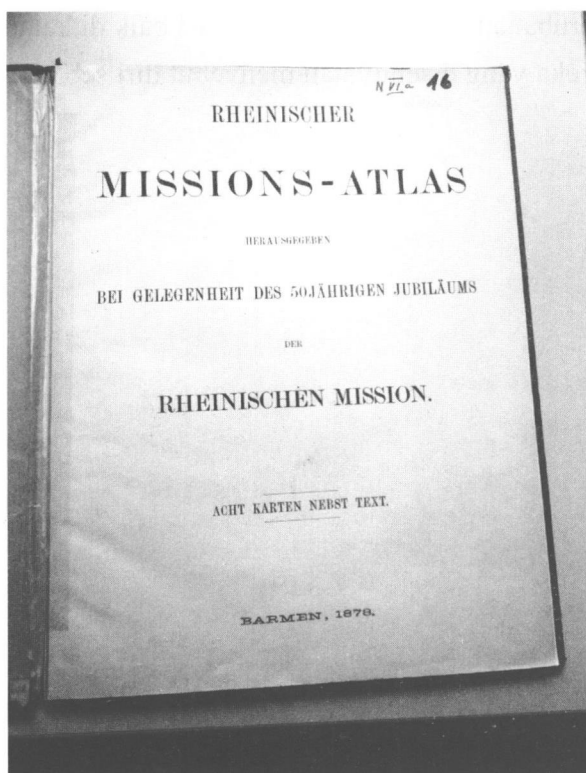
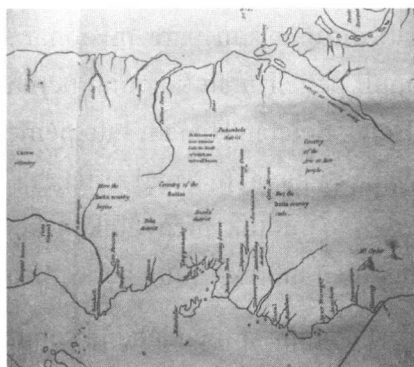
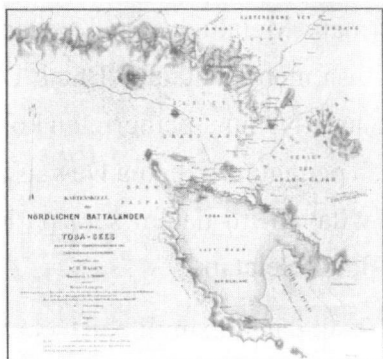
Sebutan Tapanuli jelas merupakan konstruksi pemerintah kolonial Belanda yang kesulitan mencari nama tunggal untuk menggabungkan

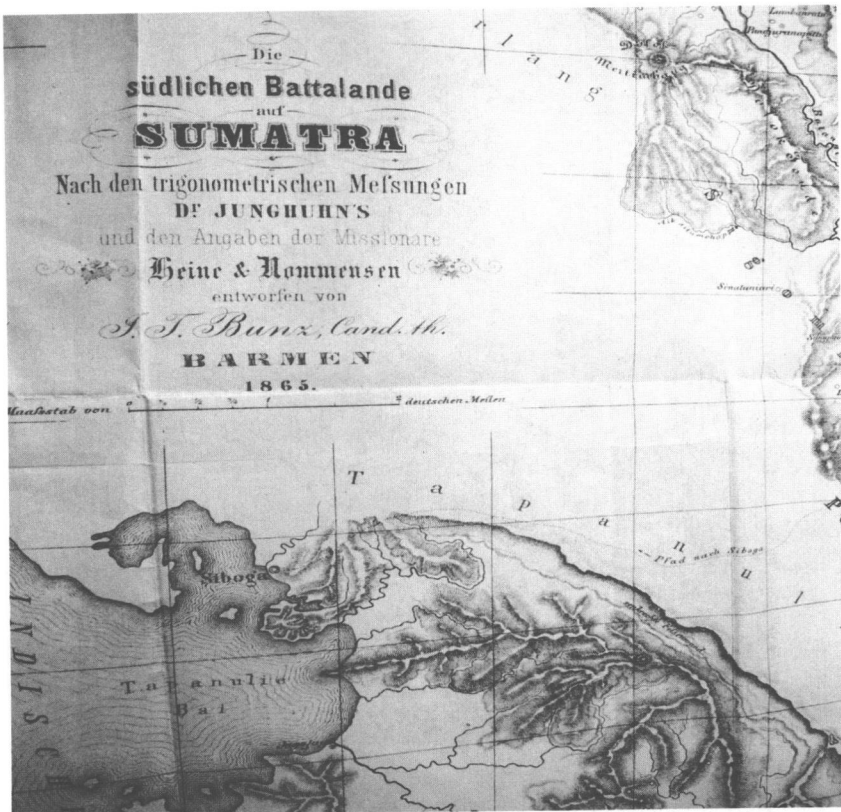


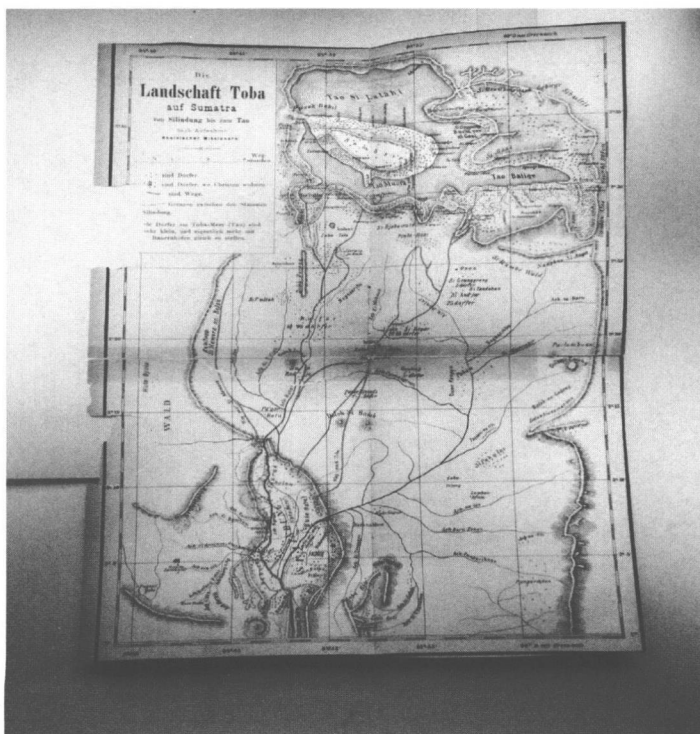
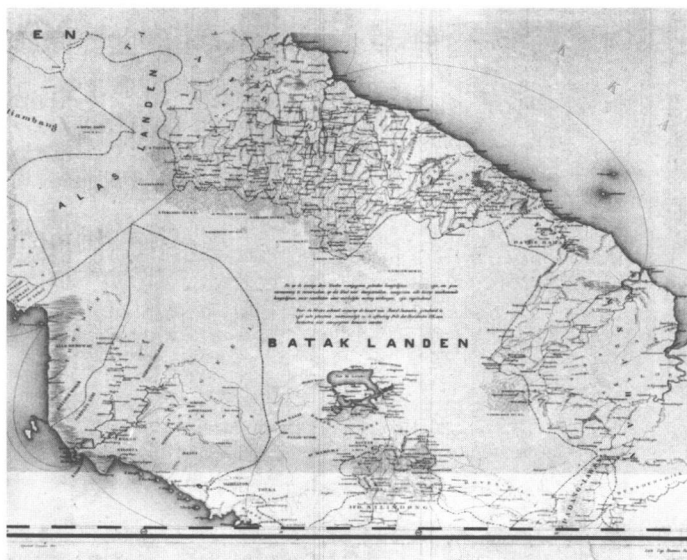
kawasan “Batak Utara” dan “Batak Selatan” dalam satu wilayah administratif. Nama Tapanuli sebagai label kawasan “Utara-Selatan” sama sekali tidak pernah dirumuskan para misionaris Jerman. Melalui nama Keresidenan Tapanuli pemerintah kolonial berharap bisa mendudukkan “Batak Utara” dan Batak Selatan” dalam satu pemerintahan. Namun, pemerintah kolonial menyadari upaya itu gagal terlebih setelah penggunaan nama Dewan Batak (*Batakraad*) untuk menyatukan kedua wilayah itu dalam satu parlemen ditolak oleh mereka yang berasal dari “Batak Selatan.”

Pada masa mendatang, sebutan Batak dan Tapanuli baik sebagai pernyataan dan ekspresi identitas, nama suku dalam konsep antropologi, maupun sebagai nama kawasan kultural dan administratif, akan terus mengalami perubahan makna dan interpretasi baik di kalangan akademisi ataupun mereka yang disebut atau menyebut diri sebagai orang Batak.

LAMPIRAN







Etnik Pakpak Membelah Wilayah Sendiri Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat

BUDI AGUSTONO
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

Etnik Pakpak merupakan salah satu dari sepuluh kelompok etnik di Sumatra Utara. Asal-usul teritorial etnik Pakpak adalah Tanah Pakpak yang juga sering disebut Dairi.¹ Pada masa pra-kolonial batas fisik geografis Tanah Pakpak menyebar di lima wilayah, yaitu Pegagan, Keppas, Simsim, Kelasén, dan Boang.² Pada masa kolonial wilayah Tanah Pakpak terletak di kawasan pantai barat Sumatra antara Singkel dan Barus atau membentang ke barat hingga garis pangkalan, ke utara dan timur laut hingga barisan Pegunungan Alas dan dataran tinggi Karo, ke timur berbatasan dengan punggung gunung dan sungai sampai ke Danau Toba menuju Silalahi sampai bertemu batas selatan; sedangkan batas wilayah barat hingga pangkalan Cenendang (van Vuuren 1910: 24).

Secara etimologis, *pakpak* berarti puncak gunung. Orang Pakpak adalah orang pegunungan karena sebagian besar hidup dan bertempat tinggal di

1Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara dengan ibu kota Sidikalang. Luas wilayah kabupaten ini 3.246 kilometer persegi, terletak 220 kilometer dari Medan, ibu kota Provinsi. Sebelum 2003 Kabupaten Dairi memiliki 14 kecamatan, yaitu Sidikalang, Sumbul, Tigalingga, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Silima Punga Punga, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir, Lae Parira, Gunung Sitember, Berampu, dan Silahisabungan. Di sebelah timur, Kabupaten Dairi berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Toba Samosir, sebelah Barat dengan Aceh Singkil, sebelah utara dengan Karo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Toba Samosir dan Tapanuli Utara. Wilayah Kabupaten ini sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan variasi ketinggian 250–1700 meter di atas permukaan laut.

2Lima daerah ini menunjukkan orang Pakpak menyebar dan terpecah dalam lima sub-kelompok etnik, yaitu Pakpak Pegagan, Pakpak Keppas, Pakpak Simsim, Pakpak Kelasén, dan Pakpak Boang. Dalam tulisannya, van Vuuren hanya menyebut Pakpak Pegagan, Pakpak Keppas, Pakpak Simsim, Pakpak Boang, masing-masing memiliki batas geografis sendiri; sedangkan Pakpak Boang tidak disebut (lihat van Vuuren 1910: 23–7). Kini, Keppas dan Pegagan berada di sekitar Sidikalang, ibu kota Kabupaten Dairi. Pakpak Simsim yang dikenal sebagai daerah pegunungan masuk wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Kelasén masuk dalam wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Boang masuk Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (lihat Makmur, Berutu, dan Berutu, ed. 2002: 1).

pegunungan (Tumangger 1995). Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul orang Pakpak, namun pendapat yang diterima masyarakat adalah bahwa orang Pakpak datang ke wilayah itu bersamaan dengan kedatangan gelombang penduduk dari Indocina ke Nusantara yang diperkirakan terjadi 4000 sebelum Masehi. Orang Pakpak, Karo, Alas, dan Gayo, dipercaya menjadi satu kelompok migrasi ke Nusantara.³ Pada masa prakolonial, Tanah Pakpak telah menjadi wilayah perdagangan, termasuk perdagangan budak. Pada masa itu orang Pakpak banyak yang menjadi budak,⁴ dan salah satu tempat aktivitas ekonominya adalah Salak.⁵ Walaupun letaknya di pegunungan, tetapi karena berdekatan dengan Barus dan Aceh membuka kesempatan bagi orang Salak berkomunikasi dan menjalin hubungan dagang dengan dua daerah ini atau sebaliknya. Pada masa ketika menjalin hubungan dengan dunia luar dan melakukan aktivitas ekonominya di luar batas teritorialnya, orang Pakpak masih menyatu dalam satu wilayah geografis dan identitasnya sebagai kelompok etnik tetap utuh dan belum terpecah.⁶ Pada masa itu, orang Pakpak masih menganut agama suku, dan mereka memakai bahasa Pakpak dalam berkomunikasi satu sama lain, meski dengan dialek yang berbeda-beda.

Orang Pakpak terbagi atas lima subkelompok etnik atau *suak* berdasarkan teritorial yaitu Pegagan, Keppas, Simsim, Kelasén, dan Boang. Ketika melakukan ekspansi kekuasaannya pada 1907, pemerintah kolonial Belanda memasukkan dan memecah kelima daerah ini ke wilayah administrasi yang berbeda-beda. Pegagan, Keppas, Simsim berada di wilayah Dairi. Kelasén digabung ke Batak *landen*, tepatnya Parlilitan, sedangkan Boang disatukan ke Singkil, Keresidenan Aceh. Pemecahan dan penggabungan Tanah Pakpak ini menyebabkan melemahnya identitas

3Orang Alas berada di Aceh Tenggara dan Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Beneriah, dan Gayo Luwes, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Etnik Gayo bukan bagian dari etnik Aceh dan mereka tidak mau disebut Aceh. Bahasa dan budaya Gayo berbeda dengan budaya Aceh (lihat Bowen 1991).

4Mengetahui perdagangan budak Pakpak dan Toba lihat Gordon 1862: 1–41.

5Sebelum 2002 Salak yang berjarak 40 kilometer dari Sidikalang masuk wilayah Kabupaten Dairi.

6Sebelum kedatangan Belanda, orang Pakpak mengklaim wilayah berada dalam kesatuan geografis. Kesatuan geografis ini mulai terpecah setelah masuknya Belanda ke wilayah ini. Informasi tentang orang Pakpak di masa prakolonial sangat terbatas.



orang Pakpak yang akhirnya memengaruhi aspek politik, sosial, dan budaya orang Pakpak sebagai penduduk asli di tanah kelahirannya sendiri, yang dianggap sebagai tanah ulayatnya.⁷

Setelah meluaskan kekuasaannya, pemerintah kolonial Belanda membangun mesin birokrasinya di Tanah Pakpak. Sejalan dengan itu, sejak 1905 misionaris Jerman yang mengawali kegiatannya dari Tanah Batak Toba mulai menyebarkan agama Kristen ke Tanah Pakpak yang pada masa itu masih banyak penduduk yang menganut agama suku. Ekspansi kekuasaan kolonial ke Tanah Pakpak mendorong orang Batak Toba bermigrasi ke daerah ini, terutama karena berkait erat dengan kebijakan kolonial yang menarik mereka untuk mengisi birokrasi pemerintahan. Migrasi orang Batak Toba ke luar wilayahnya, terutama ke Tanah Pakpak selain mendapat dukungan dari pemerintah kolonial dan *zendelingen* Kristen dengan harapan orang di daerah baru itu akan beralih ke agama Kristen, juga didorong oleh misi budaya, yaitu tradisi ekspansif migrasi yang memiliki akarnya dalam kosmologi orang Batak Toba. Moto tradisi migrasi eskpansionis adalah "cari anak" dan "cari tanah," yang keduanya merupakan simbol kekuasaan dan kemakmuran.⁸

7Penduduk asli dikenal dengan berbagai istilah: suku asli, orang asli, pribumi, kaum minoritas, orang gunung, orang hutan. Walau secara kultural mereka tampak berbeda namun mereka memiliki kesamaan tertentu. Secara demografis pada masing masing negeri jumlah mereka kecil sehingga secara politik sangat tidak berpengaruh dan secara ekonomi tidak berarti. Sebagian suku-suku ini telah mampu melawan dominasi dan penyatuan politik tetapi sayangnya banyak yang tunduk kepada kekuatan politik dan militer yang lebih besar dan tidak lagi menjadi komunitas etnis yang hidup dan otonom. Lihat Lim dan Gomes (ed.) 1993: 2–3; tentang pengertian kaum minoritas dapat dibaca pada Preece 2005: 1–7; Kingsbury 1995: 13–34.

8Berkaitan dengan migrasi ini orang Batak mempunyai gagasan kultural yang disebut *sahala hasangapon*. *Sahala* adalah sifat *tondi* (semangat sebagai esensi manusia), yaitu watak alami selain kekuasaan dan wewenang manusiawi. *Hasangapon* berarti suatu kualitas yang dihormati sebagai akibat dari yang dimilikinya *sahala*. Jadi, *sahala hasangapon* adalah kualitas kehormatan diri yang juga berarti bahwa seseorang itu patut dihargai oleh orang lain. Agar memperoleh kualitas ini, orang harus mengembangkan *sahala harajaon* (kerajaan pribadi). *Sahala hasangapon* baru menjadi kenyataan apabila seseorang telah memperlihatkan prestasinya. Seorang laki-laki dengan banyak anak dan cucu serta berhasil dalam pertanian atau pekerjaan lain akan dipandang memiliki *sahala hasangapon* yang tinggi. Karena itu, di kalangan orang Toba yang bertani subsisten, tanah dan anak merupakan faktor penting dalam membangun suatu "kerajaan"; dari tanah dan anak bisa diperoleh kekuasaan dan kekayaan. Dalam hal ini jelas bahwa kompleks *sahala hasangapon* juga mendorong orang Batak berpindah dan mendirikan "kerajaan" baru (lihat Pelly 1994: 47).

Pada mulanya, kedatangan orang Batak Toba didorong pemerintah kolonial yang sedang melakukan perluasan kekuasaan ke wilayah itu. Tanah Pakpak yang subur perlahan-lahan mulai terbuka setelah Belanda menguasai daerah itu. Dalam rangka perluasan kekuasaannya, pemerintah kolonial membuka jalan raya dari Doloksanggul ke Sidikalang pada 1906, dan mendirikan markas militer dan bangunan penunjangnya di Sidikalang. Untuk merampungkan proyek itu pemerintah mengerahkan banyak tenaga kerja. Proyek itu membuat banyak orang Batak Toba bermukim di sepanjang jalan raya ataupun di Sidikalang (Aritonang 1988: 203). Dalam tahun berikutnya, jumlah orang Batak Toba yang datang ke Dairi semakin membesar. Memasuki 1908, setelah perang berakhir, jumlah orang Batak Toba di Sidikalang mencapai ratusan orang. Beberapa tahun kemudian, jumlah yang bermigrasi menetap di Tanah Pakpak sekitar 1000 orang setiap tahun (Purba dan Purba 1998: 38).

Kedatangan orang Batak Toba bagaikan air bah dan tanpa bisa dibendung lagi sehingga pada 1930 jumlah orang Batak Toba mencapai 24.893 jiwa (Volkstelling 1935: 31). Sebanyak 46 persen penduduk Tanah Pakpak pada masa itu adalah orang Batak Toba yang berjumlah lebih besar daripada penduduk setempat. Berhubung masih banyak lahan kosong, orang Batak Toba berdatangan di Tanah Pakpak dalam jumlah yang terus meningkat. Jika ingin keluar dari kampungnya untuk mencari pekerjaan, biasanya orang Batak menuliskan Tanah Pakpak atau Sidikalang sebagai tujuannya. Tanah Pakpak menjadi tujuan utama bagi orang Batak Toba untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan hidup.

Sejak awal, pemerintah kolonial mendukung ekspansi penginjilan dan meminta guru kepada misionaris untuk ditempatkan di Tanah Pakpak. Penginjil ditempatkan di wilayah itu pada 1906. Untuk mempercepat pengkristenan terhadap orang Pakpak, dikirim lagi seorang penginjil yang juga guru ke Salak (Simsim). Seperti di Sidikalang, penginjil mendirikan sekolah sambil menyebarkan Kristen kepada orang Pakpak di Salak.



Semakin lama orang Pakpak yang memeluk Kristen semakin banyak, dan untuk keperluan beribadah didirikan gereja di halaman sekolah. Melalui sekolah itulah Kristen semakin berkembang. Pendidikan dan Kristen di Tanah Pakpak bukan berlandaskan pada budaya setempat melainkan lebih berdasarkan pada nilai budaya Batak Toba sehingga menceraabut orang Pakpak dari budaya asalnya. Komunikasi antara guru dan murid memakai bahasa Toba. Demikian pula bahasa pengajaran di sekolah sehingga murid Pakpak yang sebelumnya tidak bisa berbahasa Batak Toba, lambat laun mengerti dan fasih berbahasa kelompok etnik pendatang itu. Di mata orang Pakpak, apa yang dilakukan orang Batak Toba terkesan setengah hati dan tidak bersungguh-sungguh untuk memajukan orang Pakpak jika dibandingkan dengan apa yang dikerjakan Nommensen dan misionaris lainnya untuk mendidik, memajukan, dan mencerahkan orang Batak Toba di Tanah Batak Toba pada abad ke-19. Orang Batak Toba tidak mengapresiasi budaya lokal karena guru di sekolah dan pendeta di gereja tidak pernah mau mengerti budaya Pakpak. Oleh karena sekolah dikuasai guru Batak Toba, mereka inilah yang mendidik orang Pakpak menciptakan kesan bahwa orang Batak Toba mengadabkan orang Pakpak di tengah kegelapan.

Tobanisasi di Tanah Pakpak pada awal abad ke-20 dua hingga pertengahan 1990-an masih terus berlangsung. Berbeda dengan masa sebelumnya, sejak kurun 1950-an, kemudian awal 1990-an, orang Pakpak perlahan-lahan menata dan memperkuat konsolidasi kesadaran kelompok etniknya. Seturut dengan konsolidasi kesadaran etnik ini, pada awal 1990-an, berlangsung perubahan dalam pengelolaan politik pada aras nasional. Perubahan pengelolaan politik itu membawa dampak yang signifikan terhadap orang Pakpak. Jika sebelumnya kekuasaan Orde Baru cenderung menyebarkan kekerasan dan ketakutan terhadap rakyat,⁹ memasuki 1990-an kebijakan politiknya mengalami perubahan yang membuka kesempatan

⁹Mengenai pengelolaan kekuasaan Orde Baru yang menyebarkan ketakutan, kekerasan, dan mengandalkan moncong senjata, lihat Colombijn and Thomas Lindblad (ed.) 2002: 173–276; Carci 2006.

bergulirnya gelombang demokratisasi.¹⁰ Gelombang ini mempercepat tumbuhnya organisasi masyarakat sipil dari Jakarta sampai ke berbagai daerah sehingga melahirkan lingkungan politik yang berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Pada masa ini aktivisme pemberdayaan rakyat dan serangkaian perbincangan narasi besar yang menjadi arus utama global semisal demokrasi dan partisipasi politik terus bergelinding menjadi sumber pencerah publik. Narasi besar yang berkembang pada aras nasional perlahan tetapi pasti bergerak ke tingkat lokal, termasuk di Daiiri.

Sementara itu, diskusi pada aras lokal yang bertema kemiskinan, demokrasi, gender, partisipasi politik, penguatan masyarakat adat, dan sistem politik yang lebih terbuka pada 1990-an, dijadikan motivasi oleh etnik Pakpak untuk terus mengkonsolidasi kesadaran etniknya. Memasuki akhir 1990-an, etnik Pakpak diselimuti suasana ketidakpastian politik sehubungan pergantian Kepala Daerah Kabupaten Daiiri. Di tengah ketidakpastian politik lokal di Tanah Pakpak, rezim Orde Baru tumbang pada 1998 (Anderson 2008: 27–59). Runtuhnya Orde Baru membawa perubahan politik yang dampaknya sampai ke tingkat akar rumput. Jika pada masa sebelumnya hanya terdapat tiga partai politik dan jumlah ormas yang sangat terbatas, dan dikendalikan oleh kekuasaan, pada era Reformasi tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan (Philphott 2000). Pada masa transisi itu, orang Pakpak semakin tertantang melibatkan diri dalam jagat politik, terutama dalam partai politik atau parpol. Keterlibatan orang Pakpak dalam parpol baru menjadi anak tangga dalam meraih mobilitas sosial secara cepat, menjadi pemimpin partai sekaligus bertransformasi menjadi elite baru di wilayahnya sendiri. Sebagai pemimpin partai, betapapun kecilnya partai itu, membuka jalan bagi mereka mendekatkan diri dengan pusat kekuasaan lokal. Hal itu semakin dipermudah jika ada anggota partainya duduk di lembaga legislatif. Proses demokratisasi yang berlangsung sejak awal 1990-an hingga jatuhnya Orde Baru membuka akses

10 Beberapa kajian tentang demokratisasi dan perubahan politik, lihat Huntington 1995; Potter dan Goldblatt (ed.) 1997. Dampak bergulirnya demokratisasi di Indonesia diuraikan oleh Makka (ed.), 2002; Hiariej, Martanto, dan Musyaddad (ed.) 2004.



kepada orang Pakpak untuk mengisi ruang publik di tanah kelahirannya, yang sebelumnya didominasi Batak Toba.

Pada pertengahan 1990-an, M. P. Tumangger, seorang campuran Pakpak dan Batak Toba, diangkat sebagai Bupati Dairi. Pada awal pemerintahannya, Tumangger memberikan perhatian khusus pada pembangunan di Simsim untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya.¹¹ Selain ini, ia juga memerhatikan pegawai Pakpak yang mempunyai kapasitas dan berpotensi dipromosikan menjadi camat atau menduduki jabatan lainnya dalam birokrasi pemerintahan. Jika pada masa sebelumnya kekuasaan lokal berperan membesarkan pengusaha Pakpak, pada masa pemerintahan Tumangger semakin banyak orang Pakpak yang mendapat kucuran proyek pemerintah. Hal itu tidak saja memperbesar kehadiran aktor ekonomi lokal, tetapi juga semakin terbuka lebar akses orang Pakpak ke jalan kekuasaan lokal.

Konsolidasi elite etnik Pakpak yang telah terbangun pada masa sebelumnya, semakin menguat pada masa kepemimpinan Tumangger. Penguatan kesadaran itu terlihat pada aktivitas kampanye politik dan kultural IKPPI untuk menyebarkan identitas etnik. Meningkatnya kesadaran identitas ini dimanfaatkan oleh kaum terdidik Pakpak untuk menampilkan bahasa Pakpak dalam siaran radio swasta komersial di Sidikalang pada 2000. Tujuannya tidak lain untuk menyebarluaskan kampanye pemakaian bahasa Pakpak. Selain konsolidasi kesadaran etnik, pada masa jabatan Tumangger orang Pakpak mempunyai akses lebih besar ke lorong kekuasaan.

Keberadaan orang Pakpak dalam lingkaran politik lokal menunjukkan bahwa kekuasaan telah berpihak kepada orang Pakpak. Ketika relasi

11 Hingga 1988 di wilayah Salak (Simsim) hanya terdapat sebuah Sekolah Menengah Atas swasta, sedangkan SMA negeri belum ada. Siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah negeri atau yang sederajat dengan itu harus ke Sidikalang. Sebagian besar siswa Simsin yang bersekolah di Sidikalang berasal dari keluarga yang relatif mampu. Mereka yang kurang mampu, tinggal bersama kerabat di Sidikalang sambil membantu keluarga tersebut tanpa mendapat imbalan, sedangkan semua keperluan sekolahnya tetap disediakan keluarga di Simsim.

kekuasaan lokal dengan orang Pakpak semakin mendekat dan kesadaran etnik orang Pakpak mulai terkonsolidasi, pada saat yang sama pemerintah pusat memperkenalkan otonomi daerah pada 2001.¹²

PEMBENTUKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Orang Pakpak memanfaatkan era otonomi daerah untuk melakukan konsolidasi kelompok etniknya. Pada masa ini, kesadaran politik orang Pakpak semakin menguat; pemuka masyarakat, IKPPI, dan kaum terdidik lokal yang selama ini merumuskan dan memperkuat identitas kelompok etniknya muncul sebagai elite Pakpak.¹³ Ketika kesadaran elite etnik meningkat, mereka inilah yang memanfaatkan sentimen kesukuan untuk tujuan politik dan ekonomi.¹⁴ Pemanfaatan dan pemanipulasian sentimen etnik itu terlihat pada keinginan kuat elite etnik Pakpak mendapatkan kekuasaan di wilayahnya sendiri. Manipulasi sentimen etnik tecermin dari pernyataan elite Pakpak untuk menegaskan pentingnya menjadi orang Pakpak, menjadi penduduk asli sekaligus pemilik tanah ulayat di tanah kelahiran sendiri pada masa otonomi daerah. Mereka juga tiada hentinya menyuarakan ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan yang dialami orang Pakpak dari generasi ke generasi.¹⁵ Isu ketimpangan sosial dilontarkan untuk menambah kekuatan posisi tawar orang Pakpak agar diperhitungkan dalam kekuasaan lokal. Elite Pakpak menyadari bahwa tanpa memanipulasi sentimen kelompok etniknya, tidak akan pernah bangkit menjadi amunisi politik untuk bernegosiasi dengan kekuasaan lokal.

12 Tentang pembahasan asal-mula pelaksanaan otonomi daerah, lihat Romli 2007; terutama Bagian Satu, Potret Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah, h. 3–33.

13 Gejala tampilnya elite etnik baru setelah runtuhnya Orde Baru, khususnya di wilayah yang mengalami konflik etnik atau perebutan kekuasaan lokal, bisa dilihat misalnya pada munculnya elite etnik baru Dayak (lihat van Klinken 2002: 66–105).

14 Mengenai elite etnik yang memanfaatkan dan memanipulasi sentimen etnik untuk tujuan politik dan ekonomi, lihat Brass 1991.

15 Salah satu wujud kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakmampuan masyarakat Pakpak menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Sebagian besar masyarakat hanya dapat membiayai sekolah anaknya sampai tingkat sekolah menengah atas, dan hingga 1990 lulusan sarjana asal Simsim masih dapat dihitungkan dengan jari. Oleh karena itu dapat dikatakan sumber daya manusia Pakpak tergolong rendah.



Dalam memanipulasi etnisitas untuk tujuan politik dan ekonomi, elite etnik Pakpak bersikap ambivalen. Ada yang mencoba menekan kekuasaan lokal agar orang Pakpak diberi proteksi politik dan ekonomi lebih besar, sedangkan yang lain menolak menekan kekuasaan lokal karena Bupati Dairi adalah orang Pakpak. Menekan kekuasaan lokal sama artinya menyerang orang Pakpak yang menjadi bupati. Jika terlalu keras menekan kekuasaan lokal akan berakibat fatal, berkonflik dengan Bupati Dairi. Untuk menghindari benturan dengan orang nomor satu di wilayah itu, elite Pakpak memanfaatkan peluang momentum otonomi daerah, yakni mengusulkan pemekaran Kabupaten Dairi.¹⁶

Selain menghindari benturan dengan Bupati Dairi, alasan pemekaran kabupaten adalah faktor sejarah, ketertinggalan di bidang sosial dan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, terisolasi, miskin sarana dan prasarana. Pemekaran diyakini akan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan, keberadaan dan penampilan Pakpak akan lebih terjamin, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷ Pelayanan kepada publik dan perbaikan kesejahteraan orang Pakpak akan mendapat perhatian, apalagi aparat pemerintahan diisi etnik Pakpak sendiri sehingga semakin mempercepat pemberantasan keterbelakangan dan kemiskinan. Untuk melanjutkan gagasan pemekaran kabupaten baru, pada Mei 2001 dibentuk Komite Pemekaran Kabupaten Dairi yang diketuai B. T. Padang, yang anggotanya terdiri dari perwakilan *suak* Pegagan, Keppas, Kelasén, Simsim dan Boang.¹⁸ Susunan Komite Pemekaran Kabupaten ini melibatkan semua komponen masyarakat Pakpak mulai dari pelindung, ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan biro-biro lainnya, termasuk perwakilan agama Kristen dan Islam.¹⁹

Elite etnik Pakpak semakin kuat mendesak percepatan pembentukan kabupaten baru dengan cara memobilisasi massa dan memanipulasi

16 Tentang gagasan awal hingga terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat, lihat <http://www.pakpakkbharatblog.co.cc/2008/08/sejarah-pembentukan-kabupaten-pakpak.html>, "Sejarah Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat," diunduh 22 Mei 2010.

17Notulen Runggu Suak Keppas di Pasi, 1 Oktober 2002, h. 7.

18Komite Pemekaran Kabupaten Dairi 1 Juni 2001.

19Susunan Komite Pemekaran Kabupaten Dairi Sumatra Utara, 22 Mei 2001.

sentimen etnik untuk memompa soliditas dan solidaritas orang Pakpak. Manipulasi sentimen etnik melalui isu penduduk asli, pemilik tanah ulayat, dan menjadi tuan rumah di tanah kelahiran sendiri yang mengalami marginalisasi politik dan ekonomi semakin melambungkan harapan sekaligus menjadi justifikasi pembentukan kabupaten baru. Bersamaan dengan terus meningkatnya kesadaran etnik Pakpak, para elite terus-menerus memobilisasi massa dengan menggelar demonstrasi di berbagai tempat untuk mendapat dukungan kekuasaan lokal.

Sejak awal bergulir, Bupati Dairi, M. P. Tumangger, mendukung sepenuhnya usulan pemekaran kabupaten baru. Meski tidak dinyatakan secara terbuka, sikap dukungan tersebut diperlihatkan Bupati Tumangger saat Komite Pemekaran Kabupaten mengadakan diskusi dan memobilisasi massa yang tidak pernah mendapat hambatan. Sikap politik Bupati tampaknya didasarkan pada perhitungan jika salah mengambil keputusan akan mendapat perlawanan dari kalangan Batak Toba. Para elite Pakpak pun mengetahui bahwa sejak awal Bupati Dairi secara diam-diam mendukung usulan pemekaran. Tanpa bantuan kekuasaan lokal, usulan pemekaran dan pembentukan Komite Pemekaran Kabupaten tidak akan berjalan lancar. Dukungan kekuasaan lokal semakin terlihat jelas pada April 2002 ketika permohonan Panitia Pemekaran Kabupaten untuk pemekaran daerah mendapat persetujuan Bupati Dairi sehingga meluruskan jalan pembentukan kabupaten baru.

Bagi Bupati Dairi, mendukung usulan pemekaran daerah Pakpak yang terpisah dari Kabupaten Dairi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, kecuali bila etnik Pakpak diberi kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan lokal. Pembagian kekuasaan yang demikian bisa menghentikan usulan pemekaran. Namun, memperbesar porsi kekuasaan bagi orang Pakpak tidaklah mungkin karena orang Batak Toba tidak akan bisa menerima alasan pembagian kekuasaan semata-mata karena tuntutan pemekaran daerah. Selain itu, Bupati Tumangger menyadari bila usulan pemekaran dihalangi



dan tidak diakomodasi, hubungan antara etnik Pakpak dengan orang Batak Toba akan terus memanas dan diwarnai ketegangan, kecurigaan, dan bukan tidak mungkin akan mengundang konflik terbuka kedua kelompok etnik ini. Di berbagai tempat, usaha pengambilalihan kembali tanah ulayat oleh orang Pakpak yang memicu ketegangan etnik adalah contoh dari makin memanasnya relasi kedua kelompok etnik ini. Untuk mengatasi meledaknya potensi konflik antaretnik itulah, Bupati Tumangger mendukung sepenuhnya Pakpak lepas dari Kabupaten Dairi.²⁰

Pada 2003, usulan pemekaran kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Dairi terwujud dengan terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat.²¹ Ini berarti Tanah Pakpak dipecah menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.²² Tidak lama setelah itu, Tigor Solin diangkat sebagai Pejabat Bupati Pakpak Bharat.²³ Orang Pakpak menyambut penuh semangat atas berdirinya kabupaten baru ini dengan harapan Pejabat Bupati Tigor Solin dapat mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan diri dari dominasi etnik Batak Toba.

20Setelah mendapat persetujuan Bupati Dairi, Komite Pemekaran Daerah meminta persetujuan DPRD Dairi, DPRD Sumatra Utara, dan Gubernur Sumatra Utara. Pada 25 April 2002, Komite Pemekaran Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Dairi dan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Dairi menyampaikan aspirasi pemekaran ke DPR Pusat di Jakarta. Pada 20 Mei 2002, rombongan Komisi II DPR Pusat tiba di Sidikalang mengumpulkan data pemekaran (Notulen Runggu Suak Boang, 31 Oktober 2002).

21Dalam bahasa lokal, *bharat* berarti melintang. Bersamaan dengan Pakpak Bharat, dua kabupaten baru lainnya yang berdiri di Sumatra Utara pada 2003 adalah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara).

22Secara geografis dengan terpecahnya Tanah Pakpak menjadi dua kabupaten, wilayah Tanah Pakpak semakin berkeping-keping dan mengecil. Oleh karena itu, akibat tiadanya kesatuan geografis Kabupaten Pakpak Bharat yang mayoritas penduduknya etnik Pakpak tidak dapat begitu saja disebut Tanah Pakpak.

23Sebelum diangkat menjadi Pejabat Bupati Pakpak Bharat, J. Solin, adalah Asisten I Kabupaten Dairi. Ayahnya, M. D. Solin adalah mantan Pejabat Kabupaten Dairi. Tigor Solin diangkat sebagai pejabat Bupati atas permintaan masyarakat mengingat jasa orang tuanya kepada masyarakat Pakpak. Sewaktu pergolakan pembentukan GKPPD, Tigor Solin bersikap pro-pemisahan gereja dari HKBP. Hal itu juga menjadi pertimbangan pengusulannya sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Pakpak Bharat. Sebenarnya ada pejabat lokal Pakpak yang disebut-sebut menjadi calon pejabat Bupati, yaitu Marshal Munthe, namun ia dianggap tidak pro-GKPPD sehingga masyarakat tidak mengusulkannya. Sebagai orang Pakpak, Tigor Solin beristrikan perempuan Batak Toba.

KESIMPULAN

Rekonstruksi identitas kelompok etnik Pakpak berkelindan dengan pemanipulasian etnik dan kekuasaan. Setelah berhasil merapat dalam kekuasaan lokal, elite Pakpak melakukan mobilisasi etnik untuk menggapai kepentingan politiknya. Dalam perkembangan selanjutnya kekuasaan ini membangkitkan kesadaran politis orang Pakpak untuk merekonstruksi identitas kelompok sebagai akibat dari melemahnya batasan kultural kelompok etnik itu. Pelemahan batasan kultural ini akibat dari migrasi, kristenisasi, tobanisasi yang dimulai sejak awal abad ke-20 hingga kurun 1990-an di wilayah itu.

Etnik Pakpak telah berhasil membentuk Kabupaten Pakpak Bharat. Namun, setelah itu elite Pakpak saling berebut kekuasaan. Di tengah suasana seperti itu, pemilihan Bupati definitif akan mendorong para elite etnik mengerahkan massa masing-masing untuk merebut jabatan menjadi orang nomor satu di kabupaten baru itu. Elite Pakpak tidak lagi bersemangat membicarakan agenda yang menyejahterakan rakyat, tetapi terlelap membicarakan koalisi pelangi—Kristen dan Muslim—dalam memburu kekuasaan lokal.

Pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat pada dasarnya merupakan distorsi atas ide dasar rekonstruksi identitas etnik Pakpak yang telah dimulai pada 1950-an. Namun, terlepas dari hal itu, tidak dapat dipungkiri kelahiran kabupaten yang mempunyai delapan kecamatan ini semakin mengurangi batasan teritorial Tanah Pakpak. Pada masa kolonial, wilayah Tanah Pakpak mengalami pembelahan geografis, pada masa kemerdekaan menjadi arena tarik-menarik Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian dilepas kembali menjadi Kabupaten Dairi. Semua itu menyebabkan runtuhnya aura Tanah Pakpak sebagai tanah ulayat orang Pakpak. Meski ada anggapan lahirnya Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kemenangan orang Pakpak atas dominasi Batak Toba, tetapi sesungguhnya partisi Tanah Pakpak itu menjadi dilema. Jika Dairi tidak dipecah, orang Pakpak akan tetap berada



dalam dominasi Batak Toba, tetapi jika dipecah akan memperkecil batasan teritorial Tanah Pakpak.

Bagaimanapun, kelahiran Kabupaten Pakpak Bharat dapat memadamkan potensi konflik antara orang Pakpak dan Batak Toba. Meredanya potensi konflik antara kedua kelompok etnik itu tidak hanya disebabkan oleh partisi wilayah, tetapi juga bekerjanya *everyday forms of engagement* seperti adanya interaksi yang rutin antara orang Pakpak dan Batak Toba, saling kunjung antara kedua kelompok ini, anak-anak dari masing-masing keluarga bermain bersama, dan lebih penting lagi adanya pertalian darah lewat hubungan perkawinan. Saling menghadiri dalam acara adat menjadi rem pecahnya potensi konflik terbuka antara orang Pakpak dan Batak Toba. Dari keseluruhan proses reka ulang identitas etnik ini menghasilkan transformasi orang Pakpak menuju entitas politik yang sadar akan kelompok etniknya. Entitas politik ini memproduksi simbol teritorial dan simbol politis, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat.

DAFTAR ACUAN

- Anderson, Benedict (2008), "Exit Soeharto: Obituary for a Mediocre Tyrant," *New Left Review*, No. 50, Maret–April.
- Aritonang, Jan S. (1988), *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Bowen, John R. (1991), *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History 1900–1989*. New Haven: Yale University Press.
- Brass, Paul (1991), *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. London: Sage Publication.
- Carci, Ross O. (2006), "Organizing and Sustaining Hegemony: A Gramscian Perspective on Suharto's New Order Indonesia," Disertasi. New Zealand: University of Waikato.
- Colombijn, Freek dan Thomas Lindblad (ed.) (2002), *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Gordon, A. P. (1862), "De assistent residentie Mandailing en Ankola op Sumatra's westkust van 1847 tot 1857," *TNI*.
- Hiariej, Erick, Ucu Martanto dan Ahmad Musyaddad (ed.) (2004), *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Huntington, Samuel P. (1995), *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Jakarta: Grafiti.
- Kingsbury, Benedict (1995), "Indigenous Peoples as an International Legal Concept," dalam R. H. Barnes, Andrew Gray dan Benedict Kingsbury (ed.), *Indigenous Peoples of Asia*. Ann Arbor: The Association for Asian Studies.
- van Klinken, Gerry (2002), "Indonesia's New Ethnic Elites," dalam Henk Schulte Nordholt dan Irwan Abdullah (ed.), *Indonesia in Search of Transition*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes (ed.) (1993), *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Makka, A. Makmur (ed.) (2002), *Demokratisasi Tak Boleh Henti*. Jakarta: The Habibie Center.
- Makmur, Mariana, Lister Berutu dan Pader Berutu (ed.) (2002), *Aspek-aspek Kultural Etnis Pakpak: Suatu Eksplorasi tentang Potensi Lokal*. Medan: Monora.
- Pelly, Usman (1994), *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Philpott, Simon (2000), *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKis.
- Potter, David dan David Goldblatt (ed.) (1997), *Democratization*. Cambridge: Blackwell.
- Preece, Jennifer Jackson (2005), *Minority Rights between Diversity and Community*. Cambridge: Polity Press.
- Purba, O. H. S. dan Elvis S. Purba (1998), *Migrasi Batak Toba di Luar Tapanuli Utara*. Medan: Monora.
- Romli, Lili (2007), *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, tanpa penerbit.
- Tumanger, A. R. Oloan (1995), *Manusia Pakpak Dairi: Ulasan Selayang Pandang atas Suku Pakpak Dairi*. Pematang Siantar: tanpa nama penerbit.
- Volkstelling (1935), *Inheemsche bevolking van Sumatra, Deel IV*. Batavia: Landsdrukkerij.
- van Vuuren, L. (1910), *Eerste maatregelen in pas geanezeerd gebied*. Den Haag: H. J. van de Garde & Co.



Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah di Poso

Antara Otonomi dan Pemikiran Kekuasaan Lokal

HALIADI-SADI
UNIVERSITAS TADULAKO

Tema sejarah politik yang membicarakan tentang kekuasaan dan pemikiran politik lokal di Indonesia masih perlu dikaji secara tuntas dalam historiografi Indonesia. Pada tingkat lokal, sejarah Indonesia belum banyak menyoroti upaya dinamika pembentukan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga segmentasi pengalaman lokal tidak banyak tampil dalam wacana sejarah nasional Indonesia. Barbara Sillars Harvey dan R. Z. Leirissa telah membahas Permesta sebagai gerakan politik lokal yang menginginkan otonomi sejak 1957 di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Namun, apakah Permesta mendapatkan tantangan di tingkat lokal sebagai bentuk ketidaksetujuan anak daerah terhadap gerakan tersebut. Pertanyaan ini belum banyak dijawab dalam dua kajian tersebut sehingga perlu dikonstruksi kembali sekaligus dikembangkan analisis pemikiran pelaku untuk menyoroti Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah pada 1957–63 sebagai bentuk reaksi lokal terhadap gerakan Permesta di Sulawesi Utara.

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah inilah sebagai salah satu bentuk reaksi lokal Sulawesi Tengah terhadap gerakan Permesta atas nama lokal yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada 1964 sebagai salah satu provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah berpusat di Poso yang melibatkan kurang lebih 20.000 pemuda yang terbagi dalam 10 divisi/ sektor untuk menghalau Permesta dari utara dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dari selatan.

Pengalaman kolektif masyarakat termasuk pandangan tokoh lokal terhadap otonomi dan pemekaran wilayah administratif seharusnya mulai

diungkapkan untuk kelengkapan sejarah nasional Indonesia. Pandangan tokoh lokal Poso kurun 1950-an tentang otonomi, sadar atau tidak mulai diterapkan oleh tokoh-tokoh politik sekarang ini terutama ide mengenai pemekaran Provinsi Gorontalo dan juga wacana tentang Provinsi Sulawesi Timur yang akan mekar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ide-ide yang muncul tentang otonomi dan pemekaran kurun 1950-an tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk pemekaran beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

GEOGRAFI KABUPATEN POSO

Pada 1950-an, Kabupaten Poso merupakan kabupaten terluas dan berpenduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak 2011, kabupaten itu dipecah menjadi tiga yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Dengan demikian, saat terjadi Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah pada 1957, Kabupaten Poso harus dilihat sebagai wilayah yang belum terbagi berdasarkan kebijakan pemekaran pada era Reformasi. Secara geografis, Kabupaten Poso memiliki wilayah yang luas dan batas administratif yang jelas dengan kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Provinsi Sulawesi Selatan atau Kabupaten Luwu Utara serta Provinsi Gorontalo di Teluk Tomini.

Hasil pemetaan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (1991), memperlihatkan posisi Kabupaten Poso memanjang dari tenggara ke arah barat daya, melebar dari barat ke timur, terletak di kawasan antara Teluk Tomini dan Teluk Tolo pada koordinat $0^{\circ} 06' 56''$ hingga $3^{\circ} 37' 41''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 05' 25''$ hingga $123^{\circ} 06' 17''$ Bujur Timur.¹

Pada posisi ujung paling utara terletak Kecamatan Una-Una dan Walea

¹Bandingkan *Monografi Kabupaten Poso 1984*: 1; *Kabupaten Poso dalam Angka 1996*: 3; *Memori Bupati 1994–99*: 15; dan *Kabupaten Poso dalam Angka 2001*: 3. Posisi seperti ini berlangsung hingga 1999 sebelum dimekarkan dan terpisah dari Kabupaten Morowali.



Kepulauan yang terdiri atas tujuh pulau besar pada koordinat $0^{\circ} 06' 56''$ Lintang Selatan, sementara di ujung paling selatan terletak Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri atas 12 pulau pada koordinat $3^{\circ} 37' 41''$ Lintang Selatan. Bagian paling timur adalah Kecamatan Menui Kepulauan pada koordinat $123^{\circ} 06' 17''$ Bujur Timur dan bagian paling barat adalah Kecamatan Lore Utara dan Lore Selatan yang terletak pada koordinat $120^{\circ} 05' 25''$ Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografis tersebut, Kabupaten Poso berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara.² Batas-batas di sebelah selatan adalah wilayah Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Luwu Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwuk dan Kabupaten Banggai Kepulauan di perairan Teluk Tolo; sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.³ Sebelum pemekaran, luas wilayah Kabupaten Poso secara keseluruhan 2.992.888 hektar atau 29.928,88 kilometer persegi,⁴ sebagian besar merupakan daerah pegunungan atau perbukitan berlereng terjal. Data kemiringan wilayah Kabupaten Poso sebagai berikut.

- (0–15%) seluas 593.806 hektar atau 20 persen tersebar di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Poso Pesisir, Lore Utara, Pamona Selatan, Mori Atas, Petasia, Bungku Tengah, Bungku Utara, Bungku Barat dan Bungku Selatan.
- (5–40%) seluas 787.877 hektar atau 26,93 persen terutama di Kecamatan Lore Utara dan Ulubongka.
- (40%) seluas 1.483.675 hektar atau 51,76 persen, merupakan bagian

2Dulu Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Utara

3Luas tersebut sebelum terpisah dari Kabupaten Morowali. Mengenai luas wilayah ini ada perbedaan data, pada *Monografi Kabupaten Poso 1984* halaman 1 disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Poso 2.801.350 hektar.

4Termasuk wilayah Kabupaten Morowali.

terluas dari seluruh luas terjal dan curam, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Tojo, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Pamona Utara, dan Kecamatan Mori Atas.

Pada umumnya wilayah Kabupaten Poso berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Sesuai dengan data elevasi (ketinggian dari permukaan laut) diketahui bahwa wilayah Kabupaten Poso dibagi menjadi enam interval dengan ketinggian terendah 0–7 meter dari permukaan laut seluas 17.143 hektar atau 0,61 persen; daerah terluas berada pada ketinggian 101–500 meter dari permukaan laut meliputi wilayah 912.538 hektar atau 32,57 persen. Iklim di wilayah Kabupaten Poso termasuk dalam kategori Tipe A yaitu iklim hujan tropis yang dipengaruhi oleh dua musim secara tetap yakni musim Timur dan musim Barat. Musim angin Timur pada April hingga September banyak membawa air hujan sehingga wilayah Poso sering mengalami banjir; sementara pada saat bertiup angin Barat pada Oktober hingga Maret curah hujan agak berkurang tetapi cukup untuk kebutuhan pertanian. Kondisi iklim seperti itu sudah barang tentu mempengaruhi tanah sehingga baik untuk kegiatan pertanian; juga berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna yang spesifik.

PERMESTA DAN GERAKAN OTONOMI DAERAH

Telah disebutkan, Barbara Sillars Harvey dan R. Z. Leirissa telah membahas Permesta sebagai gerakan politik lokal yang menginginkan otonomi sejak 1957 di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Harvey memulai pembahasannya dengan keadaan politik di Sulawesi Selatan Tenggara, Sulawesi Utara Tengah, dan secara khusus keadaan politik di Sulawesi Selatan. Kemudian, kronologi perkembangan gerakan Permesta hingga akhir dan setelah gerakan itu. Kajian Harvey mengenai PRRI/Permesta komprehensif karena menggunakan arsip secara memadai, baik yang tersimpan di kantor Arsip Nasional di Jakarta maupun



di kantor Arsip Makassar. Namun, salah satu kekurangannya, Harvey tidak membahas mengenai kelompok penentang Permesta selain militer; substansi kajiannya hanya tertuju pada anatomi gerakan PRRI/Permesta. Penelitian standar PRRI/Permesta yang dilakukan oleh Barbara seharusnya membahas Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) sebagai organisasi yang melawan secara sistematis Permesta di Kabupaten Poso.

Penelitian Leirissa juga belum membahas GPST di Kabupaten Poso sebagai organisasi yang melawan Permesta. Sejarawan yang banyak meneliti tentang Sulawesi Utara itu, dalam bukunya tentang Permesta, tidak banyak melihat keadaan Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada waktu itu. Namun, bagaimanapun, buku Leirissa ini kaya akan arsip PRRI/Permesta di Sulawesi Utara. Hanya saja, seperti halnya Harvey, kajian itu tidak membahas aspek GPST dalam kaitan dengan Permesta. Pertanyaan yang menarik adalah apakah Permesta mendapatkan tantangan di tingkat lokal sebagai bentuk ketidaksetujuan anak daerah terhadap gerakan tersebut. Pertanyaan ini belum banyak dijawab dalam dua kajian tersebut sehingga perlu rekonstruksi kembali sekaligus mengembangkan analisis pemikiran pelaku untuk menyoroti Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah pada 1957–63 sebagai bentuk reaksi lokal terhadap gerakan Permesta di Sulawesi.

Wilayah Sulawesi Tengah pada kurun 1950-an dikendalikan secara politik dari Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Keadaan aparat pemerintahan belum memadai waktu itu sehingga aturan ketatanegaraan ataupun pelaksanaan administrasi pemerintahan belum terlaksana secara optimal. Terutama pada 1957–60, keadaan militer di Sulawesi Tengah dapat dikatakan tidak stabil atau belum terkoordinasikan secara efektif. Keadaan itu terlihat dalam penataan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara/Tengah yang dipengaruhi oleh PRRI/Permesta pada Juni 1957. Panglima komandonya, Letnan Kolonel D. J. Somba, membelot dan memberikan dukungannya kepada PRRI dan menyatakan

diri lepas dari Republik Indonesia (Joseph, ed. 1994: 88).

Permesta atau Perjuangan Semesta merupakan gerakan yang menuntut otonomi daerah yang diproklamasikan di Sulawesi Selatan pada 2 Maret 1957 oleh 51 tokoh politik, birokrat, dan militer termasuk pengusaha yang tersebar di Pulau Sulawesi. Pada Juni 1957, H. N. V. Sumual, Komandan Tentara dan Teritori VII, pindah ke Minahasa, dan bersama Somba melakukan Konferensi Kerja Permesta di Gorontalo. Pada 20 Juni 1957, mereka secara sepihak mengumumkan pembentukan Provinsi Sulawesi Utara dan mengangkat H. D. Manoppo asal Bolaang Mongondow sebagai gubernur. Hal itu merupakan perwujudan awal gerakan Permesta berupa otonomi daerah Sulawesi Utara atas Sulawesi Selatan.

Selain di Sulawesi Utara, wilayah kekuasaan Permesta juga meliputi Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Poso setelah Sumual memindahkan kekuasaan Permesta ke Sulawesi Utara pada pertengahan Juni 1957. Pada bulan tersebut Sumual memindahkan Batalyon 702 yang kebanyakan memiliki anggota dari Minahasa termasuk Dee Gerungan, Eddy Gagola, Lendy Tumbelaka, dan John Ottay (Harvey 1989: 282), dari Makassar ke Sulawesi Utara dengan memilih markas besar Permesta di Kinilow. Pada 20 Juni 1957, Sumual menyatukan Sulawesi Utara Tengah yang terpisah dari Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara Tengah mengangkat Manoppo sebagai Gubernur. Wilayah Sulawesi Utara Tengah secara administratif dibagi ke dalam tujuh kabupaten dan kotamadya, yakni Kotamadya Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Sangir Talaud, Kabupaten Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Tanah Toraja (Leirissa 1991: 110–11). Hingga munculnya GPST, Kabupaten Sulawesi Tengah dipimpin oleh R. M. Pusadan sebagai bupati pertama. Setelah itu, yang menjabat bupati Poso antara lain Abdul Latif Daeng Masikki (1952–54), Alimuddin Daeng Matiro (1954–56), Djafar Lapasere (1956–57), dan S. Kabo (1957–59).

Bukti solidaritas pembangkangan PRRI/Permesta diperlihatkan



dalam organisasi militer yang dibentuk oleh Sumual dan kawan-kawan. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Permesta dipimpin langsung oleh Sumual dengan membawahkan Angkatan Darat Revolusi, Angkatan Udara Revolusi di bawah Laksamana Muda/TII Muharto, Angkatan Laut Revolusi dipimpin oleh Kapten Laut L. D. Pesik, dan Polisi Revolusi dipimpin oleh Letkol W. H. Korompis. Kasad membawahkan empat Komando Daerah Pertempuran (KDP), yaitu KDP-1 meliputi wilayah Maluku, Irian Barat, dan Sangir Talaud; KDP-2 mencakup Minahasa; KDP-3 meliputi Bolaang Mongondow; dan KDP-4 mencakup seluruh daerah Sulawesi Tengah, dipimpin oleh Mayor D. Gerungan (Elyas, ed. 1994: 90–1).

Kekuatan militer PRRI/Permesta di Sulawesi Tengah terdiri atas Batalyon 719 dan Brimob 5490. Invasi militer atas daerah Sulawesi Tengah dilakukan oleh D. J. Somba dengan sebutan Ekspedisi Jakarta II langsung menguasai Parigi pada 22 Mei 1958, namun dapat dipukul oleh pasukan Kapten Frans Karangan sehingga mereka berjalan kaki ke Sulawesi Utara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melancarkan berbagai operasi militer untuk menumpas Permesta, yakni Operasi Merdeka dipimpin oleh Kapten Frans Karangan, Operasi Sapta Marga II dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Soemarsono dari pasukan Batalyon 501/Brawijaya, Batalyon 601/Tanjungpura, dan Kompi Khusus Koandait dengan operasi di Sulawesi Tengah antara lain di Donggala, Palu, Parigi, Tawaeli, Toboli, Kulawi, Bada, Poso, Taipa, dan Tentena. Operasi militer tersebut sempat membuat Batalyon 501/Brawijaya bergesekan dengan pemuda Poso yang tergabung dalam GPST sehingga menyebabkan beberapa pemimpin GPST di Kabupaten Poso gugur.

Pada masa pergolakan Permesta, Poso merupakan bagian dari Kabupaten Sulawesi Tengah. Isu Permesta hanya berada di kalangan militer yang bertugas pada waktu itu. Permesta di daerah-daerah digalakkan oleh para pemuda pro-Permesta yang menamakan diri Komando Pemuda Permesta atau KoP2, sedangkan lawannya adalah pemuda pro-Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah Poso, Ko2P berhadapan dengan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Asa Bungkundapu. Militer Permesta yang dipimpin Somba menguasai Sulawesi Tengah, khususnya di Parigi, sedangkan di wilayah Kabupaten Poso dipimpin oleh Pallar. Unsur TNI yang bergabung dalam Permesta diperkirakan mencapai sekitar 6000 personel (Matindas dan Supit 1998: 313).

PEMUDA SULAWESI TENGAH MELAWAN PERMESTA

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Asa Bungkundapu⁵ menuntut Provinsi Sulawesi Tengah yang otonom, dan resimen induk di Sulawesi Tengah dipegang oleh para pemuda daerah Sulawesi Tengah. Gerakan itu dimulai sejak 5 Desember 1957⁶ ditandai dengan pelarian para pemuda ke hutan untuk menyusun strategi sehingga mengakibatkan 15 orang pimpinan GPST terbunuh pada 10 Desember 1960.⁷ GPST Kabupaten Poso melakukan gerakan perlawanan secara total terhadap kekuasaan Permesta di Sulawesi Tengah terutama di wilayah Kabupaten Poso mulai dari Poso, Tentena, Mori, Kolonodale, Bungku, Tojo, Ampana, hingga Banggai.

Pada 1957, masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso, dalam keadaan resah. Keresahan itu disebabkan oleh dua gerakan gerombolan yang berkecamuk di Pulau Sulawesi, yaitu DI/TII di bagian selatan dan Permesta di Sulawesi Utara. Menurut Zainuddin Bolong, pergerakan DI/TII ke Sulawesi Tengah melalui dua jalur, yakni lewat daerah Mamuju di pantai barat Sulawesi Tengah (Selat Makassar) di Kecamatan

5Asa Bungkundapu lahir 9 Maret 1925, menjadi pegawai perpajakan di Poso. Pada awal 1950, mengorganisasikan pemuda Poso dalam Serbu yang bertugas membantu polisi menjaga keamanan dari gangguan kelompok yang menamakan diri Laskar Merah Putih yang datang ke Poso untuk melucuti persenjataan kepolisian. Bungkundapu menjadi Ketua Umum GPST 1957–60.

6Bdk. Toripah, "Sedikit tentang Watak dan Perjuangan GPST di Sulawesi Tengah," dalam Arsip Provinsi Sulawesi, No. 236; baca juga "Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah Desak Segera Dibentuknja Resimen Induk untuk Daerah Sulawesi Tengah: Pemuda dan Rakjat Sulawesi Tengah Berdiri dibelakang Pemerintah Pusat," *Berita Antara*, No. 3/A, 3 Januari 1958.

7Lihat naskah sejarah singkat terjadinya pembunuhan 15 orang pimpinan dan atau anggota pasukan partisan GPST pada 10 Desember 1960 di Poso.



Pasang Kayu yang berbatasan dengan Kecamatan Banawa di Sulawesi Tengah dan langsung ke utara di Kecamatan Dampelas–Sojol hingga masuk ke wilayah Kabupaten Buol. Gerombolan DI/TII yang bergerak pada jalur itu dipimpin oleh M. Nur Rasyid. Jalur kedua, dipimpin oleh M. Amin Larekeng, melewati dataran tinggi bagian tengah Tanah Toraja menuju pedalaman Poso, terus berlanjut ke daerah Luwuk Banggai. Kekuatan DI/TII yang beroperasi di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai 1.000 hingga 1.500 personel. M. Nur Rasyid beroperasi di wilayah Donggala dan daerah Tolitoli, Buol, sedangkan M. Amin Larekeng beroperasi di wilayah Poso dan wilayah Luwuk Banggai.

Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah merupakan bentuk reaksi lokal terhadap Permesta. Atas nama lokalitas, GPST memperjuangkan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah pada 1964 yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. GPST berpusat di Poso, melibatkan sekitar 20.000 pemuda yang meliputi hampir semua etnis di sana. Terbagi dalam 10 divisi/sektor, GPST menghalau Permesta dari arah utara dan DI/TII dari selatan. Perjuangan GPST mengusir Permesta dari Sulawesi Tengah berlangsung sejak 5 Desember 1957 hingga 14 Juli 1958, dan mereka berhasil menguasai Poso. Perjuangan GPST membuktikan bahwa pemuda Sulawesi Tengah berhasil mewujudkan cita-cita mereka yakni membentuk provinsi yang otonom dan resimen induk di Sulawesi Tengah. Dalam siaran kilat yang dikeluarkan sejak mereka berjuang dari dalam hutan di wilayah Poso dan sekitarnya disebutkan, “Kami, putera dan puteri Sulawesi Tengah, dengan ini memisahkan diri dari halayak ramai, menuntut daerah tingkat I (satu) dan resimen induk yang terdiri dari putera dan puteri Sulawesi Tengah. Poso, 5 Desember 1957. Sekali 5 Desember tetap 5 Desember.”⁸

MEREBUT MEMORI KOLEKTIF PEMUDA

Gerakan kaum muda Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala tersebut menjadi semacam spirit bagi masyarakat daerah Sulawesi Tengah

⁸Wawancara dengan Nico Pelima dan Tonigi.

untuk memperjuangkan pembentukan provinsi baru yang terpisah dari Sulawesi Utara yang agak militan waktu itu. Selain melalui cara perlawanan fisik, perjuangan pembentukan provinsi baru itu dilakukan secara politik seperti terlihat pada sejumlah konsepsi yang diajukan oleh berbagai pihak atau tokoh di bagian tengah Pulau Sulawesi tersebut. Terdapat delapan konsepsi yang menawarkan rumusan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Konsepsi Residen Manoppo, Konsepsi Toraja Raya, Konsepsi Makassar, Konsepsi Zakaria Imban, Konsepsi Tobing, Konsepsi Ngitung, Konsepsi Propinsi Tomini Raya, dan Konsepsi Mahasiswa Sulawesi Tengah.

Pada umumnya, berbagai konsepsi tersebut menyangkut wilayah provinsi yang akan dibentuk. Secara garis besar, isi konsepsi adalah sebagai berikut.

1. Konsepsi Residen Manoppo; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Gorontalo. Konsepsi ini mendapat dukungan DPRD Donggala pada 1954 (Kutoyo, dkk. 2005: 247–8). Konsepsi ini boleh dikatakan sebagai “sudut pandang” dari Manado yang tidak banyak memperhatikan masalah khusus di Sulawesi Tengah.
2. Konsepsi Toraja Raya atau Konsepsi Tumakaka-Tambing; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tanah Toraja. Konsepsi ini mendukung, atau didukung oleh, penempatan militer pimpinan Frans Karangan di Palu, dan GPST diduga berhubungan dengan konsepsi ini. Tumakaka, salah seorang konseptor, merupakan anggota DPR Pusat yang banyak berhubungan dengan pihak pemerintahan di Jakarta. Demikian pula Tambing, kelahiran Toraja, adalah anggota DPR Pusat pada waktu itu yang getol memperjuangkan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta.
3. Konsepsi Makassar atau Konsepsi Hamid Syahid Arsyad Pane; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten



Donggala, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwu-Palopo. Konsepsi ini mengacu kepada hak historis Kerajaan Luwu-Palopo sehingga perspektif atau pandangan terhadap Sulawesi Tengah selalu dihubungkan dengan konstelasi politik di Makassar sebagai pusat kegiatan anak atau pemuda daerah yang melakukan studi di Makassar.

4. Konsepsi Zakaria Imban; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupa-ten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Dicetuskan dari Jakarta (Zakaria Imban adalah anggota DPRGR asal Bolaang Mongondow), konsepsi ini dimaksudkan untuk mengimbangi konsepsi dari Manado dan Sulawesi Tengah, namun tujuan utamanya adalah memasukan Bolaang Mongondow dalam wilayah Sulawesi Tengah dan keluar dari wilayah Sulawesi Utara.
5. Konsepsi Tobing; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tana Toraja dan Mamuju. Konsepsi ini dikemukakan oleh Dr. Tobing, bekas Menteri Antar-Daerah dalam Kabinet Karya.
6. Konsepsi Ngitung; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi daerah Luwuk/ Banggai, Kolonodale, Bungku, dan Kendari. Konsepsi ini diusulkan oleh Ngitung, kelahiran Bungku, yang menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Poso 1960–62.
7. Konsepsi Provinsi Tomini Raya; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi daerah Tolitoli, Buol, Kepulauan Una-Una, Gorontalo, dan Bolaang Mongondow. Konsepsi ini kemudian berubah menjadi Konsepsi Provinsi Tomini Raya, yang dikenal pula sebagai Konsepsi Nani Wartabone. Mantan Residen Koordinator Sulawesi Utara, Nani Wartabone, giat melakukan aktivitas politik dan perjuangan di wilayah Gorontalo dan sekitarnya sehingga diangkat menjadi pahlawan nasional bagi Gorontalo.

8. Konsepsi Mahasiswa Sulawesi Tengah; mengusulkan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Konsepsi ini dikenal dengan sebutan Konsepsi Rusdi Toana-Mene Lamakarate yang diambil dari nama pengusulnya. Rusdi Toana merupakan intelektual dan wartawan di Sulawesi Tengah,⁹ sedangkan Mene Lamakarate adalah seorang bangsawan Kaili dari Biromaru.

Munculnya delapan konsepsi tersebut menunjukkan ada pertarungan politik berbagai unsur masyarakat dalam proses pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Beragamnya konsepsi itu, menurut Rusdi Toana—salah seorang pelaku pengusul konsepsi—cukup menimbulkan kesulitan pemerintah Pusat untuk memilih salah satu di antaranya.¹⁰ Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, konsepsi kedelapan, yang digagas Rusdi Toana dan Mene Lamakarate, dipilih pemerintah untuk menetapkan berdirinya Provinsi Sulawesi Tengah. Pilihan atas konsepsi itu juga menunjukkan kemenangan perjuangan pemuda Sulawesi Tengah dalam membentuk ruang politiknya sendiri.

KESIMPULAN

Pergolakan di Pulau Sulawesi pada 1957 mendapat tanggapan berbeda-beda di antara tokoh politik lokal berdasarkan pengalaman individual mereka. Asa Bungkundapu, seorang pemuda Kristen Pamona, menghimpun pemuda Sulawesi Tengah di wilayah Poso untuk mengusir Permesta dari wilayahnya dengan tetap menyatu bersama TNI yang pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia. Variasi perbedaan pandangan dari beberapa tokoh Sulawesi Tengah atas pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah menjadi bukti bahwa tokoh-

9Rusdi Toana mendirikan *Mercusuar*, surat kabar yang terbit sejak 1 September 1962—masih beredar hingga sekarang (2011)—dan merupakan koran pertama di Sulawesi Tengah. Selain sebagai perintis senior pers di Sulawesi Tengah, Rusdi Toana juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah di Palu.

10Lihat pernyataan Toana dan Mbouw (1980: 28).



tokoh lokal memiliki pandangan berbeda-beda terhadap konsep otonomi berdasarkan pengalaman perjuangan masing-masing.

Hal itu terlihat pada delapan konsepsi yang diajukan untuk membentuk Provinsi Sulawesi Tengah. Kedelapan konsepsi tersebut ditawarkan oleh Manoppo, Tumakaka-Tambing, Hamid Syahid Arsyad Pane, Zakaria Imban, Tobing, Ngitung, Nani Wartabone, dan Rusdi Toana-Mene Lamakarate. Konsepsi Rusdi Toana dan Mene Lamakarate yang dilatari oleh para pemuda-pejuang seperti Asa Bungkundapu dari GPST Poso, dan K. Z. A. Betalemba dari GPPST Donggala, akhirnya memenangkan wacana pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud otonomi daerah pada waktu itu.

DAFTAR ACUAN

- Harvey, Barbara Sillars (1989), *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, terj. Inkultra. Jakarta: Grafiti Pers.
- Joseph, Elyas (ed.) (1994), *Lintasan Perjuangan dan Pengabdian Prajurit Kodam VII Wirabuana*. Makassar: Dinas Pembinaan Mental Kodam VII Wirabuana.
- Kutoyo, Sutrisno, dkk. (2005), *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Leirissa, R. Z. (1991), *PRRI Permesta: Membangun Indonesia Tanpa Komunisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Matindas, B. E. dan Bert Supit (1998), *Ventje Sumual Menatap Hanya ke Depan: Biografi Seorang Patriot, Filsuf, Gembong Pemberontak*. Jakarta: Bina Insani.
- Toana, Rusdi dan Abd. Karim Mbouw (1980), “Mengungkap Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah di Arena Sejarah Bangsa Indonesia,” Makalah Sarasehan Sejarah dan Pembangunan Sulawesi Tengah. Palu: Universitas Tadulako.

Sumber Resmi Tercetak

Kabupaten Poso dalam Angka 1996

Kabupaten Poso dalam Angka 2001

Memori Bupati Poso 1994–1999

Monografi Kabupaten Poso 1984.





BAGIAN KEDUA
KEDAULATAN DAN STRATEGI
PERTAHANAN - KEMANAN



Utang Republik dan Utang Rezim Ironisme Sejarah Negeri yang Terjerat Utang

MESTIKA ZED
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Utang adalah bagian penting dalam sejarah, tidak terkecuali sejarah Indonesia. Negeri bekas jajahan Belanda ini bahkan sudah terjerat utang untuk mendapat kedaulatan. Ironisnya, perilaku berutang lama-kelamaan menjadi semacam “candu” pembangunan pada masa pascakolonial sehingga Republik yang merdeka pada 1945 itu semakin lama terperosok ke dalam kubangan utang. Tulisan ini bertujuan melacak kebijakan utang selama 60 tahun terakhir. Akan ditunjukkan bahwa Indonesia merupakan contoh penting dalam kasus “utang kotor” (*odious debt*) rezim pengutang di negara-negara Dunia Ketiga. Pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan utang diputuskan; seberapa besar; digunakan untuk apa; dan apa implikasinya bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pokok persoalan tersebut menjadi penting terutama juga bertalian erat dengan persoalan kesadaran nasional yang semakin buram. Kesadaran nasional atas utang itu penting dibangun untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Kesadaran itu juga menjadi salah satu titik simpul dalam upaya membrantas korupsi, dan kesungguhan untuk menegakkan supremasi hukum dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan rakyat banyak.

Barangkali tidak ada negara kolonial yang dalam melaksanakan pembangunan ekonominya sangat tergantung pada daerah koloninya seperti Negeri Belanda terhadap Indonesia. Sebagai negara kecil tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam perdagangan dunia, negara kolonial Belanda sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam negeri jajajahannya itu.¹ Bagi Negeri Belanda, Indonesia, atau Hindia-Belanda pada masa

¹Pada masa sebelum perang, sekitar 90 persen pasar kina dunia dipegang oleh Belanda, begitu juga lada (86 persen), kapok (75 persen), karet (37persen), produk minyak kelapa (28 persen), teh (19 persen), timah (17 persen), gula (3persen), kopi (4 persen), dan minyak mentah (3persen). Semua

lalu, adalah “tropische Holland” atau dalam istilah Multatuli “zamrud khatulistiwa”—negeri tempat berinvestasi tinggi dan menyediakan deviden secara teratur bagi ‘negeri induk’. Hindia-Belanda secara langsung atau tidak langsung menyediakan pendapatan untuk satu orang di antara setiap tujuh orang warga Belanda (Woodman 1955).

Dapat dimengerti jika ada ungkapan Belanda berbunyi *Indië verloren, ramspoed geboren*, yang artinya “kehilangan Indonesia berarti bencana bagi Belanda.” Kekhawatiran Belanda akan “bencana” itu tampak sekali pada sikap politiknya dalam perundingan yang terakhir, dan yang amat menentukan, yakni Konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, antara bulan Agustus hingga pengujung Desember 1949. Meski konferensi itu telah memberi jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai negara-bangsa yang merdeka, Belanda masih sempat melepaskan “tendangan terakhir” yang membuat Indonesia terpaksa menerima utang warisan Hindia-Belanda sebagai imbalan atas pengakuan kedaulatannya.

Analisis dalam risalah ini terdiri dari dua bagian. Pertama, menekankan bahwa utang yang dipikul Indonesia lewat KMB merupakan “utang Republik” dalam arti digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Republik, dalam hal ini menuntaskan amanat Proklamasi 1945. Kedua, utang-piutang yang dipikul Indonesia setelah merdeka, yang dibuat dan digunakan, dan atau disalahgunakan, untuk kepentingan rezim layak disebut “utang rezim.” Keduanya harus dibedakan, baik latar belakang maupun proses dan penggunaannya.

UTANG REPUBLIK: KEDAULATAN YANG DIBELI?

Sejak umur “balita” Indonesia sudah harus menanggung beban utang warisan kolonial yang dipikulkan ke pundaknya lewat perundingan KMB pada pengujung 1949. Utang merupakan salah satu di antara tiga

komoditas tersebut berasal dari Indonesia (lihat Woodman 1955: 348).



masalah utama dan menuntut lebih banyak perhatian, pengertian, konsesi dari masing-masing pihak dalam perundingan tersebut.² Pembicaraan tentang utang-piutang berjalan sangat alot. Masing-masing pihak mengemukakan pendiri-annya lewat perdebatan diplomatik tingkat tinggi, adu argumen dengan dukungan data serta sikap yang berbeda sehingga sulit dijembatani satu sama lain. Menurut laporan, dalam tiga minggu pertama perundingan soal utang, tidak ada kemajuan yang berarti. Masing-masing pihak tetap bertahan dengan pendiriannya. Sementara pihak penengah dalam perundingan itu, UNCI, sampai tingkat tertentu, tampaknya gagal menengahi masalah ini.

Belanda memperoleh kesempatan mengemukakan pendiriannya terlebih dulu. Dasar pandangan Belanda adalah bahwa pemerintah Indonesia—Republik Indonesia Serikat— harus memikul semua beban utang pemerintah Belanda pada saat penyerahan kedaulatan. Total utang yang harus dibayar Indonesia, menurut perhitungan Belanda, adalah 6.100 milyar gulden (atau senilai 1.732.400.000 dollar AS). Belanda membedakan dua jenis utang Indonesia: pertama utang domestik sebesar 3.100 milyar gulden, dan kedua atau sisanya, 3.000 milyar gulden adalah utang luar negeri. Utang domestik dihitung berdasarkan pengeluaran pemerintah Belanda di Indonesia antara 1938 hingga 1949. Di antaranya berupa uang kertas pemerintah, surat-surat berharga bank (obligasi) dan bon-bon pemerintah, dan utang luar negeri dengan perincian kasar sebesar 3 milyar gulden berasal dari utang yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dalam periode yang sama.³ Dalam perhitungan ini, pihak Belanda menyatakan bahwa hanya utang luar negeri yang dapat dirundingkan, sedangkan utang dalam negeri

²Selain utang, dua masalah penting lainnya yang dibahas dalam KMB adalah soal kedudukan Irian Barat dan masalah Unie (Republik Indonesia Serikat), termasuk kedudukan bekas tentara kolonial (*Koninklijk Nederlandsch-Indië Leger*, KNIL) dan perusahaan asing setelah penyerahan kedaulatan (lihat Kahin 1995: 549).

³Terdapat sedikit perbedaan mengenai total jumlah utang ini dalam berbagai sumber: Kahin (1995: 557) menyebut 6,1 milyar gulden; Taylor (1975: 240) 1,1 milyar gulden, sedangkan Smit (1986: 43) menyebut 6,3 milyar gulden.

sepenuhnya harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Dari utang luar negeri tersebut, Belanda menyatakan bersedia mengurangnya sebesar 400 juta gulden sehingga utang luar negeri yang harus dibayar Indonesia tinggal 2.600 milyar gulden. Dengan demikian, jumlah utang seluruhnya berkurang menjadi 5.600 juta gulden.

Delegasi Indonesia sangat terkejut ketika delegasi Belanda mulai mengajukan rincian jumlah utang yang harus dipikul Indonesia tersebut. Mereka mulai merumuskan utang terhitung sejak zaman sebelum perang (1938) ketika Hindia-Belanda kehilangan pendapatan akibat Perang Dunia II. Menurut perhitungan mereka, utang Indonesia sebelum perang atau sampai 1938 berjumlah sekitar f 1,3 milyar gulden. Tambahan utang dalam kurun waktu sesudah itu (1938–49) adalah sebesar 4,7 milyar gulden. Dalam perincian disebutkan bahwa utang dalam negeri berjumlah 3 milyar gulden, sedangkan utang luar negeri 3,3 milyar gulden.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Djuanda dalam komisi itu tercengang dengan pembengkakan jumlah utang sampai yang mencapai 4,7 milyar. Bukan saja terkesan dipermainkan, dan sulit diterima akal sehat, jumlah yang demikian besar itu mereka nilai mengada-ada karena secara riil Indonesia tidak pernah memperoleh manfaat dari pembengkakan utang itu. Di luar sidang, delegasi Belanda menjelaskan kepada pers bahwa jumlah utang 6 milyar gulden itu sebagai sesuatu yang dapat diterima. Argumen mereka ialah bahwa jika dihitung tanpa mempertimbangkan akibat kenaikan harga produk dan nilai (kurs) uang yang menurun, maka utang Indonesia sebesar 6 milyar itu, sebetulnya hanya berjumlah 4,765 milyar gulden. Pengurangan riil itu terjadi, sekali lagi menurut argumen Belanda, karena perhitungan berikut (Taylor 1975: 240),

- a. akibat kenaikan harga di pasar dunia: 280 juta gulden
- b. akibat devaluasi April 1945: 320 juta gulden
- c. akibat kenaikan harga di pasar dunia: 260 juta gulden



d. akibat devaluasi September 1949: 375 juta gulden.

Pihak Belanda selanjutnya menyatakan bahwa bila delegasi Indonesia bersedia menerimanya, mereka akan mengurangi tuntutan mereka dalam kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa mendatang. Dengan jumlah demikian itu mereka sudah cukup merasa puas. Delegasi Belanda juga menyatakan bahwa meski sebelumnya telah dirundingkan, keputusan terakhir akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Indonesia. Namun, selain itu, mereka juga menuntut agar metode pembayaran kembali utang tersebut akan dilakukan dengan dua cara: (1) melalui penerimaan di muka suatu persentase tertentu dari nilai “ekspor Indonesia setiap tahun sebagai angsuran pembayaran utang”; dan (2) pembayaran lewat keuntungan dari produksi timah per tahun, yang harus dimasukkan ke dalam bank Belanda yang ditunjuk untuk itu guna melunasi dan membayar bunga utang ini bila jumlah yang diperoleh dari ekspor Indonesia tidak memadai.

Apapun alasannya, Belanda tampaknya tidak mengubah tuntutan mereka. Artinya, Indonesia harus memikul utang sebesar 6 milyar gulden. Suatu beban yang tidak hanya sulit dipikul oleh sebuah negara yang baru merdeka, yang tercabik-cabik akibat perang, tetapi pada saat yang sama juga harus menyediakan anggaran untuk membangun bangsa yang sekian abad dijajah. Ini sangat ironis karena Belanda membebaskan biaya perangnya yang digunakan justru untuk melakukan operasi militer dan membunuh orang Indonesia. Terang saja pihak Indonesia menolak keras tuntutan Belanda mengenai jumlah utang yang bagi mereka sangat tidak masuk akal.

Sebelum mengemukakan tanggapan, delegasi Indonesia, atas anjuran Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ketua delegasi bagian Ekonomi dan Keuangan Republik, sudah siap dengan usul tandingan. Mereka akhirnya sampai pada suatu pendirian yang sangat tegas, yang menurut suatu laporan, juga sangat mengagetkan dan menggoyahkan

pendirian delegasi Belanda. Kesimpulan Indonesia yang sangat mengejutkan pihak Belanda itu adalah bahwa negara Indonesia tidak harus mempunyai utang apa pun kepada Negeri Belanda. Sebaliknya, Negeri Belanda yang semestinya berutang lebih dari 500 juta gulden kepada negara baru itu.

Delegasi Indonesia mulai dengan menghitung biaya anggaran militer Belanda di Indonesia sejak 1945 yang mencapai sekitar sekitar 3.500 juta gulden. Jumlah itu tidak termasuk biaya normal pemeliharaan angkatan bersenjata dan belanja normal pengelo-laan operasional pemerintah. Mereka berpendapat bahwa pengeluaran gulden yang dipakai Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh rakyat Indonesia dan oleh negara yang baru merdeka, dan karena itu harus ditolak. Jika pun bisa diterima, angka 6.100 juta gulden (total utang pemerintah Indonesia versi tuntutan Negeri Belanda), harus dikurangi 3.500 juta gulden itu. Dengan demikian, utang yang harus dibayar Indonesia kepada Negeri Belanda tinggal 2.600 juta gulden. Disimpulkan bahwa paling sedikit 2.240 juta gulden dari biaya militer Belanda telah dipakai untuk menghancurkan Republik dan itu semua mereka ambil dari Indonesia terutama dari sumber dalam negeri di Indonesia (Kahin 1995: 557).

Menurut delegasi Indonesia, jumlah itu menggambarkan tuntutan pemerintah Indonesia mendatang terhadap pemerintah Belanda. Jadi, menurut mereka, dari seluruh utang dalam negeri Indonesia, yang berjumlah 3.000 juta gulden, pemerintah Indonesia hanya dapat bertanggung jawab atas 760 juta gulden (yaitu 3.000 juta dikurangi 2.240 juta gulden). Dari 3.500 juta gulden sisanya yang dikeluarkan Belanda dalam kampanye militernya melawan Republik, delegasi Indonesia menghitung bahwa 1.260 juta gulden dapat dikenakan kepada utang dalam negeri Indonesia. Selebihnya merupakan utang langsung yang dibuat Belanda. Pihak Indonesia juga menolak membayar utang



untuk anggaran militer Belanda dan berpendapat bahwa hal itu harus dikurangi dari utang luar negeri Indonesia berjumlah 3.100 juta gulden yang harus ditanggung sendiri oleh Belanda. Dengan demikian, mereka berkesimpulan, utang luar negeri resmi Indonesia hanya 1.840 juta gulden. Dari jumlah itu, sebanyak 140 juta gulden merupakan utang Indonesia kepada negara-negara ketiga. Sisanya, sebanyak 1.700 juta, jelas merupakan bagian utang luar negeri yang harus dibebankan kepada Belanda karena merekalah yang membuat utang itu untuk kepentingan kolonialnya.

Delegasi Indonesia melengkapi perhitungan dengan kesimpulan bahwa Belanda mempunyai utang kepada Indonesia sebesar 2.240 juta gulden (bagian dari utang dalam negeri Indonesia), sedangkan utang negara Indonesia yang baru (RIS) kepada Negeri Belanda adalah 1.700 juta gulden (bagian resmi dari utang luar negeri, yaitu bagian yang tidak termasuk utang Belanda untuk aksi militernya terhadap Republik). Dengan demikian, mereka menarik kesimpulan bahwa Negeri Belanda punya utang kepada Indonesia sejumlah 2.240 juta dikurangi 1.700 juta atau 540 juta gulden.

Belanda sangat kaget dan goyah dengan argumen kuat dari delegasi Indonesia itu. Untuk sementara mereka kehilangan argumen balasan dan sejak itu perundingan tentang posisi utang pun macet. Dalam pada itu tidak satupun delegasi dari anggota Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) yang mampu mengajukan pemecahannya. Delegasi Indonesia tetap berpendirian bahwa penyerahan kedaulatan tidak dapat dirintangi dengan alasan utang seperti yang ditekankan Belanda dan bahwa keputusan terakhir mengenai pembagian pertanggungjawaban pemerintah Hindia Belanda antara Indonesia dan Belanda harus diselesaikan oleh suatu komisi utang, termasuk wakil dari pihak ketiga, mungkin dari Bank Dunia atau UNCI. Untuk memperkuat argumen, delegasi Indonesia menganalogikan dengan penyelesaian utang terakhir antara Amerika Serikat dan Filipina, dan antara Kerajaan

Inggris dan India. Dalam kasus itu, masalah utang dapat diselesaikan setelah penyerahan kedaulatan beres. Oleh karena itu, pihak Indonesia tidak melihat alasan penyelesaian masalah semacam itu tidak dapat dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia.

Belanda tampaknya tidak sepakat terhadap argumen Indonesia, dan terus menekan bahwa masalah utang harus diselesaikan terlebih dahulu jika konferensi tidak ingin gagal. Sekali lagi, perundingan menemukan jalan buntu. Merley Cochran dari UNCI segera melapor ke Washington dan minta izin untuk mengajukan proposal penyelesaian fasal itu melalui lobi informal. Awal Oktober perundingan tentang utang dibuka kembali, mengambil tempat di Hotel Hoge Vuurse di Baarn, kota turis di bagian timur Amsterdam. Pada 7 Oktober Cochran datang dengan sebuah memorandum berkenaan dengan sebuah proposal agar Belanda bersedia membatalkan tuntutan utang luar negerinya sebesar 2 milyar gulden, sementara delegasi Indonesia tetap bertanggung jawab memikul utang domestik sebesar 3 milyar gulden. Ujar Cochran, “Saya katakan, kita harus terus berjalan menuju tapal batas di mana semua pihak bersedia berkorban untuk suatu rencana yang memungkinkan perundingan ini bisa mencapai hasil” (Taylor 1975: 242).

Delegasi Belanda bereaksi sengit dan menolak usul Cochran. Perdana Menteri Drees konon memilih mundur dari jabatannya daripada menerima usul Cochran. Menteri Stikker sejalan dengan sikap Drees. Malam hari, masih 7 Oktober, Cochran mencoba mengontak Hatta dan Hamid, minta agar mereka kembali mempelajari memonya dan memberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan dari delegasi Indonesia.

Dalam situasi buntu, delegasi Indonesia berharap kepada UNCI, sebagai pihak ketiga dalam perundingan Indonesia-Belanda, berperan lebih aktif memecahkan persoalan, dan berupaya mencari kompromi tentang pembagian utang Hindia Belanda. Di mata delegasi Indonesia,



Cochran mencoba “memaksa” masuk ke dalam posisi ini sebagai wakil satu-satunya dari UNCI. Namun, sebenarnya Indonesia lebih senang jika Thomas K. Critchley, anggota UNCI dari Australia, yang ikut berunding. Tidak hanya karena Australia menaruh simpati kepada kedudukan Indonesia, tetapi juga karena Critchley dipandang lebih tahu tentang Indonesia daripada delegasi Amerika atau Belgia yang dipegang oleh Herremans sebagai anggota UNCI pilihan Belanda. Ia dianggap kurang berperan dalam perundingan dan bahkan jarang diajak berkonsultasi oleh delegasi Belanda sekalipun.⁴ Lagi pula, di mata delegasi Indonesia, kemampuan Critchley akan dapat mengimbangi anggota UNCI dari Belgia di depan Komisi PBB secara lengkap.

Namun, Critchley sangat tidak disukai delegasi Belanda dan sebaliknya peran Cochran lebih diterima oleh kedua belah pihak. Jelaslah bahwa pandangan ini juga cenderung sejalan dengan pendirian pemerintah Belanda karena Cochran sudah mendapat jaminan persetujuan dari delegasi Belanda untuk bertindak sebagai satu-satunya penengah pihak ketiga sebelum ia mendekati delegasi Indonesia dengan usul ini.

Bagaimanapun, dukungan Amerika terhadap Indonesia pada konferensi di Den Haag itu, di mata delegasi Republik, cukup penting, dan ketergantungan Indonesia sebagai negara baru pada bantuan ekonomi yang dijanjikan Amerika digambarkan cukup besar. Oleh karena itu, mayoritas delegasi Indonesia tidak kuasa menentang permintaan tidak resmi dari Cochran untuk memperoleh kedudukan yang sangat penting itu. Bila Indonesia tetap bertahan dengan pendirian semula, mereka khawatir dukungan Amerika pada konferensi tersebut akan berkurang dan dengan demikian prospek bantuan ekonomi Amerika akan menjadi sirna pula. Delegasi Indonesia menyadari peran sentral yang dimainkan Amerika dan hal itu merupakan harga yang harus dibayar oleh Indonesia

⁴Oey Hong Lie, *War and Diplomacy in Indonesia*, h. 241.

dari suatu kehendak akan pengakuan kedaulatan. Maka dengan getir, delegasi Indonesia mulai melunakkan tuntutan atas Belanda bertalian dengan utang itu. Delegasi Indonesia akhirnya menyetujui 3.400 juta gulden sebagai utang yang harus dipikul, tidak lebih dari itu. Bagaimanapun, baik Cochran maupun delegasi Belanda mendesak agar angka yang disetujui jauh lebih tinggi daripada itu.

Akhirnya pada 24 Oktober, delegasi Indonesia terpaksa setuju bahwa RIS akan mengambil alih utang yang seluruhnya berjumlah sekitar 4.300 juta gulden (hampir 1.130 juta dollar Amerika) dari pemerintah Hindia Belanda. Dari jumlah itu, 3.000 juta gulden di antaranya merupakan utang dalam negeri. Dari 1.291 juta gulden utang luar negeri, 871 juta gulden diduga merupakan utang konsolidasi kepada Negeri Belanda. Sisanya, 420 juta gulden, merupakan utang kepada negara-negara lain. Akan tetapi, Indonesia tidak perlu menggadaikan laba-labanya sebagai jaminan agar utangnya kepada Negeri Belanda dapat terlunasi.

Bagi banyak orang Indonesia, besarnya jumlah utang itu jelas merupakan beban yang sangat berat, bahkan tidak masuk akal, karena harus dipikul ke pundak setiap seorang Indonesia yang sudah lama menderita kehancuran selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang, ditambah empat tahun perang kemerdekaan. Dalam pandangan delegasi Indonesia, ada kesan bahwa usaha Cochran untuk membuka jalan buntu perkara utang ini mengurangi nilai “jasa baik” Amerika untuk Indonesia seperti juga kemampuan Cochran mewakili kepentingan Indonesia dalam masalah lain yang timbul dalam konferensi tersebut. Dugaan bahwa mereka seolah-olah dipaksa membayar sebagian besar biaya operasi militer Belanda melawan Republik sungguh sangat menyakitkan dan mengecewakan bangsa Indonesia. Itu sama artinya dengan membeli kedaulatan sebab pada akhirnya Indonesia harus mengakui utang sebelum kedaulatan diakui Belanda. Lagi pula,



perbedaan sebesar 900 juta gulden antara utang maksimum yang harus harus mereka bayar, bagi banyak orang Indonesia, dianggap sangat tidak sepadan dengan nilai pinjaman Amerika yang beberapa bulan kemudian dikatakan oleh Cochran, duta besar Amerika pertama untuk Indonesia (Taylor 1975: 437, dst.).

UTANG REZIM KURUN 1950-AN DAN SESUDAHNYA

Memasuki tahun 1950-an, Indonesia menemukan dirinya sebagai negara yang ‘berdaulat’, tetapi harus memikul beban utang warisan kolonial dipundaknya. Tentu saja masalah ‘*transfer burden of national debt*’ (pengalihan beban utang nasional) yang dibuat Belanda kepada Indonesia, hanyalah sebagian kecil dari timbunan persoalan bangsa pada tahun-tahun pertama 1950-an.⁵ Pemerintahan negara yang baru berdaulat itu harus menghadapi pekerjaan rumah yang demikian berat. Ibarat mesin ‘baru’ yang dipasangkan ke mobil tua, kini Ratu Juliana harus pindah dari kursi ‘driver’, dan Presiden Sukarno, menggantikannya. Rem dan persnelingnya masih tetap sama. Tentu masih perlu dibuktikan apakah sopir baru dapat mengubah, tidak hanya laju kendaraan, tetapi yang jauh lebih penting lagi ialah *arahnya* ke depan.

Dalam konteks tahun 1950-an, agaknya tidak diperlukan analisis yang rumit untuk menjelas mengapa Indonesia harus berutang.⁶ Terhitung sejak awal 1950-an, pemerintah negara baru itu harus memikul dua jenis hutang luar negeri (i) utang warisan Hindia-Belanda sebesar f4.300 juta gulden (US\$1.130 juta), (ii) ditambah dengan utang luar negeri yang baru sebesar 2,3 milyar, khususnya untuk membiayai kekurangan (defisit) belanja rutin dan penghasilan retribusi untuk anggaran tahunan (*annual* Sumitro Djojohadikusumo (1953: 17).

⁶ Sekedar uraian pengantar tentang teori utang lihat Bachrum Elmi dan Syahrir Ika, “Hutang sebagai Salah satu Sumber Pembangunan Daerah Otonomi” dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2002), pp. 57-80.

budget). Antara tahun 1950-1956, utang baru yang dibuat pemerintah Indonesia, masing-masing berjumlah 3,8 miliar rupiah (1950), 4,5 miliar rupiah (1951), 5,3 miliar rupiah (1952), 5,2 miliar rupiah (1953), 5,2 miliar rupiah (1954), 5,0 miliar rupiah (1955), dan 2,9 miliar rupiah (1956).⁷ Sejak itu pemerintah Indonesia menjadi pelanggan setia utang luar negeri dari tahun ke tahun (data utang rezim terlampir).

Jumlah utang luar negeri Indonesia terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari suatu rejim ke rezim berikutnya, dengan beberapa kekecualian. Baik rezim Orde Lama, dan terlebih lagi rezim Orde baru atau pun rejim-rejim sesudahnya (sebut saja Rezim Reformasi) makin terbiasa berutang untuk membiayai pembangunan, sehingga nyaris tak pernah terjadi upaya pengurangan utang, kecuali di zaman Gus Dur yang singkat. Namun secara keseluruhan Indonesia semakin terjatut utang dari satu rezim ke rezim berikutnya hingga sekarang.

Selama 16 tahun pemerintahan Presiden Sukarno sejak pengambilalihan kedaulatan dan utang dari tangan Belanda (1950-1966), Indonesia praktis terperangkap utang “warisan” Hindia Belanda ditambah dengan utang-utang baru.⁸ Presiden RI pertama itu pada dasarnya bersikap anti-utang. Ini antara lain terlihat dari pernyataan-pernyataan politiknya yang tegas tentang politik “Berdikari”. Pernyataannya yang terkenal “*Go to hell with your aid*” terkait erat dengan campur tangan IMF pada kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963-1966. Walaupunpun rezim Orde Lama sebenarnya tidak bebas dari gejala korupsi, Presiden RI pertama itu tak syak lagi adalah seorang nasionalis sejati yang berpendirian teguh dan berani dalam mengambil sikap tegas atas setiap intervensi asing.

Pada masa Orde Baru Soeharto (1966–1998) utang dikategorikan penerimaan negara selain pajak. Utang umumnya digunakan untuk membiayai program-program “pembangunan” pemerintah. Namun selama

⁷Higgins (1957); lihat juga data statistik KAU tentang Utang Luar Negeri Indonesia (2006).

⁸Harian *Republika* (17/4/2006), mencatat jumlah utang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno sebesar 6,3 miliar dollar AS, terdiri dari 4 miliar dollar AS adalah warisan utang Hindia Belanda dan 2,3 miliar dollar AS adalah utang baru. Tetapi angka tersebut hanyalah perhitungan awal 1950-an. Pada tahun-tahun sesudah Pemilu 1955 sebenarnya masih terjadi transaksi utang luar negeri RI, terutama dengan negara-negara blok Timur (Higgins 1956; lihat juga Adam 1991).



32 tahun berkuasa, pemerintahan Orde Baru berwatak sangat sentralistik dan sering disindir berasaskan “Asal Bapak Senang” (ABS), sehingga masalah utang negara adalah “tabu” untuk dibicarakan. Akibatnya, pengelolaan utang negara pun menjadi rahasia segelintir orang. Ketika ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi tingkat kebocoran anggaran pembangunan lebih dari 30 persen” (*Media Indonesia*, 13/11/1996), banyak orang terkejut karena keberaniannya menyatakan pendapat. Meskipun tidak merinci pernyataannya itu, yang membuat DPR pernah memanggilnya tetapi ditolak, publik dapat menyimpulkan rahasia umum itu: gejala KKN.

Penulusuran yang lebih terbuka sejak beberapa waktu belakangan ini malah menyebut jumlah 30 persen itu memang dikorupsi oleh pejabat yang bersekongkol dengan pengusaha. Seorang pengamat bahkan berani mengatakan bahwa utang luar negeri di zaman Suharto, meski tidak seluruhnya, adalah “utang kriminal”. Dengan “utang kriminal” (*criminal deb*) dimaksudkannya utang-utang yang dibuat dan dibebankan secara tidak adil, baik karena mekanisme peminjamannya, maupun karena dimaling oleh pejabat dan kroni bisnisnya atau karena utang yang dibuat untuk menyelamatkan ekonomi suatu negara digero-goti oleh perilaku kriminal elit berkuasa (Winter 2000). Lebih jauh ia membedakan antara “utang kriminal” dengan *odious debt* (“utang najis” atau “utang haram”). Utang kriminal adalah utang publik, yang disalahgunakan untuk kegiatan bisnis ilegal dan/atau dimaling atau dialihkan untuk memperkaya individu atau usaha bisnis dari hasil utang tersebut. “Utang najis” terkait dengan hukum internasional, di mana transaksi utang berada di bawah tekanan politik yang tidak adil dari negara atau lembaga keuangan internasional

sebagai kreditor.⁹ Dalam konteks *odious debt* ini terdapat semacam jaringan utang-piutang antara negara kaya dan miskin ini yang diperankan oleh “preman ekonomi” (*economic hitman*). Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, melakukan tekanan-tekanan politik dan pemerasan terhadap pemimpin negara-negara miskin di dunia ketiga melalui instrumen utang dan bantuan proyek pembangunan. Perangkap utang dilakukan dengan berbagai modus. Lazimnya bermuara pada pengurasan sumber daya alam negara debitor dan bagi-bagi ‘rejek’ di antara para pelakunya.¹⁰

Bagaimanapun caranya, yang jelas semua jenis utang luar negeri atau demestik harus dibayar oleh rakyat, mayoritas yang rata-rata masih miskin. Lebih ironis lagi, jumlah cicilan utang luar negeri zaman Orde Baru, menurut sebuah laporan, jauh lebih besar daripada yang dikucurkan untuk proyek air bersih, kesehatan dan pendidikan untuk rakyat “negeri doyan pengutang” (Pettifor 2002). Sampai 1998, dari total utang luar negeri sebesar US\$171,8 miliar, hanya sekitar 73 persen yang terserap atau dapat disalurkan ke dalam bentuk proyek dan program, sedangkan sisanya (27 persen) menjadi pinjaman yang menguap dan tidak efektif.

Rezim di Era Reformasi meneruskan tradisi utang. Baik pada masa Habibie, maupun para penggantinya kemudian (Gus Dur, Megawati dan SBY yang sedang berkuasa sekarang) masih layak disebut “rezim pengutang”, yang setia menjadi pelanggan utang luar negeri, baik kepada IMF, Bank Dunia dan ADB, maupun utang bilateral antara negara tertentu

⁹Lebih jauh dikatakan, “Criminal debt is distinct from “odious debt.” Odious debt in international law is defined as loans accumulated by an unrepresentative and oppressive government which are used to repress a country’s citizens. It does not matter if the loans were used according to prevailing law or were stolen or misallocated by officials. Most criminal debt is also odious debt, but not all odious debt is criminal debt. Also, odious debts are exclusively external. Criminal debts can consist of both foreign and domestic debt. In the Indonesian case, significant parts of the country’s foreign debts are criminal. But much of the public debt to bail out the domestic banking sector is also criminal debt because the debt was caused by criminal behavior by bankers and corporations (Winter *ibid*).

¹⁰Persekongkolan dan kerja ‘busuk’ ini diungkapkan berdasarkan pengakuan salah seorang pelakunya seperti ditulis oleh John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, 2004).



(Jepang, Amerika Serikat, Jerman dan lain-lain). Masing-masing era tentu memiliki kondisi spesifik masing-masing. Masa pemerintahan B. J. Habibie (1998–1999) merupakan pemerintahan transisi dari Orde Baru menuju era Reformasi. Meskipun Habibie hanya memerintah kurang lebih setahun, pemerintahannya terjebak dengan krisis moneter dan sekaligus “krisis utang”, yang menghempaskan perekonomian Indonesia ke tingkat yang sangat parah.

Adalah pengganti Habibie, yakni Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, (1999–2001) yang memikul utang yang makin membengkak. Bukan karena regim Gus Dur bernaftsu menggenjot utang negara, melainkan karena imbas badai “krismon” yang berdampak langsung terhadap kenaikan nilai nominal tingkat utang Indonesia yang sulit dibayangkan. Dalam tempo dua tahun sejak 1998 sampai tahun 2000 ratio utang Indonesia terhadap PDB melonjak drastis dari 23 menjadi 89 persen. Menurut catatan Winter (2000), “tidak ada negara di dunia yang mengalami kenaikan massif utangnya dalam jangka pendek sejak PD II, kecuali Indonesia.” Sejak itu Indonesia terkenal dengan reputasi negara pengutang ‘rangking atas’ di dunia. Namun perlu dicatat, pada masa Gus Dur tidak terjadi pembuatan utang baru, malah sanggup membayarnya sebagian. Pemerintahan Gus Dur malah mencatatkan hal yang positif dalam soal utang, yaitu terjadi penurunan jumlah utang luar negeri sebesar 21,1 miliar dollar AS, dari 178 miliar dollar AS pada 1999 menjadi 157,3 miliar dollar AS pada 2001.

Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung selama tiga tahun (2001–2004) banyak terjadi kasus-kasus yang kontroversial tentang utang, antara lain terkait dengan penjualan aset negara dan BUMN dan pembelian pesawat Sukoi. Masih terkait dengan imbas dari krisis moneter pada 1998/1999 pada masa pemerintahannya, privatisasi terjadi lebih gencar guna menutupi utang negara yang makin membengkak. Demikian gencarnya, sehingga BUMN yang sehat sekali pun seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah pun ikut diprivatisasi. Bagi

Menurut Megawati dan pembantunya, itulah satu-satunya cara untuk menutup defisit APBN. Selama tiga tahun pemerintahan ini privatisasi BUMN mendatangkan tambahan untuk APBN, masing-masing nilai 3,5 triliun rupiah (2001), 7,7 triliun rupiah (2002), dan 7,3 triliun rupiah (2003). Jadi, totalnya 18,5 triliun rupiah. Alhasil, selama masa pemerintahan Megawati privatisasi dimaksudkan untuk menekan pembuatan utang baru. Namun, pada tahun terakhir pemerintahannya (2004), utang Indonesia terus meningkat sampai 1.299,5 triliun rupiah. Rata-rata peningkatan utang pada tiga tahun pemerintahan Megawati adalah sekitar 25 triliun rupiah tiap tahunnya.

Akhirnya dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Era SBY I (2004–2009), utang luar negeri Indonesia meningkat menjadi 170.785 juta dollar AS (pemerintah 98,859 juta dollar dan swasta 71.926 dollar). Presiden kita yang sabar dan memelihara citra di depan publik menghendaki negeri ini semakin maju. Dalam Pidato Presiden di depan Sidang Paripurna DPR tentang RAPBN 2011 dan Nota Keuangan dikesankan terjadinya penyehatan perekonomian nasional dengan menunjukkan data penurunan rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Dengan mematok PDB sebesar 6.253,79 triliun rupiah, rasio utang RI turun dari 27,8 persen (APBN 2010) menjadi 26 persen (APBN 2011). Meskipun demikian, faktanya adalah bahwa utang luar negeri Indonesia semakin membengkak dari tahun ke tahun. Pada semester pertama 2010, utang RI bertambah menjadi 34,97 triliun rupiah dari posisi 2009 sebesar 1.590 triliun rupiah jadi 1.625 triliun rupiah (*Kompas*, 26/6/2011). Lebih mengejutkan lagi, selama 5 tahun terakhir sejak 2005 hingga 2009, akumulasi beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai 879,22 triliun rupiah. Untuk 2010 saja, misalnya, pemerintah harus membayar cicilan utang pokok dan bunga sebesar 237 triliun rupiah. Jumlah ini hampir separuh anggaran belanja negara yang hanya 725 triliun rupiah.



Akan tetapi pencitraan seperti itu juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2009, Menteri Keuangan, sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian, Sri Mulyani memberikan ilustrasi untuk menunjukkan prestasi kabinetnya dengan data penurunan ratio utang Indonesia terhadap PDB dari 100 persen pada 1999 menjadi 61 persen tahun 2003, 33 persen tahun 2008. Untuk lebih meyakinkan argumennya ia juga memberikan ilustrasi tentang ratio utang negara-negara maju (Jepang, Inggris dan Amerika) terhadap PDB negara, yang cenderung terus menaik antara 2003–08. Gambaran ini kelihatan menggembirakan. Namun ia lupa atau mungkin sengaja melupakan bahwa ratio utang terhadap pendapatan perkapita penduduk negara-negara maju itu tetap tinggi. Celaknya lagi dengan argumen dan data angka yang disodorkannya itu, ia tampaknya cukup merasa nyaman untuk menyimpulkan bahwa kenaikan utang Indonesia masih dalam batas yang wajar dan “bukanlah bencana”.

Kesimpulan yang terkesan pembiaran berlanjutnya kebiasaan berutang itu telah membuat aktivis KAU (Koalisi Anti Utang) berang dan membalasnya lewat suatu konferensi pers yang menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan tersebut yang seakan-akan membodohi publik.¹¹ Sejauhini, protes publik terhadap kebijakan utang tampaknya tidak diindahkan karena faktanya dari tahun ke tahun utang terus bertambah atas nama menutup defisit biaya pembangunan. Barangkali ke depan seruan yang lebih efektif untuk menghentikan kebiasaan berutang bergeser kepada himbauan agar Indonesia berhenti melakukan ‘pembangunan’. Kerusakan fundamental negeri ini bukan terletak pada kerusakan fundametal ekonomi, tetapi pada hal-hal yang lebih fundamental yang bersifat non ekonomik, berkenaan dengankarakter kepemimpinan yang makin kehilangan identitas kesejarahan bangsa. Meminjam terminologi yang digunakan oleh Higgins (1957: 101), antagonisme kepemimpinan bangsa hari ini dan kepemimpinan Indonesia hari ini semakin “*intact*”, yakni antara kepemimpinan yang peduli sejarah (*history-minded*) dan kepemimpinan berwajah *economic minded*

¹¹Padang Ekspres, 16 Juni 2009.

atau *developmen-minded*. Yang pertama ingin menciptakan Indonesianisasi ekonomi warisan kolonial (ekonomi nasional), dengan paradigma “rakyat first”, yang kedua secara esensial berorientasi Barat, dengan paradigma kapitalisme dan lebih khusus neoliberalisme yang serakah dan siapa kuat siapa di atas (lihat Sritua Arief, 2000). Lantas apa yang dapat dikatakan dengan kemajuan perekonomian bangsa setelah penyerahan kedaulatan?

KESIMPULAN

Dalam keseluruhan rangkaian proses dialektik pembangunan ekonomi setelah penyerahan kedaulatan melalui utang sebagaimana yang diuraikan di atas, beberapa catatan kesimpulan berikut ini, masih bersifat tentatif. Pertama, Indonesia merdeka karena pengalaman dan kesadaran sejarah bangsa tertindas alias terjajah. Atas dasar itulah mereka berfikir dan berjalan melakukan pembangunan ekonomi ke depan, yaitu mengubah struktur ekonomi kolonial warisan Hindia-Belanda menjadi ekonomi berwajah nasional, yakni keberpihakan untuk melindungi segenap hak-hak rakyat banyak sejalan dengan konstitusi 1945. Karena itu prasyarat merdeka bagi pemimpin bangsa generasi pertama ialah adanya kedaulatan. Itulah taruhan identitas *the truly national leadership* para penyelenggara negara generasi pertama. Selama kedaulatan dan kemandirian tidak dimiliki, maka ekonomi Indonesia, dalam pandangan ini, tidak akan ada perubahan dan sebaliknya akan tetap dalam kubangan ekonomi kolonial. Ekonomi kolonial, seperti diingat Presiden Sukarno, memiliki tiga ciri berikut: (i) negara jajahan Indonesia merupakan sumber bahan baku bagi negara-negara industri; (ii) tempat melemparkan barang-barang hasil industri mereka; dan (iii) tempat berinvestasi bagi modal negara-negara industri tersebut (Revorison 2006; Weinstein 1976: 213).

Setelah lebih 60 tahun Indonesia memegang kedaulatannya sejak awal 1950, apakah ekonomi Indonesia merdeka apakah sudah terjadi perubahan yang substansial, baik laju kecepataannya mau pun arahnya.



Secara kuantitatif, tak syak lagi, sudah banyak perubahan dan jatuh bangun pembangunan ekonomi Indonesia selama ini mengakibatkan negeri bekas jajahan itu masih jauh dari tujuan nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *blue-print* Indonesia Merdeka. Secara kualitatif dan struktural ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan substansial karena ketidakmampuan atau tidak ada niat untuk keluar dari struktur ekonomi kolonial. Sebagai konsekuensinya, maka tidaklah begitu mengherankan jika persneling pembangunan perekonomian Indonesia yang mengandalkan utang itu tidak hanya tidak mampu memacu kecepatan yang lebih tinggi, tetapi juga kehilangan arah dari apa yang sudah menjadi komitmen sejarah. Bukti-bukti empirik tentang ini masih bisa diperdebatkan, tetapi substansinya bisa dilihat dari tiga kecenderungan pokok berikut ini. *Pertama*, Pulau Jawa dengan Batavia lama (Jakarta) di masa lalu, meminjam istilah Harry J. Benda, tetap merupakan *a cradle of Dutch colonialism* (tempat buaian kolonialisme Belanda) dan Indonesia Merdeka meneruskannya tanpa mampu membuat atau mengubah peta ekologi bagi pembangunan bangsa paska kolonial, sehingga Jawa makin tergerus dengan involusi pertanian. *Kedua*, erat kaitannya dengan yang pertama, sampai hari pemerintah Indonesia dan rakyatnya masih gemar menjual hasil yang mentah-metah, baik hasil pertaniannya maupun deposit meniralnya, sehingga negeri ini hanya berperan menjadi penyedia bahan baku dunia industri maju dan sebaliknya menjadi surga pasar konsumen untuk semua produk luar. Indonesia hari ini bahkan kembali menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing.¹²

Ketiga, Indonesia hari ini, layak disebut sebagai “negara pengutang” karena sejak kelahirannya, mendapatkan kedaulatan dengan utang, lahir dan hidup sampai mati dengan utang. Tiap jiwa orang Indonesia yang bernyawa (tidak termasuk yang meninggal, baik karena gantung diri atau

¹²Tentang data neraca pembayaran menunjukkan bahwa selama ini nilai kumulatif arus masuk investasi asing jauh lebih rendah nilainya dari keuntungan investasi asing yang direpatriasi keluar negeri, termasuk investasi asing dalam *portfolio*, lihat Sritua Arief (1987).

tewas di negeri orang, menemukan dirinya terutang antar 6 sampai 7 juta (data 1999-2003). Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, Indonesia masuk negara pegutang keenam tertinggi dunia setelah India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki. Indonesia makin sulit keluar kubangan utang karena terperangkap dengan apa yang disebut *Fisher paradox* dalam hubungannya dengan hutang luar negerinya, yaitu bahwa semakin banyak cicilan hutang luar negeri dilakukan makin besar akumulasi hutang luar negerinya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa cicilan plus bunga hutang luar negeri secara substansial justru dibiayai oleh hutang baru. Oleh karena nilai cicilan plus bunga hutang luar negeri lebih besar dari nilai hutang baru, maka terjadilah apa yang disebut *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing. Jadi utang terus dan terus berutang.



LAMPIRAN

Tabel
Perkiraan Posisi Utang Luar Negeri Indonesia 1949–2010
(termasuk utang pemerintah dan swasta dalam dollar AS)

Nama Presiden	Lama Memerintah	Jumlah Utang Sebelumnya	Total dlm Era Pemerintahan
Sukarno	1945-1966 (21 Tahun)	4 miliar * + 2,3 miliar	?
Suharto	1966-1998 (32 Tahun)	? + 171.8 miliar	171.8 miliar
B. J. Habibie	1998-1999 (1 tahun lebih)	171.8 miliar + 6,6 miliar	178,4 miliar
Abdurrahman Wahid	1999-2001 (2 tahun)	178,4 miliar - 21,2 miliar	157,2 miliar
Megawati Sukarnoputri	2001-2004 (3 tahun)	157,2 miliar + 3,37 miliar	160,5 miliar
Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2010 (6 tahun)	160,5 miliar + 14.9 milyar dolar	per Maret 2010 174,89 miliar

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

Tabel
Utang Luar Negeri Pemerintah 1966-2000
(dalam juta Dollar AS)

Tahun	Total Utang	Tahun	Total Utang	Tahun	Total Utang
1966	2.015	1978	11.330	1990	45.100
1967	2.076	1979	11.775	1991	45.725
1968	2.174	1980	12.994	1992	48.769
1969	2.437	1981	13.945	1993	52.462
1970	2.778	1982	16.767	1994	58.616
1971	3.225	1983	19.953	1995	59.588
1972	3.617	1984	21.589	1996	55.303
1973	4.426	1985	25.321	1997	53.865
1974	4.851	1986	31.521	1998	67.315
1975	6.611	1987	38.417	1999	75.720
1976	8.295	1988	38.983	2000	74.891
1977	9.654	1989	39.577		

Cyrrllus Harinowo (2002: 39).

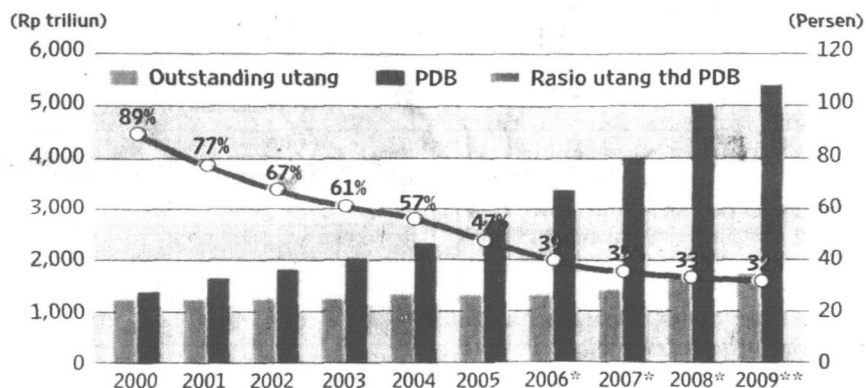
Tabel 1. SEPULUH NEGARA PENGUTANG TERBESAR 1998

No.	Negara	Utang LN		ULN/kapita	Nilai Kini
		1990 (US\$ billion)	1998	1998 (US\$)	ULN thd PDB (%)
1.	Brazil	120	232	1,360	29
2.	Rusia	60	183	1,200	62
3.	Mexico	104	159	1,600	39
4.	China	55	154	130	15
5.	Indonesia	70	150	750	169
6.	Argentina	63	144	3,900	52
7.	Korea Selatan	35	139	2,950	43
8.	Turki	49	102	1,590	49
9.	India	83	98	100	20
10.	Thailand	28	86	1,390	79

Sumber: World Development Report 2000/2001 (diolah oleh Revrisond Baswir)

(Dikutip dari Revrisond Baswir, "Utang dan Imperialisme," *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th. I, No. 3, Mei 2002).

Grafik
Rasio Utang Rezim terhadap PDB



* Angka sementara, ** Angka proyeksi

Sumber: Departemen Keuangan

BESTARI

Sumber: *Kompas*, 17 Juni 2009

Reorganisasi Militer Belanda-Prancis di Hindia Timur Pada Awal Abad Ke-19

DJOKO MARIHANDONO
UNIVERSITAS INDONESIA

Dalam sejarah Indonesia, awal abad ke-19 merupakan masa yang amat penting. Pada masa itu, wilayah koloni Hindia Timur berada di bawah kekuasaan tiga negara adidaya di Eropa, yakni Republik Bataf (1795–1808), Kekaisaran Prancis (1806–11), dan pemerintahan Inggris (1811–16). Situasi politik di Hindia Timur sebelumnya—akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19—sangat sulit sebagai akibat dari perseteruan antara Inggris dan Prancis di Eropa. Perseteruan kedua negara adidaya itu berdampak di Hindia Timur berupa blokade laut yang dilakukan oleh Inggris atas Pulau Jawa. Dengan blokade itu, pemerintahan di Belanda berupaya memperkuat Pulau Jawa dengan cara melakukan organisasi militer di wilayah koloni tersebut.

Tulisan ini membahas persoalan reorganisasi militer Belanda-Prancis di Hindia Timur tersebut. Uraian diawali dengan deskripsi tentang pembentukan Republik Bataf di Negeri Belanda pada 1795. Republik Bataf merupakan negara satelit yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Prancis. Pembahasan dibatasi hingga 1811 (tepatnya 18 September) ketika wilayah koloni Hindia Timur secara resmi menjadi milik Inggris sebagai konsekuensi persetujuan Kapitulasi Tuntang.

KEKUASAAN PRANCIS DI BELANDA

Menjelang akhir abad ke-18, terjadi peristiwa besar di Negeri Belanda. Pasukan Patriot yang dibantu oleh Prancis berhasil mendesak Stadhouder Willem V yang saat itu dibantu oleh pasukan Wurtemberg. Pada 17 Januari 1789 pagi, Willem V berangkat melalui Scheveningen menuju Texel untuk selanjutnya mengungsi ke Inggris. Kaum Patriot yang dibantu oleh

pasukan Prancis di bawah pimpinan Jenderal Pichegru berhasil menguasai kota-kota penting di Belanda dan memproklamasikan pembentukan negara baru yang disebut Republik Bataf (*Bataafsche Republiek*) pada 19 Januari 1795. Selanjutnya, Komite Revolusioner Bataf mengumumkan konstitusi baru Republik Bataf pada 4 Maret 1795. Dalam konstitusi itu disebutkan bahwa bentuk pemerintahan Belanda adalah republik kesatuan. Dalam konstitusi itu juga disebutkan bahwa pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan yang anggotanya diangkat oleh Komite Revolusioner Bataf. Dewan ini dipimpin oleh mantan pengacara Amsterdam, Jan Rutgers Schimmelpenninck, dengan jabatan *Raadpensionaris*.

Akibat ekspansi Napoleon Bonaparte di Eropa, posisi Belanda menjadi sangat penting. Belanda merupakan satu-satunya akses bagi Inggris untuk mendaratkan pasukannya di Eropa. Oleh karena itu, Kaisar Napoléon Bonaparte melihat betapa penting posisi Belanda bagi Prancis. Setelah beberapa kali wilayah Belanda digempur oleh armada Inggris, pada 5 Juni 1806, Kaisar Napoleon memanggil anggota parlemen Republik Bataf ke Istana Tuilleries di Paris. Dari hasil pertemuan itu, Kaisar Napoleon memutuskan mengubah sistem pemerintahan di Negeri Belanda dari republik menjadi kerajaan. Perubahan sistem pemerintahan ini bertujuan memudahkan koordinasi dalam bidang militer, politik dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam upaya menghadapi Inggris. Secara terus-terang Napoleon mengatakan bahwa tidak ada seorang pun mampu memimpin Belanda saat itu.¹ Ia akan menyerahkan kekuasaan wilayah Belanda kepada orang Prancis yang teah teruji kesetiaan dan kemampuannya. Pilihannya adalah Louis Napoleon Bonaparte, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Saat itu, Louis masih aktif dalam dinas ketentaraan Prancis Grande Armée dan berpangkat Jenderal. Singkat kata, Louis dilantik menjadi Raja Belanda. Satu minggu kemudian, tepatnya 23

¹Sebelum mengangkat Louis, Napoleon telah memberitahukan kepada lima orang utusan Belanda tentang jabatan *Stadhouder* bagi Louis sebagai pengganti Schimmelpenninck. Namun utusan Belanda menolaknya. Dengan traktat baru, bentuk pemerintahan republik diubah menjadi kerajaan. Berdasarkan traktat itu, konstitusi baru dibuat yang mengesahkan kedudukan Louis sebagai raja Belanda (Bonaventura 1905: 300).



Juni 1806, Raja Louis dan permaisurinya Hortense tiba di Den Haag dan memulai pemerintahannya.

Namun, harapan Napoleon Bonaparte terhadap Louis tidak menjadi kenyataan. Meski berhasil menguasai wilayah Spanyol, Napoleon dan pasukannya tidak mampu menaklukkan pasukan gerilya Spanyol. Untuk menumpasnya, ia memerintahkan kepada Raja Louis untuk mengirimkan tiga ribu serdadu Belanda yang berakibat kekuatan personel Belanda yang berjumlah 9 ribu orang menjadi berkurang. Inggris yang mengetahui hal itu segera mendaratkan pasukannya di Belanda Utara. Dengan pasukan berkekuatan 40 ribu personel yang diangkut dalam 264 kapal perang, Inggris mendarat di pantai barat Belanda pada Juli 1809. Mereka menduduki Zeeland, Pulau Walcheren, dan setelah terjadi pertempuran sengit selama 17 hari, Inggris berhasil menguasai Vlissingen pada 15 Agustus 1809.

Kekalahan Belanda itu dilaporkan kepada Napoleon. Namun, Napoleon menuduh Louis telah berbuat lalai dan menduganya sebagai “mata-mata Inggris.” Sejak itu, terjadi konflik antara Napoleon dan Louis. Perselisihan ini semakin meruncing dan mengarah pada gagasan Napoléon menganeksasi wilayah Belanda dan menyatukannya ke dalam wilayah Prancis. Louis keberatan dengan rencana itu dengan alasan bahwa Belanda tetap memiliki hak sebagai negara merdeka, bukan sebagai negara boneka Prancis. Di sisi lain, Napoleon melihat lokasi geografi Belanda merupakan pintu gerbang menuju Prancis bahkan ke daratan Eropa. Dengan pertimbangan itu, ia beranggapan lebih tepat apabila Belanda langsung dikendalikan dari Paris untuk memudahkan koordinasi dalam strategi pertahanan militernya. Pada 9 Juli 1810, ia memerintahkan pasukan Prancis menduduki Amsterdam.² Keesokan harinya Napoleon mengumumkan bahwa sejak 10 Juli 1810, Belanda menjadi bagian dari Prancis.³ Dengan pengumuman itu, Louis tidak lagi menjabat sebagai raja Belanda.

²Sebelumnya telah dilakukan kesepakatan antara Napoleon dan adiknya Louis di Istana Rembouillet pada 16 Maret 1810 untuk menjaga pentingnya wilayah Belanda bagi Prancis dan konsekuensi yang akan diterima oleh Louis apabila membiarkan armada Inggris mendarat di Belanda.

³Sejak saat ini semua hukum Prancis diberlakukan di Belanda. Wilayah Belanda langsung dibawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Sistem pemerintahan mengikuti Prancis (Brugmans, t.t.: 146).

Berita tentang penghapusan kerajaan Belanda tersebut diterima secara resmi oleh Gubernur Jenderal Daendels di Batavia pada Februari 1811 melalui surat yang dikirimkan Menteri Angkatan Laut dan Koloni kepadanya. Sebenarnya, Daendels telah menerima berita aneksasi Belanda itu melalui pelaut Amerika dan dari surat kabar. Dengan demikian, ia semakin yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Inggris pasti akan menyerang Pulau Jawa. Untuk menghadapi ancaman Inggris itu, ia menyusun strategi pertahanan dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa.

HINDIA TIMUR ANTARA AKHIR ABAD KE-18 DAN AWAL ABAD KE-19

Ketika negara induk mengalami pergolakan yang berakhir dengan pergantian pemerintahan (dari *stadhouder* ke republik), wilayah koloni di Tanjung Harapan dan Hindia Timur mengalami situasi yang amat buruk. Kekuatan armada VOC menjelang akhir abad ke-18 tidak dapat diharapkan lagi untuk mempertahankan wilayah koloni. Kondisi itu menyebabkan VOC tidak mampu lagi bersaing dengan armada negara Eropa lainnya. Kapal dan persenjataan VOC kebanyakan sudah berumur lebih dari satu abad dan tidak pernah diperbarui karena ketiadaan anggaran untuk. Kondisi wilayah koloni sangat tergantung pada negara induk.

Menjelang akhir abad ke-18, VOC harus bersaing ketat dengan perusahaan asing lainnya di Asia, yaitu East India Company (EIC), kongsi dagang Inggris yang berpusat di Calcutta, dan *Compagnie des Indes*, kongsi dagang Prancis yang berpusat di Madras.⁴ Dengan demikian, persaingan dagang di perairan Asia dan Afrika meningkat tajam. Persaingan itu tidak hanya menyangkut bidang ekonomi, tenaga kerja, harga komoditi, tarif angkutan dan bea cukai, tetapi mengarah kepada ancaman akan monopoli masing-masing kongsi dagang tersebut. Dengan demikian,

⁴*Compagnie des Indes* dibentuk oleh Raja Louis XV, yang memiliki mayoritas saham dan menjadi investor utama dalam pembentukan kongsi dagang ini (Romier 1948: 279).



upaya melakukan monopoli sudah tidak dapat lagi dipertahankan bahkan menjadikan suasana tegang dan konflik di wilayah koloni. VOC tidak dapat menghindarkan diri dari situasi itu. Ancaman utama datang dari para pedagang EIC yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Inggris di London dan menjadikannya sebagai ujung tombak penguasaan wilayah koloni baru di kawasan timur Tanjung Harapan, termasuk wilayah koloni Hindia Timur. Berpusat di Calcutta, EIC memperluas pengaruhnya di daerah sekitarnya, terutama wilayah yang dikuasai Prancis. Sementara itu, EIC juga berhasil memperluas wilayahnya hingga daerah Benggala dengan berakhirnya kekuasaan dinasti Mongol pada 1744 (Price 1955: 400). Dengan dibantu oleh Angkatan Laut Inggris (*Bristh Navy Admiralty*), armada laut EIC menjadi kekuatan yang tidak tertandingi di lautan Afrika maupun Asia. Kehadiran armada ini menjadi ancaman utama bagi jaringan perdagangan VOC yang terbentang dari Samudra Hindia sampai Asia Timur.

Seiring dengan naiknya kekuatan tempur armada Inggris di Afrika dan Asia, kekuatan tempur VOC mengalami kemerosotan yang sangat tajam sehingga tidak mampu mempertahankan kekuatannya seperti pada abad ke-17. Proses penaklukan yang dilakukan oleh VOC tidak mendapatkan dukungan finansial dari para pemilik saham. Mengingat keinginan menambah kekuatan di Hindia Timur sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan, perekrutan tentara dilakukan dengan menambah tentara yang berasal dari tenaga pribumi lokal atau dari wilayah pulau-pulau di sekitarnya. Perekrutan tenaga lokal ini jauh lebih murah biayanya. Sebagian tenaga lokal juga diperoleh dari bantuan raja lokal yang disebut *hulptropen*.

Namun, kekuatan VOC tidak dapat diharapkan lagi ketika menghadapi ancaman pasukan Inggris yang telah beberapa kali mengganggu penduduk di pantai. Hal itu tidak dapat dicegah karena keterbatasan kapal milik VOC, yang kebanyakan sudah satu abad dan tidak dirawat, anak buah kapal yang tidak terampil, persenjataan yang sudah kuno dan berkarat. Hal itulah yang menyebabkan kekalahan Belanda dalam Perang Laut

Tujuh Tahun (1756–63), armada VOC di Samudra Hindia dihancurkan oleh armada EIC. Perang itu sebenarnya bertujuan mengalahkan kekuatan maritim Prancis dan merebut monopoli maritim VOC, maka Inggris tidak meneruskan penyerangannya ke Hindia Timur. Dengan peristiwa ini, kapal-kapal Inggris bebas berlayar di semua perairan Hindia Timur, yang sekaligus mengakhiri dominasi laut VOC di wilayah koloninya.

Dalam sejarah VOC di Hindia Timur, pernah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Ketua Dewan Hindia (*Raad van Indie*) Gustaaf Willem Baron van Imhoff terhadap Gubernur Jenderal Valckenier. Van Imhoff menuduh Gubernur Jenderal Valckenier sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pemberontakan Cina di Batavia yang menyebabkan terbakarnya kota Batavia. Akhirnya Valckenier dipecat dan *Heeren XVII* atas izin raja Belanda Willem II yang saat itu menjadi *stadhouder* melantik Baron van Imhoff sebagai gubernur jenderal. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan rencana Valckenier untuk membentuk satuan wilayah baru di Jawa, yaitu pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa (*gouvernement van Noordoostkust Java*) dan Ujung Timur Jawa (*Oosthoek van Java*).⁵ Pembentukan wilayah administrasi atas Pulau Jawa adalah agar dapat dibentuk wilayah yang semakin baik, dan dapat dengan mudah dikontrol oleh pemerintah di Batavia. Kedua wilayah itu dipimpin oleh seorang gubernur. Namun, wilayah ini menimbulkan persoalan baru karena utusan dari Republik Batavia (Nederburgh) tidak berhasil menyingkirkan para koruptor di wilayah ini.

Membaca laporan tersebut Jan Rutger Schimmelpenninck merasa perlu untuk melakukan reorganisasi di wilayah ini. Menjelang tahun 1800,

⁵Wilayah Administrasi Pantai Timur Laut Jawa dibubarkan pada masa pemerintahan Daendels berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal pada 17 Mei 1808. Gubernur Pantai Timur Laut Jawa saat itu dijabat oleh Nicolas Engelhard. Ia dicopot dari jabatannya oleh Daendels dan wilayahnya digabungkan dengan wilayah Batavia yang berada di bawah tanggung jawab gubernur jenderal (Stapel 1940:38-39). Penghapusan wilayah ini disetujui oleh Menteri Perdagangan dan Koloni Van der Heim yang menyatakan bahwa Nicolas Engelhard telah memperlambat tugas-tugas Gubernur Jenderal. Sementara berdasarkan alasan Gubernur Jenderal membubarkan wilayah administratif ini karena lahannya sangat luas, bantuan keuangan diberikan ke wilayah ini sebesar 700.000 ringgit, tetapi uang yang disetorkan kembali kepada pemerintah sangat kecil sehingga dianggap tidak efektif lagi.



ia membentuk Dewan Koloni Asia yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pemerintahan (de Vries 1941:2). Namun, Dewan Koloni Asia tidak dapat berbuat banyak karena tidak tersedia fasilitas dan terjadi blokade laut di perairan Asia, tidak memungkinkan baginya untuk melakukan komunikasi dengan wilayah koloni. Nederburg akhirnya kembali ke Belanda dan menuliskan kondisi wilayah koloni yang sangat memprihatinkan. Schimmelpenninck memberikan reaksi positif atas laporan itu dengan menyediakan dana sebesar 2,6 juta gulden. Dana ini digunakan untuk membentuk sukarelawan yang bersedia menjadi tentara di Hindia Timur. Jumlah orang yang telah direkrut sebanyak 800 orang pada 1806. Mereka dilatih secara singkat dan segera diberangkatkan ke Hindia Timur diangkut dengan kapal dagang Wils & Co menuju Asia. Namun, ketika kapal melewati pelabuhan Den Helder, pemerintah Prancis melarangnya untuk melanjutkan perjalanan ke Asia dengan alasan pasukan itu diperlukan untuk memperkuat wilayah Belanda Utara sebagai tentara cadangan untuk melawan gempuran Inggris di Belanda Utara.⁶

Schimmelpenninck akhirnya mengirim surat kepada Sieberg tentang penundaan pengiriman pasukan. Surat itu tidak pernah diterima oleh Sieberg karena jabatan Gubernur Jenderal telah diserahkan kepada penggantinya Albertus Henricus Wiese. Surat keputusan pengangkatan Wiese tiba di Batavia pada 29 Juni 1806, yang mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal yang berpangkat Letnan Jenderal militer Kerajaan Belanda.

REORGANISASI MILITER DI HINDIA TIMUR

Dalam upaya menghadapi ancaman serangan Inggris, pemerintah Batavia melakukan reorganisasi militer, yaitu reorganisasi Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Reorganisasi Angkatan Laut dilakukan dengan mengirimkan beberapa kapal secara bertahap ke Hindia Timur, sementara

⁶Baca J. Hageman, *ibid*, halaman 167.

reorganisasi Angkatan Darat baru dilakukan setelah Daendels tiba dan berkuasa.

a. Reorganisasi Armada Laut

Rezim Napoléon memprioritaskan faktor keamanan dan pertahanan di semua wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, wilayah-wilayah strategis harus diperhatikan dan diperahankan seperti Tanjung Harapan, Mauritius di Isle de France, dan Ceylon. Ketika VOC berkuasa, wilayah-wilayah itu dihubungkan dengan armada dagangnya yang dipersenjatai (Locher-Scholten dan Rietbergen, ed. 2004: 8). Sementara itu Prancis menekankan pada aspek militernya dalam menghadapi blokade laut Inggris.

Setelah tanggal 1 Januari 1800, Gubernur Jenderal saat itu, Van Overstraten, mengubah status semua pejabat tinggi dan pejabat Belanda dari pegawai VOC menjadi pegawai negara. Beberapa wilayah di Hindia Timur pada pergantian abad sudah dikuasai oleh Inggris kecuali Jawa, Ternate, Manado, Makassar dan sekitarnya, bagian selatan pulau Timor, Palembang dan kantor Banjarmasin yang masih dikuasai oleh Belanda.⁷

Setelah perubahan status itu, pada 23 Agustus dilaporkan bahwa lima armada Inggris menguasai Teluk Batavia setelah menguasai pulau Onrust dan Kuiper dengan menghancurkan semua kapal yang berlabuh di sana. Kapten Ball mengirimkan perwira angkatan laut menemui gubernur jenderal untuk menyampaikan perintah atasannya, Laksamana Muda P. Reinier, agar bersedia untuk menyerah. Gubernur Jenderal Van Overstraten menolaknya, sehingga armada Inggris melakukan blokade laut atas pulau Jawa sambil menunggu armada Inggris lainnya. Upaya menyerang Batavia terjadi lagi pada bulan Oktober 1800. Inggris berhasil mendaratkan pasukannya di muara Marunda. Namun, pada tanggal 9 November 1800, armada Inggris harus meninggalkan Marunda setelah mendapatkan perlawanan dari

⁷ Lihat Stapel (1940:15–6).



pasukan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolas Engelhard.

Untuk sementara waktu tidak ada lagi penyerangan dari pihak armada Inggris, karena di Eropa telah terjadi kesepakatan damai antara Inggris dan Prancis di yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1802 di kota Amiens. Laksamana Dekker yang habis kontrak kerjanya pada awal tahun 1804, harus segera meninggalkan Jawa sebelum tanggal 15 Oktober 1803. Namun, keberangkatan Dekker dicegah oleh Gubernur Jenderal karena berdasarkan berita koran Amerika yang diterima di Batavia, Inggris telah mengumumkan perang kembali dengan Prancis dan Republik Bataf. Atas dasar inilah Dekker diminta untuk tetap berada di Batavia. Dekker menolaknya, dan berniat kembali ke Eropa. Setibanya di Ile de France pada tanggal 3 Nopember 1803, ia bergabung dengan Laksamana Mist dan Laksamana Jan Willem Janssens. Dekker diminta untuk kembali ke Batavia, sementara De Mist dan Janssens melanjutkan perjalanannya menuju Tanjung Harapan dengan dikawal oleh tiga kapal perang yang bersenjata lengkap. Namun, Dekker menolaknya, karena di Jawa, dia akan menjadi anak buah Laksamana Hartsinck yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya.⁸

Laksamana Muda Hartsinck tiba di Jawa dengan menggunakan kapal kompeni lama dan dikawal oleh dua kapal yang dikirimkan dari Tanjung Harapan oleh Laksamana de Mist. Dengan demikian, jumlah kapal yang berada di Hindia Timur sebanyak 13 kapal. Pada tanggal 12 Desember 1803, datanglah Laksamana Linois di pelabuhan Batavia dengan membawa 200 orang tentara Prancis. Bersama dengan pasukan ini ikut serta Jenderal de Gosson beserta staf perwira tinggi yang berjumlah 40 orang. Ia menyatakan bahwa dirinya diberi tugas oleh *Premier Consul* (baca: Napoléon Bonaparte) untuk memimpin pasukan Prancis di Jawa di

⁸ Dekker akhirnya melanjutkan perjalanannya kembali ke Belanda dengan menggunakan kapal swasta melalui Lisabon. Sesampainya di Belanda, ia ditangkap, kemudian diadili di Mahkamah Tinggi Militer dan dijatuhi hukuman mati. (Stapel:1940;22-3).

Hindia Timur. Namun, pemerintah di Batavia menolaknya karena ia tidak dapat menunjukkan surat tugasnya. Batavia menerima 200 bantuan tentara Prancis, sementara Jenderal de Gosson dan stafnya dikirimkan kembali ke Isle de France di kepulauan Mauritius. Ketika Gubernur Jenderal Sieberg dan anggota Dewan Hindia meminta tambahan pasukan, Laksamana Lonois menolaknya.

Blokade laut atas Pulau Jawa yang dilakukan oleh armada Inggris terus dilakukan. Pada tanggal 18 Oktober 1806, sebuah kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia. Kapal ini kemudian merampok sebuah kapal layar dan sebuah fregat. Satu bulan kemudian, tanggal 26 November 1806, tujuh kapal Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Sir Edward Pellew muncul di Laut Jawa. Pellew menerima instruksi, yang disampaikan melalui armada lainnya yang baru bergabung, untuk menghancurkan semua armada Belanda yang berada di sekitar laut Jawa. Ketika Pellew akan mendaratkan⁹ armadanya di Batavia, di pelabuhan Batavia terdapat 20 kapal dagang dan 8 kapal perang yang sedang berlabuh di pelabuhan itu. Akhirnya Pellew mengerahkan 18 buah armada perangnya untuk menghancurkan semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Batavia. Pellew tidak melanjutkan misinya dengan pendaratan, tetapi terus melakukan patroli di laut Jawa.¹⁰ Pada bulan April kembali armada Inggris merampas empat kapal dagang Belanda. Kondisi ini menyebabkan Laksamana Hartsinck mengundurkan diri. Namun, ia meninggal pada tanggal 8 Juli 1808 di Baltimore, Amerika Serikat dalam perjalanan pulang ke Belanda. Patroli Armada Inggris juga berhasil mencegat kapal Perang Belanda *Scorpio* yang sedang mengawal kapal dagang dari Batavia ke Semarang.

9 Sebanyak delapan kapal yang berada di Batavia adalah armada Hartsinck. Bersama dengan hancurnya kapal-kapal ini juga dihancurkan beberapa kapal dagang lainnya. (Stappel 1940:24).

10 Akibat dari patroli laut yang dilakukan oleh armada Pellew, pulau Jawa telah dikepung oleh armada Inggris. Pelabuhan Batavia tidak terlindungi, karena tidak adanya kapal perang di pelabuhan itu. Sisa beberapa armada Hartsinck berada di pelabuhan Gresik, dan tidak memungkinkan digerakkan ke Batavia untuk melindungi Pelabuhan Batavia (Stapel:1940:26). Kapal yang ada di Gresik yakni *Pluto* dan *Revolutie*. Di pelabuhan ini juga sedang bersandar kapal *Koortenaar* dengan kekuatan 60 meriam, *Bustaff* dengan kekuatan 40 meriam (Von Faber: *Oud Soerabaia*, 1931: 30).



Pellew juga berhasil menangkap korvet Belanda yang dilengkapi dengan 20 meriam di pelabuhan Semarang.

Pada bulan April 1807, delapan armada Pellew berada di pelabuhan Gresik, Surabaya.¹¹ Ia mengirim sebuah rakit yang ditumpangi oleh beberapa perwira untuk menyampaikan surat kepada komandan pelabuhan Gresik, Kapten Cowell. Isi surat itu antara lain bahwa Inggris tidak akan menyerang apabila pemerintah di Surabaya bersedia menyerahkan kapal-kapal itu. Namun, komandan keamanan di Surabaya justru menangkap mereka. Insiden ini menimbulkan kemarahan Pellew yang mendaratkan 1.400 orang marinirnya untuk menguasai Surabaya. Insiden dikuasainya kota Surabaya oleh tentara Inggris menimbulkan ketegangan bagi para penguasa Belanda di Surabaya. Setelah disepakatinya perdamaian antara penguasa Batavia dan Laksamana Pellew, Pellew menarik pasukannya dengan menyita semua armada laut Belanda.¹² Dengan demikian penguasa Ujung Timur pulau Jawa tidak lagi memiliki armada laut. Hal ini berarti habislah kekuatan laut pemerintahan Belanda di Hindia Timur.

b. Reorganisasi Angkatan Darat

Menjelang pembubaran VOC, kondisi angkatan darat Belanda di Hindia Timur sangat buruk. Pemerintah Belanda mengirimkan beberapa gelombang serdadu baru dari Eropa ke Batavia. Kondisi mereka sangat buruk karena mereka kurang terlatih, senjatanya tidak lengkap, dan gajinya sangat minim, banyak tentara yang sakit, desersi. Alasan mereka meninggalkan induk pasukannya karena merasa rindu dengan anak dan isterinya. Mereka dibayar dengan gaji yang rendah, yang mengakibatkan

11 Laksamana Pellew muncul dengan 8 buah kapal, yakni *Culloden*, *Powerfull*, *Fox*, *Corlyn*, *Semarang*, *Victor*, *Seaflower* dan *Diana*. (Stapel, 1940:26-28).

12 Ada lima kesepakatan antara penguasa militer Surabaya dan armada Laksamana Pellew, yakni: inggris akan meninggalkan Gresik dan Surabaya; kapal Belanda yang rusak harus segera dibakar; pembongkaran pertahanan pantai di Madura; orang Belanda harus memasok air minum gratis kepada awak armada Inggris; dan pemerintah belanda di Surabaya harus mengizinkan pedagang daging untuk menjual dagangannya kepada Inggris.

menurunnya semangat juang mereka. Pasukan di Batavia dan Batavia ommelanden dipusatkan di Batavia. Sementara itu, pasukan di Jawa bagian timur dipusatkan di Surabaya. Adapun Jumlah tentara seperti tercantum dalam Tabel.

Tabel
Jumlah Tentara di Hindia Timur
Menjelang dan Sesudah VOC Bubar

Tahun	Jumlah Tentara	Keterangan
1771	2.372	
1793	434	
1797	516	
1802	2.020	Tentara yang berada dibawah pimpinan Jenderal de Gosson dikembalikan ke <i>Isle de France</i> .
1803	1.098	Penambahan tentara Eropa sebanyak 216 orang di bawah Letnan Kolonel Jauffret.
1804	1.132	Sebanyak 775 tentara diambil dari tentara di <i>Isle de France</i> yang dibawa oleh Laksamana De Mist.
1808	3.496 Eropa 8.347 pribumi	Saat serah terima jabatan Gubernur Jenderal dari Wiese kepada Daendels.
1811	2.430 Eropa 1.506 Ambon 13.838 pribumi	Laporan Brigadir GH v Gutzlaff, 11 Mei 1811.

Sumber: *Tijdschrift voor Indie* 1879: 437.

Selama perang terjadi, tidak ada tentara Eropa yang menerima gaji secara tetap. Namun demikian, menurut laporan komandan Brigadir Sandel Roy kepada pemerintah di Batavia, pada tahun 1802, jumlah anggota militer di garnizun Batavia, Jawa dan Makasar tidak lebih dari 2.020 orang



Belanda, yang dua pertiganya harus dianggap tidak berguna. Meskipun ada penambahan tentara, pasukan darat Eropa di Hindia Timur masih lemah dan kondisinya semakin lama semakin lemah. Senjata api dilaporkan hampir seluruhnya rusak dan tidak dapat digunakan akibat terkena korosi. Meriam tembaga juga masih tersedia dalam jumlah besar, namun kalibernya sudah tidak cocok untuk digunakan sebagai meriam pantai karena daya jangkanya yang rendah.¹³

Setelah dilantik menjadi Gubernur Jenderal pada 14 Januari 1808, Daendels melakukan pemeriksaan terhadap pasukannya di Hindia Timur, dengan hasil sebagai berikut.

- a. Sisa Resimen Wurtemberg, yang dikirim dari Eropa pada tahun 1788, ditambah dengan pasukan yang berasal dari Tanjung Harapan yang dipimpin oleh Laksamana Sonrey, yang langsung kembali ke Belanda setelah mendaratkan pasukannya di Jawa;
- b. Serdadu dan kelasi armada yang ditinggalkan oleh Laksamana Hartsinck, disebut sebagai Resimen Zeeuw;
- c. Sisa serdadu yang pernah berdinasi dalam dinas militer VOC;
- d. Kesatuan cadangan yang terdiri atas orang pribumi Jawa atau Madura sebagai kekuatan milisi.

Seluruh kesatuan ini dipimpin oleh Panglima Brigadir Jenderal Simon de Sandel Roy. Ia memimpin pasukan Eropa dan pribumi. Sementara itu Batalyon Infanteri XII Prancis di bawah komandan Letnan Kolonel Jauffret, yang terdiri atas 5 kompi dan 21 perwira. Setengah brigade infanteri nasional di bawah komando Kolonel Charles Etien Vangin yang terdiri atas 11 kompi dengan 68 perwira. Terdapat satu batalyon empat kompi berada di bawah komando Letnan Kolonel Carel Frederik Gaupp; Satu batalyon Gubernur Jenderal Wiese pada tanggal 23 Juli 1805 melakukan inspeksi ke gudang senjata. Melihat apa yang ada di gudang, ia kemudian menulis surat kepada pemerintahan Republik Batavia mengenai kemungkinan sulitnya mempertahankan wilayah koloni mereka di Asia (lihat dalam *Tijdschrift voor Indie*, 1879: 443).

tiga kompi berada di bawah komando Letnan Kolonel Nic. Dom Cher le Grevisse, satu batayon empat kompi berada di bawah komando Mayor Joseph de Lort. Batalyon Infanteri III Republik Bataf berada di bawah komando Letnan Kolonel Abraham Mathieu yang terdiri atas 9 kompi dengan 33 perwira. Satu batalyon pemburu terdiri atas 2 kompi dengan 21 perwira berada di bawah komando Mayor Rene François Auguste le Motte Bertin. Korps kavaleri pengawal Gubernur Jenderal di bawah komando Letnan Kolonel George Heinrich von Gutzlaff terdiri atas 3 kompi dengan 16 perwira yang semuanya berjumlah 362 tentara. Satu korps artileri di bawah komando Kolonel Korps Louis Auguste d'Omarcey d'Omois yang merupakan pasukan zeni berjumlah 7 kompi dan 63 perwira yang sebagian besar sudah dibubarkan pada akhir tahun 1807. Korps pertahanan sipil berada di bawah komando Andries van Braam dengan 23 perwira yang bersama-sama dengan pasukan garnizun menempati pos di Weltevreden, Meester Cornelis, Tanjungpura, Tangerang, Buitenzorg, Kwal dan Angke.

Sementara itu di beberapa wilayah juga terdapat beberapa kesatuan seperti di Semarang yang meliputi Bangkalan, Pasuruan dan Banyuwangi; Cirebon, dan Banten yang masing-masing memiliki satu korps infanteri dan artileri. Sementara itu, pasukan yang ditempatkan di dua pusat kerajaan Sunda (Cirebon dan Banten) dianggap sangat lemah. Dari jumlah yang ada, diketahui tidak lebih dari 1/3 nya dianggap tidak layak untuk bertempur.

Daendels melihat bahwa kualitas pasukan tidak memungkinkan untuk menghadapi serbuan Inggris. Ia menyadari bahwa jumlah pasukan tidak memadai dan tidak mencukupi. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengganti para panglimanya. Tanpa menyingkirkan para komandannya, tidak mungkin reorganisasi militer dilakukan. Brigadir de Sansel de Roy digantikan oleh Kepala Staf umum, Kolonel Alberti, yang kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal.



Langkah kedua yang diambil oleh Daendels adalah melakukan pembenahan pasukan. Keputusan pertama yang berpengaruh pada bidang militer adalah keputusan tanggal 14 Januari 1808. Keputusan yang dianggap peraturan ini dibuat untuk membenahi wilayah Ujung Timur Jawa (Java oosthoek), khususnya komando yang harus diterapkan di sana. Komandan wilayah Ujung Timur diberi wewenang untuk memobilisasi pasukan dan mendapatkan dukungan dari pemerintahan sipil yang ada di sana apabila diperlukan;

Keputusan tanggal 7 maret 1808 berisi tentang penetapan jumlah pasukan yang layak untuk mempertahankan pulau Jawa, yaitu sebanyak 19.316 tentara. Bagi Daendels, luar Jawa tidak begitu penting dan tidak perlu dipertahankan mengingat ketiadaan sarana dan prasaranya. Hanya wilayah yang memiliki makna bagi militer saja yang dipertahankan seperti Ternate dan Palembang yang harus dipertahankan. Untuk memudahkan pengendalian atas pulau Jawa, ia membagi pertahanan pulau Jawa menjadi tiga daerah masing-masing dengan kekuatan pasukan tempur masing-masing sebanyak satu batalyon. Daerah militer pertama adalah ibukota Batavia dan sekitarnya (Batavia Ommelanden), yang berada di bawah komando Brigadir Jenderal Guslaw von Lutzow. Wilayah kedua adalah wilayah Jawa Tengah di bawah komando Brigadir Jenderal von Winkelman dengan menampati markas di Semarang, yang sekaligus membawahi garnizun di *vorstenlanden*. Sementara itu wilayah ketiga, yakni wilayah Jawa Timur berada di bawah komando Brigadir Jenderal von Motman yang berkedudukan di Surabaya, yang membawahi Madura dan Ujung Timur pulau Jawa. Sebagai koordinator dari ketiga wilayah ini, Daendels menunjuk Brigadir Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang menjabat sebagai Kepala Staf Umum. Sementara itu kesatuan Wurtemberg yang

terdiri atas orang Eropa bukan Belanda digabungkan dengan kesatuan tentara Hindia Timur (*Nederlandsche Oost Indie Leger*).¹⁴

Langkah lainnya yang diambil oleh Daendels adalah meningkatkan jumlah pasukan di Jawa.¹⁵ Mengingat tidak memungkinkan untuk mendatangkan pasukan Eropa ke Jawa, ia merekrut orang pribumi untuk dijadikan pasukan Belanda di Hindia Timur. Seperti telah dilaporkan oleh Daendels kepada Kaisar Napoléon, bahwa Daendels telah berhasil merekrut sebanyak 13.838 tentara pribumi yang disebut sebagai Pasukan Jayengsekar. Pasukan ini ditempatkan di beberapa prefektur dan kabupaten yang berada di Jawa. Pembentukan pasukan pribumi ini bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi pemerintahan di Pantai Timur Laut Jawa (*Noord-Oostkust*) dan Ujung Timur Jawa (*Oosthoek*). Berdasarkan reorganisasi itu telah ditetapkan jumlah tentara pribumi yang dibentuk di setiap prefektur, yang masing-masing berjumlah antara 50 dan 100 orang, tergantung dari luasnya wilayah.¹⁶ Anggota pasukan ini dipilih dari penduduk yang baik, terdiri atas orang-orang yang pandai dan cerdas. Mereka akan dipimpin oleh perwiranya sendiri yang jumlahnya 3 orang untuk setiap prefektur atau daerah komando. Perwira ini memiliki pangkat setara bupati. Mereka ini dilengkapi dengan tanda-tanda kemiliteran secara khusus.

Kekuatan pasukan di Hindia Timur masih memperoleh tambahan dari pasukan Mangkunegaran yang diberi nama Pasukan *Prangwedono*. Pasukan Prangwedono terdiri atas 1.100 tentara yang berada di bawah Adipati Mangkunegoro yang bemarkas di Surakarta. Pasukan ini dibentuk oleh Daendels menurut model tentara Eropa, dibagi dalam satu batalyon

14 Hal ini membuktikan bahwa Daendels mempercayakan pertahan Jawa kepada pasukan Wurtemberg sebagai kekuatan intinya. Keyakinan ini nantinya akan mempengaruhi karir Daendels setelah bertugas dari Hindia Timur. Oleh Napoléon Bonaparte, Daendels diberi tugas untuk memimpin tentara cadangan Wurtemberg dalam rangka penyerangan Napoléon Bonaparte ke Rusia pada tahun 1812.

15 Anonim. "Een kritiek over de Indische leger organisatie en het legerberker van Daendels," *Indische Militaire Tijdschrift*, 1878: 270.

16 Disebutkan bahwa di Prefektur Tegal dibentuk 80 orang, Pekalongan 50 orang, Semarang 100 orang, Jepara 100 orang, Rembang 50 orang, Gresik 50 orang, Surabaya 80 orang, Pasuruan 100 orang dan Sumenep 100 orang. (Pasal 25 *Ordonantie den 18 Augustus 1808*).



infanteri yang terdiri atas empat kompi, ditambah dengan 2 kompi pemburu, 2 pasukan artileri berkuda, dan 2 skuadron kavaleri. Pasukan *Prangwedono* ini langsung berada di bawah komando Gubernur Jenderal di Batavia.

Tenaga pribumi ini semula didatangkan dari luar Jawa yang terdiri atas orang Ternate, Ambon, dan tenaga lain dari luar Jawa. Setelah dilatih, mereka ditempatkan di masing-masing daerah sebagai pasukan pengamanan kota (*garnizun*). Reaksi terjadi dari masing-masing wilayah. Terjadi perlawanan di Tondano ketika ia merekrut 3.000 orang untuk dibawa ke Jawa. Dari raja-raja pribumi, Daendels kurang mendapatkan pasukan yang dapat diandalkan, karena mayoritas dari kerajaan di Jawa menentang kebijakannya. Selain itu, kesatuan pribumi lainnya yang ia rekrut adalah barisan Madura. Pasukan ini dipersembahkan oleh raja Madura dan Panembahan Sumenep. Jasa barisan Madura telah teruji tatkala Nicolas Engelhard menyelesaikan pemberontakan rakyat Cirebon dan mengusir armada Inggris yang telah mendarat di Marunda.

Berdasarkan laporan staffnya dan berdasarkan analisis yang dibuatnya, Daendels yakin bahwa Inggris dengan meriam jarak jauhnya memiliki kelemahan. Armada Inggris akan berjaya apabila dilakukan perang laut di pantai-pantai terbuka. Oleh karena itu, apabila Inggris menyerang Jawa, Daendels akan memaksanya untuk bertempur di laut yang sempit. Oleh karena itu, Daendels memusatkan pertahanan di selat-selat sempit di sekitar pulau Jawa, antara lain selat Sunda, selat Madura, dan selat Bali. Daendels yakin bahwa Inggris tidak akan mencapai selat Bali karena jaraknya yang terlalu jauh. Oleh karena itu, konsentrasi Daendels ditujukan pada selat Sunda dan selat Madura. Oleh karena itu, apabila Inggris menyerang Jawa, peperangan harus diarahkan di selat-selat itu, dengan sistem peperangan jarak dekat, agar mudah dihancurkan dengan menggunakan meriam-meriam yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Timur.

Untuk menunjang sistem pertahanannya, Daendels membuat pabrik senjata yang tugasnya antara lain memperbaiki persenjataan pasukan dan

memodifikasi meriam-meriam yang ada. Meriam yang ada di Surabaya dan Batavia berasal dari meriam kapal yang tidak digunakan lagi. Selain memodifikasi meriam yang ada, ia juga menginstruksikan untuk membuat meriam yang jauh lebih besar kalibernya, dengan harapan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Dengan kemampuan tembaknya yang besar, meriam ini akan mampu menghancurkan musuh di barisan depan yang berguna bagi pasukan kavaleri dan infanteri untuk terus bergerak maju menghancurkan musuh.

Dengan kekuatan artileri yang besar, Daendels mengharapkan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Untuk merealisasikan idenya, pada 13 Februari 1808 ia membentuk satu korps artileri yang terdiri atas 2.716 tentara di bawah komando kolonel von Gutzlaw. Kesatuan ini terdiri atas tiga batalyon dan enam kompi yang terdiri atas pasukan infanteri dan kavaleri. Mereka beranggotakan tidak hanya orang Belanda, tetapi anggota pasukan Wurtemberg dan pasukan cadangan termasuk tenaga pengangkut meriam dan perlengkapannya. Selain itu disiapkan 176 ekor kuda yang mampu menarik meriam besar. Daendels juga memerintahkan untuk membangun bengkel artileri untuk memperbaiki meriam-meriam yang mengalami kerusakan ketika diselamatkan dari Isle de France dan Tanjung Harapan, agar dapat dimanfaatkan kembali. Tenaga teknisi terdiri dari tenaga-tenaga VOC yang pernah bekerja pada bengkel persenjataan di pulau Onrust. Industri artileri ini akhirnya ditetapkan didirikan di Surabaya (Von Faber 1931: 26). Pertimbangan lain industri artileri didirikan di Surabaya, karena dekat dengan daerah produksi salpeter yang merupakan bahan dasar pembuatan amunisi dan peluru. Ternyata pembangunan industri artileri di Surabaya belum dianggap cukup oleh Daendels. Ia menetapkan untuk membangun pabrik pembuatan peluru di Semarang. Pendirian pabrik peluru di Semarang dengan pertimbangan bahwa gudang mesiu dapat ditempatkan di benteng-benteng di pedalaman.¹⁷ Kegiatan bongkar

17 H. W. Daendels, 1814. *Op.cit.* Harga mesiu dianggarkan 15 ringgit per pikul. Budget ini dimasukkan dalam anggaran militer.



muat barang dapat dilakukan di pelabuhan sehingga dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di pulau Jawa. Produk yang dihasilkan dari pabrik di Semarang ini, selain peluru, juga membuat granat dan peluru meriam.

Untuk menampung hasil produksinya, Daendels memerintahkan untuk membangun gudang-gudang amunisi di Surabaya, Salatiga, Meester Cornelis. Surabaya dan Meester Cornelis digunakan untuk mendukung garis besar pertahanan di Jawa. Salatiga dipilih dengan pertimbangan bahwa Salatiga relatif dekat dengan pertahanan di Jawa Tengah dan dekat dengan benteng-benteng yang didirikan di *Vorstenlanden*.

Di samping perlengkapan tempur, kebutuhan lain yang dianggap perlu untuk ditingkatkan oleh Daendels adalah peralatan dan hewan penarik senjata. Peralatan transportasi seperti pedati, kotak-kotak pengangkut senjata, tandu, gerobag dibuat dengan memanfaatkan tukang-tukang pribumi. Material untuk keperluan itu dibuat dari kayu yang didatangkan dari wilayah Rembang, Blora, Tuban dan Lamongan. Sementara itu, untuk hewan, khususnya kuda, didatangkan dari Bali dan Sumbawa. Mengingat bahwa lalu lintas impor kuda ini untuk kepentingan militer, maka penyediannya dikontrol oleh dinas militer.

Fasilitas komunikasi lainnya adalah membangun jalan dan menghubungkan jalan-jalan yang sudah lama ada. Di samping itu, diperlukan mekanisme yang mengatur pemeliharaan jalan dan jembatan. Kepala Kantor pertahanan Semarang Schultze menulis surat kepada Daendels pada bulan Februari 1809 yang mengeluhkan kondisi sejumlah jembatan yang tidak dapat dilalui oleh kereta pengangkut personil dan peralatan. Daendels setelah memantau di lapangan memerintahkan Kolonel Gordon dari dinas Zeni untuk menghubungi para bupati setempat. Mereka diminta untuk mengerahkan tenaga kerja wajib sebagai pekerja kasar untuk melakukan perbaikan fasilitas tersebut.

PENUTUP

Hindia Timur, khususnya Jawa, dianggap sangat penting bagi Prancis. Napoléon Bonaparte telah mengirimkan beberapa pasukannya yang tergabung dalam Divisi XII. Jawa dianggap penting bagi Prancis karena kekayaan hasil komoditi Ekspor, posisi geografisnya, dan potensi penduduknya. Hasil komoditi ekspor yang berupa kopi, gula dan padi, di samping kayu jati merupakan komoditi yang sangat laku di pasaran internasional. Instruksi yang diberikan oleh Napoléon Bonaparte kepada Gubernur Jenderal Daendels sesaat sebelum meninggalkan istana Tuilleries adalah membenahi sistem administrasi pemerintahan di Hindia Timur agar memberikan manfaat kepada negara induk di Eropa. Napoléon Bonaparte menganggap penting pulau Jawa karena posisi geografisnya. Napoléon akan menjadikan Jawa sebagai pangkalan utama Prancis dalam rangka rencana penyerangan Prancis ke India, yang dikatakan sebagai wilayah yang kekayaannya melebihi semua kekayaan semua negara di Eropa. Selain itu, penduduk Jawa memiliki kekuatan fisik yang tidak kalah kuatnya dengan tentara Sepoy dari India.

Oleh karena itu, Napoléon Bonaparte mengingatkan agar pulau Jawa diperkuat. Kaisar menegaskan bahwa Batavia harus diperkuat, karena Inggris sewaktu-waktu akan menyerang Jawa. Ia mengingatkan bahwa kemungkinan besar Inggris akan mendaratkan pasukannya dari Cilincing yang jaraknya kira-kira 2 *lieux* (1 *lieu*=4 km) dari pusat pemerintahan di Batavia. Pasukan yang dikirimkan ke Jawa melaporkannya bahwa Batavia tidak memiliki pertahanan apa pun, sehingga apabila tidak diperkuat, Batavia akan segera jatuh apabila diserang oleh Inggris.

Oleh karena itu, beberapa tentara dikirimkan ke Jawa melalui Isle de France dan Port Louis. Jumlah tentara yang ideal yang seharusnya ditempatkan di Jawa menurut Napoléon Bonaparte berjumlah 20.000 orang. Oleh karena itu, pada saat Daendels dikirimkan ke Jawa untuk menduduki



jabatannya sebagai gubernur jenderal, ia harus segera melakukan reorganisasi dan memobilisir tentara yang berjumlah mendekati jumlah yang diinginkan oleh Kaisar. Untuk itu, pada bulan Mei 1811, Kepala Staf angkatan darat von Gutzlaff melaporkan jumlah tentara yang berhasil dimobilisasi oleh Daendels.

DAFTAR ACUAN

- Bonaventura, M. (1905), *De Bonapartes*. Nijmegen: L. C. G. Malmberg.
- Brugmans, H. (t.t.), *Van Republiek tot Koninkrijk: Geschiedenis van Nederlanden 1795–1815*. Amsterdam: Scheltens & Giltay.
- von Faber, G. H. (1931), *Oud Soerabaia* [nama kota dan penerbit tidak tercatat].
- Locher-Scholten, Elsbeth dan Peter Rietbergen (ed.) (2004), *Fofen handel: Aziatische vorsten en de VOC 1602–1720*. Leiden: KITLV.
- Price, J. C. Powell (1955), *A History of India*. [nama kota tidak tercatat], Thomas Nelson & Son.
- Romier, Lucien (1948), *L'ancienne France: Des origins á la revolution*. Paris: Librairie Hachette.
- de Vries, Theun (1941), *Rutger Jan Schimmelpenninck*. Amsterdam: Leopold Uitgeverij.
- Williamson, James A. (1962), *The British Empire and Commonwealth*. London: Macmillan.



Aspek Pertahanan Pembangunan Jalan Kereta Api Lajur Rancaekek – Sumedang (1917-1921)^{1*)}

Agus Mulyana^{2**)}

Pembangunan jalan kereta api merupakan bagian dari perluasan eksploitasi kolonial pada awal abad ke-20. Ada dua hal yang melatarbelakangi pembangunan jalan kereta api, pertama latar belakang ekonomi dan kedua latar belakang pertahanan militer. Latar belakang ekonomi disebabkan oleh terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat yang disebabkan oleh pertumbuhan perkebunan.

Di daerah Priangan pada umumnya, perkebunan-perkebunan terletak di daerah pedalaman dan pegunungan. Kondisi yang demikian sangat sulit kalau hanya menggunakan angkutan tradisional. Alat angkut tradisional memiliki keterbatasan baik daya angkutnya maupun kecepatan waktu untuk mencapai daerah tujuan.

Untuk menangani kesulitan angkutan tersebut, timbul pemikiran baik di kalangan pemerintah maupun swasta perlunya angkutan yang memadai untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Pihak swasta merasa berkepentingan ketika mulai masuknya para pengusaha swasta dalam sektor perkebunan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Solusi angkutan yang diajukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta, untuk memecahkan kesulitan tersebut adalah perlu dibangunnya jalan kereta api. Alat angkutan ini sangat cocok mengingat daya angkut yang banyak dan jarak tempuh yang cepat serta dapat menembus ke berbagai keadaan geografi baik pegunungan dan dataran. Selain itu, jaringan jalan

1 *) Disajikan dalam Konferensi Nasional Sejarah Ke-9, Jakarta 5 –7 Juli 2011.

2 **) Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

kereta api dapat dibangun dengan hubungan langsung antara pedalaman dan pelabuhan.

Kepentingan pertahanan militer dalam pembangunan kereta api di Priangan berkaitan erat dengan kondisi geografis Priangan. Kondisi Priangan yang merupakan daerah pegunungan yang berada di pedalaman, merupakan kondisi yang strategis untuk membangun garis pertahanan antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Jalan kereta api yang dibangun merupakan sarana yang strategis untuk mengangkut pasukan apabila terjadi serangan musuh. Serangan musuh kemungkinan besar akan datang dari pelabuhan. Oleh sebab itu, jalur-jalur kereta api di Jawa banyak berhubungan langsung ke pelabuhan. Hubungan pelabuhan sebagai daerah yang terbuka dan pedalaman yang terisolir, merupakan garis pertahanan yang strategis. Untuk membangun garis pertahanan tersebut akan disambungkan dengan pembangunan jalan kereta api. Hubungan langsung antara pantai dan pedalaman akan memberikan gerak yang cepat terhadap pasukan apabila terjadi serangan musuh. Kebutuhan ini terasa setelah selesainya pembangunan jalan kereta api Batavia-Buitenzorg (1869-1873) yang dibangun oleh *Nederlandsch Indisch Spoorweg Maatschappij* (NISM).³ Hubungan langsung antara Priangan dengan Batavia menjadi terbuka setelah selesai pembangunan kereta api Batavia-Buitenzorg.

Selain hubungan dengan pelabuhan Batavia, kepentingan militer perlu juga dibangun dengan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki hubungan langsung dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Cilacap dan Cirebon. Untuk memenuhi kepentingan pertahanan dengan pelabuhan Cilacap, maka dibangun lajur Priangan-Cilacap dan dengan pelabuhan Cirebon dibangun lajur Rancaekek-

³ *Verslag NISM 1873*, hlm. 34.



Sumedang. Lajur Rancaekek-Sumedang, semula akan dibangun Sumedang-Kadipaten-Cirebon.⁴ Lajur ini tidak jadi dibangun sehubungan dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Pembangunan lajur-lajur kepentingan militer tersebut, dalam pelaksanaannya juga memiliki kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi pada lajur-lajur tersebut adalah pengangkutan baik perkebunan maupun hasil-hasil pertanian daerah-daerah yang dilewatinya.

Pertahanan Militer

Ide awal pembangunan jalan kereta api Rancaekek-Sumedang berasal dari Panglima Militer. Dia berpendapat pentingnya membangun pertahanan di Pulau Jawa. Pada saat itu Jawa Barat merupakan salah satu bagian dari pemusatan pasukan. Pemusatan pasukan ditempatkan di Bandung.⁵ Bandung sejak akhir abad ke-19 telah dijadikan sebagai kota pertahanan militer oleh pemerintah Hindia Belanda. Secara geografis, Bandung sangat strategis untuk pertahanan karena letaknya berada di daerah pedalaman dan merupakan dataran tinggi atau pegunungan. Sedangkan Batavia, secara geografis kurang strategis bagi pertahanan karena merupakan daerah yang terbuka. Untuk membangun pertahanan di dataran tinggi Bandung, maka ditempatkanlah pasukan di kota Bandung di daerah sekitar Cimahi sekarang

Untuk melindungi pertahanan kota Bandung, dibangunlah basis-basis pertahanan di sisi kota Bandung, khususnya daerah yang secara geografis dapat menjadi sasaran serangan terbuka oleh musuh. Pihak militer berpandangan bahwa musuh yang akan menyerang ke Bandung akan

⁴ Besluit, 15 September 1915 No. 4, Koleksi Algemeen Secretarie, Arsip Nasional Republik Indonesia

⁵ Surat Departemen Perang (Departement van Oorlog) Staf Umum Militer Nomor 48/S tanggal 27 Juli 1910 ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, lampiran dalam, Besluit 15 September 1915 No. 4, Koleksi Algemeen Secretarie, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

masuk melalui pelabuhan Cirebon.⁶ Oleh sebab itu pembangunan basis pertahanan di arah timur Bandung sangatlah penting. Untuk membangun basis pertahanan di arah timur, kota Sumedang merupakan daerah yang strategis. Kota ini merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, dilewati oleh Jalan Raya Pos dan melalui jalan ini memiliki hubungan langsung dengan Cirebon. Untuk membangun basis pertahanan di kota Sumedang, dibangunlah benteng-benteng.

Pemerintah kolonial Belanda membangun benteng-benteng pertahanan di Sumedang pada umumnya terletak di daerah perbukitan. Benteng-benteng yang dibangun yaitu di Pasirlaja, Pasiskolocer, dan benteng Darmaga. Benteng-benteng tersebut dibangun pada tahun 1915. Selain itu dibangun pula benteng di Gunung Palasari dan Gunung Kunci (<http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/05/sisa-pertahanan-belanda-pada-perang.html> (11/5/2011)).

Daerah yang menjadi lajur masuknya musuh dari Cirebon selain langsung dari Cirebon ke Sumedang, dapat pula datang melalui Darmaraja-Balubur-Limbangan-Nagrek. Selain datang dari Cirebon, musuh dapat pula datang dari Krawang Utara, yang kemudian dapat bergerak menyerang menuju Sagala Herang (Jalan Cagak Subang) dan serangan ini akan mengancam pertahanan Citatah-Batukarut, Ciater-Bukanagara dan pertahanan Sumedang.⁷

Pembangunan jalan kereta api Rancaekek-Sumedang memiliki arti strategis untuk menghadang serangan musuh yang akan masuk dari arah

6 Nota betreffende het militair nut eener Spoor- of tramverbinding Soemedang-Preangerspoorweg, in het bijzonder eener verbinding Soemedang-Rantjaekek met Spoorwijke 1,067 M, Bijlage no 3, geheim, dalam, Surat Departemen Perang (Departement van Oorlog) Bagian VII Staf Umum Nomer 29/S tanggal 28 April 1910 ditujukan kepada Directeur van Gouvernementsbedrijven, lampiran Besluit Gubernur Jenderal 15 September 1915 No. 4, Koleksi Algemeen Secretarie Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Lihat pula Surat Staff Umum Militer Departemen Perang nomor 48/S tanggal 27 Juni 1910 yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Surat Departemen Peperangan Staf Umum Bagian VII Nomor 873 tanggal 20 September 1900 ditujukan kepada Direktur BOW.

7 Ibid.



sebelah timur Bandung. Pertahanan, wilayah Bandung tidak hanya di sebelah timur saja, akan tetapi dapat pula masuk melalui Bandung utara melalui Subang. Oleh sebab itu, dataran tinggi Bandung utara menjadi salah satu tempat pemusatan pasukan. Pihak militer, pernah mengajukan kepada pemerintah untuk membangun jalan kereta api Bandung-Lembang atau Bandung-Pangragajian.⁸ Lajur ini dibangun untuk membangun pertahanan di Bandung utara.

Jalan kereta api yang dibangun berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat gerak pengangkutan militer. Pasukan yang ditempatkan di daerah Bandung barat yaitu di Tagog Apu (Cimahi/Padalarang) akan mudah diangkut melalui lajur kereta api menuju Sumedang.⁹ Selain dijadikan sebagai benteng pertahanan, Sumedang dapat dijadikan tempat untuk perawatan para serdadu yang luka dalam perang.¹⁰

Pelaksanaan Pembangunan

Untuk membangun garis pertahanan Cirebon-Sumedang-Bandung, pada mulanya akan dibangun kereta api Bandung-Sumedang-Cirebon. Lajur ini tidak jadi dibangun sehubungan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Pembangunan hanya dilaksanakan dari Rancaekek-Sumedang dan Cirebon-Kadipaten. Lajur Cirebon-Kadipaten dibangun oleh perusahaan swasta yaitu *Semarang-Cherebon Stoomtram-Maatschappij* (SCSM). Berdasarkan surat keputusan pemerintah (besluit) 9 Agustus 1900 nomor 57. Pembangunan dipimpin oleh J. Andre de la Porte, agen kepala pengangkutan oleh J.F.M. Banens dan kepala pengelolaan

8 Surat Departemen Perang (Departement van Oorlog) Staf Umum Militer Nomor 48/S tanggal 27 Juli 1910, Op. Cit.

9 Nota betreffende het militair nut eene....., Op.Cit.

10 Besluit 15 September 1915 Nomor 4.

sehari-hari proyek pembukaan dikepalai oleh F. James.¹¹ Berbeda halnya dengan tujuan semula yang akan dilakukan pemerintah pada pembangunan lajur Cirebon-Kadipaten yaitu tujuan pertahanan, sedangkan pembangunan oleh SCSM lebih banyak kepentingan ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari daerah yang dilewati. SCSM membangun lajur Cirebon-Kadipaten banyak melewati daerah-daerah pabrik gula. Bahkan SCSM membuka lajur-lajur cabang yang menuju pabrik-pabrik gula dan melakukan kontrak kerjasama dengan pabrik-pabrik gula tersebut dalam hal pengangkutan. Pabrik-pabrik gula yang dibangun lajur cabangnya yaitu pabrik gula Kadipaten, Jatiwangi, Plumbon, Parongjaya, Gempol, Cileduk dan Tersana.¹²

Dalam pembangunan lajur Rancaekek-Sumedang, pihak militer meminta bantuan pemerintah agar mau membangunnya, dalam hal ini adalah pihak SS melalui Departemen BOW. Walaupun pembangunan ini untuk kepentingan militer, pihak militer meminta agar Departemen BOW dapat membangun jalan kereta api Rancaekek-Sumedang dengan menggunakan lebar spoor normal (1,067 M). Anggaran yang digunakan untuk pembangunan ini bukan anggaran militer, tetapi anggaran BOW untuk membangun jalan kereta api.

Pihak militer mengakui bahwa lajur yang akan dibangun tersebut tidak terlalu strategis untuk kepentingan ekonomi, karena biaya eksploitasi akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Kecilnya keuntungan yang diperoleh daripada biaya eksploitasi dikarenakan lajur dilewati tidak terlalu cocok untuk kepentingan pengangkutan umum dan panjang lajur yang terlalu pendek. Pihak militer bahkan menganjurkan apabila pemerintah tidak mampu membangun dan mengeksploitasi, dapat diserahkan kepada pihak swasta. Walaupun pihak militer menyadari, bahwa hal ini sangat tidak

¹¹ *Verslag Semarang-Cherebon Stoomtram-Maatschappij over Het Jaar 1900*, De'S-Gravenhagaasche : Bock-En handelsdrukkerij voorheen Gebr. Giunta D'albani, 1902, hlm. 5-6.

¹² *Ibid.*



mungkin dilaksanakan, karena biasanya pihak swasta dalam membangun kereta api lebih banyak mempertimbangkan keuntungan ekonominya.¹³

Agar kepentingan ekonomi dan militer terpenuhi, Inspektorat Kepala Dinas SS di Jawa mengusulkan pembangunan jalur alternatif yaitu Bandung-Ujungberung-Jatinangor-Sumedang.¹⁴ Pembangunan jalur alternatif ini dapat menguntungkan secara ekonomi karena jalurnya relatif panjang sehingga dimungkinkan akan banyak penumpang dan barang yang dapat diangkut. Selain itu kepentingan pertahananpun akan terpenuhi. Bahkan Inspektorat Kepala Dinas Kereta SS mengusulkan kalau bisa pembiayaan pembangunan jalan kereta api Rancaekek-Sumedang dibiayai oleh pihak militer. Usulan Inspektorat Kepala Dinas SS di Jawa ternyata tidak jadi dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan mengikuti lajur yang telah diusulkan oleh pihak militer. SS mau menangani pembangunan kereta api lajur militer ini, mengingat SS memiliki kewajiban untuk membangun jalan kereta api demi kepentingan negara.¹⁵

Pengukuran lahan lajur kereta api Rancaekek Sumedang sudah dilaksanakan pada tahun 1914. Sedangkan pembangunan jalan kereta api Rancaekek dimulai pada tahun 1917. Arah lajur yang diusulkan oleh pihak militer meliputi Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Citali. Pembalikan tanah dipersiapkan seluas 454.353 M³ dan pemlesteran diperkirakan 9.425 M³. Sampai dengan tahun 1920, biaya yang digunakan sebesar f. 916.711. Jembatan yang dikerjakan yaitu di Cikuda.¹⁶

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, terjadi kerjasama antara SS dan pihak militer. Hal ini dikarenakan, usulan peta diajukan oleh

13 Surat Departemen Perang (Departement van Oorlog) Staf Umum Militer Nomor 48/S tanggal 27 Juli 1910, *Op. Cit.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 *Verslag der Staatsspoorwegen In Nederlandsch Over Het Jaar 1920 Deel 1*, Batavia : Landsdrukkerij, 1922.

pihak militer. Ketika proses pelaksanaan sedang berlangsung, antara SS dan pihak militer ada kesepakatan untuk memperpanjang lajur sampai ke kota Sumedang.¹⁷ Panjang lajur dari Rancaekek ke Sumedang yaitu 18 Km. Usulan perpanjangan ini selain memiliki alasan pertahanan juga memiliki alasan ekonomi. Perpanjangan lajur diharapkan dapat mengembangkan kota Sumedang secara ekonomi. Hasil-hasil pertanian dari Sumedang diharapkan dapat diangkut ke jalur utama (Priangan-Cilacap). Pertumbuhan kota Sumedang agar tertinggal setelah dibukanya lajur kereta api Priangan-Cilacap¹⁸, karena kota Sumedang tidak terlewati oleh lajur kereta api, sedangkan beberapa daerah di Priangan terlewati lajur kereta api.

Pembangunan jalan kereta api Rancaekek-Sumedang ternyata hanya dapat diselesaikan sampai Tanjungsari. Panjang lajur yang dibangun berjarak 11,5 Km. Lajur Rancaekek-Tanjungsari dapat diselesaikan pada tahun 1921 dan mulai diekplotasi pada tanggal 13 Februari 1921.¹⁹ Batalnya pembangunan sampai dengan Sumedang disebabkan oleh tidak adanya dana pemerintah. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda sedang menghadapi Perang Dunia I. Perang ini berdampak pada kecilnya anggaran Hindia Belanda.

17 *Verslag der Staatsspoorwegen in nederlandsch Indie Over Het Jaar 1919 Deel 1*, Batavia : Landsdrukkerij 1921, hlm 79.

18 *Memori Residen Priangan (L. de Steurs, dalam Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 8, Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*, Jakarta : ANRI, 1976. hlm. LXXII.

19 *Verslag Der Staatsspoor en Tramwegen in Nederlandsch Indie 1921 Jaarstatistiken, Weltevreden: landsdrukkerij, 1923.*



Pengelolaan Keamanan Dalam Negeri Di Masa Revolusi Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Intelijen Kepolisian RI 1945-1949

Dr. G. Ambar Wulan

A. Pendahuluan

Pengelolaan keamanan di dalam negeri yang merupakan salah satu tugas pokok lembaga kepolisian merupakan persoalan yang menarik, terkait dengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk gangguan keamanan dan cara penyelesaiannya yang hingga kini tetap aktual karena menyangkut kepentingan rasa aman masyarakat. Salah satu masalah yang hendak dipertegas dalam kajian ini adalah bagaimana Polri di masa revolusi yang sarat dengan gangguan-gangguan keamanan di dalam negeri, di samping menghadapi agresi-agresi Belanda saat itu, mengelola keamanan dalam melaksanakan fungsi preventif dan represifnya melalui kerja intelijennya.

Sejak pembentukannya, Jawatan Kepolisian Negara RI, nama lembaga Polri saat itu, sebagai *ruler appointed police* memiliki peran penting dalam mengelola keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan bagi stabilitas Indonesia yang berstatus sebagai negara yang baru merdeka. Mengacu pada pandangan Robert I. Rotberg yang menyebutkan bahwa salah satu faktor kegagalan suatu negara berkaitan dengan persoalan kemampuan terhadap pengelolaan keamanan (*The Washington Quarterly*, vol. 25, no. 3, 2006: 87). Selain itu, revolusi sebagai perubahan yang berlangsung cepat dan disertai dengan kekerasan (*A.S. Cohan*, 1975: 14) berekses terhadap buruknya keamanan yang menyebabkan jiwa dan harta benda rakyat menjadi tidak terjamin. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk memaksakan tuntutan terhadap pelaksanaan keamanan bersama di wilayah RI melalui pasukan *Gendarmerie* yang mengancam hilangnya hak

RI sebagai negara merdeka. Di Belanda korps ini berada dalam lingkungan Departemen Pertahanan yang diperbantukan untuk membina keamanan dan ketertiban umum maupun persoalan-persoalan polisi kehakiman (*Charles Reith, 1952: 243*).

Dalam masa revolusi, keamanan merupakan program prioritas dalam setiap kebijakan kabinet-kabinet yang berkuasa saat itu. Situasi keamanan yang dihadapkan pada ancaman bersama, yaitu pihak Belanda terhadap RI menyebabkan perluasan pekerjaan intelijen kepolisian yang saat itu di sebut Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) terus menuntut penataan organisasinya dalam memenuhi kebutuhan Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai penjamin keamanan dalam negeri. Walaupun demikian, kebutuhan terhadap pemenuhan personel, pendidikan dan sarana dalam melaksanakan tugasnya merupakan kendala yang dihadapi PAM di Pusat dan di daerah.

Kedudukan Jawatan Kepolisian Negara yang secara langsung berada di bawah Perdana Menteri sejak 1 Juli 1946 telah memberikan keleluasan dalam melakukan pembenahan organisasi terhadap institusi tersebut. Intelijen kepolisian sebagai kebutuhan integral dalam pelaksanaan fungsi kepolisian membantu tugas penegak keamanan dalam menentukan sikap guna menangani permasalahan dengan perhitungan yang baik. Di samping menghadapi maraknya kriminalitas dan gangguan-gangguan keamanan yang secara sengaja dilakukukan Belanda untuk mengacau keamanan dalam negeri RI, pergolakan internal yang sarat dengan pertentangan politik menjadikan keamanan sebagai agenda pokok yang harus di hadapi dalam setiap kabinet yang berkuasa saat itu.

Selanjutnya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi yang mengadopsi sistem kepolisian Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tugasnya dengan memberikan peran terhadap bagian PAM di tengah tantangan keamanan selama masa revolusi. Dalam hal ini, intensitas produk Bagian PAM dari pusat ke daerah dan sebaliknya menunjukkan tindakan



konkrit lembaga Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan *veiligheid, rust en orde* (keamanan, ketertiban, dan ketentraman) bagi Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda tersebut.

B. PAM: Fungsi Intelijen Kepolisian Negara RI

Sentralisasi kepolisian sebagai bangunan institusi dirancang guna menciptakan bentuk Kepolisian Nasional yang di sebut Jawatan Kepolisian Negara bertugas menjamin keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Namun, pada awal RI, status Kepolisian Negara RI masih mengikuti model kepolisian jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kolonial, Dinas Polisi Umum (Algemeene Politie) secara administratif adalah bagian dari Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri) yang bertugas menyelenggarakan urusan pegawai, pendidikan, persenjataan dan pelatihan kesatuan, tetapi tidak memiliki hak untuk mencampuri pelaksanaan operasionalnya.

Di awal pemerintahan RI, secara administratif Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan secara operasional kewenangan kepolisian berada di bawah Jaksa Agung yang berwewenang sebagai polisi preventif dan represif. Padahal dalam bangunan Kepolisian Nasional, seperti yang diperintahkan Presiden Soekarno saat melantik R.S Soekanto sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI pada tanggal 29 September 1945, sebagai korps menuntut peletakan dasar-dasar hubungan yang baik antara pusat dan di daerah-daerah. Selain itu keseragaman merupakan dasar yang dibutuhkan untuk menimbulkan perasaan satu korps di kalangan kepolisian negara. Pembentukan susunan organisasi kepolisian yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan persyaratan yang diprioritaskan dalam membangun alat negara, seperti institusi kepolisian ini. Oleh karena itu, keluarnya Penetapan Pemerintah No 11/SD Tahun 1946 yang diberlakukan sejak 1 Juli 1946 menjadi momentum perubahan status kepolisian yang secara independen

berada di bawah Perdana Menteri. Status baru ini memudahkan kepolisian untuk melaksanakan kewenangan tugasnya di seluruh wilayah RI (*Koesnodiprodjo, 1951: 290*).

Suasana revolusi yang melingkupi tugas pokok Kepolisian Negara RI dengan perubahan-perubahan wilayah kepolisian sebagai dampak kebijakan diplomasi yang dilakukan pemerintah RI dengan pihak Belanda, menyebabkan secara de facto polisi RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjamin keamanan dan ketertiban. Selain itu, ekses revolusi telah membawa akibat terhadap perubahan kondisi keamanan dalam negeri. Diantaranya, kerusuhan-kerusuhan sebagai akibat pelbagai pergolakan politik yang disebabkan adanya pertentangan ideologi, tingginya tingkat kriminalitas biasa hingga yang sengaja diciptakan Belanda untuk mengacaukan keamanan RI, serta kerusuhan-kerusuhan lainnya.

Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah yang berpedoman pada aturan-aturan HIR (*Herziene Indlandsche Reglement=Reglement Indonesia yang Diperbaharui*) menempatkan Bagian PAM berperan sebagai polisi preventif dan represif dalam pelaksanaan tugasnya guna menegakkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Dalam konteks tugas tersebut PAM di wilayah Kepolisian Negara RI wajib menyesuaikan cara kerjanya dengan situasi revolusi. Lingkup tugas itu memberikan peranan terhadap PAM yang bertanggung jawab terhadap tugas pengawasan pergerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, agama, pengawasan terhadap bangsa asing, dan lain-lain. Dalam hal ini kegiatan intelijen sebagai salah satu fungsi kepolisian memiliki proporsi kerja yang berpeluang besar terhadap tindakan-tindakan infiltrasi dalam semua jenis institusi dan aspek kehidupan masyarakat. Namun, mayoritas hasil laporan PAM di dominasi oleh kegiatan-kegiatan politik yang berposisi terhadap pemerintah saat itu (*G. Ambar Wulan, 2009: 88*).

Fungsi intelijen dalam pelaksanaan tugas kepolisian memiliki



kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan fungsi preventif dan represif yang bersifat universal. Dalam konteks situasi revolusi saat itu, fungsi preventif berarti bahwa Bagian PAM berkewajiban menunjang aliran-aliran yang memperkuat kedudukan RI, baik ke luar maupun ke dalam, serta mengeliminasi aliran-aliran yang merugikan pemerintah. Sementara itu, fungsi represif berarti bahwa bagian PAM berkewajiban mengambil tindakan-tindakan terhadap anasir-anasir, baik perorangan maupun gerombolan yang dianggap bersalah dari sudut politik negara (*Ibid*).

Sementara itu, penandatanganan perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 menyebabkan wilayah tugas Jawatan Kepolisian mengalami penyempitan, yakni mencakup Jawa, madura, dan Sumatra. Walaupun demikian, laporan-laporan PAM menunjukkan jelajah kerjanya tidak hanya terbatas di wilayah RI, tetapi mampu menembus batas wilayah Belanda. Bahkan, dari laporan-laporan tersebut, masalah-masalah keamanan di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai wilayah *status quo* (demiliterisasi) pasca gencatan senjata antara RI dan Belanda terpantau oleh pola kerja PAM yang terepresentasikan oleh hasil-hasil capaian yang dilaporkannya. Diantaranya, tindakan-tindakan Belanda yang mengingkari kedudukan RI, baik di daerah-daerah pendudukan maupun daerah RI dalam bentuk serangan berupa gangguan-gangguan keamanan. Produk-produk informasi ini dibutuhkan, terutama bagi Kepolisian Negara RI, pemerintah, dan jawatan-jawatan RI yang membutuhkannya. Di samping itu, lingkup pekerjaan PAM ditengah-tengah badan rahasia lainnya, capaian produk PAM memiliki nilai bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah melalui peranan Kepolisian Negara RI sebagai pengelola keamanan di dalam negeri.

Kondisi keamanan saat itu yang menuntut pemenuhan tenaga PAM secara memadai, salah satu prioritas kebijakan Bagian PAM Pusat di bawah pimpinan PAM Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab mengeluarkan

aturan tentang larangan perangkapan pekerjaan bagi anggota-anggotanya dengan tugas-tugas lain dalam Kepolisian Negara RI. Adapun tugas utama Bagian PAM dalam melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran politik di masyarakat serta menyediakan bahan-bahan sebagai salah satu produk yang mendukung informasi bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah, mewajibkan anggota-anggotanya mengikuti program kabinet terkait dengan permasalahan keamanan. Di samping itu, Bagian PAM diwajibkan mengikuti perjuangan berbagai aliran politik partai-partai yang membahayakan pemerintah sebagai salah satu bentuk kerja dari polisi preventif dan represif (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, 370).

Sebagai usaha mencapai produk bernilai tinggi bagi Kepolisian maupun pemerintah, Bagian PAM Pusat yang berada di Yogyakarta melakukan pula peningkatan jumlah anggota-anggota PAM, baik di karesidenanan maupun di daerah-daerah lainnya. Sebagai upaya mempercepat penyediaan produk laporan-laporan yang dihasilkannya, baik di pusat maupun di daerah, Bagian PAM mengintensifkan cara kerjanya melalui sarana perhubungan radio yang dijaga kerahasiannya dalam masalah lokasi pemancar, jam siaran, kode berita, dan lain-lain. Pemancar yang digunakan sebagai alat komunikasi ini dibangun di daerah-daerah, seperti Blitar, Madura, Magelang, Solo, dan lain-lain (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949: Order PAM Pusat tgl 20 Juli 1948*).

Pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian di masa revolusi yang sarat dengan situasi perpolitikan sekelilingnya, menjadikan tugas PAM hanya mengandalkan acuan kerjanya melalui para polisi bumiputera yang memperoleh pendidikan dan latihan tentang intelijen pada masa Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintahan Pendudukan Jepang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan model kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan besarnya peran PAM dalam kaitan pengelolaan keamanan dalam negeri tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah dalam mengamankan kebijakan-kebijakan politiknya.



C. PAM dan Perannya Dalam pengelolaan Keamanan Dalam Negeri

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah dalam melaksanakan *veiligheid, rust, en orde* tidak terlepas dari *environment* dengan pelbagai kebijakan politik pemerintah dari masa kabinet Sjahrir, kabinet Amir Sjarifuddin, dan kabinet Hatta. Pembentukan PAM di saat Kepolisian Negara telah berada di bawah Perdana Menteri Sjahrir, ditandai dengan buruknya kondisi keamanan dalam negeri. Dalam laporan-laporan PAM disebutkan bahwa peningkatan gerakan pelbagai aliran politik yang memunculkan persaingan politik untuk menjatuhkan pemerintah telah memicu situasi keamanan saat itu. Adapun laporan-laporan PAM yang ditujukan bagi kepentingan pemerintah didasarkan pada Instruksi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman kepada Kepolisian Negara untuk melaporkan kondisi keamanan oleh situasi perpolitikan yang terus meningkat. Kondisi tersebut menjadi fokus perhatian PAM dalam melaksanakan fungsi intelijen untuk mendukung tugas kepolisian yang banyak tercurah bagi keamanan dan keselamatan pemerintah beserta lembaga-lembaganya dari unsur-unsur yang bertendensi hendak menghancurkannya (*G. Ambar Wulan, 2009: 123*).

Dari laporan-laporan itu disebutkan pula bahwa gangguan keamanan tersebut bersumber dari reaksi masyarakat dalam menentang kebijakan pemerintah, terkait strategi diplomasi dalam menghadapi Belanda. Sebagian besar kelompok-kelompok oposisi yang dilaporkan direpresentasikan oleh gerakan-gerakan perlawanan yang memiliki hubungan dengan Tan Malaka (pendiri Persatuan Perjuangan), partai-partai kubu sayap kanan (Masyumi, PNI, dan lain-lain), serta BPRI (Badan Pemberontak Rakyat Indonesia) sebagai organisasi yang dianggap radikal di bawah pimpinan Bung Tomo. Pengaruh-pengaruh gerakan yang terus dilakukan dalam melawan agenda-agenda pemerintah, terutama kebijakan pemerintah tentang diplomasi dengan Belanda yang telah mewarnai kondisi keamanan hampir selama berlangsungnya pemerintahan kabinet

Sjahrir yang mengalami jatuh bangun hingga tiga kali, terus mewarnai kondisi keamanan dalam negeri (*Ibid*: 125).

Di samping kegiatan-kegiatan perpolitikan internal yang mewarnai kondisi keamanan waktu itu, laporan PAM menyebutkan pula adanya gangguan keamanan yang direkayasa oleh Belanda. Salah satu laporan PAM yang memberikan informasi pada pimpinannya, Komisaris Klas I R. Oemargatab yang memberitahukan pada Kepolisian Karesidenan Pekalongan tentang penyebaran mata-mata sebagai kaki tangan Belanda ke daerah-daerah pedalaman yang menyelundup melalui jalan darat menuju daerah Kendal dan Pati dengan membawa ribuan uang palsu ORI (mata uang RI) guna mengacaukan perekonomian RI (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, bdl. 867*). Peristiwa yang terjadi pada bulan Desember 1947 menunjukkan bahwa perundingan Linggajati yang diparaf tanggal 15 November 1946 tidak menjadi jaminan bahwa Belanda patuh terhadap kesepakatan tersebut.

Walaupun demikian, perkembangan aliran-aliran masyarakat dalam mengakomodasi ketidakpuasan penentang kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan faktot yang melemahkan kedudukan pemerintah kabinet Sjahrir. Dalam hal ini, laporan-laporan PAM menunjukkan bahwa gangguan-gangguan keamanan yang bersumber dari gerakan-gerakan aliran politik berdampak terhadap adanya perpecahan mendalam di kalangan berbagai golongan. Produk laporan PAM digunakan Kepolisian secara khusus dalam tugasnya menjaga kemananan dan sekaligus sebagai dukungan informasi yang diberikan pada pemerintah dalam memperoleh informasi dalam memahami gerakan dan kekuatan oposisinya. Tindakan *police in politics* institusi melalui peranan PAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya dalam mengamankan kebijakan politik pemerintah yang telah dimulai sejak masa kabinet Shahrir ini. Tindakan penyelidikan tersebut telah membantu Kepolisian Negara RI menentukan sikap, baik terhadap kebijakan institusi maupun kebijakan politik



pemerintah dalam menghadapi masyarakat, dan juga suatu peristiwa (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, bdl. 399*).

Dalam situasi revolusi, laporan-laporan politik di wilayah RI sebagai produk PAM merupakan bahan-bahan yang bernilai tinggi bagi Kepolisian Negara RI sebagai dukungan informasi terkait dengan situasi politik yang terus berkembang di masyarakat. Diantaranya, permintaan laporan produk PAM oleh Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri terkait dengan reaksi masyarakat terhadap amanat pidato presiden pasca pemberontakan PKI Madiun 1948. Laporan PAM tentang reaksi kebijakan politik pemerintah kabinet Hatta, seperti “rekonstruksi dan rasionalisasi” (re-ra) sebagai program efisiensi ekonomi merupakan informasi yang diminta oleh pemerintah. Salah satu laporan PAM menyebutkan tentang adanya dukungan masyarakat di karesidenan Kediri terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, bdl. 455*).

Dalam menghadapi kekeruhan situasi perkembangan politik pasca pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, anggota PAM bekerja dengan cara melakukan infiltrasi ke dalam pengacauan yang dilakukan FDR (Front Demokrasi Rakyat) guna memperoleh informasi tentang pengiriman gerombolan para pelaku kerusuhan ke daerah lain di wilayah RI. Dari laporan PAM diperoleh berita-berita tentang pengiriman pelaku pengacauan ke daerah-daerah dekat garis *status quo* yang longgar penjagaannya. Hal ini disebabkan adanya pengiriman tentara ke front guna membantu pembersihan terhadap kerusuhan-kerusuhan di daerah RI lainnya. Laporan-laporan tersebut merupakan produk yang dikirimkan oleh Bagian PAM kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1948, “Laporan PAM tentang Kekacauan di daerah-daerah RI, 11 Oktober 1948”*).

Selanjutnya, cara kerja PAM semakin terfokus dalam pelaksanaan kerjanya dengan mengikuti kebijakan pemerintah dalam menangani

pasca pemberontakan. Dalam hal ini, PAM semakin terkonsentrasi guna mengawasi dan bahkan “terjun langsung” mengikuti gerakan berbagai partai yang bergabung dalam sayap kiri, seperti PKI, SOBSI, FDR, dll, serta gerakan-gerakan radikal dari aliran lainnya yang berkembang dalam masyarakat. Kekeruhan politik saat itu terus menjalar ke daerah-daerah RI lainnya, seperti di Kudus muncul sabotase, pembakaran, dan penggedoran-penggedoran. Menurut laporan anggota PAM yang melakukan infiltrasi dalam pengacauan FDR di Purwodadi menjelaskan bahwa segerombolan pengacau telah dikirim ke Karesidenan Kedu dan sebagainya lainnya masih berkeliaran di desa-desa dekat garis status quo. Mereka menyusun kekuatan di daerah-daerah yang kurang ketat penjagaannya oleh karena penarikan tentara di front untuk membantu pembersihan di dalam wilayah RI. Salah satunya adalah kehadiran anggota-anggota Pesindo yang berjumlah kurang lebih 150 orang ke daerah Grabag, Magelang. Mereka didatangkan ke daerah-daerah yang dijadikan “tempat berkumpul” guna menyusun kekuatan untuk melakukan pengacauan. Hal ini disebabkan masih banyak pemimpin FDR/PKI yang belum tertangkap (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, bdl. 574*).

Sehubungan kondisi tersebut, Kepala Bagian PAM Kepolisian Negara RI mengusulkan kepada Kepala bagian Urusan Pegawai Kepolisian Negara RI untuk tidak melakukan perubahan formasi terhadap pimpinan PAM kepolisian di daerah-daerah. Perubahan formasi anggota-anggota dalam Bagian PAM dapat menghambat tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara tegas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengacauan-pengacauan. Perpindahan atau kekosongan pimpinan dalam bagian PAM beresiko terhadap pelaksanaan tugas yang membutuhkan waktu untuk memahami permasalahan-permasalahan secara baik, terkait dengan tugasnya sebagai polisi preventif dan represif. Atas dasar alasan itu pimpinan-pimpinan PAM di daerah-daerah tetap dipertahankan (*ANRI, Arsip Kepolisian Negara 1947-1949, bdl. 411*).



Keberadaan PAM ini hanya berlangsung selama masa revolusi, dari 1944 hingga 1949, dan selanjutnya PAM berganti nama menjadi DPKN (Dinas Pengawasan Keselamatan Negara) dengan tugas menyesuaikan perkembangan situasi masyarakat pasca tahun 1950-an. Di samping itu, Kepala kepolisian Negara RI R.S. Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian RIS yang mendasarkan pada sistem dan ketatanegaraan berdasarkan pada Konstitusi RIS. Sejak 13 Maret 1951 PAM yang berperan besar sebagai salah satu bagian dalam Jawatan kepolisian Negara di masa revolusi, telah mengalami perubahan tugas, susunan, dan cara kerjanya dalam wujud DPKN.

D. Penutup

Pengalaman empiris lembaga Kepolisian RI dalam melaksanakan fungsinya di masa revolusi ini tetap aktual sebagai cermin dalam melihat persoalan pengelolaan keamanan, terutama dalam wacana intelektual yang masih sarat dengan perdebatan hingga kini. Hal ini menjadi *lesson learnt* yang dapat digunakan sebagai pijakan bernilai dalam menjawab persoalan-persoalan pengelolaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks saat ini.

Namun, Bagian PAM yang berperan sebagai polisi preventif dan represif hanya tepat digunakan saat RI berada dalam situasi perang kemerdekaan atau masa revolusi. PAM sebagai cikal bakal intelijen Kepolisian RI yang terus mengalami perkembangan dalam menyesuaikan situasi yang melingkupinya, dapat memberikan pembelajaran melalui pengalaman baik dan buruk terkait dengan perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sebagai tugas pokok polisi. Pengalaman buruk yakni pelaksanaan fungsi kepolisian melalui PAM pada masa revolusi, sebagian besar perannya terserap ke dalam pergolakan politik yang berlangsung selama masa revolusi. Dan, pengalaman baik yaitu keberadaan PAM tetap diprioritaskan, meskipun pemerintahan kabinet selama masa

revolusi mengalami pergantian berkali-kali. Cara kerja PAM, terutamaa dalam aspek politik tidak melakukan keberpihakan terhadap salah satu dari kepentingan penguasa. Peran PAM sebagai bagian dari pengelola keamanan di dalam negeri tetap menjalankan aturan-aturan institusi yang berpegang pada kepentingan politik negara dan bukan alat penguasa. Hal ini tercermin dari tetap dipertahankan R.S. Soekanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI dan Komisaris Klas I Oemargatab sebagai Kepala Bagian PAM Jawatan kepolisian Negara RI selama periode revolusi yang ditandai dengan pimpinan kabinet yang silih berganti.



Aksi-Aksi Kolektif Pada Masa Bersiap: “KASU S CE MAMAT”

Mohammad Iskandar

Pendahuluan

Aksi kolektif adalah aksi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang *nota bene* mempunyai identitas dan tujuan yang relatif sama pula. Mereka melakukan tindakan itu karena melihat adanya peluang (*oportunity*) yang diyakini dapat digunakan untuk mengubah situasi sesuai yang telah mereka susun atau bicarakan sebelumnya. Dalam struktur sosial politik yang normal di mana pemerintah yang berkuasa relatif kuat, aksi-aksi kolektif umumnya berjalan secara damai. Namun dalam situasi yang tidak normal, seringkali aksi-aksi kolektif itu disertai dengan tindak kekerasan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, aksi-aksi semacam antara nampak “masa bersiap” pasca Gestapu. Makalah hanya akan mengungkapkan aksi kolektif yang terjadi di daerah Banten pada masa bersiap.

“Masa Bersiap” merupakan suatu masa yang relatif pendek dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu sekitar empat atau lima bulan terhitung sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Masa ini merupakan periode yang sangat kritis dan menentukan, yang disebut sebagai periode yang kacau, sarat dengan berbagai tindak kekerasan, penjarahan, bahkan pembunuhan massal. Kondisi semacam itu tidak berarti bahwa semua pelaku sama sekali tidak mempunyai semangat kebangsaan. Justru banyak kelompok pemuda yang secara emosional setia kepada bangsa Indonesia. Namun karena kontrol pemerintah pusat - yang *nota bene* masih mencari-cari bentuk, nyaris tidak ada, maka mereka menafsirkan sendiri arti perjuangan dan memutuskan sendiri siapa yang menjadi musuh republik. Namun umumnya yang

menjadi sasaran adalah orang-orang atau kelompok orang yang dinilai sebagai kolaborator pemerintah sebelum PD II atau kaki tangan pemerintah Belanda, termasuk di dalamnya orang-orang dari etnik Cina (Bussemaker, 2005: 101-102).

Selintas aksi-aksi kekerasan secara kolektif yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, menunjukkan beberapa ciri yang mirip dengan aksi-aksi kekerasan pada masa bersiap”, seperti isu rasial dan agama. Namun jika dicermati lebih dalam, ternyata isu-isu rasial atau agama yang muncul lebih banyak dikaitkan dengan faktor kedekatan atau keterkaitannya dengan penguasa kolonial sebelum PD II. Seperti disampaikan oleh van Doorn: Maar voor goed begriip van de maatschappelijken historische betekenis van deze periode is het nuttig te beseffen dat de “bersiap“ veel meer was; een revolutionair proces, waarbij met geweld van wapenen een sociale opstand werd doorgevoerd en een collectief nationaal sentiment werd gedemonstreerd, gericht tegen terugkeer van de “kolonie“ (van Doorn, 1983). Dengan kata lain, masa bersiap secara sosial-historis harus ditafsirkan sebagai suatu proses perubahan yang revolusioner, di mana terjadi suatu gerakan sosial dengan kekerasan/bersenjata yang disertai sentimen nasional secara kolektif yang ditujukan terhadap penguasa kolonial yang hendak berkuasa kembali.

Pernyataan van Doorn yang menyiratkan kewajaran kondisi seperti itu terjadi, patut disikapi secara arif. Sebab, proses perubahan sosial atau politik yang terjadi di satu tempat, belum tentu terjadi di tempat lain. Artinya peristiwa di satu tempat tidak dapat begitu saja dapat dijadikan ukuran untuk menggeneralisasi peristiwa di tempat lain. Beberapa kasus yang terjadi sekitar bulan September 1945-Agustus 1946 di Jakarta-Tangerang (Cribb, 1991), Banten (Iskandar, 1992), “Tiga Daerah“ (Lucas, 1991), Sumatera Timur (Kahin, 1971) dan Sumatera Timur (Reid) yang disebut oleh Nasution dan Anderson (1972) sebagai “revolusi sosial“, bahwa



terjadinya “revolusi sosial“, menunjukkan bahwa penyebab terjadinya “revolusi sosial” beragam. Demikian pula dengan aksi-aksi kolektif, baik yang disertai tindak kekerasan maupun tanpa kekerasan mempunyai sebab dan dampak berbeda pula. Charles Tilly mengelompokkan tindak kekerasan secara kolektif itu menjadi enam variasi (Tilly, 2003:81-220). Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa aksi daulat di Banten tahun 1945 yang dilancarkan Ce Mamat dkk, dengan menggunakan konsep/model Tilly.

Kondisi sosial-politik Pasca Proklamasi

Seperti dilaporkan oleh koran-koran lokal dan dinas intelejen Belanda (*Netherlands Eastern Forces Intelligence Service-NEFIS*), Pasca Jepang menyerah, khususnya pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, di beberapa daerah muncul aksi-aksi kekerasan, baik secara individual maupun secara kolektif, lengkap dengan hukum rimbanya. Hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya pemerintah Pusat yang kuat. Pemerintah RI yang baru saja berdiri, belum mempunyai perangkat kekuasaan (termasuk birokrasi) yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimilikinya sangat terbatas. Kondisi ini semakin diperberat oleh tindakan pasukan NICA yang ikut mendompleng pasukan Sekutu, yang menyita kendaraan milik pemerintah RI tanpa alasan yang jelas. Pemerintah RI secara resmi mengajukan protes kepada “panglima” Sekutu atas tindakan tak bertanggung jawab itu¹

Berita kekalahan telah terdengar oleh kalangan pemuda yang bekerja pada kantor berita Jepang, Domei. Meskipun para pemuda nampaknya telah diindoktrinasi secara sempurna oleh Jepang, namun sesungguhnya telah meningkatkan rasa percaya diri dan sikap kritis

¹Lihat memorandum Presiden Soekarno 6 Oktober 1945 dan memorandum Wakil Presiden Hatta 8 Oktober 1945 kepada penguasa Sekutu (Christison-King), dalam *Officiele Beschieden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*. No. 36, S.L. van der Wal (ed.), -,s-Gravenhage, 1971.

termasuk terhadap Jepang sendiri. Mereka pun mempunyai kesadaran sejarah yang tajam dan merasa bahwa kemerdekaan yang diberikan Jepang terasa tidak nyaman di mata Sekutu yang menang perang. Oleh karena itulah mereka mendesak kaum tua seperti Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Nugroho Notosusanto, 1979: 131-132).

Sementara itu kaum tua menilai kemerdekaan sudah dijanjikan. Oleh karena itu untuk apa terburu-buru, apalagi harus berhadapan dengan Jepang, yang *nota bene* kekuatannya masih utuh. Lebih baik tenaga disimpan untuk menghadapi kekuatan Sekutu yang akan datang mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Para pemuda kemudian menculik Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengasdengklok. Kasus ini kemudian dapat diselesaikan oleh Ahmad Soebardjo, yang memberikan jaminan kepada para pemuda, bahwa, jika Soekarno-Hatta dibebaskan, proklamasi kemerdekaan akan segera dikumandangkan (Ahmad Subardjo, 1977: 86-87; Anderson, 1972: 74). Akhirnya Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta, dan keesokan harinya, Jumat, 17 Agustus 1945 (2605) proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan.

Berita kemerdekaan itu dengan cepat disebarkan ke berbagai pelosok Indonesia, baik melalui radio, telegram, maupun kurir. Namun mengingat situasi dan kondisi waktu itu, berita itu sampai ke tujuan dalam rentang waktu yang cukup beragam. Tanggapannya pun cukup beragam pula. Ada yang menanggapinya secara suka cita dan langsung mendukung pemerintah Indonesia, ada pula yang menafsirkannya sebagai kemerdekaan untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Pemikiran seperti inilah yang mendorong tokoh-tokoh lokal di daerah tertentu mengambil tindakan sendiri, yang membuat situasi sosial-politik menjadi tidak menentu dan cukup mencekam. Seperti telah disebutkan di atas, periode yang kacau ini dikenal dengan sebutan “Masa Bersiap”.



Masa Bersiap

Berita tentang kekalahan Jepang dari pihak Sekutu sebenarnya sudah ditengarai oleh pimpinan tentara Peta Bogor, *Daidancho Haji Abdullah bin Nuh*. Menurutny, beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, waktu pasukannya bertugas di Ujung Genteng-Jampang Kulon, Sukabumi, ia menyaksikan pengawas Jepang melucuti senjata pasukannya dengan alasan senjata-senjata itu sudah usang dan akan diganti dengan yang lebih modern (Susanto Zuhdi, 1979: 223-224). Pelucutan senjata seperti itu ternyata tidak hanya di wilayah *Bogor Shū* saja, melainkan dilakukan serentak di tiap daerah. Rupanya pemerintah pendudukan Jepang masih trauma dengan peristiwa pemberontakan Peta di Blitar beberapa bulan sebelumnya. Mereka khawatir jika tentara Peta mendengar berita kekalahan Jepang, akan melakukan balas dendam kepada pihak Jepang (Nugroho Notosusanto, 1979: 128).²

Sehari setelah proklamasi dibacakan, PPKI mengadakan sidang dengan agenda memilih kepala negara. Dalam sidang itu, secara aklamasi Ir. Soekarno terpilih menjadi presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Di samping itu ditetapkan pula Undang-undang Dasar bagi negara Republik Indonesia serta pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bertugas membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. KNI Pusat (KNIP) baru terbentuk pada 29 Agustus 1945. Anggotanya berjumlah 135 orang yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta. Setelah KNIP terbentuk, di daerah-daerah didirikan pula KNI-Daerah (KNID). Umumnya anggota KNID dipilih oleh rakyat seperti halnya di keresidenan Bogor. Terpilih sebagai ketuanya adalah dr. Abu Hanifah (Abu Hanifah, 1978:47). Namun ada pula KNID yang

² Ada yang berpendapat bahwa dibubarkannya Peta dan Heiho adalah atas usul Otto Iskandar di Nata melalui PPKI. Alasannya karena Sekutu tidak menyukai produk yang berbau Jepang, sehingga Indonesia yang merdeka dapat dianggap sebagai boneka Jepang. Oleh karena itu, PPKI kemudian mengusulkan kepada Jepang untuk membubarkan kedua organisasi militer tersebut. Pendapat ini antara lain dikutip oleh R.H.A. Saleh. Lihat Saleh, 2000: 102-103.

diprotes bahkan didaulat oleh sebagian masyarakat seperti yang terjadi di keresidenan Banten. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan, KNID-KNID inilah yang sebenarnya memerintah Republik Indonesia, termasuk mengontrol Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk juga pada 29 Agustus 1945.

Kalangan pemuda sebenarnya menghendaki agar pemerintah segera pula membentuk tentara nasional. Namun Soekarno - Hatta menolak itu dengan alasan tidak ingin melakukan provokasi terhadap kekuatan Sekutu. Mereka merasa khawatir Sekutu akan melakukan penghancuran terhadap Republik yang *nota bene* belum mempunyai cukup tenaga dan ketrampilan militer untuk mengadakan perlawanan (Nugroho Notosusanto, 1979: 141-142). Pemerintah RI ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Pemerintah hanya menyetujui pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berada di bawah kontrol KNIP dan KNID. Pada dasarnya BKR bukanlah tentara. Akan tetapi dengan adanya bentrokan-demi bentrokan dengan pasukan Inggris yang sulit dihindari, maka pada 15 Oktober 1945 pemerintah memanggil mantan Mayor KNIL Urip Sumohardjo bersama beberapa mantan KNIL dan Peta. Dari rapat itu akhirnya disetujui untuk membentuk Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Urip diberi tugas untuk menjadi formatur TKR dengan kedudukan sebagai Kepala Staf Umum (KSU) TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Meskipun sudah ada kepastian tentang dibentuknya organisasi tentara, namun masih banyak kekuatan politik dalam negeri yang menilai keputusan itu sebagai sikap ragu-ragu yang dapat ditafsirkan sebagai kelemahan. Oleh karena itu banyak kelompok “politik” membentuk lembaga kelasykaran sendiri, seperti Hizbullah, Lasykar Leuwiliang, Lasykar Pesindo, Bambu Runcing, dll. Kelemahan seperti itu pula yang akhirnya mendorong muncul aksi-aksi perorangan maupun kelompok yang disertai tindak kekerasan, yang nyaris tidak terkontrol oleh pemerintah RI. Bahkan di beberapa daerah, beberapa jawara dan perampok



berupaya pula melakukan aksi daulat terhadap pejabat RI setempat dan membunuhnya dengan alasan mereka adalah kaki tangan Belanda. Akibat aksi-aksi seperti itu, beberapa tokoh pergerakan politik dan budaya ikut menjadi korban, misalnya Amrin Pane (Sumatera Timur) dan Otto Iskandar di Nata (Jawa Barat).

Perebutan kekuasaan di wilayah kabupaten Bogor sendiri dimulai dengan perebutan kantor *shūchokan*, tak lama setelah berita proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah ini. Awalnya pihak Jepang yang mendapat mandat dari Sekutu untuk menjaga *status quo*, tidak mau menyerahkan gedung tersebut. Namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin pemuda, Muhammad Sirodj, akhirnya pihak Jepang mau menyerahkan kantor tersebut (*Tjahaja*, 19 Agustus 1945).

Akan tetapi dalam proses pemindahan kekuasaan itu tidak semuanya dapat berjalan damai seperti yang ditempuh Muhammad Sirodj. Banyak aksi-aksi brutal dan anarkhi terjadi di wilayah ini. Di Depok misalnya, pada 7 Oktober 1945 terjadi kericuhan karena penduduk setempat memboikot orang-orang Eropa termasuk orang-orang yang dinilai menjadi kaki tangan Belanda. Mereka menghalang-halangi orang-orang Eropa itu membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu mereka melarang para pedagang menjual barang dagangannya kepada orang-orang Eropa. Bahkan menurut laporan intelejen Belanda, aksi tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada orang Eropa saja tetapi juga kepada indo-indo dan orang-orang yang beragama Kristen, yang sebelumnya dikenal sangat dekat dengan orang-orang Belanda. Selanjutnya laporan ini menyebutkan pula bahwa di beberapa tempat di wilayah Depok, perampokan itu melibatkan orang-orang dari Barisan Pelopor³ yang dikenal sebagai pekerja Asisten Wedana Depok. (Algemeen Secretarie 1942 - 1945 No.1240, Arsip Nasional Republik Indonesia).

³Barisan Pelopor merupakan barisan pemuda yang didirikan bulan September 1944 sebagai dukungan terhadap *Jawa Hokokai*. Jabatan tertinggi *Hokokai* untuk wilayah Bogor Shū dipegang oleh Gatot Mangkupradja (*Bogor Shū Rengōkai Taicho*) dan Suradiredja sebagai wakil kepala pasukan. Lihat *Tjahaja*, 26 September 1944.

Kemudian pada 9 Oktober segerombolan yang bersenjatakan bambu runcing merampok lima keluarga yang disebut-sebut sebagai kaki tangan Belanda. Mereka

Kemudian pada 9 Oktober segerombolan yang bersenjatakan bambu runcing merampok lima keluarga yang disebut-sebut sebagai kaki tangan Belanda. Mereka menjarah semua harta kekayaannya. Keesokan harinya, giliran gudang koperasi tempat menyimpan bahan pangan dijarah oleh sekelompok gelandangan. Polisi dan para aparatur pemerintah RI yang mengetahui kedua peristiwa tersebut tidak melakukan tindakan apa-apa selain berdiri menontonnya (*I b i d*).

Kekacauan pun semakin meningkat dengan lemahnya koordinasi antara polisi dan BKR yang seharusnya menjaga keamanan. Pada 11 Oktober, sekitar 4000 orang datang ke Depok, ada yang naik kereta api, truk bahkan gerobak sapi. Pihak intelejen Belanda melaporkan bahwa kedatangan orang-orang itu dengan sepengetahuan aparatur pemerintah dan kepolisian RI. Tidak ditemukan antahan atau pembenaran dari pihak RI mengenai masalah ini, yang pasti gerombolan tersebut dengan bebas merampok dan mengobrak-abrik rumah-rumah dan mengusir penghuninya, terutama penduduk Kristen Eropa. Para korban itu sulit mencari perlindungan karena lari ke hutan-hutan pun keselamatan mereka tidak terjamin.

Sebab di sekitar hutan juga banyak perampok yang mengambil harta bendanya seperti pakaian, makanan, uang kertas Jepang dan Belanda, permata dan uang perak Belanda. Laporan intelejen menyebutkan bahwa dengan melihat ciri-cirinya, cukup jelas bahwa aksi-aksi itu merupakan aksi kolektif yang terorganisir secara baik. Artinya ada orang atau kelompok tertentu yang mengorganisir aksi-aksi tersebut. (*i b i d*)

Selanjutnya laporan itu menyebutkan pula bahwa dengan sikap aparatur dan polisi RI yang pasif, maka aksi-aksi aksi-aksi kolektif



yang disertai tindakan kekerasan semakin meningkat. Pada 13 Oktober misalnya, dilaporkan 10 orang warga Depok mati terbunuh dalam kekacauan itu. Hampir semua penduduk Eropa diburu oleh BKR dan Pelopor (yang dikenal dari pita yang diikatkan di lengannya). Mereka ditangkap dan dikumpulkan di belakang stasiun kereta Depok (Depok Lama). Di tempat itu, baik pria, wanita, maupun anak-anak ditelanjangi hingga tinggal celana dalam dan BH. Semua pakaian dan perhiasannya dirampas oleh para perampok yang ada di tempat itu dengan pengawasan Barisan Pelopor (*ibid*).

Aksi kekerasan itu tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang dituduh atau dicurigai sebagai kaki tangan Belanda, kadangkala juga menimpa orang-orang *republikein*. Tidak sedikit penjahat atau perampok yang memanfaatkan kekacauan itu untuk kepentingan sendiri. Salah tindak kekerasan seperti yang disebutkan di atas, laporannya sampai ke tangan Mayor A.E. Kawilarang yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Bogor/Divisi II TKR. Isi laporan itu menyebutkan bahwa di Cisarua ada dua wanita pengungsi Menado bersama-sama anak-anaknya yang minta perlindungan. BKR sudah memberi jaminan kepada mereka bahwa esok hari akan dibawa ke Bogor untuk selanjutnya dikirimkan ke daerah aman. Namun sewaktu akan diangkut, ternyata tempat menginap kedua wanita tersebut telah dirampok. Kedua wanita beserta anak-anaknya yang berjumlah 12 orang telah mati dengan luka-luka bacokan di sekujur tubuhnya. Seluruh harta bendanya habis dijarah (Ramadhan KH, 1988: 74).

Dari sekian banyak aksi dengan tindak kekerasan secara kolektif yang terjadi pada “masa bersiap”, aksi pimpinan Ki Nariya dari Leuwiliang merupakan aksi yang cukup untuk diungkapkan. Karena aksi ini sempat menawan pimpinan pemerintahan RI di Keresidenan Bogor, khususnya di tingkat kabupaten. Ki Nariya yang mendapat dukungan dari Lasykar Gulkut (Gulung Bukut) pimpinan The Mamat

menangkap Residen Bogor R. Barnas Tanuningrat dan Kepala Polisi R. Enoch Danubrata dan mencopot jabatannya. Setelah itu semua pejabat pemerintah RI yang ada di Bogor diganti oleh Ki Nariya-Tje Mamat. Ki Nariya kemudian mundur ke Dramaga, setelah kesatuan polisi dan aparaturnya setempat dilucutinya dan diganti oleh orang-orangnya. Sebagai catatan, Tje Mamat dengan laskarnya itu sampai ke daerah Bogor, tepatnya Leuwiliang, karena melarikan diri setelah aksi daulatnya di Banten mengalami kekalahan.

Aksi Ki Nariya dan kawan-kawannya nyaris pula mendapat pengakuan dari pemerintah RI di Jakarta yang kurang mendapat informasi tentang perkembangan sosial-politik di wilayah sekitar Jakarta-Bogor, sehingga nyaris mengakui kepemimpinannya. Namun setelah menerima laporan dari Bogor, pimpinan di Jakarta memerintahkan agar pimpinan TKR di wilayah Bogor untuk segera menindak tegas gerakan Ki Nariya-Tje Mamat itu (Ramadhan KH, 198: 62-63 dan lihat juga Laporan Agen Khusus tgl. 25 Maret 1946 No.KH2/29170/G, Alegenemeen Secretarie, ANRI).

Setelah menerima perintah itu, pasukan gabungan dari Resimen Bogor yang terdiri dari Batalyon II pimpinan Mayor Toha, Batalyon III pimpinan Kapten Haji Dasuki Bakri, Polisi Istimewa pimpinan Muharam Wiranata Kusuma, Laskar Hizbullah pimpinan E. Affandi, Laskar Bogor pimpinan Dadang Sapri, Pasukan Jabang Tutuka pimpinan R.E. Abdullah, dan Laskar Leuwiliang pimpinan Sholeh Iskandar berhasil mengepung dan menyergap Ki Nariya dkk di Dramaga. Tje Mamat sendiri berhasil meloloskan diri dari sergapan pasukan gabungan, akhirnya berhasil disergap oleh Laskar Leuwiliang pimpinan Sholeh Iskandar. Selanjutnya Tje Mamat dengan laskarnya yang merupakan buronan dari Banten, dikirimkan ke Komandemen



I Jawa Barat yang berkedudukan di Purwakarta (Sri Handajani Purwaningsih, 1984: 91).

Dalam suasana dalam negeri yang kacau balau seperti itu, pihak RI juga harus berhadapan dengan pihak Inggris selaku pasukan Sekutu (yang didalamnya ikut pula orang-orang NICA-Belanda) yang datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan para tawanan Jepang. Seperti telah banyak diungkapkan oleh banyak peneliti sejarah, kesalahan pandangan dan persepsi antara pihak RI dengan Inggris, membuat proses rekapitulasi Jepang tidak berjalan mulus. Bentrokan-bentrokan, sampai pertempuran antara lasykar atau BKR/TKR melawan pasukan Inggris-Belanda kerap terjadi di berbagai tempat seperti: di Depok (Merdeka No.155, 30 Maret 1946), Cibinong, Cikeas, Bojong Kulur, (Merdeka No. 166, 12 April 1946), Cileungsi (Merdeka No.157, 2 April 1946), Leuwi Malang, Ciburial, dan Cikemasan (Merdeka No. 159, 4 April 1946). Oleh karena seringkali lasykar atau TKR melakukan sergapan-sergapan atas konvoi mereka, maka tidak jarang pasukan Inggris-Belanda melakukan tindakan balasan dan penggeladahan terhadap rumah-rumah penduduk (Merdeka No.155, 30 Maret 1946; No. 156, 1 April 1946 dan No. 159, 4 April 1946).

Oleh karena kurang baiknya koordinasi antara TKR dengan badan-badan kelasykaran, maka tidak jarang terjadi bentrokan antara TKR melawan lasykar (Ramadhan Kh,1988: 61). Seringkali pula lasykar-lasykar melakukan serangan yang merugikan reputasi RI, misalnya menyerang konvoi pengangkut pasukan Jepang, yang sebelumnya telah disepekat oleh pihak RI dengan pihak Sekutu untuk lewat ke wilayah Bogor. Oleh karena itu pimpinan TKR di Keresidenan Bogor memperingatkan agar konvoi 11 truk yang akan melewati Cimande menuju Jakarta tidak diganggu, karena isinya adalah para serdadu Jepang yang akan dikembalikan ke negeri asalnya (Algemeen Secretarie 1942-1950 No. 1240, ANRI).

Akhir Masa Bersiap

Jika pada awalnya pimpinan RI tidak begitu antusias untuk membentuk tentara nasional karena “takut” dicap tidak beritikad baik dan fasis, namun dengan melihat kenyataan di lapangan, pendirian itu berubah. Perubahan itu antara lain terlihat dengan terbitnya maklumat tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Pada bulan Februari 1946 nama itu diubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan dua minggu kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Waktu itu penyusunan TKR/TRI masih meniru *Departemen van Oorlog* KNIL di Bandung. Menurut A.H. Nasution, semula direncanakan susunan organisasi terdiri dari tiga divisi di Jawa dan satu di Sumatera. Namun kenyataannya waktu itu sudah ada selusin jenderal di Yogyakarta dengan 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera yang mencakup sekitar 100 resimen infantri (Nasution, 1963).

Bertolak dari kenyataan itu maka divisi yang sudah ada di Jawa diformulasikan ke dalam 3 komandemen di Jawa dan 1 komandemen di Sumatera. Ketiga komandemen di Jawa tersebut adalah:

- Komandemen I : Jawa Barat (Mayjen Didi Kartasasmita/eks KNIL)
- Komandemen II : Jawa Tengah (Mayjen Suratman/eks KNIL)
- Komandemen III : Jawa Timur (Mayjen Mohamad/eks Peta)

Ketiga kepala komandemen diangkat berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan kemudian pada 19 Desember 1945 No. 44/MT yang ditandatangani oleh Letjen Urip Sumohardjo, kepala Markas Besar Umum TKR (Saleh, 2000: 129). Dalam praktiknya, hanya Komandemen I yang berhasil dibentuk, sedangkan tiga lainnya, tidak. Hal ini terjadi karena di ketiga wilayah lainnya, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera, terjadi semacam persaingan antara mantan tentara didikan Jepang (khususnya Peta) dengan mantan tentara didikan Belanda, KNIL (Anderson, 1972). Sementara di Jawa Barat terjadi kesepakatan dan kebesaran hati antara mantan Peta dan KNIL. Mereka bersedia untuk



bekerjasama dalam Komandemen, walaupun pimpinan dan stafnya kebanyakan mantan KNIL (Saleh, *I b i d*). Mereka lebih banyak mengemukakan kepentingan nasional, khususnya melawan ancaman Belanda-NICA yang sudah ada di depan mata mempersoalkan siapa yang paling nasionalis atau berhak menjadi pimpinan.

Semangat itu juga nampak dalam reorganisasi TKR/TRI di wilayah Keresidenan Bogor. Waktu itu, secara militer terbagi dua, yaitu masuk Divisi I Banten-Bogor dengan Kolonel Kiai Haji Syam'un sebagai panglimanya, dan Divisi III Priangan-Bogor dengan Kolonel Arudji Kartawinata/A.H. Nasution sebagai panglimanya. Dalam perkembangannya, wilayah tanggung jawab Divisi I hanya mencakup Keresidenan Banten saja, karena oleh KSU TKR dibentuk sementara Divisi XI di bawah pimpinan Kolonel Abdul Kadir yang bertanggung jawab atas daerah (kabupaten) Bogor (Saleh, *I b i d*). Di bawah divisi ini terbentuk Resimen 2 di bawah pimpinan Husein Sastranegara. Baik pembentuk divisi maupun resimen yang *nota bene* dibentuk lebih dahulu, bahkan juga sudah mempunyai nomor urut, dapat dikatakan berjalan demikian mudah, tanpa gejolak.

Adapun batalyon yang ada di Bogor waktu itu adalah: Batalyon I di bawah pimpinan Mayor Ibrahim Adjie yang bertanggung jawab atas daerah Depok, Bojong Gede dan sekitarnya. Batalyon II di bawah pimpinan Mayor Toha yang bertanggung jawab atas daerah Cijeruk sampai ke sekitar kota Bogor. Batalyon III di bawah pimpinan Mayor Haji Dasuki Bakri yang bertanggung jawab atas daerah Ciampea dan Leuwiliang. Batalyon IV di bawah pimpinan Mayor Abing Sarbini yang bertanggung jawab atas daerah Cileungsi, Citeureup sampai Cibarusah (Rmadhan Kh, 1988: 62).

Seperti disinggung di atas, reorganisasi dan struktrisasi di wilayah Jawa Barat berdampak cukup positif, baik secara intern maupun ekstern. Tidak ada lagi kecurigaan antara mantan KNIL, Peta, Heiho,

maupun mantan barisan perjuangan. Bahkan seperti diungkapkan oleh Nasution, ada pula badan kelasykaran yang minta bergabung atau diakui sebagai bagian dari Misalnya Garut muncul Resimen “Perjuangan” di bawah pimpinan Kolonel Sutoko dan di Subang muncul “Lasykar Rakyat” di bawah pimpinan Mayor Rambe (Nasution, 1963: 200).

Di wilayah kabupaten Bogor sendiri, reorganisasi/strukturisasi tentara ini membuat komando militer menjadi semakin baik, dan koordinasi baik sesama TKR/TRI maupun dengan badan-badan perjuangan semakin baik pula. Hal ini antara lain tercermin dalam kerjasama menumpas gerakan Ki Narija-Tje Mamat di Leuwiliang dan Dramaga. Demikian pula dalam menghadapi kekuatan Inggris dan Belanda-NICA. Sebagai catatan, sejak bulan Januari 1946 Markas Resimen Bogor/Divisi II berada di Dramaga, karena waktu itu kota Bogor telah dikuasai oleh Inggris, walaupun pemerintahan sipilnya masih tetap berkedudukan di kota Bogor. Bahkan seperti diuraikan oleh Kawilarang, “di Bogor ganjil sekali”. Sewaktu TKR dengan tentara Sekutu main kucing-kucingan dan saling tembak, saling mencegat; sementara itu pemerintah setempat (Bogor) dan polisi mengadakan rapat dengan Inggris mengenai keamanan setempat, dan sebagian besar natulen hasil rapat itu sampai juga ke tangan TKR.

Bahkan menurut Kawilarang, pada suatu waktu Residen Bogor Barnas Wiratuningrat mengadakan makan malam bersama Walikota Odang dengan mengundang komandan brigade Inggris dan stafnya. Dari pihak TKR juga hadir Kolonel Abdul Kadir, Letkol Hidayat Sukarmadijaya, Kapten Yusuf Hardjadiarta dan Kawilarang sendiri (Ramadhan Kh, 1988: 69). Semakin terkordinasinya hubungan pemerintah, TKR dan polisi, kontrol pemerintah atas wilayah kekuasaannya semakin baik. Kondisi itu secara perlahan-lahan mengakhiri masa tak menentu. Memang sulit untuk memastikan, kapan tepatnya Masa Bersiap itu berakhir, namun secara umum kondisi semacam itu berakhir setelah peristiwa 3 Juli



1946. Walaupun setelah itu pun masih ada benalu-benalu revolusi yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri.

Epilog

Sejarah adalah masa lampau manusia alias masa yang sudah tidak bisa diulang lagi. Kalau begitu untuk apa mempelajari sejarah, jika hasilnya tidak bermanfaat untuk masa kini? Memang kalau mempelajari sejarah hanya sekedar ingin tahu “cikal bakal”, “geneologi”, atau jasa dan peranan tokoh-tokoh tertentu di masa lampau, maka manfaatnya akan berhenti setelah terpenuhi keinginan itu. Akan tetapi berbeda dampaknya jika mempelajari sejarah itu justru untuk masa kini. Seperti diungkapkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam pidato guru besarnya, Sejarah itu untuk masa kini, bukan untuk masa lampau. Artinya yang kita pelajari dari masa lampau adalah kearifannya. Dengan kearifan itu kita membangun masa kini serta merancang masa depan.

Dari Masa Bersiap yang relatif singkat, banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran atau bandingan untuk membangun masa kini, khususnya kabupaten Bogor. Pertama, Masa Bersiap itu terjadi karena pemerintah pusat, karena keterbatasannya tidak berani bertindak cepat dan tegas. Bahkan ada kelengkapan Negara yang harus segera dibangun justru diambangkan atau ditunda, misalnya pembentukan tentara. Padahal pada waktu itu, kedaulatan RI sedang menghadapi ancaman yang cukup serius. Kedua, Tidak ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara aparat keamanan, seperti polisi dengan BKR di bawah KNID maupun dengan badan-badan kelasykaran yang umumnya menjadi bagian dari kekuatan politik, baik kekuatan politik agama maupun sekuler. Akibatnya, setiap kekuatan merasa independent atau mempunyai hak otonomi untuk menafsirkan kemerdekaan itu, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk aksi-aksi, di antaranya aksi-aksi

kekerasan, termasuk aksi daulat. Ketiga, dari aksi-aksi itu dapat disimak bahwa pada dasarnya manusialah yang menentukan sejarah. Jika sejarah itu adalah (proses) perubahan, maka manusialah agen perubahan (agent of change- lihat Lloyd, 1992).

Pertanyaannya, apakah semua manusia dapat menjadi agen perubahan? Kalau pertanyaan seperti itu dikaitkan dengan salah satu agama atau kepercayaan, jawabnya “ya”. Tetapi dikaitkan realitas maka “tidak”. Yang dapat menjadi agen perubahan hanyalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan. Untuk tingkat kabupaten, orang yang dinilai mempunyai kemampuan itu adalah bupati atau camat. Masalahnya adalah, adakah kemauan pada orang-orang yang mempunyai kemampuan itu untuk melakukan perubahan? Jawabnya berpulang kepada orang-orang tersebut.





BAGIAN KETIGA
PERUBAHAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN



DARI *VORSTENLANDEN* KE DIY: Kesinambungan dan Perubahan

Oleh: Djoko Suryo¹

INTISARI

Tulisan singkat ini akan mengulas tentang perjalanan sejarah terbentuknya daerah *Vorstenlanden* sampai dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu usaha untuk mencari kearifan dari keragaman pengalaman sejarah masyarakat Indonesia yang bermanfaat bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ulasan ini dipandang penting, mengingat peristiwa terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari proses perjalanan sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia beserta masyarakat dan bangsanya, baik dari masa sebelum maupun masa sesudahnya. Keeratan hubungan tersebut memungkinkan untuk dipahami tentang keunikan pengalaman dan kearifan sejarah dari proses pergeseran Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dari kedudukannya sebagai daerah *Vorstenlanden* pada masa kolonial Belanda ke kedudukannya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa kemerdekaan Indonesia.

Masa perubahan yang akan disimak dalam tulisan ini mencakup periode sekitar tahun 1755-1830 dan 1830-1942, 1942-1945, dan 1945-1950-an. Periode pertama mencakup masa Negari Ngayogyakarta Hadiningrat harus menghadapi penetrasi kekuasaan politik kolonial Belanda dengan menjadi daerah *Vorstenlanden* atau “*Kerajaan Kejawen*”

¹ Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah ke-9 diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala di Jakarta pada tanggal 5-7 Juli 2011.

atau “*Praja Kejawen*” (*Inlandsche rijken*), Periode kedua mencakup masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus menghadapi Pemerintahan Pendudukan Jepang. Periode yang terakhir mencakup masa Negari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama dengan Kadipaten Pakualaman menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia serta menjadi daerah tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Negari Ngayogyakarta Hadiningrat, *Vorstenlanden* dan DIY.

1. Pendahuluan

Tulisan singkat ini akan mencoba mengulas tentang perjalanan sejarah dari terbentuknya daerah *Vorstenlanden* sampai dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu usaha untuk mencari kearifan dari keragaman pengalaman sejarah masyarakat Indonesia yang bermanfaat bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ulasan ini dipandang penting, mengingat peristiwa terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari proses perjalanan sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia beserta masyarakat dan bangsanya, baik dari masa sebelum maupun masa sesudahnya. Keeratan hubungan tersebut memungkinkan untuk dipahami tentang keunikan pengalaman dan kearifan sejarah dari proses pergeseran Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dari kedudukannya sebagai daerah *Vorstenlanden* pada masa kolonial Belanda ke kedudukannya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada masa kemerdekaan Indonesia.

Mengingat topik pembahasan lebih berkaitan dengan masalah sejarah terbentuknya DIY, maka pembahasan tentang daerah *Vorstenlanden*



akan lebih banyak ditekankan pada lingkup Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dari pada Kesunanan Surakarta. Proses perubahan yang disoroti mencakup, periode 1755-1830, periode 1830-1942, periode 1942-1945, dan periode 1945-1950. Periode pertama merupakan masa awal kelahiran dan perkembangan Negari Ngayogyakarta Hadiningrat di Jawa. Masa ini dapat disebut juga sebagai masa awal terbentuknya daerah *Vorstenladen* atau “*Praja Kejawen*” (*inlandsche rijken, Principality*). Periode kedua merupakan masa terbentuknya “*Praja Kejawen* atau *Vorstenlanden* yang baru. Periode ketiga, merupakan masa transisi; dan periode terakhir, merupakan periode terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Persoalan pokok yang menarik untuk disimak antara lain ialah pengalaman penting yang bagaimanakah yang dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri terhadap tantangan perubahan-perubahan zaman dari masa menjadi daerah *Vorstenlandem* sampai menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta? Modal sosial dan kultural apakah yang mendasari kemampuan beradaptasi, bergumul dan berperan penting dalam menjawab tuntutan zamannya. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman sejarah lokal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut? Sesuai dengan uraian di atas maka secara berturut-turut akan disajikan segi-segi penting sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat lahir dan kemudian menjadi daerah *Vorstenlanden*. Kedua, bagaimanakah Negari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat mengalami perubahan-perubahan dalam menghadapi pengaruh politik kolonial Belanda dan politik pemerintah Pendudukan Jepang. Ketiga, bagaimanakah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menyambut dan berintergrasi ke dalam RI dan

menjadi DIY sampai masa kini. Diharapkan ulasan singkat ini dapat juga membantu untuk memperluas pemahaman kearifan sejarah lokal dalam perjalanan sejarah bangsa dan sekaligus tentang hakekat Sejarah DIY yang menjadi salah satu isu mutakhir dalam pembicaraan RUUK-DIY di tingkat pemerintah pusat.²

2. Negari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah *Vorstenlanden*

Daerah Istimewa Yogyakarta semula merupakan wilayah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, atau Kraton Yogyakarta, yang sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 menjadi bagian dari apa yang dalam perspektif tata pemerintah kolonial Belanda disebut daerah *Vorstenlanden*. Semula istilah *Vorstenlanden* mencakup pengertian sebagai wilayah pemeritahan sendiri (*zelfbesturende landschappen*) bagi wilayah kerajaan-kerajaan lokal pribumi (*inlandsche rijken*) yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Kumpeni Belanda. Pada masa kemudian, terutama sejak Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menggantikan pemerintahan VOC, istilah *Vorstenlanden* memiliki pengertian yang lebih spesifik untuk memberikan nama wilayah pemerintahan kerajaan Jawa, atau dalam perspektif Jawa disebut wilayah pemerintahan *Kerajaan Kejawen* atau *Praja Kejawen*, yang mencakup wilayah Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman.³ Secara singkat

2 Sampai dengan makalah ini ditulis masalah RUUK-DIY belum mendapat penyelesaian yang final, tetapi masih dalam proses pembahasan antara pihak Komisi II DPR-RI dan pihak Pemerintah Pusat. Masalah RUUK- DIY telah lama diajukan ke pihak Pemerintah Pusat, paling tidak sejak sekitar tahun 2002 tetapi selalu mendapat jalan buntu, sebagai akibat dari tidak adanya kesepahaman antara pihak Pemerintah dan Komisi II DPR-RI, terutama dalam masalah pengisian jabatan Gubernur DIY, yaitu antara melalui sistem pemilihan atau penetapan.

3 Lihat G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", dalam *ENI*, Jilid IV, (s-Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-NV-E.J. Brill, 1921) hal. 626-636, dan *Adatrechtbundel*, XXXIV, (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hal. 194 - 378. Lihat pula Vincent J.H. Houben, *Kraton and Kupeni, Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1970*. (Leiden: KITLV Press, 1994), hal. 4.



terbentuknya keempat wilayah pemerintahan Praja Kejawen tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Negari Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Arya Mangkubumi atau Raden Mas Sujana pada tahun 1755. Ia naik takhta setelah lama berjuang melawan Kumpeni Belanda atau VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) dan kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwana I (HB I). Ia merupakan putra Sunan Amangkurat IV yang memerintah Kerajaan Mataram di Surakarta (1719-1726), dan adik Sunan Paku Buwana II yang memerintah Kraton Surakarta (1726-1749). Ia mengangkat senjata melawan Kumpeni Belanda yang dianggap telah menjadikan Kraton Surakarta menjadi bonekanya, dan kraton Mataram telah banyak kehilangan wilayah dan kekuasaannya, sebagai akibat semakin besarnya campur tangan Kumpeni Belanda terhadap kraton Jawa. Perjuangan ini diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (*Palihan Negari*) pada 13 Februari 1755, antara Pangeran Mangkubumi, Sunan Paku Buwana III dan VOC yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.⁴ Perjanjian perdamaian di desa Giyanti yang terletak di kaki G. Lawu itu telah menghasilkan penetapan pembagian kerajaan Jawa menjadi dua secara abadi.⁵ Perjanjian ini sekaligus menjadi tonggak kelahiran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar *Ngersa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga, Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*.⁶

Dari perjanjian Giyanti tersebut Kraton Yogyakarta memperoleh bagian wilayah yang mencakup wilayah *Negara Agung*, yaitu Mataram,

⁴Lihat M.C. Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792. A History of the Division of Java* (London: Oxford University Press, 1974), hal. 37-86.

⁵ Profesor M.C. Ricklefs menyebut peristiwa Perjanjian Giyanti ini telah membagi Jawa menjadi dua kerajaan secara abadi, karena sesudah itu tidak pernah terjadi penyatuan kembali. Apabila ada gagasan namun tidak pernah terwujud. Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi*,... hal. 414-425.

⁶ Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi*,..., hal. 71.

Kedu, dan Bagelen, dan wilayah *Mancanegara*, yang terletak pada wilayah bagian timur kerajaan meliputi daerah Madiun (kota Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan); Kediri (Kertasana, Kalangbret, Ngrawa/Tulung Agung); Surabaya (Japen/Majakerta; Rembang (Jipang, Teras Karas); Semarang (Sela, Kuwu, sebagian Grobogan). Selain itu, Kesultanan Yogyakarta juga memperoleh separoh dari wilayah Pantai Utara Jawa/Pasisir yang disewakan kepada VOC. Selain itu, Kraton Yogyakarta memperoleh 53.100 *cacah* (karya, rumah tangga) untuk daerah pusat (*Negara Agung*), dan 33.950 *cacah* untuk daerah *Mancanegara*.⁷

Kraton Surakarta, memperoleh wilayah *Negara Agung* Surakarta yang meliputi Surakarta, Pajang, Matesih, dan wilayah Mancanegara, umumnya terletak di wilayah bagian barat (Banyumas), dengan 53.100 *cacah* untuk wilayah Negara Agung dan 32.350 *cacah* untuk wilayah *Mancanegara*.⁸

Peristiwa pembagian wilayah kerajaan terus berlanjut di wilayah *Vorstenlanden* ketika Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 dilakukan antara Raden Mas Said, Paku Buwana III, dan VOC. Perjanjian ini dilaksanakan untuk mengakhiri perlawanan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwana I. Perjanjian ini menyebabkan Kraton Surakarta harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said (cucu Sunan Amangkurat IV, kemenakan PB II dan Pangeran Mangkubumi) untuk menjadi wilayah pemerintahan Kadipaten,

7 *Ibid.*, hal. 68-76. Lihat pula G. P. Rouffaer. "Vorstenlanden", *Adatrechtbundel*, XXXIV, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hal. 194- 378. An. Lihat pula Vincent H.B. Houben, *Kraton and Kumpeni, Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994), hal. 4.

8 Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi....*, hal. 71. Lihat pula P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hal. 52.



di bawah kekuasaannya. Ia bergelar K.P.A. Mangkunegara I dan wilayah pemerintahannya disebut Kadipaten Mangkunegaran.⁹

Pemisahan wilayah kraton juga dialami oleh kraton Yogyakarta. Atas jasa Pangeran Natakusuma (putra HB I, adik HB II) terhadap pemerintah Inggris di bawah Raffles (1811-1816), ia mendapat kedudukan sebagai “**Pangeran Merdika**” dengan memperoleh sebagian wilayah kraton Yogyakarta yang dijadikan wilayah pemerintahan Kadipaten. Ia bergelar K.P.A. Paku Alam I (1813-1829) dan wilayah pemerintahannya disebut Kadipaten Pakualaman. Peristiwa ini terjadi setelah pada 20 Juni 1812 pasukan Inggris menyerbu dan menjarah Kraton Yogyakarta, dan menurunkan Sultan HB II, yang termasuk seorang tokoh Sultan yang bersikap anti-Barat dan pembela budaya Jawa, serta menggantikannya dengan Sultan HB III (putra HB II).¹⁰

Apabila disimak perjalanan kerajaan Jawa Surakarta dan Yogyakarta pada akhir abad ke-18 banyak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, sekalipun demikian masih dapat dipandang cukup memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan pengaruh kekuasaan Barat. Masa itu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk perubahan dinamis dari kerajaan Jawa dalam menghadapi tantangan eksternal dan internalnya. Selama Periode 1755-1800 kerajaan Jawa mengalami kemakmuran ekonomi dan situasi politik yang stabil, tentram dan damai, termasuk Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada masa itu. Penduduk Jawa tumbuh cepat di tengah-tengah produksi pangan yang meningkat, bebas dari

9 Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi...*, hal., 92.

10 Ricklefs, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi...*, hal. 350-351. Lihat pula M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Third Eds. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2001), hal. 14. Periksa pula P.B.R. Carey, “The Spoy Conspiracy of 1815 in Java”, *BKI*, jilid 133 (1977), hal. 296. Mengenai HB II sebagai tokoh Sultan yang anti-Barat dan pembela kebudayaan Jawa

gangguan hama dan epidemi.¹¹ Pada sisi lain, masa itu juga merupakan era baru dalam sejarah Jawa, yaitu era Kesultanan Yogyakarta. Naik takhtanya Sultan Hamengku Buwana I pada 1755, menjadi ciri lahirnya era Kesultanan Yogyakarta, yang memiliki ciri, identitas dan peran unik sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kebudayaan Jawa, yang pada masa kemudian mampu berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan Indonesia modern yang berlangsung hingga pada masa kini.

Pada masa awal pertumbuhannya Kesultanan Yogyakarta menampilkan kerajaan Jawa yang kokoh karena sejak awal dibangun dan disusun atas dasar landasan pandangan dunia dan pemikiran kerangka konseptual yang berakar pada kebudayaan Islam-Jawa sebagai modal sosial dan kultural yang dimilikinya. Pandangan dan konsep raja dan kerajaan tidak dapat dipisahkan dari pandangan dunia kosmis-religio-magis orang Jawa terhadap kehidupan dan alam semesta di jagad raya ini. Ajaran pra-Islam dan Islam lebur dalam pandangan dunia Kraton yang tercermin dalam konsep tentang kekuasaan, kedudukan, fungsi, tugas, citra raja, dan kerajaan yang ideal, serta konsep Kerajaan (*Negari, State, Kingdom*), Raja (*Kingship*), dan Tata Pemerintahan Kerajaan (*Paprentahan, Kaprajan, Statecraft*), yang hingga masa kini masih menjadi landasan kehidupan Kraton Yogyakarta.

Gelar Sultan sebagai kepala Negari Ngayogyakarta Hadiningrat secara simbolis dan filosofis mencerminkan kerangka konseptual tentang raja (*king*) dan kerajaan (*kingship*) beserta sifat ke-Illahi-annya dalam pandangan Islam-Jawa. Kata *Hamangku Buwana* bermakna sebagai simbol dan otoritas raja yang berfungsi menjaga, memelihara dan

¹¹ Menurut Ricklefs, penduduk Surakarta dan Yogyakarta pada 1755 kurang lebih 690.000 sampai 1.000.000. orang, dan pada 1795 kurang lebih menjadi 1.4 samai 1.6 juta orang. Lihat Ricklefs, *A History of Modern Indonesia...*, hal. 143, dan Houben, *Kraton and Kumpeni ...*, hal. 10.



membina kehidupan jagad raya. *Senapati Ingalaga* mencerminkan makna perbuatan kesatria raja dalam menciptakan dan memelihara keharmonisan, keamanan dan kedamaian Negara. *Abdurrahman Sayidin Panatagama*, mengisyaratkan makna penempatan diri sebagai umat Islam bersama sesama umat Islam lainnya berbuat untuk menjaga kehidupan agama yang sesungguhnya dihadapan Allah s.w.t. *Khalifatullah* dimaknai sebagai manifestasi segala tindakan untuk memimpin kawulanya dalam menjalankan segala aspek kehidupannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah s.w.t.¹²

Secara fisik letak dan tata ruang kraton Yogyakarta juga dibangun sesuai dengan pandangan dunia yang tersusun dalam garis imajiner yang membujur dari arah selatan ke arah utara menghubungkan lima titik filosofis kosmis-religio-magis kebudayaan Jawa antara *Segara Kidul* (Laut Selatan, Samudra India), *Panggung Krapyak*, *Kraton Yogya*, *Tugu* dan *Gunung Merapi*. Wilayah kerajaan dibagi atas dua bagian pokok, yaitu *Negara Agung* (Pusat, Ibukota, Kraton) – wilayah pemerintahan pusat, dan *Mancanegara* (Daerah di Luar Pusat)- wilayah di luar pemerintahan pusat. Birokrasi pemerintahan disusun secara hierarkis dari pusat ke daerah melalui pejabat-pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintahan kerajaan. Di tingkat pusat, Sultan sebagai kepala pemerintahan kerajaan sehari-harinya dibantu oleh dua orang *Pepatih Dalem* (*Patih Jaba* dan *Patih Jero*), dan delapan *Kenayakan* (Kementerian/Departemen). Di tingkat daerah, para bupati beserta pejabat lokalnya memiliki tanggungjawab untuk menangani tugas pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Hal

¹²Lihat Chamamah Soeratto, Michael Vatikiotis, Djoko Suryo, C. Bakdi Soemanto, GBPH Joyokusumo, dan J.W. Junardy, (eds.), *Kraton Yogyakarta. The History and Cultural Heritage* (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offised, 2002), hal. 20-29. Lihat pula Soemarsaid Moertono, *State and statecraft in Old Java. A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century* (Ithaca, New York: Cornell University-Modern Indonesian Project, 1974). Reprinted.

ini menegaskan bahwa terbentuknya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dari sejak awal telah mewujudkan sebagai bentuk Negara (*State*), yaitu Negara Kerajaan, yang secara utuh memiliki syarat-syarat sebagai Negara yang berdaulat dalam pengertian modern (wilayah, pemerintahan, sistem pemerintahan, rakyat, dan sebagainya).

Akan tetapi sesudah 1800 terjadi perubahan yang berarti dalam sejarah Jawa. Pada masa pergantian abad secara resmi telah terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan dari VOC ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indische Gouvernement*), setelah pada 1798 VOC dibubarkan. Pergeseran kekuasaan ini menandai era baru dengan hadirnya kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang secara agresif melancarkan ekspansi pendirian hegemoni kekuasaan kolonialisme dan imperialisme baru di tanah jajahan. Ekspansi kekuasaan kolonial ini dilancarkan baik melalui penaklukan teritorial secara militer maupun melalui kontrak-politik (*korte verklaringen atau lange verklaringen*) antara pihak penguasa Belanda dan penguasa / raja-raja lokal di Indonesia untuk mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda. Proses ini ditunjang dengan penetrasi politik kolonial baru baik melalui proses birokratisasi, komersialisasi maupun westernisasi dan modernisasi. Pergeseran era baru ini telah membawa ketegangan-ketegangan baru di wilayah *Vorstenlanden* yang berlangsung selama periode 1800-1830. Ketegangan-ketegangan tersebut pada akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa pecahnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830).

Perang Jawa meletus pada 20 Juli 1825. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Sejak 1812-1825 timbul kekecewaan dan ketidakpuasan di berbagai lingkungan masyarakat di Jawa sebagai akibat dari banyak masalah yang berlangsung selama itu. Penguasa Barat terus-menerus



mencampuri masalah internal kraton, baik mengenai tradisi, budaya dan kekuasaan politik, maupun dalam masalah suksesi di kraton Yogyakarta, sebagaimana yang telah dilancarkan oleh Gubernur Jendral Daendels (1808-1811) dan Letnan-Gubernur Raffles (1811-1816) terhadap kraton Yogyakarta. Korupsi dan intrik-intrik merajalela. Orang-orang Eropa dan Cina (Tionghoa) makin meluaskan kegiatannya dalam persewaan tanah untuk perkebunan tebu, kopi, dan indigo, di Jawa Tengah. Dalam praktek persewaan tanah untuk perkebunan tersebut banyak petani desa yang diperlakukan tidak adil. Petani makin dituntut pembayaran pajak dalam bentuk uang dari pada inatura. Banyak penduduk desa yang terpaksa jatuh ke tangan kaum lintah darat, yang kebanyakan adalah orang Cina. Pengusaha Cina dan pemborong pajak (*pachters*) makin berperan dalam lingkungan masyarakat pedesaan, yang makin memperburuk kehidupan dan timbulnya ketegangan etnis antara orang Jawa dan orang Cina. Banyak praktek pemerasaan dalam penarikan pajak dan uang cukai di daerah Yogyakarta selama 1816-1824. Kesengsaran kehidupan menyebabkan timbulnya dislokasi sosial, yang antara lain ditandai dengan maraknya berbagai bentuk gangguan keamanan dan kekacauan seperti perampokan, pencurian, dan tindak kekerasan. Pemadatan dan penjualan candu juga merajalela telah menambah semakin terpuruknya kehidupan sosial di berbagai lingkungan masyarakat Jawa. Di tengah situasi pergolakan sosial tersebut muncul tokoh Pangeran Diponegoro (1785-1855), putera tertua Sultan HB III (1812-1814), seorang bangsawan yang religius, sebagai seorang tokoh pemimpin yang meledakkan perang besar di Jawa selama 1825-1830. Perang meluas dari wilayah Yogyakarta ke seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan membawa korban besar bagi kedua

belah pihak, baik pihak penguasa Belanda maupun masyarakat Jawa.¹³

Pada tahun 1830 Perang Jawa berakhir, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830, dan kemudian dibuang ke Menado, dan pada akhirnya dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya pada 1855. Berakhirnya Perang Diponegoro ini menjadi tonggak perubahan bagi sejarah Jawa dan perubahan penting bagi peta kehidupan *Praja Kejawen* (*Vorstenlanden*) yang baru (1830-1942) dari Praja Kejawen lama (1755-1830). Salah satu ciri *Praja Kejawen* baru pada masa itu pada hakekatnya terletak pada kedudukannya yang sangat khusus dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan daerah Gubernemen (daerah yang dikuasai dan diperintah secara langsung oleh pemerintah Belanda di Batavia), Penguasa Praja Kejawen masih memegang kekuasaan dan otoritas pemerintahannya terhadap rakyat atau kawulanya di wilayah kerajaannya sesuai dengan landasan pandangan dunia, konsep, tatanan, sistem pemerintahan dan birokrasi yang berlaku dalam kebudayaan kraton Jawa. Hubungan pemerintah Belanda-Raja Praja Kejawen pada dasarnya lebih terbatas pada dasarnya lebih terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan perundangan (*wetgeving*), urusan keamanan (*politie*), pengadilan (*justitie*), dan kepangreh-prajaan (*bestuursvoering*).¹⁴ Di luar segi-segi tersebut Sultan dan Sunan masih memiliki kebebasan untuk melangsungkan otoritas pemerintahan dan kekuasaannya di wilayah Praja Kejawen. Dengan demikian hubungan raja dan rakyatnya masih

¹³Lihat Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, hal. 150-153. Mengenai Perang Jawa atau Perang Diponegoro secara mendalam lihat P.B.R. Carey, *The Power of Prophecy Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java, 1785-1855* (Leiden: KITLV Press, 2007); dan P.J.F. Louw dan E.S. de Kleck, *De Java-Oorlog van 1825-1830*. 6 Jilid ('s-Gravenhage & Batavia: Martinus Nijhoff-Landsdrukkerij, 1894-1909).

¹⁴ Mengenai ini lihat, C. Ch. Van den Haspel, *Overzicht in Overleg. Hervorming van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930* (Dordrecht-Leiden: Foris Publications Holland, KITLV, 1985), hal. 103-118.



terjaga sesuai dengan tradisi yang berlaku, dan berlangsung hingga masa berakhirnya masa penjajahan Belanda.

Banyak pengalaman yang harus dihadapi oleh *Praja Kejawen* ketika pemerintah Belanda memaksakan kekuasaannya dengan melalui kontrak-politik yang berusaha memperkecil wilayah kekuasaan, dan memecah belah *Praja Kejawen* untuk dapat dikuasainya.

3. Reorganisasi Wilayah dan Pembaruan di Vorstenlanden: 1830-1942

Berakhirnya Perang Diponegoro telah memberikan alasan pihak Belanda untuk memperluas jangkauan kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kedua *Kerajaan Kejawen* Yogyakarta dan Surakarta beserta kawulanya di daerah pedesaan. Selain itu pemerintah Belanda juga mempunyai alasan untuk mempersempit dan memperkecil wilayah kedua kerajaan tersebut. Semuanya itu dapat dicapai oleh Pemerintah Belanda dengan cara memaksakan kekuasaannya melalui penandatanganan kontrak-kontrak-politik antara kedua penguasa Kerajaan Kejawen Yogyakarta dan Surakarta, yaitu Sultan dan Sunan yang diwakili oleh *Pepatih Dalem* dan pejabat kraton lain yang ditunjuk di satu pihak, dan penguasa pemerintah Belanda yang diwakili oleh anggota Komisaris Pemerintah Belanda dan Residen setempat di pihak lain. Secara berturut-turut kontrak-kontrak-politik tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak antara lain pada tanggal 22 Juni 1830, tanggal 27 September 1830, tanggal 3 Nopember 1830, dan penetapan-penetapan lainnya pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831.¹⁵ Pejabat Belanda yang mewakili pemerintahan Belanda antara

¹⁵Lihat Jaarlijk Verslag Resident Jogjakarta, 1830, 1831. ANRI Jakart. Lihat "Contract tusschen Soerakarta en Djokjakarta dd. 27 September 1830 (Res. 23 October 1830 No. 6)", dan "Contract met Djokjakarta 3 November 1830 1830 (Res. 23 October 1830 No. 6 en 21 Mei 1831 No. 16)", dalam E.S. de Klerck, *De Java Orlog van 1825-1830* (Batavia-'s-Hage: Landsdrukkerij-M.Nijhoff, 1909), Bijlage IV dan VII

lain ialah P. Merkus, J.I. van Sevenhoven dan H.G. Nahuys van Burgst, serta Residen Surakarta J.W.H. Smissaert dan pihak Kesunanan Surakarta diwakili oleh Adipati Sasradiningrat II (Patih) dan Panembahan Buminata, dan pihak Kesultanan Yogyakarta diwakili oleh Adipati Danureja IV (Patih) dan Panembahan Mangkurat (putra HB II). Pada perjanjian di Yogyakarta, pihak pemerintah diwakili oleh P.Merkus dan J. I. van Sevenhoven dan pihak Kesultanan Yogyakarta diwakili oleh Panembahan Mangkurat, Pengeran Mangkukusuma, dan Adi Winata.¹⁶

Pada intinya kedua Kraton Yogyakarta dan Surakarta dianggap bertanggungjawab atas pecahnya Perang Diponegoro, karena itu harus dikenakan sanksi dengan pembatasan wilayah dan kekuasaannya. Kesultanan Yogyakarta dianggap paling bertanggungjawab sehingga dikenakan sanksi pembatasan lebih berat. Secara singkat dapat disebutkan bahwa akibat dari penandatanganan kontrak politik tersebut Kraton Yogyakarta kehilangan wilayah *Mancanegara* yang meliputi Madiun dan Kediri, dan Kraton Surakarta kehilangan Banyumas dan Bagelen, karena diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kesultanan Yogyakarta dinyatakan akan terus memegang kekuasaan pemerintahannya di wilayah yang terbatas meliputi daerah Mataram dan Gunung Kidul. Batas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta semula ditetapkan Sungai Opak, tetapi kemudian ditetapkan berupa sebuah jalan yang membujur dari Prambanan ke utara sampai Gunung Merapi dan ke selatan sampai di kaki bukit di bagian utara Gunung Kidul. Sungai Krasak ditetapkan menjadi batas wilayah Kesultanan Yogyakarta dengan Keresidenan Kedu. Adapun wilayah Kesunanan Surakarta ditetapkan hanya meliputi daerah Pajang dan Sukawati. Batas-batas wilayah tersebut sekaligus menetapkan batas

16 De Klerck, *De Java Oorlog*. Bijlage IV dan Bijlage VII.



wilayah *Vorstenlanden* yang baru sejak 1830. Demikian pula penetapan batas wilayah Kesultanan Yogyakarta tersebut berlaku secara berkelanjutan sejak 1830 hingga masa Sultan HB IX naik tahta pada 18 Maret 1940 dan juga sampai daerah ini menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1945.

Sesuai dengan tuntutan perubahan-perubahan tersebut di atas Sultan HB V (1820-1855, bertakhta 1823-1826, 1828-1855), melakukan pembaharuan dalam wilayah administrasi pemerintahan dan reorganisasi birokrasi pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1831 Sultan HB V membagi wilayah administrasi pemerintahan di bawah Kesultanan Yogyakarta atas tiga kabupaten (*Regentschap*), yaitu Kabupaten Bantul Karang, yang terletak di bagian selatan, Kabupaten Denggung, di bagian utara, dan Kabupaten Kalasan, di bagian timur. Tiap kabupaten dibagi menjadi beberapa wilayah distrik. Masing-masing kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati (*Regent*), dan masing-masing mendapat gelar, *Mantri*, *Tumenggung* dan *Rangga*. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang kepala distrik.¹⁷ Pembaruan di bidang pemerintahan ini selanjutnya diteruskan dengan pembentukan bidang pengadilan daerah (*Inlandsche Rechtbank*) di wilayah Kesultanan, dan perubahan penanganan masalah keamanan yang semula ditangani oleh pemerintahan kraton kemudian ditangani oleh sektor kepolisian dari pemerintah keresidenan. Semuanya ini dilakukan dengan sepersetujuan pihak pemerintah Belanda.

Birokrasi pemerintahan Kartan Yogyakarta juga dilakukan. Mengingat wilayah Kesultanan tinggal tersisa daerah *Negara Agung*, maka secara internal Sultan HB V juga melakukan pembaharuan birokrasi pemerintahan Kesultanan, yang sesuai dengan wilayah Kesultanan yang

17 Jaarlijk Verslag Resident Jogjakarta, 1831-1835. ANRI-Jakarta. Lihat pula Djoko Suryo, "Penelitian Sejarah Lokal Bantul. Perkembangan dari Desa sampai ke Pembentukan Kabupaten Abad ke 16-19". Laporan Penelitian di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1993.

baru, yang hanya mencakup *Negara Agung* atau *Kutanagara*. Urusan pemerintahan daerah *Mancanegara* sudah tidak lagi ditangani secara formal lagi karena wilayahnya telah berada di tangan pemerintah Belanda. Birokrasi pemerintahan di dalam istana, yang melingkupi daerah istana sekitarnya, atau disebut daerah *narawita*, ditangani oleh empat orang kepala pemerintahan yang disebut *Wedana Lebet*. Mereka disebut juga *Nayaka*. Keempat Wedana itu bertanggung jawab langsung kepada *Patih Lebet / Jero* (Patih Dalam) dan Sultan sebagai penguasa Negara. Keempat Wedana tersebut adalah *Wedana Gedhong Kiwa, Wedana Gedhong Tengen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Gedhong Keparak Tengen*. *Wedana Gedhong Kiwa* dan *Wedana Gedhong Tengen* bertugas mengurus urusan keuangan dan urusan perbendaharaan Kraton. *Tugas Wedana Keparak Kiwa* dan *Wedana Keparak Tengen* mengurus urusan pertahanan atau keprajuritan dan urusan pengadilan. Para wedana mendapat gelar Tumenggung untuk orang-orang yang bukan bangsawan, sedangkan mereka yang berasal dari keluarga bangsawan mendapat gelar Pangeran. Tiap-tiap wedana membawahi seorang pejabat disebut *Kliwon* yang bertugas membantu wedana tersebut, para Kliwon mendapat gelar *Ngabehi*, dan sejumlah *Mantrijajar* (40 orang).¹⁸ Selain itu, di luar istana, yaitu daerah *Negara* atau *Negari* atau *Kutanegara*, ditangani oleh dua orang *Wedana Miji*. Kedua orang Wedana Miji itu langsung bertanggung jawab kepada Sultan. *Wedana Miji* dan *Wedana Lebet* merupakan pejabat teras yang penting bagi Kraton, karena itu mereka menjadi anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Di luar *Kutanagara* pemerintahan ditangani oleh Bupati pulisi yang diatur oleh seorang pepatih. Tugas mereka adalah menjaga hukum ketertiban.

Sejak lama wilayah Negara Agung merupakan daerah yang

¹⁸ Jaarlijk Verslag Resident Jogjakarta, 1830, 1831, 1832. ANRI Jakarta.



dipergunakan sebagai tanah lungguh (*apanage*) bagi para *Nayaka* atau pejabat tinggi dan para bupati, yaitu sebagai (tanah) gaji atas tugas dan jasanya terhadap istana. Mereka yang memperoleh tanah lungguh di wilayah Negara Agung itu biasanya disebut *patuh (apanage holder)*. Pemilik lungguh atau patuh tersebut berhak memungut pajak berupa hasil bumi atau bahan inatura. Pajak dalam bentuk inatura tersebut biasanya disebut juga sebagai *upeti*.¹⁹

Pembaruan administrasi pemerintahan dan birokrasi pemerintahan kraton tersebut tidak mengalami perubahan sampai masa pemerintahan Sultan HB VI (1855-1877). Baru setelah pemerintahan Sultan berikutnya terjadi perubahan-perubahan lebih lanjut. Sultan HB VII (1877-1921), pada tahun 1903, melanjutkan reorganisasi wilayah administrasi pemerintahan dengan membagi wilayah kabupaten di Kesultanan Yogyakarta menjadi Kabupaten Kulon Progo (Kesultanan), Kabupaten Adikarta (Pakualaman), Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kalasan, dan Kota Yogyakarta.²⁰ Pembagian wilayah kabupaten ini selanjutnya disusun kembali oleh Sultan HB VIII (1821-1839), putra HB VII, pada tahun 1927 menjadi enam wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan dan Gunung Kidul.²¹ Seperti yang berlaku di daerah Gubernemen, masing-masing kabupaten kemudian dibagi menjadi distrik, dan tiap distrik dibagi menjadi onderdistrik. Kepala distrik disebut *Panji* kemudian diubah menjadi Wedana, kepala onderdistrik disebut Asisten *Panji* diubah menjadi Asisten Wedana, seperti yang berlaku di daerah Gubernemen.

Sampai berakhirnya pemerintahan Sultan HB VIII (wafat, 22

19 Jaarlijk Verslag Resident Jogjakarta, 1830, 1831, 1832. ANRI Jakarta.

20 Van den Haspel, *Overzicht in Overleg*, hal. 105.

21 P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hal. 53.

Oktober 1939) wilayah administrasi pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta tersusun kembali menjadi Kabupaten Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, dengan rincian pembagian wilayah masing-masing sebagai berikut. Kabupaten Yogyakarta dibagi menjadi 3 distrik, 14 onderdistrik, 191 kelurahan, dan 10 kampung. Kabupaten Bantul, terbagi atas 4 distrik, 21 onderdistrik, dan 234 kalurahan. Kabupaten Gunung Kidul terdiri atas 3 distrik, 12 onderdistrik, dan 168 kelurahan. Kabupaten Kulon Progo terbagi atas 2 distrik, 8 onderdistrik, dan 129 kelurahan. Sementara itu Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang mencakup Onderdistrik Pakualaman di Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Adikarto di Kulon Progo. Dengan demikian Kesultanan Yogyakarta sampai tahun 1939 memiliki 4 kabupaten, 12 distrik, 55 onderdistrik, 762 kelurahan, dan 10 kampung.²²

Pembagian wilayah yang sama selanjutnya dilakukan pada waktu Sultan HB IX (1912-1998) naik takhta (18 Maret 1940). Pada tahun 1940 Sultan HB IX membagi Kasultanan Yogyakarta secara keseluruhan menjadi 4 kabupaten, yang antara lain sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Yogyakarta yang terbagi menjadi 2 distrik, yaitu (1) Distrik Kota, yang meliputi 8 onderdistrik, 87 kelurahan dan 10 kampung; dan (2) Distrik Sleman, terbagi atas 6 onderdistrik, dan 104 kelurahan. Kedua, Kabupaten Bantul, terbagi atas 4 distrik, yaitu: (1) Distrik Bantul, terdiri atas 6 onderdistrik, 76 kelurahan; (2) Distrik Godean, terdiri atas 5 onderdistrik dan 71 kelurahan; (3) Distrik Kotagede, terdiri atas 5 onderdistrik dan 71 kelurahan; dan (4) Distrik Pandak, terdiri atas 5 onderdistrik, dan 54 kelurahan. Ketiga, Kabupaten Kulon Progo, yang terbagi atas 2 distrik, yaitu (1) Distrik Sentolo, yang terdiri atas 4 onderdistrik dan 57 kelurahan; (2) Distrik Nanggulan, terdiri atas 4 onderdistrik, dan 47 kelurahan.

22 Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan*, hal. 53-54.



Keempat, Kabupaten Gunung Kidul, yang terdiri atas 3 distrik, yaitu (1) Distrik Wonosari, meliputi 4 onderdistrik dan 58 kelurahan; (2) Distrik Playen, yang terdiri atas 4 onderdistrik dan 53 kelurahan; dan (3) Distrik Semanu, terdiri atas 4 onderdistrik dan 57 kelurahan. Dengan demikian Kesultanan Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten 11 distrik, 55 onderdistrik, 732 kelurahan dan 10 kampung.²³

Sementara itu pada tahun 1903, pemerintahan Karesidenan Yogyakarta, yaitu pemerintan Barat (Eropa), juga melakukan perubahan wilayah administratifnya. Pada masa itu wilayah administratif Karesidenan Yogyakarta, yang membawahi wilayah Kesultanan dan Pakualaman, dibagi menjadi tiga wilayah *afdeling*, yaitu *Afdeling Mataram* (kota Yogyakarta dan sekitarnya), *Afdeling Kulon Progo*, dan *Afdeling Gunung Kidul*. Masing-masing *afdeling* dikepalai oleh seorang Asisten Residen.²⁴

Bagaimanakah hubungan antara kedua bentuk pemerintahan kolonial Belanda dan *Praja Kejawen* selama itu? Menurut Houben sifat hubungan keduanya berwatak ganda. Pada satu sisi menampilkan wajah kemitraan, sekalipun tidak setara, tetapi pada sisi lain menunjukkan sifat saling curiga. Belanda mencurigai Raja Jawa tidak sepenuhnya dapat dipercayai untuk tunduk kepada Belanda, karena dicurigai selalu mengintai untuk mencari kesempatan memulihkan kembali kejayaan Mataram atas seluruh Jawa dan akan mengusir bangsa asing.²⁵ Haspel juga berpendapat bahwa selama periode 1830-1901 para penguasa di *Vorstenlanden* merupakan penguasa yang memiliki birokrasi yang cukup kokoh. Sekalipun penguasa Belanda berada di atas angin, tetapi para elite dan penguasa *Vorstenlanden* tidak dapat diabaikan.²⁶ Sesungguhnya

23 Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan*; hal. 54-55.

24 Van den Haspel, *Overwicht in Overleg*, hal. 105.

25 Houben, Kraton and Kumpeni., hal. 73-85, 350.

26 Lihat Van den Haspel, *Overwicht in Overleg*, hal. 123-124; 139-142.

Perang Jawa (1825-1830) telah memberi pelajaran penting bagi kedua belah pihak, baik bagi penguasa kolonial Belanda maupun penguasa Praja Kejawen. Praja Kejawen memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan dalam membangun ikatan hubungan kultural antara raja dan kawulanya, sehingga penguasa Belanda tidak berani bertindak gegabah terhadap Praja Kejawen, terutama Kesultanan Yogyakarta. Sebaliknya bagi penguasa Praja Kejawen Perang Jawa dan juga perang-perang lainnya memberikan pelajaran agar lebih hati-hati, waspada dan bijaksana dalam menghadapi politik kolonial Belanda beserta pengaruh Barat. Sikap kehati-hatian, kewaspadaan dan kebijaksanaan tersebut ditunjukkan baik secara aktual maupun simbolis dalam menghadapi tantangan zamannya agar mampu mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan kehidupan kerajaan dan kawulanya. Sikap kritis, adaptif, kreatif dan trasformatif tampak menjadi pilihan kebijaksanaan dari para Sultan dalam melakukan perubahan-perubahan pada masa pemerintahannya. Sementara pihak penguasa Belanda tampak banyak menekankan politik kemitraan dan keseimbangan dalam menghadapi *Praja Kejawen* sampai berakhirnya masa penjajahan di Indonesia.

Sikap penguasa Praja Kejawen tersebut dalam selain tampak dalam kebijakannya dalam pembaharuan pembagian wilayah administrasi pemerintahan dan birokrasi pemerintahan kraton seperti tersebut diatas, tetapi juga tampak dalam kebijakan bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural. Kebijakan pembaruan dalam bidang ekonomi tampak, misalnya, dalam pembaruan sistem persewaan tanah untuk tanaman komersial oleh orang Eropa untuk mensikapi kebijakan politik liberal dalam pembukaan pintu penanaman modal swasta Barat, sehingga daerah Yogyakarta ikut



kebanjiran masuknya penanaman modal swasta-Barat.²⁷ Sejak 1870-an, yaitu sejak masa pemerintahan Sultan HB VI dan Sultan HB VII, banyak usaha industri perkebunan dibuka di Yogyakarta, antara lain adalah usaha industri perkebunan gula, indigo, tembakau dan kopi, yang mempengaruhi kehidupan perekonomian pedesaan Yogyakarta.²⁸ Demikian pula Sultan HB VII melakukan Reorganisasi Agraria (*Agrarische Reorganisatie*) yang menata kembali sistem pemilikan tanah lungguh (*apange*) dan sistem persewaan tanah dengan investor asing di daerah *Praja Kejawen* pada 1912-1926, yang telah meningkatkan terbukanya wilayah Kesultanan Yogyakarta bagi kontrak-kontrak persewaan tanah untuk pembukaan usaha perkebunan swasta Barat.²⁹ Demikian pula sikap terbukanya pembukaan sarana transportasi jalan Kereta Api yang menghubungkan Yogyakarta – Semarang sejak 1872, Yogyakarta-Surabaya sejak 1884, dan Yogyakarta-Cilacap sejak 1887, telah menjadi faktor pendukung penting bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian, sosial, politik dan kebudayaan di wilayah Praja Kejawen pada awal abad ke-20.

Sikap adaptifnya Sultan HB VII dan HB VIII terhadap pengaruh pendidikan dan kebudayaan Barat serta kelahiran nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20 telah menjadikan kota Yogyakarta tumbuh menjadi menjadi salah satu kota pusat pembaruan, modernisasi dan nasionalisme di Indonesia. Dengan menjadi daerah *Vorstenlanden*, kraton dan masyarakat Kesultanan Yogyakarta masih dapat mempertahankan keberadaannya sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kekuasaan politik memang telah merosot, tetapi otoritas budaya Jawa masih hidup. Ini merupakan salah satu modal

27 Sistem persewaan tanah di daerah Parja Kejawen telah berlangsung sejak 1818 dan meningkat pada akhir abad ke-19. Lihat Harto Juwono, "Persewaan Tanah di Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912. Penerapan Prinsip Konkordasi di Wilayah *Praja Kejawen*". Disertasi di Departemen Sejarah, Universitas Indonesia, 2011.

28 Lihat Missive Resident Jogjakarta, 1882, 1883. ANRI Jakarta.

29 Van den Haspel, *Overwicht in Overleg*, hal 183-221.

sosial-kultural yang menjadikan salah satu keunikan survivalitas sosio-kultural masyarakat Yogyakarta dalam sejarah Jawa. Sejak menjadi daerah *Vorstenlanden*, masyarakat Yogyakarta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan pembaharuan yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Proses Westernisasi dan Modernisasi tidak terkecuali masuk ke wilayah ini. Sejak 1900-an unsur-unsur pendidikan modern (Barat), alam pemikiran Barat, gagasan, semangat, dan idiologi politik dan kultural Barat, tumbuh dan berkembang di lingkungan kota Yogyakarta. Secara dinamis kota Yogyakarta berkembang menjadi "kota kolonial" ("*colonial city*"), yang menjadi embrio kota "**Indonesia Baru**". Penduduk kota menjadi semakin plural (Eropa, Cina, Arab, Jawa dan etnis lainnya) dan unsur budayanya menjadi semakin beragam. Namun terdapat kecenderungan terjadinya hibrida kebudayaan yang menuju ke arah terbentuknya kebudayaan "Indonesia Baru" yang tengah berkembang di Yogyakarta. Dengan kata lain semenjak itu kota Yogyakarta, menunjukkan keistimewaannya, tumbuh menjadi enbrio Pusat Kebudayaan "Indonesia Baru", dan sekaligus juga menjadi "Kota Pergerakan Nasional", "Kota Pendidikan", karena berkembangnya pendirian sekolah-sekolah baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh organisasi swasta, seperti Misi, Zending, Pergerakan Muhammadiyah, Taman Siswa, Budi Utpmo dan lainnya. Demikian halnya dengan pendirian Rumah Sakit dan klinik-klinik kesehatannya. Pada saat yang sama Yogyakarta tumbuh dan berkembang menjadi pusat kegiatan pergerakan nasional, ditandai dengan digunakannya kota Yogyakarta menjadi tempat kongres Budi Utomo, dan tempat kelahiran Pergerakan Muhammadiyah (1912), Taman Siswa, dan tempat kegiatan pergerakan lainnya, termasuk pergerakan



kaum perempuan dan pemuda Indones³⁰ Dengan demikian perkembangan Vorstenlanden selama periode 1830-1940-an pada hakekatnya telah menjadikan Kraton Yogyakarta berperan menjadi katalisator transformasi masyarakat dan kebudayaan baru di Indonesia sampai masa berakhirnya penjajahan Belanda.

4. Praja Kejawen Menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian tersebut di atas dapat disimak bahwa pada masa pasca Perang Jawa (1825-1830) tidak berarti Kesultanan Yogyakarta sepenuhnya hancur atau lenyap, karena pihak pemerintah kolonial Belanda sesungguhnya tidak berani mengambil resiko lebih jauh apabila kraton Yogyakarta dihancurkan atau lenyap. Pemerintah kolonial Belanda lebih memilih menjadikan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta menjadi daerah *Vorstenlanden* atau *Praja Kejawen*, yang lebih ditempatkan sebagai "mitra" politik dari pada sebagai "musuh" abadinya. Aktualisasi dari hubungan ke"mitraan" politik tersebut pada hakekatnya diwujudkan dalam bentuk simbolisasi komunikasi politik yang "tinggi" antara penguasa pemerintah Belanda dan penguasa Praja Kejawen Kesultanan Yogyakarta. Sifat hubungan yang lebih ditekankan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak tersebut, telah menjadikan Praja Kejawen dan masyarakatnya mampu menyiasati diri tidak saja dalam menyongsong masuknya era kelahiran nasionalisme dan modernisasi di Indonesia, tetapi juga dalam menyambut dan mendukung kelahiran Republik Indonesia pada tahun 1945, sebagai tonggak dan tanda zaman baru bagi sejarah bangsa Indonesia. Kemampuan menangkap tanda-tanda perubahan zaman ini dimiliki oleh Sultan HB IX ketika naik takhta pada 18 Maret 1940, bertepatan dengan

30 Lihat Djoko Suryo, "Keistimewaan Sosial-Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Lampau, Kini, dan Masa Datang", dalam *Transformasi at Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern* (Yogyakarta: Penerbit STPN Press, 2009), hal. 138-140.

masa pecah Perang Dunia II (1938-1945).³¹ Peristiwa naik takhtanya Sultan HB IX di Negari Yogyakarta Hadiningrat pada masa pecahnya Perang Dunia II dan era pergantian rezim ini, sangat unik dan fenomenal. Sultan HB IX mampu menampilkan sikap politik raja Jawa yang berani menentang dan menolak tradisi proses suksesi setiap raja Jawa naik takhta yang diikuti dengan penandatanganan kontrak-politik dengan penguasa Belanda, yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Yogyakarta L. Adam.³² Tidak lain, karena sikap dan kepribadian Sultan yang baru naik takhta ini dilandasi oleh ideologi dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang kuat, sehingga mampu membaca tanda-tanda zaman dan bersikap tepat dalam memenuhi tuntutan semangat zamannya, dan secara konsisten mendasari integritas kepemimpinannya dalam mengantar terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Republik Indonesia. Peristiwa ini, oleh karenanya, dapat disebut sebagai salah satu tonggak awal bagi proses sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta yang kini telah berusia 66 tahun lebih.

5. Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945

Sikap kepemimpinan Sultan HB IX tersebut berlanjut ketika Kesultanan Yogyakarta harus menyesuaikan diri dalam menghadapi kebijakan pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Indonesia (1942-1945). Paling tidak ada tiga sikap tanggap dan kritis Sultan HB IX terhadap kehadiran Tentara Dai Nippon, waktu menduduki Yogyakarta. Pertama, Sultan HB IX tidak menghendaki penguasa Jepang langsung memerintah daerah Yogyakarta, dan Sultan meminta agar segala hal yang

31 Mengenai naik takhtanya Sultan Hamengku Buwono IX, lihat Atmakusumah (ed.), *Takhta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1982), hal. 48-58.

32 Atmakusumah (ed.), *Takhta Untuk Rakyat*, hal. 41-48.



menyangkut dengan daerah Kesultanan Yogyakarta harus dibicarakan lebih dahulu dengan Sultan. Hal ini dilakukan agar Sultan dapat langsung memimpin dan melindungi rakyat di wilayah kerajaannya. Langkah kedua, melepaskan kekuasaan tugas pemerintahan sehari-hari yang semula ditangani oleh **Pepatih Dalem** diambil alih oleh Sultan. **Pepatih Dalem**, yang semula menjadi pejabat ganda sebagai pejabat Kraton tetapi sejagis juga menjadi staf penguasa Belanda, kini hanya boleh bertindak hanya atas nama Sultan. Langkah ketiga, untuk melindungi keselamatan rakyat Yogyakarta Sultan mengelabui Jepang dengan angka-angka statistik palsu untuk meyakinkan bahwa daerah Yogyakarta sangat minus. Dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran disusun siasat strategis program pembuatan irigasi pengairan yang disebut "**Selokan Mataram**" dengan pengerahan tenaga kerja setempat, yang sesungguhnya hanya sebuah siasat agar rakyat Yogyakarta terhindar dari tugas pengerahan tenaga Romusa dari pemerintahan Dai Nippon.³³

Berkat sikap tanggap dan ketepatan membaca keadaan, Sultan dapat langsung memegang kendali tali pemerintahan terhadap rakyatnya tanpa diganggu oleh Jepang. Malahan pemerintah Jepang mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sebagai **Kochi (Daerah Istimewa)**. Kesudahan ini menjadi peluang bagi Sultan untuk menata birokrasi pemerintahan yang secara langsung ada di bawah kendalinya, tanpa perantaraan **Pepatih Dalem** lagi. Usaha penyatuan birokrasi **nagari** dan kraton secara struktural dan konseptual serta modern mulai dilancarkan. Pada bulan April 1945, Sulta merobah 8 Kawedanan urusan pemerintahan di pusat, yang semula ada di bawah Pepatih Dalem, menjadi enam urusan pemerintahannya yang disebut **Paniradyapati**. Keenam **Paniradyapati** tersebut adalah, **Paniradyapati Sanapanitra** (Sekretariat),

33 Atmahkumamah (ed.), *Takhta Untuk Rakyat*, hal.59-62.

Paniradyapati Wiyatapraja (Pendidikan), *Paniradyapati Racana Pancar Wara* (Penerangan), *Paniradyapati Ayahan* Umum (Urusan Umum), *Paniradyapati Ekonmi* (Urusan Perekonomian), dan *Paniradyapati Yayasan Umum*.³⁴ Sultan HB IX juga melakukan perubahan pembagian daerah Kesultanan Yogyakarta, menjadi lima kabupaten, yaitu 1) Kabupaten Kota Yogyakarta, 2) Kabupaten Sleman, 3) Kabupaten Bantul, 4) Kabupaten Gunung Kidul, dan 5) Kabupaten Kulon Progo.³⁵

Langkah sikap Sultan HB IX yang sangat penting pada masa pendudukan Jepang dan masa pra-Proklamasi Kemerdekaan yang perlu dikemukakan di sini adalah dukungannya terhadap terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta. Sultan HB IX memberikan perintah (dhawuh) kepada GBPH Puruboyo untuk mewakili Kraton Yogyakarta menjadi anggota BPUPKI di Jakarta yang akan berangkat untuk menghadiri rapat pada tanggal 14 Mei 1945, sebagaimana yang tertera dalam Surat Sultan yang ditujukan kepadanya tertanggal 23 Mei 1945 (2605).³⁶ Demikian pula setelah GBPH Puruboyo kembali dari kegiatan rapatnya di BPUPKI di Jakarta, *Parentah Hageng Karaton* mengundang seluruh anggota *abdi dalem* kraton dan para *pangagengnya* agar hadir di *Kagungan Dalem Bangsal Kestriyan* Kraton Yogyakarta untuk mendengarkan pidato oleh-oleh dari rapat BPUPKI di Jakarta dari GBPH Puruboyo, yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 1945 (2605). Surat tersebut antara berbunyi sebagai berikut. ...”*Wijose mbinjing Slosa tanggal kaping: 12 woelan VI-2605 (1945), hadimas Bandoro Pangeran Harjo Poeroebojo, bade medar sabdo wenten*

34 R.W. Projo Soegardo, *Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jogjakarta: Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta, 1950), hal. 150. Lihat pula Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan*, hal. 131-134.

35 Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan*, hal. 35.

36 Lihat Dokumen Surat-Surat dari Kraton Yogyakarta. Koleksi Arsif Kraton Yogyakarta di Kantor Arsip Daerah DIY. No.

1253.



*hing Kagoengan Dalem Bangsal Kasatrijan, minangko angsa-angsal hanggene Parepatan wenten hing kitho Djakarta, bab kawentenanne Penjelidik Indonesia Merdeka. Anggene medar sabdo, wiwit wantji djam 1,30. Ponikoe para Pangageng Kawedanan sarto Golongan, sarto habdi-Dalem Poenakawan sapanoenggalane sadojo, diadjeng-adjeng miringake pamedar sabdo waoe.....”*³⁷ Selain itu terdapat dokumen

Surat Undangan dari Himpunan Kebaktian Rakyat, ditujukan untuk umum, untuk menghadiri Rapat Besar menyambut kehadiran Ir. Soekarno di Bangsal Kepatihan (Danurejan), tempat Sultan HB IX berkantor, yang akan berpidato tentang masalah kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, pada tanggal 3 Oktober 1944 (2604).³⁸ Dalam dokumen kraton Yogyakarta tersebut juga terdapat selebaran tentang “Berita Istimewa “Sinar Matahari” Tg. 14-2605, tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang antara lain beranggotakan GBPH Puruboyo dari kraton Yogyakarta. Semua itu dapat menegaskan bahwa Sultan HB IX dan Karton Yogyakarta pada hakekatnya sudah ikut terlibat dalam dinamika perjuangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa pra-proklamasi kemerdekaan Indonesia.

6. Terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta

Proses terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dibahas melalui tiga segi penting, yaitu segi historis, segi pengakuan hukum dan segi sosio-kultural. Segi historis mencakup peristiwa-peristiwa historis penting yang berkaitan dengan bergabungnya Praja Kejawen Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam wilayah

37 Dokumen Surat-Surat dari Kraton Yogyakarta. Koleksi Arsip Kraton Yogyakarta di Kantor Arsip Daerah DIY. No. 1254.

38 Dokumen Surat-Surat dari Kraton Yogyakarta. Koleksi Arsip Kraton Yogyakarta di Kantor Arsip Daerah DIY.

Republik Indonesia, fakta historis Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia, dan fakta historis Yogyakarta menjadi kota perjuangan dalam mempertahankan dan menyelamatkan Republik Indonesia. Segi pengakuan hukum /legal/ yuridis, diartikan sebagai proses pengakuan legal keistimewaan DIY dari negara Republik Indonesia, berdasarkan sejarah, kebudayaan dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengakuan hukum ini antara lain menegaskan bahwa DIY diakui secara sah sebagai daerah yang berkedudukan istimewa dan memiliki kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan setingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kekhususan dan keistimewaan yang dimilikinya yaitu keistimewaan sejarah, keistimewaan budaya, serta keistimewaan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan hukum ini tercantum antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; Amanat Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945, Piagam Penetapan Kedudukan bagi kedua penguasa takhta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman dari Presiden Sukarno-Hatta tanggal 19 Agustus 1945 (diserahkan 6 September 1945); Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1946 (menandai bersatunya dua pemerintahan Kesultanan dan Kadipaten dalam sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk pertama kalinya penamaan Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan); Undang-Undang No. 22 Tahun 1948; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1974. Pengertian landasan yuridis yang sama ini sesungguhnya juga berlaku pada kedudukan hukum keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah



Istimewa Aceh dan kekhususan Pemerintah Daerah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, serta kekhususan Pemerintah Provinsi Papua.

Peristiwa bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Sultan Hamengku Buwana IX dan Pura Kadipaten Pakualaman di bawah Sri Paduka Paku Alam VIII ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia terekam dalam Amanat 5 September 1945. Peristiwa ini didahului dengan peristiwa pengiriman Kawat Ucapan Selamat dari Sultan Hamengku Buwana IX kepada Sukarno-Hatta atas diproklamasikannya Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini merupakan peristiwa bersejarah bagi salah seorang raja di Indonesia yang mengucapkan selamat dan mendukung berdirinya Republik Indonesia pada masa yang paling awal. Isi pokok Amanat 5 September 1945 itu antara lain sebagai berikut.

Pertama:

Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari R.I.

Kedua :

Segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada ditangan Hamengku Buwono IX;

Ketiga :

Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden R.I.³⁹

Pengakuan dan penetapan wilayah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi wilayah Negara Republik Indonesia di bawah

³⁹ Atmakusumah, *Takhta Untuk Rakyat*, hal. 65

pimpinan Sultan Hamengku Buwana ke IX, dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagaimana termuat dalam Piagam Penetapan Kedudukan, tertanggal 19 Desember 1945. Piagam tersebut antara lain menyebutkan sebagai berikut.

Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan:

**Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati
Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah
ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada
kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka
Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga,
jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai
bagian Republik Indonesia.**

Jakarta, 19 Agustus 1945

**Presiden Republik
Indonesia**

ttd

Soekarno⁴⁰

Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia (1945-1949) dan menjadi Kota Revolusi atau Kota Perjuangan (1945-1949). Peristiwa ini adalah sangat historis dan penting untuk dicatat.. Beberapa bulan setelah proklamasi (17-8-1945), Jakarta sebagai ibu kota RI yang pertama, menjadi tidak aman karena terancam akan serbuan tentara Belanda yang telah mendarat di pantai Jawa Barat yang tidak jauh dari Jakarta. Sultan Hamengku Buwono IX menawarkan kepada Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta. Pemerintah Pusat menerima

40 Atmakusumah (ed.), Takhta untuk Rakyat; hal. 65.



tawaran tersebut, sehingga pada awal Januari 1946 ibu kota RI berpindah ke kota Yogyakarta. Sejak itu Yogyakarta menjadi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Patut dicatat dan direnungkan kembali bahwa pada saat terjadinya perpindahan pemerintahan RI tersebut, sesungguhnya pemerintahan RI pada waktu itu masih sangat lemah dalam segala segi, termasuk segi perekonomian dan keuangan negara. Bisa dimaklumi bahwa penyediaan ruang dan tempat gedung, peralatan serta sarana perkantoran pemerintahan, perumahan, dan dana dan biaya kehidupan bagi para pejabat negara, staf dan pegawai pemerintahan banyak didukung dan disokong oleh kraton Yogyakarta, dalam hal ini oleh Sultan HB IX. Dalam hubungan ini peranan kraton Yogyakarta, di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX adalah sangat besar terhadap Republik Indonesia.⁴¹

Sultan Hamengku Buwono IX pada masa awal kemerdekaan menjadi pelopor demokratisasi dalam pemerintahan yang dipraktekkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang baru saja berdiri pada tahun 5 September 1945. Pada tanggal 13 Februari 1946 nama Pangreh Praja diganti Pamong Praja. Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) diganti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibedakan atas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Kapanewon, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan. Sekaligus disusun susunan pemerintahan baru yang didasarkan pada prinsip demokrasi, suatu fenomena yang unik di daerah Praja Kejawaen.

Yogyakarta menjadi penyelamat dan jembatan emas dalam perjuangan Republik Indonesia mencapai kemenangan dan pengakuan kedaulatan negara R.I. dari pihak Negeri Belanda dan dunia internasional

41 Atmakusumah (ed.) *Takhta Untuk Rakyat*; hal. 73-87.

sehingga dapat mewujudkan NKRI sejak berakhirnya perang kemerdekaan. Keberhasilan ini dicapai melalui perjuangan fisik (militer) dan non- fisik (diplomasi) yang semuanya dilakukan Berbagai peristiwa perjuangan fisik dalam menghadapi Agresi Belanda tahun 1948 dan berbagai perjuangan diplomasi melalui berbagai diplomasi, dilakukan melalui kendali perjuangan dari Yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwono IX dan Kraton Yogyakarta berperan aktif dalam proses mempertahankan pemerintahan R.I. baik secara fisik maupun non- fisik. Sultan Hamengku Buwono IX terlibat langsung dalam pemerintahan R.I. Sebagai contoh ia pernah menjadi Menteri Pertahanan, ikut serta mengatur siasat perjuangan fisik, berperan aktif dalam perundingan-perundingan internasional untuk memenangkan perjuangan diplomasi dalam menghadapi Belanda. Pada masa kemudian ia menjadi Wakil Presiden R.I. Menarik untuk dikemukakan bahwa sejak awal kemerdekaan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta terlibat aktif dalam perjuangan mendukung Republik Indonesia, di antaranya dengan cara memberikan sokongan keuangan kepada Fonds Kemerdekaan yang ditarik dari uang gajinya yang dipotong pada setiap bulannya.⁴²

Kota Yogyakarta menjadi ajang pertempuran dalam menghadapi agresi tentara Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta diduduki Belanda. Sukarno, Hatta, Agus Salim (Menlu), dan sebagian anggota kabinet ditangkap dan dibawa ke tempat pengasingan di suatu tempat di daerah Sumatra. Pertempuran demi pertempuran antara tentara gerilya RI dan rakyat di Yogyakarta meletus, dan salah satu diantaranya ialah Pertempuran 6 jam di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, yang kemudian

42 Lihat Surat Edaran tertanggal 25-10-1945 dari KRT Hanggawangsa yang ditujukan kepada seluruh anggota Abdi Dalem Kraton Yogyakarta. Dokumen Surat-Surat dari Kraton Yogyakarta. Koleksi Kantor Arsip DIY.



menjadi salah satu tonggak Sejarah Perjuangan RI yang penting.⁴³

Pada tanggal 6 Juli 1949 pemerintahan Republik Indonesia berhasil dikembalikan ke kota Yogyakarta, termasuk para pimpinan negara dan anggota kabinet yang ditahan Belanda, setelah PBB mendesak kepada pihak Belanda untuk berunding dan melepaskan semua tahanan anggota kabinet RI. Ini juga berkat siasat Pertempuran 1 Maret 1949 yang dimaksudkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, sekalipun kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Berhasil diselesaikannya konflik Indonesia-Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag –Negeri Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, telah memaksa Pemerintah Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia, dan menjadikan revolusi perjuangan kemerdekaan yang berpusat di Yogyakarta berhasil mencapai kemenangannya. Sejak itu Revolusi telah berakhir dan Yogyakarta telah mengantarkan langkah perjuangan berikutnya yaitu perjuangan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa berikutnya.

Kemenangan perjuangan RI di Yogyakarta, ditandai juga dengan dikukuhkannya Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Negeri Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Sejak 1946 Universitas Gadjah Mada telah berdiri sebagai universitas swasta dan universitas perjuangan yang didirikan oleh kaum pejuang. Pengukuhan UGM sebagai Universitas Negeri dimaksudkan oleh Sukarno untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang modern dan beradab. UGM juga diharapkan menjadi universitas nasional dan menjadi tempat mencerdaskan putra bangsa.

Berakhirnya revolusi kemerdekaan, telah menyebabkan ibu kota

43 Atmakusumah (ed.), *Takhta Untuk Rakyat*; hal. 67-81.

Republik beserta pusat pemerintahan pindah kembali ke Jakarta. Akan tetapi, semangat pembaruan dan pembangunan kebudayaan tetap berlangsung di kota Yogyakarta, tidak ikut berpindah ke Jakarta. Malahan kota Yogyakarta tampak semakin memantapkan dirinya sebagai Kota Pendidikan dan Kota Kebudayaan. Sejak 1950 berbagai perguruan tinggi, akademi dan sekolah-sekolah menengah berbagai jenis dan jurusan, baik negeri maupun swasta, berdiri menjamur. Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah itu menjadi daya tarik (*pull factor*) bagi pemuda-pemuda di seluruh wilayah Indonesia untuk datang menimba ilmu pengetahuan di Yogyakarta dan untuk menjadi "anak bangsa" ("*children of Indonesia*"). Ini merupakan peristiwa historis Yogyakarta yang memantapkan diri sebagai "*melting pot*" anak bangsa, dan memiliki simbol kebanggaan sebagai "Kota Pelajar".

Pergeseran suasana revolusi ke suasana pendidikan dan kebudayaan benar-benar terasa pada 1950-an. Hiruk-pikuk kota bergeser dari pertempuran 6 jam di Jogja ke hilir-mudik pemuda bersepeda menuju ke perkuliahan di berbagai perguruan tinggi atau ke berbagai sekolah dan akademi yang tersebar di penjuru kota. Kota Yogyakarta juga disibukkan dengan berbagai kegiatan seminar, konferensi, diskusi ilmiah, politik dan kebudayaan, baik nasional maupun internasional. Jangan dilupakan kota Yogyakarta juga disemarakkan oleh pentas-pentas berbagai cabang kesenian (drama, lukis, musik, wayang, wayang-wong, ketoprak) serta diskusi-diskusi keagamaan dan mimbar-mimbar pengajian. Suasana kehidupan budaya yang demikian itu tidak hanya terasa di lingkungan perkotaan tetapi juga di lingkungan pedesaan di wilayah yang sejak masa awal kemerdekaan telah diakui menjadi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Segi keistimewaan kultural, menegaskan bahwa keistimewaan DIY juga dilandasi oleh kekhususan dan kekhasan latar belakang sosial



dan budaya masyarakat kraton Jawa-Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah hidup dari pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-21 sekarang ini. Alam pemikiran budaya, filsafat, sastra, seni, estetika, etika dan pola hubungan sosial, dan berbagai nilai-nilai budaya lokal Jawa masih hidup dan mendasari kehidupan budaya modern. Pertemuan antara unsur budaya lama dan baru telah menjadikan Yogyakarta mampu melahirkan sumber kebudayaan Indonesia Modern, tercermin dari terbentuknya Yogyakarta menjadi kota pendidikan dan menjadi sumber pendidikan anak bangsa. Lahirnya Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Nasional atau Universitas Rakyat sejak masa revolusi, merupakan salah satu manifestasinya. Revolusi tidak hanya menempatkan kota Yogyakarta menjadi pusat strategi perjuangan fisik dan diplomasi, tetapi juga menjadikan Yogyakarta menjadi Kota Pendidikan anak Bangsa dan Kota Kebudayaan. Terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar telah membuktikan kedudukan dan perannya dalam kesinambungan dan perubahan sejarah bangsa dan negara, masyarakat dan rakyat Yogyakarta dari sejak 1945 hingga masa kini.

7. Penutup

Semangat perjuangan dan pembaruan dari kraton Yogyakarta yang tumbuh pada masa-masa awal, tampak menjadi sumber dinamika perjalanan sejarah Yogyakarta pada masa kemudian. Berbagai peristiwa historis telah membuktikan bahwa semangat perjuangan (*fighting spirit*) yang dimiliki pendiri kerajaan sebelumnya rupanya menjadi fondasi terbentuknya semangat juang kolektif (*collective fighting spirit*) dan semangat heroisme - patriotisme (*heroism and patriotism spirit*) bagi masyarakat Yogyakarta dalam sejarah perjuangan bangsa. Semangat dan

aksi juang kolektif, serta semangat heroisme-patriotisme tersebut antara lain telah dibuktikan dalam dua peristiwa sejarah penting yaitu Perang Diponegoro (1825-1830) dan Revolusi Kemerdekaan (1945-1949). Dalam kedua peristiwa besar itu rakyat Yogyakarta tampak telah berperan sebagai aktor kolektif (*collective historical actors*) penggerak perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan revolusi kemerdekaan, yang dilancarkan bersama-sama dengan tokoh pemimpinnya yaitu Pangeran Diponegoro dan Sultan Hamengku Buwana IX. Kedua peristiwa sejarah itu sesungguhnya dapat ditafsirkan sebagai aktualisasi dari respons masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perubahan zaman, yang dijiwai oleh semangat untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang tinggi (*survival spirit*), dan idealisme Jiwa Satriya atau Kesatria (*the spirit of knighthood*). Ungkapan-ungkapan, "*Nyawiji, Greget, Sengguh, Ora mingkuh*" yang menggambarkan semangat dedikasi, loyalitas dan integritas moral yang tinggi, pada hakekatnya ada didalamnya. Semangat juang (*fighting spirit*) untuk bertahan hidup (*survival spirit*) dan untuk melangsungkan keberlanjutan kehidupan (*sustainability spirit*) menjadi suatu tantangan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga bagi masyarakat bangsa Indonesia pada masa kini.

Dari uraian di atas dapat ditarik nilai-nilai kearifan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dipergunakan untuk mencari pemahaman tentang keragaman pengalaman sejarah yang dapat mencerdaskan anak bangsa pada masa kini dan mendatang. Beberapa segi penting di antaranya ialah bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya mempunyai kekayaan dan keistimewaan kebudayaan lokal yang luar biasa yang mencakup

- (1) nilai-nilai sejarah
- (2) konsepsi filosofis, religius, moralitas/spiritualitas



- (3) nilai-nilai etika dan estetika
- (4) nilai-nilai sosio-kultural,
- (5) lembaga-lembaga pranata sosial
- (6) warisan tradisi dan adat-istiadat, dan
- (7) nilai-nilai nasionalisme dan humanisme.
- (9) modal sosial (*social capital*) atau modal sosial-kultural (*socio-cultural*).

Beberapa khasanah penting yang dapat diidentifikasi dari pengalaman sejarah Daerah Istimewa tersebut di atas antara lain sebagai berikut.

1. Terwujudnya dialog budaya pra-Islam dan Islam pada masa Kerajaan Mataram.
2. Terwujudnya dialog budaya Barat dan Lokal pada masa kolonial di Pra Kejawaen Yogyakarta
3. Terwujudnya corak toleransi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbudaya di Era Modern, di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.
4. Ada petunjuk hubungan Kraton dan masyarakat Yogyakarta masih kokoh.
5. Kemampuan adaptasi masyarakat Yogyakarta terhadap perubahan dan tantangan zaman
6. Adanya semangat untuk survival dan cita-cita untuk membangun peradaban baru.

Jakarta 5-7 Juli 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah(ed.). *Takhta Untuk Rakyat. Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Penerbit PT Gramendia 1982.
- Carey, P.B.R. *The Power of Prophecy Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java, 1785-1855* .Leiden: KITLV Press, 2007.
- _____. “The Spoy Conspiracy of 1815 in Java”, *BKI*, jilid 133 (1977)..
- Chamamah Soeratno, Michael Vatiklotos, Djoko Suryo, C. Bakdi Soemanto, GBPH Joyokusumo, Y.W. Junardy. *Kraton Jogja. The History and Cultural Heritage*. Jakarta: PT Jaya Agung Offset, 2002.
- Djoko Suryo. “Penelitian Sejarah Lokal Bantul. Perkembangan dari Desa ke Pembentukan Kabupaten Abad ke -16-19”. Fakultas Sastra Univeritas Gadjah Mada, 1993.
- _____. “Keistimewaan Sosial-Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lampau, Kini, dan Mendatang”, dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogyakarta, STPN Pres, 2009; hal.130-149.
- Djoko Marihandono, “Sultan Hamengku Buwono II: “Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa”, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 12 No. 1, Juli 2008, hal. 27-38,
- Dokumen Surat-Surat dari Kraton Yogyakarta. Koleksi Arsip Kraton Yogyakarta di Kantor Arsip Daerah DIY. No. 1254.



Harto Juwono. "Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta 1818-1912. Penerapan Prinsip Konkordasi di Wilayah Praja Kejawaen". Disertasi di Departemen Sejarah Universitas Indonesia, 2011.

Haspel, Ch. Van den. *Overzicht in Overleg. Hervormingen van Justitie, Grondgebruik en Bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*. A.m.Dordrecht-Leiden: Foris Publications-KITLV, 1985.

Houben, Vincent J.H. *Kraton and Kumpeni. Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870*. Leiden: KITLV Press, 1994. Jaarlijk Verslag Resident Jogjakarta, 1830, 1831, 1832. ANRI Jakarta.

Klerck, E.S. de. *De Java Oorlog van 1825-1830*. Batavia-'s-Hage: Landsdrukkerij- M. M. Nijhoff, 1909.

Ricklefs, M.C. *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792. A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press, 1974.

_____. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Third Edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: PALGRAVE, 2001.

Rouffaer, G.P. "Vorstenlanden", dalam *ENI*, Jilid IV, (s-Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-NV-E.J. Brill, 1921) hal. 626-636,

_____. *Adatrechtbundel*, XXXI, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931, hal. 194 - 378

R.W. Prodjo Soegardo. *Buku Pegangan Pamong Pradja Jogjakarta*. Jogjakarta: Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta, 1950.

Soemarsaid Moertono. *State and Statecraft in Old Jaav. A Study of the Later Mataram Period 16th to 19th Century*. Ithaca-New York: Cornell University , 1974.

Suwarno, P.J. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.



KOTA TASIKMALAYA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA, 1820-1942^{1*}

Oleh: Miftahul Falah^{2**}

A. Pendahuluan

Saat ini, kata “Tasikmalaya” digunakan untuk dua nama hierarki pemerintahan daerah. **Pertama**, Kabupaten Tasikmalaya yaitu daerah otonom yang dipimpin oleh seorang bupati dengan luas wilayah sekitar 2.508,91 km². Sebelum bernama Tasikmalaya, kabupaten ini bernama Sukapura yang didirikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharam Tahun Alif, bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang (van der Chjis, 1880: 80-81).³ **Kedua**, Kota Tasikmalaya yakni daerah otonom yang dipimpin oleh seorang wali kota dengan luas wilayah sekitar 171,56 km² yang dibentuk pada 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 serta diresmikan pada 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta (Marlina, 2007: 98). Sebelum menjadi daerah otonom, Kota Tasikmalaya berkedudukan sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Pada 3 November 1976, Kota Tasikmalaya dijadikan sebagai kota administratif (kotif)

1* Artikel ini merupakan hasil dari penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul *Perubahan Sosial di Kota Tasikmalaya, 1820-1942*.

2** Lektor pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran dan Sekretaris MSI Cab. Jawa Barat

3 Ada yang menafsirkan bahwa tanggal 9 Muharam Tahun Alif itu identik dengan tanggal **20 April 1641** (de Haan, 1912: 59). Penafsiran de Haan tersebut diperkuat oleh de Graaf (1990: 276) yang mengatakan bahwa penguasa Mataram tersebut baru dipanggil dengan gelar “sultan” pada tahun 1641, seperti tertulis dalam *Daghregister* 1 Juli 1641. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa penanggalan tersebut identik dengan tanggal **16 Juli 1633** (Brandes, 1888: 353-356; Widjajakusumah, 1961: 27). Apabila dihubungkan dengan perlawanan Dipati Ukur yang menurut versi Batavia berakhir tahun 1632, tahun alif itu lebih rasional kalau jatuh pada 16 Juli 1633 karena Sultan Agung mereorganisasi Priangan terkait dengan peristiwa itu (Hardjasaputra, 20 Februari 2007). Meskipun dibentuk bersama-sama dengan Kabupaten Bandung, namun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak mengambil salah satu di antara dua tanggal di atas sebagai hari jadinya, melainkan tanggal 21 Agustus 1111 (Permadi, 1975). Tanggal tersebut merupakan penafsiran tanggal 13 Badrapada tahun 1033 Saka yang tertulis pada Prasasti Geger Hanjuang ‘ (Danasasmita, 1975: 28).

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1976 yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1976 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1976 (Pemerintah Kotif Tasikmalaya, 1977: i).

Pemerintahan Kota Tasikmalaya memang masih begitu muda. Akan tetapi, keberadaan Kota Tasikmalaya sudah dikenal jauh sebelum pemerintahan kota tersebut dibentuk. Pada masa kolonial, Kota Tasikmalaya menunjukkan pertumbuhan yang dinamis seiring dengan perubahan fungsi kota dari sebuah kota distrik (*district*) menjadi kota keresidenan (*residentie*). Pertumbuhan Kota Tasikmalaya penting untuk diteliti karena sampai sekarang kota tersebut menjadi barometer di wilayah Priangan Timur (Santoso [ed.], 2004: 337). Dalam tulisan ini, tidak semua aspek yang menjadi indikator pertumbuhan sebuah kota akan dikaji, tetapi dibatasi pada tiga permasalahan. **Pertama**, kapan nama Tasikmalaya mulai dipergunakan dalam administrasi pemerintahan kolonial? **Kedua**, apakah Distrik Tasikmalaya merupakan wujud perubahan dari Distrik Tawang? **Ketiga**, apakah pertumbuhan Kota Tasikmalaya terkait dengan perkembangan Kabupaten Sukapura?

B. Tasikmalaya: Tinjauan Etimologis

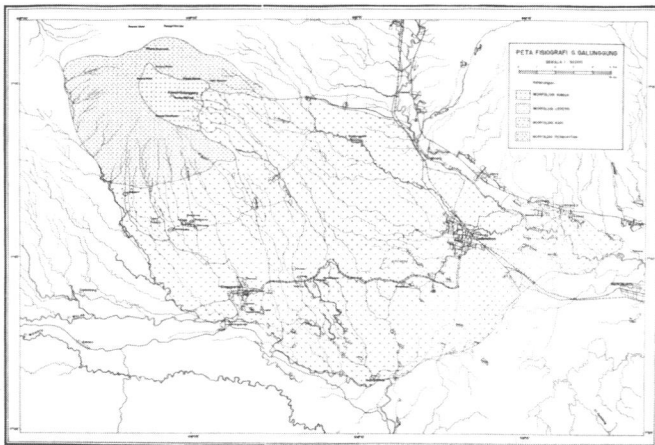
Secara etimologis, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Tasikmalaya. **Pertama**, Tasikmalaya merupakan nama yang berasal dari kata “tasik” dan “laya”. “Tasik” diartikan sebagai *keusik* (pasir) dan “laya” diambil dari kata *ngalayah* yang berarti hamparan. Dengan demikian, makna dari *keusik ngalayah* adalah hamparan pasir yang seolah-olah menutupi hampir seluruh wilayah yang sekarang bernama Kota Tasikmalaya. Hamparan pasir tersebut berasal Gunung Galunggung yang meletus pada tanggal 8 dan 12 Oktober 1822 (Ekadjati, 1975: 3; Marlina, 2007: 35; Permadi, 1975: 3). **Kedua**, ada yang berpendapat bahwa nama Tasikmalaya merupakan gabungan dari kata “tasik” dan “malaya”. Tasik berarti telaga, laut, atau air yang menggenangi, sedangkan “malaya” mengandung arti jajaran gunung-gunung (Muller dalam Marlina, 2007: 35). Dengan



demikian, “tasikmalaya” mengandung makna “gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak” seperti yang terungkap dalam pemeo “*jajaran gunung-gunung teh lobana lir ibarat cai laut*” yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Tasikmalaya (Marlina, 2007: 35; Musch, 1917: 2002; Permadi, 1975: 3).

Dalam peta 1, hamparan perbukitan di sebelah tenggara gunung tersebut (Kota Tasikmalaya) terlihat dengan jelas sehingga memperkuat pendapat bahwa nama Tasikmalaya memiliki hubungan dengan ribuan bukit (gunung). Oleh karena itu, ungkapan *jajaran gunung-gunung teh lobana lir ibarat cai laut* bukan hanya sekedar pemeo belaka, tetapi mengandung makna bahwa ribuan bukit kecil yang terdapat di wilayah Tasikmalaya merupakan ciri khas geografis daerah tersebut. Bukit-bukit kecil itu sudah ada sebelum tahun 1822 sehingga letusan Gunung Galunggung pada tahun tersebut menguatkan identitas wilayah tersebut sebagai “wilayah sepuluh ribu bukit” yang maknanya melekat pada nama Tasikmalaya (Furuya, 1978: 591-592; Zen, 1968: 62).

Peta 1: Fisiografi Gunung Galunggung



Sumber: Bronto, S. 1983. “Geologi G. Galunggung” dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan X Ikatan Ahli Geologi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

Kalau mengacu pada kedua pendapat tentang asal-usul nama Tasikmalaya yang memiliki kaitan erat dengan letusan Gunung Galunggung tahun 1822,⁴ seharusnya nama tersebut baru dikenal setelah tahun 1822. Akan tetapi, nama Tasikmalaya telah digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, setidaknya sejak tahun 1820. Artinya, wilayah tersebut sudah bernama Tasikmalaya sebelum Gunung Galunggung meletus sehingga hamparan bukit yang melatarbelakangi penggunaan nama Tasikmalaya bukan berasal dari aktivitas Gunung Galunggung. Hal tersebut diperkuat oleh catatan geologi bahwa keberadaan ribuan bukit yang “menutupi” wilayah Tasikmalaya disebabkan oleh aktivitas Gunung Guntur di Garut yang diperkirakan meletus hebat sebelum tahun 1822. (Bronto, 1983: 8). Dengan demikian, menurut pendapat penulis, nama Tasikmalaya menunjukkan hubungan yang erat dengan aktivitas dengan Gunung Guntur. Sementara itu, aktivitas Gunung Galunggung tahun 1822, memperkuat identitas atau ciri khas geografis wilayah Tasikmalaya.

C. Distrik Cicariang menjadi Distrik Tasikmalaya

Berkaitan dengan eksistensi Tasikmalaya, ada yang berpendapat bahwa sebelum bernama Tasikmalaya, wilayah ini bernama Tawang. Secara geologis, daerah Tawang merupakan suatu hamparan tanah datar yang terletak di sebelah Tenggara Gunung Galunggung. Oleh karena itu, kadang-kadang daerah ini dinamai juga Tawang-Galunggung dan memiliki makna sebagai tempat *panyawangan anu plungplong ka ditu ka dieu* (Permadi, 1975: 3). Daerah Tawang-Galunggung bukan hanya

4 Berdasarkan laporan Pangeran Sumedang kepada R. van der Capellen (Residen Priangan) diperoleh informasi bahwa letusan Gunung Galunggung tahun 1822 mengakibatkan sekitar 114 kampung mengalami kerusakan parah, sekitar 4.011 orang meninggal dunia, mematikan sekitar 105 ekor kuda serta 853 ekor kerbau dan sapi, serta menghancurkan sekitar 775.795 pohon kopi (*Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten*. 1861: 330; *Bataviasch Courant*, 22 Februari 1823. No. 8 dalam Anonim, 1920). Kalau dilihat dari angka-angka tersebut, dapat dibayangkan bahwa letusan Gunung Galunggung tahun 1822 tersebut dapat dikategorikan sebagai letusan yang dahsyat meskipun tidak sedahsyat letusan Gunung Tambora (1815) atau Gunung Krakatau tahun (1883).



berkedudukan sebagai sebuah perkampungan, tetapi juga sebagai sebuah distrik dalam lingkungan Kabupaten Sumedang. Distrik Tawang muncul ketika pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Sukaraja ke Manonjaya tahun 1832. Dengan demikian, nama Tasikmalaya diduga baru muncul setelah tahun 1832 sebagai hasil perubahan nama dari Distrik Tawang atau Distrik Tawang-Galunggung (Marlina, 2007: 35; Sastrahadiprawira, 1953: 182).

Jika Distrik Tasikmalaya merupakan hasil perubahan nama dari Distrik Tawang, seharusnya distrik tersebut tercatat dalam administrasi pemerintahan kolonial. Akan tetapi, nama Distrik Tawang atau Tawang-Galunggung tidak terdapat dalam catatan arsip kolonial. Misalnya, dalam *Verslag Omtrent der Residentie Preanger-Regentschappen en Krawang 1816*, Raffles membagi wilayah Priangan menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Berdasarkan *verslag* tersebut, baik di Kabupaten Sumedang maupun di Kabupaten Sukapura tidak terdapat Distrik Tawang atau Distrik Tawang-Galunggung. Dalam *verslag* itu justru terdapat dua distrik yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya, yaitu Distrik Indihiang dan Distrik Cicariang (Hardjasaputra dalam Sjafrudin *et al.*, 1993: 263).

Sehubungan dengan itu, pendapat tersebut kiranya perlu ditinjau ulang karena kalau dikaitkan dengan statistik Pulau Jawa tahun 1820, Distrik Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan sebagai perubahan nama dari Distrik Cicariang. Berdasarkan arsip itu diketahui bahwa salah satu distrik di wilayah Kabupaten Sumedang bernama *District Tasjikmalaija op Tjitjariang* dengan wilayah sepanjang 37 *pal*⁵ dan pusat pemerintahannya di *Tjitjariang en Tasjikmalaija* (*Statistiek van Java*. 1820 Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*. No. 28/9).

⁵*Pal* merupakan ukuran panjang yang digunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Satu *pal* (Jawa) sama dengan 400 *roede* atau jika dikonversikan ke dalam sistem matrik, satu *pal* ekuivalen dengan 1.506,943 meter (*Regeeringsalmanak voor NI*, 1925: 760). Dengan mengacu pada ukuran tersebut, Kota Tasikmalaya berarti terletak sekitar 10,55 kilometer dari Kota Manonjaya atau sekitar 82,88 kilometer dari Kota Sumedang.

Pada akhir tahun 1830-an, nama *District Tasjikalmaiija op Tjitjariang* menghilang sebagai nama wilayah pemerintahan. Pada tahun tersebut, muncul sebuah distrik bernama *District Tasjikalmaiijayang* mencakup sekitar 79 desa (*Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten...1839*, Koleksi *Preanger-Regentschappen*, No. 29^a/23). Pada pertengahan abad ke-19, distrik tersebut membawahi tujuh *onderdistrict*, yaitu Sambong, Siluman, Cibodas, Cisangkir, Cihideung, Pagaden, Mangkubumi, danCibeuti (van Carbee en Versteeg, 1853-1862; Veth, 1869: 906.). Mengapa Distrik Cicariang berubah nama menjadi Distrik Tasikmalaya? Perubahan tersebut lebih disebabkan oleh kebiasaan menyebut suatu wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan nama pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan Distrik Cicariang dipindahkan dari Cicariang ke Tasikmalaya karena secara geografis wilayah tersebut lebih strategis. Tasikmalaya terletak pada jalur utama transportasi sedangkan Cicariang terletak agak ke pedalaman sehingga sangat menguntungkan bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Peta 2: Distrik Tasikmalaya pada awal Abad XIX



Sumber: *District Tasikmalaja*. Koleksi Arsip Inventory of Cartographic Manuscript of the 17th to the 19th Century. No. 51. Jakarta: ANRI.

D. Dari Kota Distrik menjadi Kota Kabupaten

Dalam tulisannya berjudul *Sukapura (Tasikmalaya)*, Ietje Marlina (2000: 91-110) memandang Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari pertumbuhan Kabupaten Sukapura. Pendapat ini kemudian menjadi opini umum seperti yang terlihat dari beberapa tulisan mengenai Kota Tasikmalaya (Adeng, 2005; Roswandi, 2006). Sejatinya, pembahasan mengenai Kota Tasikmalaya harus dibedakan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Nama pemerintahan yang terakhir memang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Kabupaten Sukapura karena pada kenyataannya Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjelmaan dari Kabupaten Sukapura. Uraian mengenai Kota Tasikmalaya harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sumedang.

Pada 1862, Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem *afdeeling* dalam struktur pemerintahan kabupaten. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan bupati karena pemerintahan sehari-hari di wilayah *afdeeling* dijalankan oleh *hoofd van plaatselijke bestuur* (setingkat asisten residen) yang didampingi oleh *zelfstandige patih* atau patih *afdeeling* (Indonesia, 1953: 157-158; Lubis, *et al.*, 2003¹: 340). Sistem *afdeeling* diberlakukan terhadap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas. Salah satu kabupaten di *Residentie Preanger-Regentschappen* yang memiliki wilayah cukup luas adalah Kabupaten Sumedang sehingga berdasarkan sistem *afdeeling* tersebut, wilayahnya dipecah menjadi dua *afdeeling*. **Pertama**, *Afdeeling Baloeboer op Noord Soemedang* yang terdiri atas 6 distrik, 39 onder distrik, dan 209 desa. **Kedua**, *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* yang terdiri atas 5 distrik, 41 onder distrik, dan 254 desa. *Afdeeling Baloeboer* memiliki wilayah sepanjang 16,93 *Geographische Mijlen* atau 650 *pal* sedangkan *Afdeeling Galoenggoeng* memiliki panjang wilayah sekitar 15,85 *Geographische Mijlen* atau sekitar 383 *pal*⁶ (*Statistiek*

6 *Geographische Mijlen* merupakan ukuran panjang yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang ekuivalen dengan 7.407, 4 meter. *Pal* merupakan ukuran panjang yang dipergunakan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Satu *pal* (Jawa) sama dengan 400 *roede* atau jika dikonversikan ke dalam sistem metrik, satu *pal* ekuivalen dengan 1.506,943 meter (*Regeeringsalmanak voor NI*, 1925: 760).

der *Preanger Regentschappen*. 1863. Koleksi Arsip *Preanger-Regentschappen*, No. 30/5). Pusat pemerintahan *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* terletak sekitar 7 *pal* dari kota Manonjaya, ibu kota Kabupaten Sukapura, dan sekitar 55 *pal* dari kota Sumedang, ibu kota Kabupaten Sumedang⁷ (Veth, 1869³: 906).

Pembentukan *Afdeeling Galoenggoeng op Zuid Soemedang* membawa dampak bagi status Kota Tasikmalaya. Sejak *afdeeling* ini dibentuk, Kota Tasikmalaya tidak hanya berkedudukan sebagai *hoofdplaats der district* melainkan juga sebagai *hoofdplaats der afdeeling*. Dengan demikian, Kota Tasikmalaya tidak hanya menjadi tempat tinggal wedana melainkan juga menjadi tempat tinggal asisten residen sebagai *hoofd van plaatselijke bestuur* dan *zelfstandige patih* sebagai wakil bupati di daerahnya.

Perubahan wilayah pemerintahan kembali terjadi di Priangan tahun 1870, seiring dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus *Preangerstelsel*, kecuali untuk penanaman kopi karena komoditas perdagangan ini masih memberikan keuntungan besar untuk Kerajaan Belanda. Untuk dapat tetap menjalankan *preangerstelsel*, wilayah *Preanger-Regentschappen* terlebih dahulu harus direorganisasi. Selain ingin tetap mengeksploitasi tanaman kopi, Pemerintah Hindia Belanda ingin menerapkan sistem pemerintahan langsung (*direct rule*) di daerah Priangan. Keinginan tersebut disebabkan oleh besarnya kekuasaan bupati di Priangan meskipun kekuasaannya itu dijalankan atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Reorganisasi Priangan.⁸

7 Dengan mengacu pada ukuran tersebut, Kota Tasikmalaya berarti terletak sekitar 10,55 kilometer dari Kota Manonjaya atau sekitar 82,88 kilometer dari Kota Sumedang.

8 Setelah melalui perdebatan, tanggal 10 September 1870, *Eerste Kamer* Kerajaan Belanda bersama-sama dengan van Boose (Menteri Urusan Kolonial) mengeluarkan ordonansi sebagai landasan hukum bagi gubernur jenderal melakukan reorganisasi Priangan. Ordonansi itu terdiri atas enam pasal, yakni (1) Pemerintah Hindia Belanda akan mencabut hak bupati untuk memungut pajak, baik dalam bentuk uang, barang, maupun kerja. Sebagai gantinya, bupati akan mendapat gaji tiap bulannya dari Pemerintah Hindia Belanda; (2) Kekuasaan ulama terhadap urusan dunia akan dibatasi; (3) Para pegawai di bawah bupati akan mendapat gaji dari Pemerintah Hindia Belanda; (4) Pemerintah Hindia Belanda akan memungut pajak dari rakyat; (5) Pemerintah Hin-



Melalui reorganisasi tersebut, *Preanger-Regentschappen* dibagi menjadi sembilan *afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Sukabumi, *Afdeeling* Cianjur, *Afdeeling*/Kabupaten Bandung, *Afdeeling* Cicalengka, *Afdeeling*/Kabupaten Limbangan, *Afdeeling*/Kabupaten Sumedang, *Afdeeling* Tasikmalaya, *Afdeeling*/Kabupaten Sukapura, dan *Afdeeling* Sukapura Kolot. Dengan demikian, sebagian *afdeeling* bersatu dengan kabupaten yang dipimpin oleh bupati dan asisten residen. Sebagian lagi berdiri sendiri meskipun secara administratif merupakan bagian dari kabupaten tertentu (Natanagara, 1938: 114). *Afdeeling* Tasikmalaya meliputi wilayah seluas 98.768 hektar atau sekitar 15,86 *geographische mijlen* dengan batas wilayah Gunung Galunggung, Gunung Telagabodas, dan Gunung Karacak (sebelah barat); Pegunungan Cakrabuana (sebelah utara); Sungai Citanduy [*sic.*] (sebelah timur); dan Sungai Ciwulan dan Sungai Cikunir (sebelah selatan) (Stibbe, 1921: 284).

Foto 1: Kantor Asisten Tasikmalaya Tahun 1880



Sumber: Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0772/002. Jakarta: ANRI.

dia Belanda akan memperbanyak wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh asisten residen; dan (6) Menaikan pajak kopi dari 10 gulden menjadi 13 gulden (Meerten dalam Fitri, 1995: 45).

Meskipun terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan, namun kedudukan Kota Tasikmalaya sebagai pusat pemerintahan *Afdeeling* Tasikmalaya tidak berubah. Kota Tasikmalaya tetap berstatus sebagai tempat patih dan asisten residen menjalankan kekuasaannya atas wilayah *Afdeeling* Tasikmalaya. Selain itu, afdeeling ini pun masih sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang (Klein 1931: 119; *RA voor NI*, 1871: 147; *Staatsblad van NI*, 1870. No. 121). Pada Maret 1891, Gubernur Jenderal Cornelis Pijnacker Hordijk menetapkan batas-batas Kota Tasikmalaya berdasarkan *Besluit van 17 Maret 1891 No. 8* sebagai berikut.

- Utara** : Titik di mana jalan raya dari Tasikmalaya ke Sumedang memotong tegak lurus jalan yang membentang di sepanjang kampung Cipedas ke kampung Cigadog.
- Barat** : Dari titik potong itu menuju selatan, menyusuri jalan tersebut sepanjang kampung Cipedas dan Cihideung menuju kampung Cigadog sampai di mana jalan itu memotong jalan Nagarawangi tegak lurus pada pilar 3.
- Selatan** : Dari titik ini ke timur menyusuri jalan Nagarawangi sampai di mana titik ini bertemu pada pilar 2 di jalan raya dari Mangunreja ke Tasikmalaya.
- Tenggara** : Dari titik pilar 2 ini sebuah garis lurus ditarik ke titik di mana pada pilar 1 selokan Cihideung dan selokan Cimulu saling bertemu.
- T i m u r
Laut** : Dari persimpangan pada pilar 1 ini menyusuri ke arah timur laut selokan Cimulu sampai ke ujung bendungan batu besar. Kemudian menyusuri sungai Cimulu sampai ke titik di mana jalan raya dari Tasikmalaya ke Sumedang ini memotong dan selanjutnya jalan raya sampai di mana mereka bertemu dengan jalan kampung dari Cigadog ke Cipedas.



Peta 3: Pusat Kota Tasikmalaya, 1919-1922



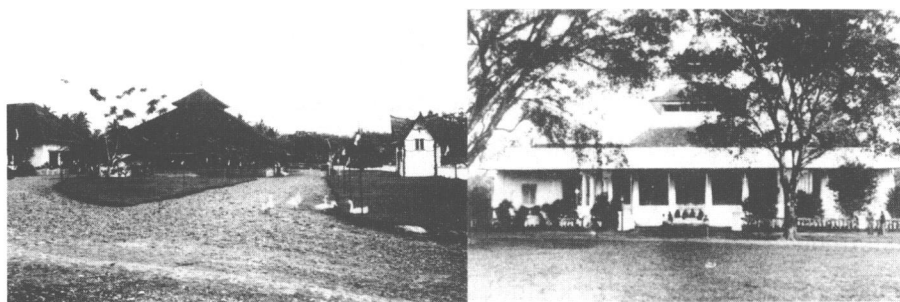
Sumber: *Tasikmalaja*. Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 744/Blad 49 n/24. Jakarta: ANRI.

Dengan keluarnya *besluit* tersebut, identitas Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang memiliki fungsi ideologis, administrasi, dan politik semakin menguat. Fungsi ideologis menjadi menguat karena Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan status dari kota distrik menjadi kota *afdeeling*. Fungsi administrasi secara efektif dapat dijalankan karena Kota Tasikmalaya berperan sebagai pusat informasi dan pengambilan keputusan, setidaknya bagi wilayah administrasi pemerintahan *Afdeeling* Tasikmalaya. Fungsi politik pun dapat dimainkan oleh Kota Tasikmalaya mengingat kota tersebut berkedudukan sebagai pusat konsentrasi kekuatan pemaksa yang tercermin dalam sistem pertahanan yang terwujud dalam bentuk kekuatan militer dan sistem perlindungan bagi golongan elite kota. Di *Afdeeling* Tasikmalaya, kekuatan militer Hindia Belanda (sebagai kekuatan pemaksa) dikonsentrasikan di Kota Tasikmalaya. Tidak hanya itu, kekuatan-kekuatan pendukung pun, antara lain poliklinik militer, dibangun juga di kota ini.

Memasuki abad ke-20, ketiga fungsi kota tersebut semakin berjalan efektif seiring dengan perubahan status Kota Tasikmalaya. Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal WillemRooseboom Nomor 4 Tanggal 1

September 1901, sejak tanggal 1 Desember 1901 *Afdeeling* Tasikmalaya dihapus. Distrik Tasikmalaya, Singaparna, Ciawi, dan Indihiang dimasukkan ke wilayah *Afdeeling*/Kabupaten Sukapura (*Staatsblad van NI*, 1901. No. 327). Selain itu, pemerintah kolonial pun menetapkan Kota Tasikmalaya sebagai ibu kota Kabupaten Sukapura menggantikan Manonjaya berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom. Oleh karena prasarana yang diperlukan bupati belum tersedia (antara lain pendopo), pemerintah kolonial masih memperkenankan R. T. Prawira Hadiningrat (Bupati Sukapura) tetap tinggal di Manonjaya (*Staatsblad van NI*, 1901. No. 431). Sebagai simbol perpindahan, pada 1 Oktober 1901, Bupati R. T. Prawira Hadiningrat meletakkan batu pertama untuk pembangunan pendopo yang terletak sekitar 300 meter ke arah timur Masjid Agung Tasikmalaya (Latief, 2009: 1).

**Foto 2: Pendopo Kabupaten di Kota Tasikmalaya Tahun 1923 (Kiri)
dan Masjid Agung Tasikmalaya Tahun 1923 (Kanan)**



Sumber: *Rumah (Pendopo) Bupati di Tasikmalaya*. Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0186/028 dan 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Pada 1921, Distrik Tasikmalaya memiliki luas sekitar 178 km² yang dibagi menjadi tiga *onderdistrik*, yaitu Tasikmalaya, Kawalu, dan Indihiang; serta dengan jumlah desa sekitar 46 buah (Stibbe, 1921: 285; *RA voor NI*, 1919: 394). Sejak tahun 1926 fungsi ideologis Kota Tasikmalaya



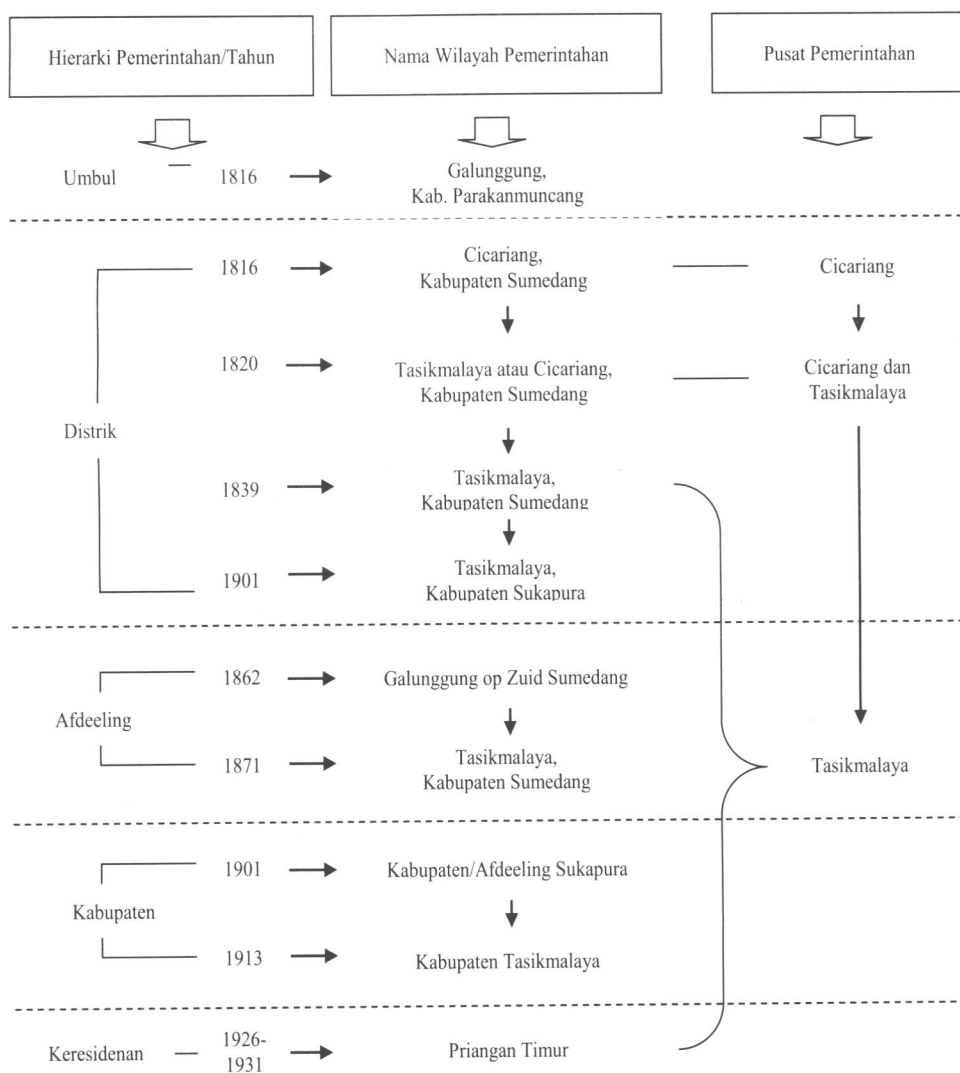
pun menguat seiring dengan ditetapkan sebagai ibu kota *Afdeeling* Priangan Timur (*Oost-Priangan*). Dalam kurun ini, kepala pemerintahan *afdeeling* dipegang oleh residen karena kekuasaannya meliputi lebih dari satu kabupaten. *Afdeeling* Priangan Timur itu sendiri meliputi Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis⁹ (Lubis, 1998: 35). Pada tahun 1931,¹⁰ Pemerintah Hindia Belanda menghapus *Afdeeling* Priangan Timur dan ketiga wilayah kabupatennya bersama-sama dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang disatukan di bawah nama *Afdeeling* Priangan (Suharto, 2002: 68).¹¹ Sebagai gambaran menyeluruh, pertumbuhan Kota Tasikmalaya dari aspek pemerintahan dapat dibaca pada diagram berikut ini.

9 Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis sebelumnya bernama Kabupaten Limbangan, Sukapuran, dan Galuh. Tahun 1913, Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama ketiga kabupaten tersebut (*Staatsblad van NI*, 1913. No. 356). Kabupaten Ciamis, menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Priangan sejak tahun 1915 karena sebelumnya sebagai bagian dari wilayah Keresidean Cirebon (Falah, 1991: 38).

10 Meskipun hanya berlangsung selama lima tahun, namun sebanyak empat orang residen pernah memerintah *Afdeeling* Priangan Timur di Kota Tasikmalaya, yaitu H. C. van den Bos (1925-1926), G. D. P. A Renardel de Lavalette (1926-1927), J. B. Hartelust (1927-1929), dan F. A. C. Halkema (1929-1931) (Dienaputra, 2004: 189; Kleine, 1931: 134; *RA voor NI*, 1926-1932).

11 Sistem *afdeeling* ini digunakan dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1937 karena sejak tahun 1938 secara resmi Pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah *residentie* (Suharto, 2002: 68).

Diagram Kedudukan Kota Tasikmalaya dalam Hierarki Pemerintahan Kolonial



E. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, Tasikmalaya telah dipergunakan sebagai nama

suatu wilayah pemerintahan antara tahun 1816-1820. Sebelum kurun waktu itu, nama yang dikenal adalah Tawang, Galunggung, atau Tawang-Galunggung. Ketika Gunung Galunggung meletus tanggal 8 dan 12 Oktober 1822, nama Tasikmalaya sudah dipergunakan dalam administrasi wilayah pemerintahan.

Kedua, penggunaan nama Tasikmalaya sebagai nama distrik bukan merupakan perubahan dari Distrik Tawang karena dari berbagai sumber arsip distrik tersebut tidak pernah tercatat. Pada masa Raffles (1816) di wilayah Priangan terdapat sebuah distrik bernama Cicariang. Oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, nama tersebut diubah menjadi *Distrikt Tassikmalaija op Tjitjariang*. Pada akhir tahun 1930-an, nama distrik tersebut berubah lagi menjadi *Distrikt Tassikmalaija*. Setelah berubah, Cicariang menjadi sebuah onderdistrik dengan nama Cibeuti dengan pusat pemerintahannya di Cibeuti.

Ketiga, pertumbuhan Kota Tasikmalaya bukan sebagai bagian dari perkembangan Kabupaten Sukapura, melainkan sebagai bagian dari dinamika Kabupaten Sumedang. Baru pada tahun 1901, Kota Tasikmalaya merupakan bagian integral dari Kabupaten Sukapura yang kemudian namanya berubah menjadi kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, pertumbuhan Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari fungsi kota yang semula berkedudukan sebagai kota distrik yang kemudian berkedudukan sebagai kota kabupaten dan keresidenan.

DAFTAR SUMBER

Arsip dan Sumber Resmi Tercetak

Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten. 1861. Eerste Deel (A-J). Amsterdam: van Kamp.

Algemeen Instructie van Alle Inlandsche Hoofden en Beambten behalve de Gestelijkeheid in de Residentie Preanger Regentschappen met vermelding van derzelver inkomsten in 1839. Koleksi Arsip Preanger-Regentschappen. No. 29^a/23. Jakarta: ANRI.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 17 Maret 1891 No. 8. Jakarta: ANRI.

Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1871-1939. Batavia: Landsdrukkerij.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor het Jaar 1859. No. 91; 1870. No. 121; 1901. No. 327 dan 431; 1913. No. 356; 1925. No. 391.

Statistiek van Java. 1820, Koleksi Arsip Preanger-Regentschappen. No. 28/9. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Statistiek der Preanger Regentschappen. 1863. Koleksi Arsip Preanger-Regent-schappen, No. 30/5. Jakarta: Arsip Nasional RI.

Leksikografi, Foto, dan Peta

van Carbee, P. Baron Melvill en W. F. Versteeg. 1853-1862. *Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie.* Batavia: van Haren Noman & Kolff.

District Tassikmalaja. Koleksi Arsip Inventory of Cartographic Manuscript of the 17th to the 19th Century. No. A.51. Jakarta: ANRI.

Masjid Agung Tasikmalaya. Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI.



- Rumah (Pendopo) Bupati di Tasikmalaya*. Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0186/028. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Stibbe, D. G. 1921. "Tasikmalaja" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Druk. Veerde Deel (Soemb – Z). Hlm. 284-285. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Tasikmalaja*. Koleksi Arsip Kartografi Indonesia 1913-1946. No. 744/Blad 49 n/24. Jakarta: ANRI.
- Veth, P. J. 1869. "Tassik Malaja (zie Tassikmalajoe)" dalam *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Bewerkt Naar de Jongste en Beste Berigten*. Hlm. 906. Deerde Deel (R-Z). Amsterdam: van Kamp.

Disertasi, Tesis, Jurnal Ilmiah, Laporan Penelitian, dan Skripsi

- Anonim. 1920. *Rupa-rupa Salinan Gunung Galunggung*. No. 1-27. Bandung: Direktorat Vulkanologi. Ditjen Pertambangan Umum.
- Brandes, J. 1888. "Drie Koperen Platen uit den Mataramschen Tijd". *TBG*, XXXII.
- Bronto, S. 1983. "Geologi G. Galunggung" dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan X Ikatan Ahli Geologi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia.
- Danasasmita, Saleh. 1975. *Hubungan antara Sri Jayabhupati dengan Prasasti Gegerhanjuang*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran.
- Ekadjati Edi S. *et al.* 1975. *Hari Jadi Tasikmalaya*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
- Falah, Miftahul. 1991. Pengungsian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dari Bandung ke Tasikmalaya pada masa Perang Kemerdekaan (1946-1948). Skripsi. Jatinangor: Fakultas Sastra Unpad.

- Fitri, Indri Alinda. 1995. *Reorganisasi Priangan 1 Juni 1871 dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Rakyat Priangan (1871-1917)*. Skripsi. Jatinangor: Fakultas Sastra Unpad.
- Furuya, Takahiko. "Preliminary Report on Some Volcanic Disasters in Indonesia" dalam *South East Asian Studies*. 1978. Vol. 15. No. 4.
- Muhsin Z., Mumuh. 1994. *Kota Bogor; Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota (Abad ke-19 sampai Abad ke-20)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Natanagara, Rd. Asik. "Sadjarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Nepi ka Kiwari" dalam *Volksalmanak Soenda*. 1938. Batavia Centrum: Bale Poestaka.
- Permadi, Agus. "Prasasti Geger Hanjuang; Ngahanjuang-siangkeun Hari Jadi Tasikmalaya" dalam *Mangle* No. 495, September 1975.
- Zen, M. T. "Seribu Gunung di Priangan Timur" dalam *Majalah Intisari*. No. 6. Agustus 1968.

Buku

- Adeng. 2005. "Sejarah Sosial di Kabupaten Tasikmalaya" dalam Sindu Galba (ed.). *Sejarah Sosial di Jawa Barat dan Banten*. Bandung: BKSNT. Hlm. 69-138.
- van der Chjis, J. A. 1880. *Babad Tanah Pasundan*. Terj. Raden Karta Winata. Batavia: Kantor Citak Gupernemen.
- Dienaputra, Reiza D. 2004. *Cianjur: Antara Bandung dan Buitenzorg. Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942*. Bandung: Prolitera.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- de Graaf, H. J. 1990. *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*. Terj. Pustaka Grafiti Utama dan KITLV. Jakarta: Pustaka



Grafiti Utama.

de Haan, F. 1912. *Priangan; de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Deerde Deel. Batavia: G. Kolff & Co.

Indonesia. Kementrian Penerangan. 1953. *Propinsi Djawa Barat*. Djakarta: Dewaruci Press.

-----, 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

de Klein, Jacob Wouter. 1931. *Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn Nawerking*. Delf: de NV Technische Boekhandel en J. Waltman Jr.

Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1042)*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

Lubis, Nina H. et al. 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad.

Marlina, Ietje. 2000. "Sukapura (Tasikmalaya)" dalam *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Hlm. 91-110. Jatinangor: AlqaPrint.

-----, 2007. *Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah*. Bandung: AlqaPrint.

Musch, C. C. 1918. *Topographisen Dienst in Nederlandsch Indie over 1917*. Dertiende Jaargang. Batavia.

Pemerintah Kotip Tasikmalaya. 1977. *Gambaran Perkembangan Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Tasikmalaya selama 1 Tahun*. Tasikmalaya: Kotip Tasikmalaya.

Roswandi, Iwan. 2006. "Sejarah Kabupaten Tasikmalaya: Studi tentang Berdiri dan Berkembangnya Pemerintahan Tasikmalaya" dalam Iim Imanuddin dan Sindu Galba (eds.). *Sejarah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten; Garut, Subang, Bekasi, Tasikmalaya, dan Tangerang*. Bandung: BKSNT.

Sastrahadiprawira, R. Memed. 1953. "Manondjaja Dajeuh Narikolot" dalam R. I. Adiwidjaja. *Pantjawarna*. Djakarta: Balai Pustaka.

- Sjafrudin, Ateng *et al.* 1993. *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Barat.
- Suharto. 2002. *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942; Profil Pergerakan Etno-Nasionalis*. Bandung: Lembaga Kajian Strategis Paguyuban Pasundan.
- Widjajakusumah, R. D. Asikin. 1961. *Tina Babad Pasundan; Riwayat Kemerdekaan Bangsa Sunda Saruntangan Kerajaan Padjadjaran dina tahun 1580*. Bandung: Kalawarta Kudjang.

Internet

- Latief, Abdoel. 2009. *Pendopo Tasikmalaya; Bukti Sejarah Berdirinya Tasikmalaya*. Diakses dari <http://berita.prianganonline.com/?act=berita&aksi=lihat&id=1684>, Tanggal 15 Agustus 2009, Pukul 11.00 WIB.
- Koleksi KITLV. Diakses dari [http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasikmalaja&sc=\(Tasikmalaja%20*\)/](http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:866/&p=1&i=14&st=Tasikmalaja&sc=(Tasikmalaja%20*)/), 28 September 2009, Pukul 1957 WIB.
- , [http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=\(Tasikmalaja\)/&wst=Tasikmalaja](http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/KITLV01:122/&p=1&i=2&st=Tasikmalaja&sc=(Tasikmalaja)/&wst=Tasikmalaja). Diakses Tanggal 12 Mei 2008, Pukul 14.00 WIB.



Dari Ujungberung ke Bandung Perubahan Wilayah Administratif Distrik Ujungberung, Kabupaten Bandung (1871–1942)

ANI ISMARINI

BAPUSIPDA JAWA BARAT

Asal-usul atau etimologis nama Ujungberung hanya dapat kita lacak dalam tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat beberapa versi asal-usul nama Ujungberung. Versi pertama berdasarkan legenda dalam masyarakat yaitu ketika Sangkuriang sedang sibuk membuat perahu. Seperti kita ketahui dalam masyarakat Sunda sangat dikenal dengan cerita legenda Sangkuriang yang hendak meminang Dayang Sumbi yang sesungguhnya adalah ibunya sendiri. Untuk menghalangi keinginan tersebut Dayang Sumbi meminta syarat untuk dibuatkan sebuah perahu dalam semalam. Rupanya Sangkuriang hampir dapat menyelesaikan perahu tersebut menjelang matahari terbit. Dayang Sumbi merasa khawatir dan untuk menghalangi pembuatan perahu yang hampir selesai tersebut ia berlari ke atas bukit dan melambai-lambaikan selendang mayang miliknya untuk memohon sang surya agar segera terbit. Permohonan tersebut terkabul, sang surya terbit (versi lain menyebutkan bahwa tindakan tersebut isyarat bagi para wanita agar menumbukkan alu ke lisung menandakan hari sudah pagi untuk mengelabui 7 guriang, makhluk gaib yang membantu pekerjaan Sangkuriang). Menyadari pekerjaannya telah gagal karena kesiangkan, Sangkuriang pun marah dan menendang perahunya hingga tertelungkup. Konon perahu yang tertelungkup itu menjelma menjadi Gunung Tangkupan Parahu, sedangkan selendang mayang milik Dayang Sumbi berubah menjadi Gunung Manglayang,

dan tempat akhir dari usaha Sangkuriang dalam mengumbar nafsu untuk mewujudkan keinginannya mempersunting Dayang Sumbi disebut Ujungberung, yaitu tempat “ujung-na nga-berung nafsu”, merupakan akhir dari nafsu untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi sebagai syarat pernikahan (Wijaya 2009: 25)

Versi kedua berdasarkan sejarah ialah ketika Dipati Ukur¹ dikejar oleh tentara Mataram sampai di suatu tempat di pinggir danau Bandung Purba di sebelah timur Bandung. Tempat tersebut ditumbuhi oleh tanaman bambu yang sangat lebat sehingga Dipati Ukur dapat menyembunyikan diri dan tidak dapat ditemukan oleh tentara Mataram. Tempat itu bernama “Bojong Awi” (*bojong, bobojong* = daerah tepian telaga; *awi* = bambu). Peristiwa itu dianggap oleh tentara Mataram sebagai ujung-nya dari suatu usaha pengejaran yang sangat panjang, dalam nga-berung nafsu (mengumbar nafsu) untuk menangkap sang adipati. Maka wilayah pengejaran tersebut diberi nama Ujungberung (Wijaya 2009: 26)

UJUNGBERUNG BAGIAN DARI KABUPATEN BANDUNG

Berdirinya Kabupaten Bandung berawal dari usaha pengembalian stabilitas politik oleh Sultan Agung setelah peristiwa Dipati Ukur yaitu dengan melakukan reorganisasi Daerah Barat (1641–45), yaitu dengan dibentuknya Kabupaten Sukapura, Kabupaten Parakanmuncang, dan Kabupaten Bandung (Hardjasaputra 2002:13) Masing-masing diangkat sebagai bupati adalah Ki Ngabehi Wirawangsa dengan gelar Tumenggung Wiradadaha sebagai Bupati Sukapura, Ki Samahita dengan gelar Raden Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang, dan Ki Astramanggala dengan gelar Tumenggung Wirangun-angun sebagai Bupati Bandung. Ketiga orang ini adalah umbul dari Priangan yang berjasa

¹ Dipati Ukur adalah bupati wedana yang gagal merebut Batavia dari VOC atas perintah Sultan Mataram pada tahun 1628; lebih lanjut lihat A. Sobana Hardjasaputra, *Sejarah Kota Bandung 1810-1942*.



terhadap Mataram dalam upaya penangkapan Dipati Ukur. Pengangkatan ketiga bupati ini tercantum dalam piagam dari Sultan Mataram yang ditulis pada hari saptoe ping sanga woelan Moecharam taoen Alip. Menurut F. de Haan, titimangsa itu sama dengan tanggal 20 April 1641 (Herlina 1990: 28-29) Tahun ini Kabupaten Bandung merayakan hari jadinya yang ke-370.

Sejak berdiri pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di Krapyak (Citeureup) yang terletak di bagian selatan daerah Bandung, sekitar 11 kilometer dari pusat kota Bandung sekarang. Tempat itu sekarang bernama Dayeuhkolot, di tepi sungai Citarum, dekat muara Sungai Cikapundung dan pertemuan Sungai Citarik dengan Sungai Citarum. Ketika Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah II memerintah (1794–1829) dilakukan pencarian tempat untuk ibu kota baru Kabupaten Bandung. Sementara itu, pada tanggal 5 Januari 1808 Herman Willem Daendels selaku Gubernur Jenderal pertama di Hindia Belanda tiba di Batavia dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa.² Daendels merencanakan untuk membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer ke Panarukan sepanjang sekitar 1.000 kilometer. Daendels memerintahkan para bupati, termasuk bupati Bandung untuk mengerahkan rakyatnya membangun “jalan raya”. Pembangunan Jalan Raya Pos di daerah Priangan sebagian besar adalah memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada, sehingga dapat dilalui oleh kereta pos. Di daerah Kabupaten Bandung, jalan yang akan dibangun menjadi jalan raya itu adalah jalan yang membentang dari bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Cianjur) menuju bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Sumedang). Pembangunan Jalan Raya Pos antara Bogor (Buitenzorg) dengan Karangsambung melewati daerah Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang dilaksanakan berdasarkan perintah Daendels yang dituangkan dalam surat keputusan tanggal 5 Mei 1808. Bupati Bandung mendapat tugas memimpin pembangunan

² Ketika Daendels berkuasa Priangan terdiri atas 5 kabupaten, yaitu Sumedang, Bandung, Cianjur, Karawang, dan Parakanmuncang, yang dikenal sebagai *Preanger-Regentschappen*.

jalan antar Bandung dan Sumedang. Jalan tersebut dibangun dari Cihea di bagian barat sampai ke Ujungbrung Kaler di bagian timur laut, daerah perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang, sepanjang 68,27 kilometer (Hardjasaputra 2002: 27-28)

WILAYAH UJUNGBERUNG

Belum didapat bukti yang akurat sejak kapan Ujungberung ada dan seluas apa batas wilayahnya. Namun nampaknya wilayah Ujungberung sudah ada sebelum ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke sekitar Alun-alun Bandung saat ini. Ketika Daendels akan membuat Jalan Raya Pos terdapat peta wilayah Ujungberung. Wilayah utara Jalan Raya Pos disebut “Oedjoengbroeng Kaler” dan di sebelah selatan disebut “Oedjoengbroeng Kidoel” yang sebagian besar masih merupakan moeras (rawa) bernama “Gegerhanjoewang”. Batas timur adalah Sungai Cibeusi yang berbatasan dengan Kabupaten Parakanmuncang. Di utara berupa rangkaian pegunungan yang diawali dari Gunung Manglayang, Gunung Bukittunggul, hingga Gunung Tangkuban Parahu. Di selatan berbatasan dengan ibukota Krapyak dan sepanjang Sungai Citarum, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Cimahi.

Wilayah Oedjoengbroeng Kaler hampir seluruhnya daratan, sebagian besar berada di utara Jalan Raya Pos, berbeda halnya dengan wilayah Oedjoengbroeng Kidoel. Wilayah ini hampir sebagian besar merupakan rawa. Hingga kini dikenal nama-nama daerah yang berhubungan dengan air (cai, ci) atau padang rumput di tepian rawa, seperti Cicadas, Cicaheum, Cicukang, Cinambo, Cibiru, dan Cipadung. Sedangkan nama-nama daerah yang dahulu merupakan wilayah rawa biasanya didahului dengan nama ranca (rawa) atau leuwi, seperti Rancaekek, Rancabolang, Leuwipanjang. Sedangkan nama-nama tempat yang berada di utara Jalan Raya Pos biasanya menggunakan nama pasir (bukit), seperti Pasirjati, Pasirluhur, Pasirtengah, Pasirkunci, dan lain sebagainya. Karena sebagian besar



wilayah Ujungberung masih berupa rawa dan hutan dapat dibayangkan bahwa sebelum dibukanya Jalan Raya Pos perjalanan menuju ke timur melalui Ujungberung belum dilakukan oleh banyak orang. Kemungkinan jalan yang digunakan menuju timur berawal dari Krapyak menyeberangi Sungai Citarum dan Citarik mendekati wilayah Ciparay dan Majalaya hingga ke Cicalengka.

Dapat dikatakan bahwa wilayah Ujungberung sebelum ada Jalan Raya Pos tidak menarik untuk disinggahi atau dijadikan wilayah hunian, namun setelah Jalan Raya Pos dibuat melalui Ujungberung dan sebagian wilayah dijadikan daerah perkebunan kopi, mulailah orang berdatangan ke Ujungberung untuk menetap. Sampai saat ini belum didapat catatan yang jelas tentang kondisi terperinci mengenai pembuatan Jalan Raya Pos yang melewati Ujungberung. Jalan Raya Pos

Peta 1 Wilayah Ujungberung (sekitar 1808–09)



Sumber: Diolah dari Koleksi Peta de Haan (A.62 dan A.81) dalam *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Batavia: BGKW.

dibuat untuk memudahkan transportasi dibuat suatu pola pemisahan jarak beraturan yang tidak lepas dari jarak tempuh “kereta pos” yang harus mengganti kudanya pada setiap jarak tertentu. Untuk itu dibuat pos-pos pemberhentian, tempat untuk mengganti kuda dan bermalam para penumpang kereta pos. Maka pada setiap jarak sekitar 15 km, dibuat tempat peristirahatan serta kandang kuda, dekat alun-alun. Alun-alun pertama ke arah barat saat keluar Bandung, dibuat di Cimahi dan ke arah timur berada di wilayah Ujungberung.

PERUBAHAN WILAYAH UJUNGBERUNG

Dari kurun waktu 1871–1942 Ujungberung merupakan suatu wilayah yang berada dalam Kabupaten Bandung. Nama Ujungberung melekat pada dua distrik di Kabupaten Bandung, yaitu Distrik Ujungberung Kulon dan Ujungberung Wetan. Berdasarkan surat keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 10 September 1870 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1871³ diadakan penataan di wilayah administratif Priangan. Setiap kabupaten di lingkungan Preanger-Regentschappen dijadikan sebagai afdeeling dan kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas dibagi menjadi dua afdeeling. Hasilnya Preanger-Regentschappen dibagi menjadi sembilan afdeeling, yaitu Afdeeling Sukabumi, Afdeeling Cianjur, Afdeeling/Kabupaten Bandung, Afdeeling Cicalengka,⁴ Afdeeling/Kabupaten Limbangan, Afdeeling/Kabupaten Sumedang, Afdeeling Tasikmalaya, Afdeeling/Kabupaten Sukapura, Afdeeling Sukapura Kolot. Dengan demikian sebagian, sebagian afdeeling bersatu dengan kabupaten yang dipimpin oleh bupati dan asisten residen, sedangkan afdeeling yang berdiri sendiri dipimpin oleh patih (*zelfstandige patih*) dan asisten residen.

3 Staatsblad 1870, No. 121 Dikenal dengan nama reorganisasi Priangan (Preanger Reorganisatie).

4 Afdeeling Cicalengka terdiri atas distrik Cicalengka, Timbanganten, Cikembilan, Balubur-Limbangan, Majalaya dan Cipeujeuh.



Afdeeling/Kabupaten Bandung terdiri atas distrik Ujungberung Kulon, Ujungberung Wetan, Banjaran, Kopo, Cisondari, Rongga, Cilokotot, Rajamandala, Cihea, dan Gandasoli. Distrik Ujungberung Kulon yang beribukota di Cipaganti membawahi onderdistrik Tjiraten, Tjibenjing, Tjipaganti, Geger Kolong, Tjibeurum, Baloeboer, Tjibongkong, Bodjong Asi, dan Bodjong Patjing, dengan jumlah penduduknya berjumlah 18.478 orang. Sedangkan Distrik Ujungberung Wetan yang beribukota di Ujungberung⁵ membawahi onderdistrik Tjiproepoeng, Odjong Bron, Binoma, Tjiseranten, Tjirtjahem, Tjiliroe, Boeah Batoe, dan Lengkong, dengan jumlah penduduk sebanyak 12.795 orang (Veth 1869: 586).

Peta 2 Wilayah Ujungberung (sekitar 1857)



Sumber: Diolah dari peta yang dibuat oleh W.F. Versteeg pada tahun 1857 dalam buku karya Anto S. Widjaya, Ujungberung, Serambi Timur Bandung. Bandung: Panitia Pameran Sejarah Ujungberung.

Berdasarkan ordonansi tanggal 16 Oktober 1882⁶ terjadi perubahan onderdistrik di Distrik Ujungberung Kulon yaitu terdiri atas Bandung,

5 Ibu kota Ujungberung ini berjarak 5 palen ke arah timur Bandung dari titik Nol. 1 paal = 1.506,943, kurang lebih 8 kilometer, kira-kira di sekitar Sukamiskin saat ini.

6 Staatsblad 1882, No. 252.

Lembang, Andir, dan Bloeboer. Sedangkan Distrik Ujungberung Wetan terdiri atas onderdistrik Oedjoengbroeng, Tjibiroe, Tjibenjing, dan Boewabatoe.

Pada 1913, melalui surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Mei 1913 no. 60 terjadi perubahan nama Distrik Ujungberung Kulon menjadi Distrik Bandung dengan onderdistrik West-Bandoeng, Oost-Bandoeng, Bodjonglowa, Tjipaganti, dan Lembang. Distrik Ujungberung Wetan menjadi Distrik Ujungberung dengan onderdistrik Oedjoengbroeng, Tjibiroe, Tjitjadas, dan Boewahbatoe.⁷

Pada 1929 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 5 Januari 1929 Nomor 25⁸ Distrik Bandung membawahi onderdistrik West-Bandoeng, Oost-Bandoeng, dan Bodjonglowa. Distrik Ujungberung membawahi onderdistrik Oedjoengbroeng, Tjitjadas, dan Boewahbatoe.

Perubahan Distrik Ujungberung

(1871–1942)

No.	DISTRIK	ONDERDISTRIK			
		1871	1882	1913	1929
1	Ujungberung Kulon → B a n d u n g (1913)	Tjiraten Tjibenjing Tjipaganti Geger Kolong Tjibeurum Baloeboer Tjibongkong Bodjong Asi Bodjong Patjing	Bandong Lembang Andir Bloeboer	West-Bandoeng Oost-Bandoeng Bodjonglowa Tjipaganti Lembang	West-Bandoeng Oost-Bandoeng Bodjonglowa
2	Ujungberung Wetan → Ujungberung (1913)	Tjiproepoeng Odjong Bron Binoma Tjiseranten Tjirtjahem Tjiliroe Boeah Batoe Lengkong	Oedjoengbroeng Tjibiroe Tjibenjing Boewabatoe.	Oedjoengbroeng Tjibiroe Tjitjadas Boewahbatoe	Oedjoengbroeng Tjitjadas Boewahbatoe

⁷Staatsblad tahun 1913 No. 356; lihat juga Staatsblad 1911 No. 622 (Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 29 November 1911 No. 36)

⁸Staatsblad 1929 No. 2.

Keberadaan distrik Bandung dan Ujungberung dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung tidak terlepas dari perkembangan Kota Bandung sejak ibukota Kabupaten Bandung berdiri. Perluasan wilayah Kota Bandung ke arah utara dan timur dalam perkembangannya selalu mengurangi kedua distrik tersebut.

Ketika Kota Bandung menjadi *gemeente* (kotapraja) pada 1 April 1906⁹ berbatasan dengan Distrik Ujungberung Kulon, dengan batas di timur sampai Kaca-kaca Wetan (Simpang Lima), di sebelah barat sampai Kaca-kaca Kulon (Pasar Andir), di utara sampai Jalan Aceh dan di selatan sampai Tegallega. Pada waktu itu luas Distrik Ujungberung Kulon 19.520,44 hektar dan Distrik Ujungberung Wetan seluas 22.036,17 hektar. Pada 1911, Gemeente Bandung kembali meluas dengan mengambil sebagian besar wilayah Distrik Ujungberung Kulon, wilayah yang tidak diambil oleh Gemeente Bandung berubah namanya menjadi Distrik Bandung pada tahun 1913. Pada 1912, dengan adanya perubahan onderdistrik di Distrik Ujungberung, wilayah Kota Bandung meluas sehingga memangkas habis Distrik Bandung ke timur dan Distrik Ujungberung berbatasan langsung dengan Kota Bandung di Sungai Cibeunying. Perubahan wilayah kedua distrik tersebut dapat dilihat dalam Peta 3.

Peta 3
Wilayah Ujungberung (1906–40)



Sumber: Diolah dari peta yang dibuat oleh *Topographisch Bureau*, Batavia dan buku karya Haryoto Kunto, Balai Agung Kota Bandung. Bandung: Granesia.

⁹ Surat Keputusan Gubernur Jenderal 21 Februari 1906 (Staatsblad 1906 No.121).

Dalam struktur pemerintahan distrik, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang wedana yang merupakan pejabat pemerintahan pribumi. Sebelum 1849, wedana di Priangan disebut kepala cutak. Setelah 1840 wedana mendapat surat pengangkatan dari Gubernur Jenderal. Selain memimpin sebuah distrik, biasanya satu dari onderdistrik bawahannya, yaitu onderdistrik yang menjadi ibukota distrik tersebut dipimpin sendiri oleh wedana. Wedana dan asisten wedana biasanya berada di pakemitan dan berasal dari golongan menak yang masih mempunyai hubungan darah dengan bupati (Lubis 1998: 37)

Wedana Ujungberung Kulon dari 1887 hingga 1913 dijabat oleh 6 orang dan ketika terjadi perubahan nama menjadi Distrik Bandung pada 1913 hingga 1942 dijabat oleh 6 orang. Sedangkan Wedana Ujungberung Wetan dari 1882 hingga 1913 sebanyak 6 orang dan ketika berubah nama menjadi Distrik Ujungberung pada 1913 hingga 1942 sebanyak 6 orang.

Wedana Ujungberung Wetan (1882–1913)

No.	NAMA	PENGANGKATAN
1	R. Raksa Manggala	-1882
2	R. Rangga Kartadiraja	1882-1887
3	R. Tunawangsa	25 Maret 1888
4	Mas Tirta Maja	16 Februari 1896
5	R. Prawirakusuma	27 November 1901
6	R. Tanumaja	26 Maret 1909



Wedana Ujungberung (1913–42)

No.	NAMA	PENGANGKATAN
1	R. Rangga Tanumaja	6 September 1913
2	R. Suria Adimijaya	31 Maret 1917
3	R. Kanduruan Suria Sumantri	28 Agustus 1926
4	R. Kanduruan Sastranagara	7 Mei 1928
5	R. Agus Padmanagara	6 Februari 1935
6	R. Wiradiputra	6 April 1937

Wedana Ujungberung Kulon (1887–1911)

No.	NAMA	PENGANGKATAN
1	R. Rangga Kartadiraja	8 Februari 1887
2	R. Parba Kusuma	18 Agustus 1893
3	R. Rangga Arga Gurnita	18 Agustus 1898
4	Mas Tirta Maja	18 Agustus 1901
5	R. Suria Kerta Legawa	3 Desember 1908
6	R. Kanduruan Sacakusumah	22 September 1910

Wedana Bandung

(1912–42)

No.	NAMA	PENGANGKATAN
1	R. Ranga Sacakusumah	29 November 1911
2	R. Kartapranata	6 September 1913
3	R. Jayasubrata	6 Juli 1915
4	R. Suria Karta Prawira	6 Februari 1918
5	R. Prawiradilaga	26 April 1921
6	R. Kanduruan Martaatmaja	28 Agustus 1925
7	R. Endung Suriasaputra	11 Maret 1929
8	R. Bratawijaya	23 Juni 1937

Ketika terjadi perubahan nama di kedua distrik tersebut pada 1913, terjadi juga perubahan nama-nama distrik di Kabupaten Bandung.¹⁰ Distrik Bandung terbagi atas onderdistrik *West-Bandoeng*, *Oost-Bandoeng*, Bodjonglowa, Tjipaganti, dan Lembang; Distrik Ujungberung terbagi atas onderdistrik Ujungberung, Tjibiroe, Tjitjadas, dan Boewahbatoe. Pada 1929, terjadi pengurangan wilayah di kedua distrik tersebut, yaitu untuk Distrik Bandung dikurangi Tjipaganti yang masuk wilayah *gemeente* Bandung, Lembang menjadi distrik tersendiri, sedangkan Distrik Ujungberung kehilangan onderdistrik Boewahbatoe yang menjadi wilayah *gemeente* Bandung.¹¹

¹⁰ Staatsblad 1913 No. 356, berlaku 1 Juli 1913.

¹¹ Staatsblad 1929 no.2, dalam keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 5 Januari 1929 no.25.



KESIMPULAN

Distrik Bandung, yang sebelum 1913 bernama Distrik Oejoengbroeng Kulon, dan Distrik Ujung Berung, yang semula bernama Distrik Oejoengbroeng Wetan, merupakan cikal bakal wilayah pemerintahan Kota Bandung.

Perubahan wilayah Ujungberung yang meliputi Distrik Ujungberung Kulon dan Distrik Ujungberung Wetan tidak lepas dari perkembangan Kota Bandung sebagai ibu kota Keresidenan Priangan, ibukota Kabupaten Bandung dan sebagai *gemeente* Bandung.



Penataan Wilayah Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan 1898–1962

ROSMAIDA SINAGA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Sebelum akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda belum tertarik untuk menegakkan kekuasaannya di Nieuw Guinea. Belanda merasa cukup menanamkan pengaruhnya atas wilayah itu melalui Sultan Tidore, karena wilayah itu dianggap tidak dapat memberikan keuntungan komersil bagi Belanda (Sinaga 2005: 3). Hubungan pemerintah kolonial dengan penduduk wilayah itu dilakukan melalui perjalanan pejabatnya untuk menempatkan bendera Belanda dan papan nama di wilayah itu (Stibbe 1919: 34). Namun, pada abad ke-19 negara-negara Barat saling berlomba untuk memperoleh tanah jajahan di Nieuw Guinea, sehingga perhatian Belanda semakin meningkat terhadap wilayah itu. Oleh karena itu, pada 1898 Belanda menegakkan kekuasaannya di Nieuw Guinea.¹ Wilayah kekuasaan Belanda di Nieuw Guinea disebut Nederlands Nieuw Guinea (selanjutnya disingkat NNG).

Pemerintahan kolonial Belanda di NNG berlangsung dari 1898 hingga 1962. Dari awal penegakan pemerintahan hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di NNG, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keberhasilan ekspansi administratif di NNG melalui penataan wilayah pemerintahan kolonial di NNG. Ekspansi administratif Belanda berhasil karena didukung kebijakan penataan

¹ ANRI, *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 19, 5 Februari 1898.

wilayah pemerintahan yang mempertimbangkan faktor politik, ekonomi (sumber daya alam), budaya (karakter sosial), dan akses transportasi (Sinaga 2010: 90). Oleh karena itu dalam tulisan ini dikemukakan proses dan dasar penataan wilayah pemerintahan kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea.

PROSES PENATAAN

Penegakan pemerintahan kolonial Belanda di NNG diawali dengan kegiatan penjajakan wilayah dan pembenahansarana dan prasarana transportasi/komunikasi dari Ternate ke NNG dan sebaliknya.² Dalam rangka pembenahan dimaksud pemerintah kolonial mengatur jalur pelayaran *Koninklijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM) ke dan dari NNG³ secara bergantian melalui jalur utara dan selatan.⁴

Adapun pelayaran KPM pada jalur utara sebagai berikut.

- a. Perjalanan pergi: Ternate, Gane, Patani, Salawati, Sorong, Dorei, Room, Teluk Umar, Ansus (Yapen), Taronta (Teluk Walckenaar), Teluk Homboldt (perbatasan dengan Jerman).
- b. Perjalanan pulang: Teluk Tanah Merah, Jamma, Awek (pantai utara Yapen), Saba (di Biak), Korido, Dorei, Sankoren (Amberbaken, pada musim angin barat laut sebagai gantinya Koor di pulau-pulau Amsterdam dan Middelburg disinggahi), Saonek (Waigeo), Patani dan Ternate.⁵

Pelayaran KPM pada jalur selatan sebagai berikut.

- a. Perjalanan pergi: Ternate, Bacan, Misool, Sekar, Skroe, Karas (Teluk

2ANRI, Surat Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 2086/2, 28 Oktober 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

3ANRI, Surat Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 2086/2, 28 Oktober 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

4ANRI, Surat Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 2086/2, 28 Oktober 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

5ANRI, Surat Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 2086/2, 28 Oktober 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.



Rijklof van Goens), Gisser, Banda, Teluk Kaimana, Utanata (Wakara), Selerika (perbatasan dengan Inggris).

- b. Perjalanan pulang: Pulau Hermuis, Teluk Kayu Merah, Teluk Triton, Namatote, Banda, Gisser, Skroe, Sekar, Bacan dan Ternate.⁶

Pembenahan jalur pelayaran itu bertujuan untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi ke tempat-tempat yang menjadi pos pemerintahan di wilayah NNG, sehingga para pejabat pemerintah dapat mengunjungi dan mengawasi wilayah kekuasaannya serta meningkatkan perdagangan di wilayah itu. Kemajuan perdagangan di NNG diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pemerintah yang bersumber dari pajak hasil bumi dan bea cukai ekspor-impor barang dari dan ke wilayah itu dan mendorong keterlibatan penduduk lokal dalam kegiatan perdagangan itu. Keterlibatan penduduk lokal dalam perdagangan diharapkan dapat meningkatnya pendapatannya, sehingga mereka mampu membayar pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah kolonial juga berharap keuntungan dari pajak perdagangan itu dapat menambah kas Negara Belanda atau sekurang-kurangnya mampu menutupi sebagian pengeluaran pelaksanaan pemerintahan di wilayah itu. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial Belanda sangat rasional dalam melaksanakan pemerintahannya di NNG.

Penjajakan wilayah yang dilakukan pemerintah kolonial bertujuan untuk menetapkan pos pemerintahan dan batas wilayah pemerintahan. Pemerintah kolonial menetapkan tempat kedudukan kontrolir di Teluk Doreh, tempat yang banyak dikunjungi oleh para pendeta zending.⁷ Usulan itu didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah lebih mudah menjalin hubungan dengan penduduk yang telah menerima pengaruh dari para pendeta yang berkarya di daerah itu. Selain itu, Teluk Doreh dipilih

⁶ANRI, Surat Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 2086/2, 28 Oktober 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

⁷ANRI, Agenda No. 2435/97, Hal Organisasi Pemerintahan di Nieuw Guinea, *Bundel Algemeene Secretarie*.

karena letaknya yang menguntungkan di bagian teluk yang dalam dan tenang sehingga cocok untuk pelabuhan bagi kapal-kapal besar. Juga di tempat itu ditemukan lahan yang luas dan subur yang menghasilkan komoditi dagang.⁸ Dengan demikian, pemilihan Teluk Doreh sebagai pangkalan pemerintah tidak terlepas dari letak geografis dan nilai ekonomis serta akses transportasi ke wilayah itu. Pemilihan Fak-Fak sebagai kedudukan kontrolir karena tempat itu telah mendapat pengaruh dari para pedagang yang berasal dari Kepulauan Maluku dan Sulawesi. Pertemuan penduduk lokal dengan para pedagang tersebut menyebabkan di antara penduduk lokal itu ada yang dapat berbahasa Melayu sehingga memudahkan para aparat pemerintah berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, pemilihan tempat kedudukan para kontrolir itu didasarkan pada tersedianya pelabuhan yang memadai yang menjadi akses transportasi ke pos itu. Pemilihan tempat itu juga bertalian dengan jabatan kontrolir sebagai kepala pelabuhan yang bertugas untuk mengawasi tindakan para pedagang asing⁹ dan mencegah perburuan burung cenderawasih¹⁰ serta memudahkan para kontrolir untuk mengutip pajak perdagangan.¹¹ Pemungutan cukai ekspor itu dimaksudkan untuk menambah kas negara dan sebagai ganti rugi atas biaya pelaksanaan pemerintahan di wilayah itu.¹² Hal ini berarti penempatan wakil pemerintah kolonial di wilayah NNG bertugas untuk mengawasi keamanan wilayah itu dan meningkatkan ekonomi pemerintah kolonial.

Dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban di wilayah NNG, pemerintah kolonial membentuk korps polisi di wilayah itu. Pemerintah merekrut aparat polisi yang mengenal daerah itu dan berpengalaman

8 ANRI, Surat Residen Ternate kepada Direktur Pemerintahan, No. 2111/2, 15 November 1897, *Bundel Algemene Secretarie*.

9 ANRI, *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 22, 16 Mei 1898, Lihat juga *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 165, 1898.

10 ANRI, Laporan Sementara Majelis Tinggi Sub-Bagian, No. 36a, *Bundel Algemeene Secretarie*.

11 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 4115, 8 September 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

12 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 4115, 8 September 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.



dalam tugasnya.¹³ Untuk menarik minat aparat polisi untuk pindah tugas ke NNG, pemerintah menawarkan kenaikan pangkat dan gaji yang lebih besar dari tempat tugas sebelumnya.¹⁴ Sementara untuk memperlancar tugas pemerintahan di NNG, pemerintah kolonial menyediakan kapal uap sebagai kendaraan dinas para kontrolir dan merekrut awak kapal uap yang mengenal wilayah itu¹⁵ dan berpengalaman dalam tugasnya.¹⁶ Pemerintah juga merekrut kontrolir yang berpengalaman dalam pemerintahan dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi sehingga mampu menghadapi kesulitan di wilayah kerjanya.¹⁷ Pemerintah kolonial tidak hanya menuntut kewajiban para aparatnya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para aparatnya melalui pemberian berbagai tunjangan di luar gaji pokoknya.¹⁸ Pemerintah kolonial memberikan gaji yang sesuai dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan hidup di NNG.¹⁹ Peningkatan kesejahteraan para aparat pemerintah itu dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan betah tinggal di tempat tugasnya yang baru itu. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial mengelola pemerintahannya secara efektif dan efisien. Tugas pemerintah berikutnya adalah menetapkan daerah kekuasaan para kontrolir itu.²⁰ Penentuan batas itu dimaksudkan untuk menentukan wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kontrolir itu.

13 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Residen Ternate, No. 90, 8 Januari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

14 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Residen Pantai Timur Sumatera, No. 90, 8 Januari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

15 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Kepala Panglima Angkatan Laut dan Kepala Departemen Angkatan Laut, No. 90, 8 Januari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

16 ANRI, Surat Panglima Angkatan Laut kepada Direktur Pemerintahan, No. 506, 17 Januari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

17 Laporan Sementara Majelis Tinggi Sub Bagian No. 36 a, *Bundel Algemeene Secretarie*.

18 ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 142, 166 dan 187, 1898.

19 ANRI, Surat Gubernur Jendral Hindia Belanda kepada Menteri Koloni, No. 11, 26 September 1897, *Bundel Algemeene Secretarie*.

20 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 90, 9 Januari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

PENATAAN WILAYAH PEMERINTAHAN KOLONIAL DI NNG 1898–1945

Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda ditegakkan di NNG, penduduk Papua hidup dalam kelompok-kelompok suku/klen yang otonom dan terasing dari dunia luar serta saling bersaing. Penduduknya masih menjalankan praktek-praktek adat seperti perang antarsuku, perbudakan, pengayauan, dan pembalasan dendam. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah kolonial untuk menegakkan kekuasaannya di NNG. Oleh karena itu, ketika Parlemen Belanda menyetujui penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di NNG pada 1898, wilayah itu dibagi menjadi dua *afdeeling*²¹ yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan. Kedua *afdeeling* tersebut ditempatkan di bawah pemerintahan Karesidenan Ternate.²² Pembangunan kedua *afdeeling* tersebut merupakan awal penataan wilayah pemerintahan kolonial di NNG. Penataan wilayah itu dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan kualitas kehadiran negara kolonial di NNG.

Meskipun Pemerintahan Kolonial Belanda telah ditegakkan di NNG, keamanan dan ketertiban sulit ditegakkan di wilayah itu, terutama di perbatasan antara wilayah kekuasaan Belanda dan Inggris di Nieuw Guinea. Suku Tugeri (Marind-Anim) di daerah Merauke acapkali melakukan pengayauan dan perompakan ke daerah kekuasaan Inggris di Nieuw Guinea bagian timur. Untuk menertibkan Suku Tugeri, pemerintah kolonial membuka pos pemerintahannya di Nieuw Guinea Selatan pada 18 Juni 1901. Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan dibagi menjadi dua bagian yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Afdeeling Nieuw Guinea Selatan.²³ Pemekaran wilayah Afdeeling Nieuw

21 *Afdeeling* adalah suatu wilayah yang diatur oleh asisten residen.

22 ANRI, *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 19, 5 Februari 1898; Lihat juga ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 142, 1898.

23 ANRI, *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 25, 18 Juni 1901, *Bundel Algemeene Secretarie*.



Guinea Barat dan Selatan bertujuan untuk menertibkan orang-orang Tugeri yang berulang kali melakukan pengayauan dan perompakan ke wilayah Nieuw Guinea Inggris dan memperpendek rentang kendali pemerintah terhadap penduduk dan wilayah itu serta meningkatkan efektivitas kontrol pemerintah terhadap warganya. Dengan demikian pemekaran wilayah itu didasarkan pada pertimbangan politis.

Pemekaran wilayah pemerintahan kolonial selanjutnya terjadi pada 1909 ketika Residen Gerrits melakukan reorganisasi pemerintahan dengan penugasan Gezaghebber J. A. W. Coenen di Teluk Humboldt. Coenen ditugaskan di wilayah itu pada 21 Juli 1909. Dalam pelaksanaan tugasnya, Coenen berada di bawah pengawasan asisten residen Afdeeling Nieuw Guinea Utara.²⁴ Pembukaan pos pemerintahan di Teluk Humboldt itu berkaitan dengan nilai politis wilayah itu yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Jerman di Nieuw Guinea. Dengan demikian, pemekaran wilayah pemerintahan di Teluk Humboldt didasarkan pada pertimbangan politis.

Peningkatan status wilayah pemerintahan di NNG dilaksanakan setelah peristiwa Perang Dunia I. Peristiwa Perang Dunia I menyebabkan lenyapnya kekuasaan Jerman atas bagian timur Nieuw Guinea. Peristiwa itu mengubah pandangan dan mendorong pemerintah kolonial untuk lebih menegaskan kekuasaannya di daerah itu dengan menciptakan suatu wilayah NNG yang otonom. Sekitar 1919 Gubernur Jenderal J. van Limburg Stirum berupaya menjadikan daerah NNG bergabung dengan pusat lalu lintas perdagangan dunia dan melepaskan NNG dari keterisolasiannya (Tip 1926: 229).

Motivasi Pemerintah Belanda untuk melepaskan NNG dari keterisolasiannya adalah untuk membuat wilayah NNG lebih layak di mata Pemerintah Inggris sebagai tetangga Belanda di Nieuw Guinea. Selain itu, pemerintah kolonial memerlukan pemerintahan yang kuat agar

24 ANRI, *Besluit van Guberneur Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 2, 15 Januari 1910.

mampu bertindak tegas terhadap pembunuh pemburu burung dan peneror para pedagang di NNG. Setiap tahun menjelang berakhirnya masa berburu burung di NNG muncul berita tentang hilangnya sejumlah orang Ternate yang berprofesi sebagai pemburu burung yang kemungkinan dibunuh oleh orang-orang Papua di pedalaman. Pemerintah kolonial menduga bahwa tindakan para pemburu burung itu sendiri yang menumbuhkan kelompok pembunuh periodik. Namun, sebagai pemerintah yang berwibawa harus mampu menjamin perlindungan jiwa dan raga para pemburu burung dan pedagang di NNG (Tip 1926: 300). Oleh karena itu pada 1919 pemerintah Kolonial merencanakan untuk membentuk Karesidenan Nieuw Guinea.²⁵

Rencana pembentukan Karesidenan Nieuw Guinea itu diwujudkan oleh pemerintah kolonial pada 1920. Gubernur Jenderal menetapkan status ketiga *afdeeling* di NNG menjadi Karesidenan Nieuw Guinea pada 17 Maret 1920.²⁶ Dengan demikian kebijakan Belanda untuk menjadikan NNG sebagai suatu karesidenan berkaitan dengan upaya Belanda untuk meningkatkan prestisenya sebagai negara kolonial.

Status Karesidenan Nieuw Guinea dihapuskan pada 1923 dengan alasan untuk menghemat (*bezuiniging*) biaya pelaksanaan pemerintahan.²⁷ Karesidenan Nieuw Guinea dihapuskan karena dianggap sebagai pemerintahan yang terlalu mahal dan kurang menguntungkan bagi kas pemerintah kolonial (Tip 1926: 305–6). Hal ini membuktikan bahwa penentuan status wilayah pemerintahan juga didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis suatu wilayah.

Gubernur Jenderal menetapkan penghapusan Karesidenan Nieuw Guinea dan penggabungannya ke dalam wilayah Karesidenan Ambon.²⁸

Penggabungan Karesidenan Nieuw Guinea ke Karesidenan Ambon

25 ANRI, *Staatsblad van Nederlndsch-Indie*, No. 457, 1919.

26 ANRI, *Besluit Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No.5, 18 Maret 1920.

27 ANRI, Surat Residen Ambon kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 3809/1, 27 Juni 1923, Bundel Algemeene Secretarie. Lihat juga ANRI, Surat Direktur Pemerintahan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 12210.Btg, 17 Desember 1923, Bundel Algemeene Secretarie.

28 ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 413, 1923.



diberlakukan pada 1 April 1924.²⁹ Meskipun wilayah NNG ditempatkan di bawah Karesidenan Ambon, tetapi pembagian wilayah NNG tetap dipertahankan dalam tiga *afdeeling*.³⁰

Pada 1925, status Karesidenan Amboina ditingkatkan menjadi Gubernuran Maluku yang membawahi dua karesidenan yaitu Karesidenan Ambon dan Karesidenan Ternate. Wilayah NNG dibagi menjadi 7 *onderafdeeling*. Enam *onderafdeeling* (Manokwari, Sorong, Schouten-eilanden, Jappengroep, Hollandia, dan West-Nieuw Guinea) dimasukkan ke dalam Karesidenan Ternate. Sedangkan satu *onderafdeeling* yaitu Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatandimasukkan ke dalam Karesidenan Ambon.³¹ Penurunan status ketiga *afdeeling* di NNG menjadi *onderafdeeling* disebabkan oleh kemerosotan kas daerah itu. Sejak 1922, daerah Nieuw Guinea Selatan ditetapkan tertutup untuk perburuan burung cenderawasih sehingga keuangan daerah itu semakin merosot (Baal 1939: 347). Hal itu membuktikan bahwa penentuan status wilayah pemerintahan didasarkan pada nilai ekonomis wilayah itu.

Penataan wilayah pemerintahan berikutnya yang didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis dan aspek budaya dilakukan pada 1934, 1936, 1937 dan 1940. Pada 1934, wilayah Gubernuran Maluku dikembalikan statusnya menjadi Karesidenan Maluku. Karesidenan Maluku membawahi Afdeeling Ambon, Tual, Ternate dan Nieuw Guinea Utara dan Barat. Wilayah Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatan dan Onderafdeeling Boven Digul ditempatkan di bawah Afdeeling Tual. Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Afdeeling Nieuw Guinea Utara digabungkan menjadi satu afdeeling yang dinamakan Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Barat yang membawahi 5 *onderafdeeling* yaitu Manokwari, Sorong, Serui, Hollandia dan Fak-Fak.³² Berdasarkan penataan wilayah tersebut wilayah NNG

29 ANRI, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 21, 25 Januari 1924. Lihat juga ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 29, 1924.

30 ANRI, Surat Direktur Pemerintahan A.J. Knaap kepada Direktur Keuangan, No. 11546/Btg, 29 November 1923, Bundel Algemeene Secretarie.

31 ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 640, 1925.

32 ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 620, 1934.

dibagi menjadi satu *afdeeling* yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Barat. Pada 1934 Onderafdeeling Boven Digul dan Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatan ditempatkan di bawah Afdeeling Tual. Wilayah Afdeeling Tual yang terlalu kecil menjadi alasan penempatan kedua *onderafdeeling* itu ke wilayah Afdeeling Tual. Selain itu, kontak yang baik telah terjalin antara missi Ordo Hati Kudus yang berkarya di kedua *onderafdeeling* itu dengan Vikariat Apostolik yang tinggal di Tual dan asisten residen Tual mempunyai hubungan yang baik dengan Vikariat Apostolik di Tual. Menurut Residen Maluku, B.J. Haga bahwa penataan wilayah tersebut merupakan yang terbaik karena hubungan yang baik antara pemerintah dengan misionaris (Haga, t.t.: 41). Pemerintah menyadari peran para misionaris dalam membantu pemerintah untuk melayani penduduk Nieuw Guinea Selatan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjalin hubungan yang baik dengan para misionaris yang berkarya di daerah itu. Hal ini berarti bahwa penataan wilayah pemerintahan di NNG juga didasarkan pada aspek budaya (mayoritas penduduknya beragama Katolik) dan hubungan baik antara pemerintah dan misionaris yang berkarya di wilayah itu.

Pada 1936, pemerintah kolonial Belanda kembali melakukan penataan wilayah di Karesidenan Maluku. Wilayah NNG dibagi menjadi dua *afdeeling* yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara yang membawahi 5 *onderafdeeling* yaitu Manokwari, Sorong, Vogelkop Tengah, Serui dan Hollandia; Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan membawahi 5 *onderafdeeling* yaitu Fak-Fak, Inanwatan, Mimika, Boven Digul dan Nieuw Guinea Selatan.³³ Berdasarkan penataan wilayah itu ada tiga *onderafdeeling* yang baru dibentuk di wilayah NNG yaitu Vogelkop Tengah, Inanwatan dan Mimika. Pembentukan ketiga *onderafdeeling* tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah kolonial pada 1936 melaksanakan pemekaran wilayah di NNG.

Pada 1937, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan penataan

33 ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 566, 1936.



wilayah pemerintahan di Karesidenan Maluku. Wilayah Onderafdeeling Boven Digul dan Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatan ditempatkan kembali di bawah Afdeeling Tual. Wilayah Afdeeling Nieuw Guinea Barat dipisahkan dari wilayah Nieuw Guinea Selatan. Afdeeling Nieuw Guinea Barat membawahi 4 *onderafdeeling* yaitu, Fak-Fak, Vogelkop Tengah, Inanwatan dan Mimika. Afdeeling Nieuw Guinea Utara membawahi 4 *onderafdeeling* yaitu Manokwari, Sorong, Serui dan Hollandia.³⁴ Berdasarkan penataan wilayah itu, NNG dibagi menjadi dua *afdeeling* yang membawahi 8 *onderafdeeling*. Dua *onderafdeeling* lainnya yang terdapat di wilayah Nieuw Guinea Selatan ditempatkan di bawah *afdeeling* yang berada di luar NNG yaitu Tual. Ketiga *onderafdeeling* yang baru dibentuk itu ditempatkan di bawah kekuasaan asisten residen Afdeeling Nieuw Guinea Barat. Pengembalian status Afdeeling Nieuw Guinea Barat tersebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas eksplorasi minyak swasta, *Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NNGPM) di Babo. NNGPM memulai aktivitasnya di NNG pada 23 April 1935 (Haar 1940: 143–4). Kebijakan pemerintah kolonial mengenai pengembalian status Afdeeling Nieuw Guinea Barat berkaitan dengan nilai ekonomis wilayah itu. Hal ini berarti pemekaran wilayah pemerintahan di Afdeeling Nieuw Guinea Barat didasarkan pada pertimbangan ekonomis wilayah itu.

Pada 15 November 1939, di Teminabuan para pejabat pemerintah NNG bersama residen Maluku menetapkan batas-batas wilayah masing-masing *afdeeling* dan *onderafdeeling* yang membentuk wilayah NNG. Mereka menyepakati bahwa penentuan batas-batas wilayah pemerintahan di NNG didasarkan pada batas-batas masyarakat adat (Haar 1940: 128). Syarat penentuan batas wilayah pemerintahan di NNG didasarkan atas ikatan adat secara teritorial dan batas-batas itu ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan.

34 ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 557, 1937.

Penataan wilayah pemerintahan terakhir sebelum Jepang menduduki Hindia Belanda dilaksanakan pada 1940 berdasarkan keputusan Gubernur Timur Besar. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa wilayah NNG sebagai bagian dari Karesidenan Maluku. Wilayah NNG dibagi dalam tiga daerah administratif yaitu Nieuw Guinea Utara yang dikepalai seorang asisten residen yang berkedudukan di Manokwari, Nieuw Guinea Barat yang dikepalai seorang asisten residen yang berkedudukan di Fak-Fak dan Nieuw Guinea Selatan. Nieuw Guinea Utara meliputi lima *onderafdeeling* yaitu Manokwari, Sorong, Serui, Sarmi, dan Hollandia. Nieuw Guinea Barat meliputi tiga *onderafdeeling* yaitu Fak-Fak, Inanwatan dan Mimika. Nieuw Guinea Selatan meliputi dua *onderafdeeling* yaitu Boven Digul dan Zuid Nieuw Guinea. Kedua *onderafdeeling* ini ditempatkan dibawah kekuasaan asisten residen yang berkedudukan di Tual.³⁵ Dengan demikian wilayah NNG dibagi menjadi 2 *afdeeling* dan 10 *onderafdeeling*.

PENATAAN WILAYAH PEMERINTAHAN KOLONIAL DI NNG 1946–62

Seusai Perang Dunia II, status pemerintahan di NNG berubah menjadi Karesidenan. Pada 15 Juli 1946 wilayah ini dinyatakan sebagai suatu karesidenan tersendiri yang terlepas dari Karesidenan Maluku. Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Jan P. K. van Eechoud diangkat sebagai residen pertama di NNG (Koentjaraningrat dan Bachtiar 1963: 80). Perubahan status itu berkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak NNG dijadikan sebagai karesidenan tersendiri, kedudukan daerah NNG dapat dipersoalkan oleh Belanda lepas dari Karesidenan Maluku dan NNG menjadi satu kesatuan politik yang berdiri sendiri. Kondisi yang demikian sengaja diciptakan Belanda untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas wilayah NNG. Belanda mempunyai kepentingan untuk menjadikan NNG sebagai tempat penampungan bagi keturunan Indo-

35 ANRI, *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 14377, 1940.



Belanda yang tidak dapat kembali ke Holland dan tempat penampungan para pengusaha Belanda yang meninggalkan Indonesia serta untuk meneruskan tugas zending dan missi di pulau itu (Bone 1958: 22).

Pada 1949, status karesidenan berubah menjadi Pemerintahan NNG yang berpusat di Hollandia. Perubahan ini dilakukan bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Seiring dengan hal tersebut, van Eechoud di Hollandia mengumumkan bahwa sejak 27 Desember 1949 semua penduduk NNG menjadi penduduk dari Gubernemen NNG dan pemerintahannya dilaksanakan atas nama Ratu Belanda. NNG menjadi salah satu bagian dari Kerajaan Belanda. Menindaklanjuti pernyataan van Eechoud itu, pada awal 1950 Pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di NNG dengan mengangkat S. L. J. van Waardenburg menjadi Gubernur di wilayah itu (Derx 1987: 206).

Sejak status wilayah NNG menjadi Gubernemen NNG, Pemerintah Kolonial secara aktif melakukan perluasan pengaruhnya melalui pembukaan pos pemerintahannya di wilayah-wilayah yang termasuk kategori *exploratieressort*. Pos pemerintahan pertama dibuka di Pegunungan Tengah yaitu di Enarotali di tepi Danau Wisselmeren pada April 1952. Pembukaan pos pemerintahan itu bertujuan mempercepat pembangunan wilayah dan penduduk NNG (Shoorl 2001: 61). Untuk memperluas pengaruh pemerintahan kolonial di Nieuw Guinea Tengah pada 10 Desember 1956 dibuka pos pemerintahan di Baliem (Shoorl 2001: 65). Pembangunan pos pemerintahan itu dimaksudkan untuk menghindari bahaya publisitas internasional yang negatif dari lembaga zending Amerika yang berkarya di daerah itu tentang perang berdarah antarsuku di wilayah itu. Sebagai pemerintah yang bermartabat, Belanda tidak dapat membiarkan keadaan itu berlangsung terus (Shoorl 2001: 70–1). Dengan demikian pemekaran wilayah pemerintahan di Nieuw Guinea didasarkan pada pertimbangan politis yaitu untuk menjaga wibawa pemerintahan kolonial di wilayah itu.

Pada 10 Mei 1952, Gubernur van Waardenburg mengadakan perubahan dalam pembagian wilayah pemerintahan menjadi empat *afdeeling* dengan 20 *onderafdeeling*. Keempat *afdeeling* itu adalah Afdeeling Nieuw Guinea Utara (ibukota Hollandia) membawahi 6 *onderafdeeling* yaitu Hollandia, Nimboran, Sarmi, Waropen, Yapen, Biak; Afdeeling Nieuw Guinea Selatan (ibu kota Merauke) membawahi 4 *onderafdeeling* yaitu Merauke, Boven Digul, Mapi, Mimika; Afdeeling Nieuw Guinea Tengah (ibu kota belum ditetapkan) membawahi Onderafdeeling Wisselmeren; Afdeeling Nieuw Guinea Barat (ibu kota Sorong) membawahi 9 *onderafdeeling* yaitu Sorong, Makbon, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Wandamen, Ayamaru, Bintuni dan Fak-Fak (Koentjaraningrat dan Bachtiar 1963: 86). Dengan demikian pemerintah kolonial melaksanakan penambahan wilayah pemerintahan satu *afdeeling* dan 10 *onderafdeeling*. Hal ini berarti pemerintah kolonial melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah pemerintahan di NNG.

Pada 1 April 1953, Gubernur S. L. J. Waardenburg digantikan oleh Gubernur J. van Baal. Gubernur van Baal mengadakan perubahan dalam pembagian wilayah pemerintahan di wilayah NNG pada 31 Oktober 1953. Wilayah Afdeeling Nieuw Guinea Utara dibagi menjadi dua *afdeeling* yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Geelvinkbaai. Dengan demikian, jumlah seluruh *afdeeling* di NNG menjadi lima yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara membawahi 3 *onderafdeeling* yaitu Hollandia, Nimboran dan Sarmi; Afdeeling Geelvinkbaai membawahi 3 *onderafdeeling* yaitu Biak, Yapen dan Waropen; Afdeeling Nieuw Guinea Selatan membawahi 4 *onderafdeeling* yaitu Merauke, Boven Digul, Mappi dan Mimika; Afdeeling Nieuw Guinea Tengah membawahi satu *onderafdeeling* yaitu Wisselmeren; Afdeeling Nieuw Guinea Barat membawahi 9 *onderafdeeling* yaitu Sorong, Makbon, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Wandamen, Ayamaru, Bintuni dan Fak-Fak (Ministerie 1953: 8-9). Dengan demikian pada 1953 wilayah pemerintahan NNG dibagi menjadi 5 *afdeeling* yang membawahi 20 *onderafdeeling*.



Penambahan *afdeeling* itu membuktikan bahwa pemerintah kolonial melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah pemerintahan di NNG yang bertujuan untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonial atas penduduk dan wilayah itu.

Pada 1954, van Baal melaksanakan perubahan satuan wilayah pemerintahan di wilayah NNG. Karesidenan Geelvinkbaai bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di bagian barat Pegunungan Tengah. Perubahan penting lainnya pada periode ini adalah pengembalian daerah Mimika oleh Karesidenan Nieuw Guinea Selatan kepada Karesidenan Fak-Fak dan pemindahan pusat kekuasaan Karesidenan Nieuw Guinea Barat dari Sorong ke Manokwari, serta dimasukkannya daerah-daerah pemerintahan Bintuni dan Ayamaru ke dalam Karesidenan Nieuw Guinea Barat (Koentjaraningrat dan Bachtiar 1963: 87). Perubahan satuan wilayah pemerintahan di NNG merupakan upaya pemerintah kolonial untuk menata wilayah pemerintahannya di NNG.

Sejak 1 Mei 1958, P. J. Platteel menjadi gubernur di NNG. Gubernur ini membina hubungan yang erat dengan pemerintah Australia yang menguasai Nieuw Guinea bagian timur. Pada Oktober 1958 pejabat pemerintah kolonial Belanda dan Australia mengadakan konferensi yang menghasilkan suatu kesepakatan adanya kerjasama untuk pembentukan “Persatuan Melanesia”, yang mencakup wilayah-wilayah Nieuw Guinea, Bismarck, dan Kepulauan Salomon sebagai suatu federasi. Namun usaha persatuan itu tidak ditindaklanjuti (Djopari 1993: 36).

Pada 1961, wilayah administratif NNG dibagi menjadi enam wilayah *afdeeling* yaitu Afdeeling Hollandia dengan ibu kota Hollandia yang membawahi empat onderafdeeling yaitu Hollandia, Nimboran, Sarmi, Keerom, dan satu daerah penjangkauan yaitu Oost-Bergland; Afdeeling Geelvinkbaai dengan ibu kota Biak yang membawahi dua onderafdeeling yaitu Schouten-eilanden dan Yapen/Waropen; Afdeeling Centraal-Nieuw-Guinea dengan ibu kota belum ditentukan yang membawahi dua

onderafdeeling yaitu Paniai dan Tigi dan dua daerah penjajakan yaitu Midden-Bergland dan West Berglanda; Afdeeling Nieuw Guinea Selatan dengan ibu kota Merauke yang membawahi lima onderafdeeling yaitu Merauke, Mapi, Boven Digul, Asmat dan Muyu; Afdeeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak yang membawahi tiga onderafdeeling yaitu Fak-Fak, Kaimanadan Mimika; Afdeeling Nieuw Guinea Barat dengan ibu kota Manokwari yang membawahi enam onderafdeeling yaitu Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Teminabuan dan Bintuni. Masing-masing *afdeeling* itu membawahi sejumlah *onderafdeeling* dan masing-masing *onderafdeling* terdiri dari sejumlah distrik dan dibawah distrik terdapat kampung-kampung. Pada 1961, jumlah *onderafdeeling* di NNG adalah 22 dan 3 daerah yang termasuk kategori penjajakan (Schoorl 2001: xxix–xxx). Penambahan *afdeeling* di NNG membuktikan bahwa hingga akhir kekuasaanya di NNG, Belanda melaksanakan pemekaran wilayah pemerintahannya di wilayah itu.

Kebijakan Belanda tentang pemekaran wilayah pemerintahan di NNG bertujuan untuk memperluas pengaruhnya atas penduduk dan wilayah itu. Perluasan pengaruh pemerintah kolonial pada periode 1950–1962 merupakan bukti meningkatnya perhatian Belanda terhadap penduduk dan wilayah NNG. Meningkatnya perhatian Belanda tersebut tidak terlepas dari kepentingannya untuk meningkatkan prestisenya sebagai suatu bangsa yang baru saja kehilangan tanah jajahannya yang luas. Dengan demikian, pemekaran wilayah pemerintahan di NNG dari 1946 hingga 1962 pada umumnya didasarkan pada pertimbangan politis.

KESIMPULAN

Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda ditegakkan di NNG, pemerintah kolonial melakukan penjajakan wilayah sebagai dasar untuk menetapkan pos pemerintahan, membenahi sarana dan prasarana



transportasi/komunikasi dan menata jalur pelayaran kapal KPM ke dan dari NNG. Pemilihan pos pemerintahan didasarkan atas pertimbangan letak geografis, nilai ekonomis serta akses transportasi ke wilayah itu. Penataan jalur pelayaran itu bertujuan untuk memudahkan para pejabat yang ditempatkan di NNG untuk mengunjungi dan mengawasi wilayah kekuasaannya dan memajukan perdagangan di wilayah itu.

Perekrutan personel aparat pemerintah di NNG baik aparat polisi, awak kapal maupun kontrolir harus memenuhi syarat yang berpengalaman dalam tugasnyadan memiliki semangat pengabdian yang tinggi serta mengenal wilayah itu. Syarat perekrutan yang demikian dimaksudkan agar para aparat yang ditempatkan di NNG mampu menghadapi lapangan kerja yang berat di pos-pos pemerintahan yang baru dibuka itu. Kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah kolonial menempatkan aparatnya sesuai dengan kompetensinya. Kebijakan pemerintah lainnya untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang bertugas di NNG adalah memberikan gaji yang sesuai dengan tingkat kemahalan harga kebutuhan hidup di wilayah itu dan memberikan berbagai tunjangan di luar gaji pokoknya dan penyediaan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Kebijakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, sehingga mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya di daerah terpencil sekalipun di NNG. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial mengelola pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Keberhasilan ekspansi kolonial Belanda di NNG bertalian dengan kebijakan penataan wilayah (pemekaran, penggabungan dan penghapusan) pemerintahan kolonial Belanda di NNG yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, politik, budaya dan geografis/akses transportasi. Namun dasar pertimbangan Belanda yang paling dominan dalam melaksanakan penataan wilayah pemerintahannya di NNG dari 1898 hingga 1945 adalah nilai ekonomis suatu wilayah. Sedangkan pada periode 1946 hingga 1962 yang menjadi dasar pertimbangan yang paling dominan dalam menentukan

penataan wilayah (pemekaran wilayah) adalah faktor politik.

Percepatan pemekaran wilayah pemerintahan di NNG merupakan upaya pemerintah kolonial untuk meningkatkan prestisenya sebagai negara kolonial yang baru saja kehilangan tanah jajahannya yang luas di Indonesia, memperkuat pengaruh Belanda terhadap penduduk Papua, menunjukkan kepada dunia bahwa Belanda berniat baik untuk memajukan penduduk lokal NNG dan menghindari pengeksposan berita-berita perang suku. Kebijakan itu membuktikan bahwa Belanda membangun wilayah dan penduduk NNG untuk menarik simpati masyarakat dunia dan penduduk NNG.





BAGIAN KEEMPAT
TOKOH, PEMIKIRAN DAN
PERJUANGAN



Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara

MUHAMAD HISYAM

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Ketika reformasi ditiupkan di akhir kejayaan Orde Baru, lahirlah banyak partai politik dari berbagai latar belakang ideologi. Di kalangan Islam, yang semasa Orde Baru tidak memiliki partai politik Islam, ikut "tersihir" oleh gelombang baru, reformasi, mendirikan partai-partai Islam. Pada Pemilihan Umum (pemilu) 1999 ada 11 partai Islam, empat di antaranya klaim sebagai '*titisan*' Masyumi. Mereka ingin menghidupkan kembali agenda lama "membawa Islam ke dalam negara", sekalipun mereka tidak memakai jargon Negara Islam. Mereka ingin peran umat Islam sebagai mayoritas proporsional. Maksudnya peran Islam lebih besar dalam negara maupun pemerintahan. Dalam reformasi itu yang menjadi isu sentral umat Islam adalah bagaimana memaksimalkan tuntutan Islam dalam kerangka *rule of law* dan negara konstitusional. Apa yang dimaksud konstitusional adalah cara demokratik memulihkan Piagam Jakarta. Dapat dikatakan bahwa *raison d'être* partai-partai Islam pasca-Soeharto adalah mendorong pulihnya Piagam Jakarta..

Eksponen partai Islam era reformasi yang dekat dengan Masyumi adalah Deliar Noer, ketua Partai Umat Islam (PUI) dan Yusril Ihza Mahendra, ketua Partai Bulan Bintang (PBB). Selain mengupayakan pulihnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, mereka mempunyai pemikiran yang hampir sama tentang partai politik Islam dan negara. Partai politik Islam punya peran sangat penting dalam negara Indonesia. Mereka mengambil posisi oposisi terhadap pemikir liberal seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Tetapi Noer dan Mahendra berbeda pula dari tokoh muslim "semodel" tetapi radikal seperti Abubakar Ba'asyir, ketua Jamaah Islamiyah dan Ja'far Umar Thalib ketua Forum Komunikasi Ahlis Sunah

wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad (LJ). Pemimpin Islam "garis keras" ini memahami syariah secara literal, yakni seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi. Sedangkan Noer dan Mahendra beranggapan bahwa syariah itu terbuka terhadap interpretasi. Mahendra meyakini bahwa hukum Islam itu dapat dimasukkan ke dalam hukum positif negara melalui interpretasi. Ketika Mahendra menjadi Menteri Hukum dan HAM menyarankan pentingnya hukum Islam sebagai sumber bagi reformasi hukum di Indonesia. Tujuan utama dari Partai Islam adalah menegakkan syariah dan melaksanakannya dalam kerangka negara. Itulah sebabnya, maka upaya memulihkan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada waktu amandemen UUD 45 dimulai, sangat santer disuarakan oleh partai-partai Islam yang didukung oleh sejumlah ormas Islam. Mereka berkeyakinan bahwa pulihnya Piagam Jakarta merupakan pintu gerbang menuju penegakan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sesuatu yang memiliki asas legalitas konstitusional serta memiliki akar historis.

Seperti diketahui, pada bulan Maret 1945, ketika kekalahan pihak Jepang telah mulai nampak, Pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/*Dokuritu Syoonbi Tyoosakai*). Di dalam badan ini berpadu para pemimpin dari berbagai golongan. Pemimpin Islam memainkan peran yang sangat penting. Rapat-rapat BPUPKI dimulai 28 Mei bertempat di gedung *Tyuuoo Sangi-In*, bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Keanggotaannya mencerminkan perwakilan dari semua golongan pemimpin setengah umur, khususnya dari Jawa. Radjiman Wedyodiningrat sebagai yang tertua ditunjuk menjadi ketua Badan, sedangkan di belakangnya ada Soekarno, Hatta, Mas Mansur, Ki Hadjar Dewantara, Agus Salim, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, dan lainnya. Jepang kelihatannya menginginkan jika Indonesia merdeka hendaknya dipegang oleh pemimpin yang lebih tua dari pada pemimpin muda yang tidak dapat diprediksi arahnya (Ricklefs 1994: 208/209).



Dalam pertemuan-pertemuan badan ini selama dua minggu pertama terjadi polarisasi dua faksi, yaitu yang ingin menjadikan negara Indonesia merdeka berdasar Islam, dan kelompok lain yang menghendaki dasar negara Pancasila. Yang pertama didukung kaum Nasionalis Islam dan yang kedua oleh Nasionalis Sekuler. Dalam bahasa mereka waktu itu, dua golongan ini secara populer disebut Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan. Walaupun demikian, tidak satupun anggota BPUPKI dari Golongan Islam yang menyuarakan ide Negara Islam bagi Indonesia. Sebelum pembrontakan Darul Islam tahun 1948, istilah Negara Islam jarang sekali dipakai, bahkan dalam sidang-sidang BPUPKI para pemimpin muslim mengabaikan istilah tersebut.

Dalam sidang-sidang BPUPKI dua golongan itu berdiskusi mencari solusi atas perbedaan-perbedaan landasan berpikir, sehingga tercapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Makalah ini akan mencoba mengungkap perdebatan antara golongan Islam dengan Golongan Kebangsaan, khususnya dalam persoalan yang terkait dengan hubungan antara agama dan negara, dengan referensi khusus kepada Ki Bagus Hadikusumo. Dari diskusi ini nanti akan terungkap apa sebenarnya yang terpikirkan oleh para pemimpin Islam dan pemimpin Kebangsaan sehingga menghasilkan Piagam Jakarta, khususnya terkait klausul syari'at Islam. Dari sini, dapat dinilai apakah aspirasi pemulihan Piagam Jakarta di era reformasi itu sejalan dengan pemikiran Golongan Islam yang telah memperjuangkannya atau tidak. Ki Bagus Hadikusumo dipilih dalam pembahasan ini mengingat beliau tergolong tokoh Islam yang paling vokal dalam sidang-sidang BPUPKI.

RIWAYAT HIDUP KI BAGUS HADIKUSUMO

Ketika dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 24 November 1890 atau 11 Rabi'ul Akhir tahun 1308 H, Ki Bagus Hadikusumo

berjuang, agar Islam masuk dalam negara, bukan melalui jalan paksaan, tetapi demokrasi. Hadikusumo memberi perhatian yang sangat serius terhadap klausul 7 kata dalam Piagam Yakarta dengan argumen bahwa kata-kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu merupakan konsep yang tidak dapat dipahami. Apakah dengan begini, negara akan membeda-bedakan penganut Islam dengan penganut agama lain? Ataupun ini merupakan sugesti halus bahwa orang Islam tidak melaksanakan syari’at agamanya? Karena itu secara elegan Hadikusumo menyatakan, “Saya menyatakan bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi ‘berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjaankan syariat bagi pemeluknya.’” Karena itu, menurut hemat saya, upaya-upaya memulihkan 7 kata tersebut pada masa kini, tidak relevan dengan prinsip yang dipegangi secara kokoh oleh Ki Bagus Hadikusumo.

Aspirasi ‘memasukkan’ agama Islam ke dalam negara Indonesia dengan cara demokrasi seperti disebut di atas boleh disebut gagal, tetapi sekurang-kurangnya para pemimpin Islam dalam BPUPKI berhasil dalam mendorong negara Indonesia tidak menjadi negara sekuler. Dalam perkembangan lebih lanjut perdebatan bentuk hubungan negara-agama tidak saja melibatkan golongan Islam dan Kebangsaan, melainkan antara kalangan pemimpin dan intelektual Islam sendiri. Pemikiran intelektual muslim Indonesia agaknya melangkah lebih maju dibanding banyak negara Muslim lainnya. Hingga kini konsepsi hubungan agama-negara yang dihasilkan oleh pemikiran intelektual Indonesia memang mencapai tingkat yang maju, dalam pengertian semakin ada persesuaian dengan pemikiran modern tentang demokrasi, pluralisme, HAM, persamaan gender, *civil society* dan kebebasan. Sekalipun demikian, tetap saja keislaman Indonesia mewarnai dengan pekat kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat.



Kemampuannya berbahasa Inggris ia gali dari gurunya seorang asal Pakistan, perintis Ahmadiyah di Indonesia, Mirza Wali Ahmad Ba'iq ([http://id.wikipedia.org/wiki/ Ki_Bagoes_Hadikoesoemo](http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Bagoes_Hadikoesoemo))

Kecerdasan Hadikusumo dilengkapi pula dengan sifat aktif dalam berbagai gerakan atau organisasi. Jadilah ia seorang aktivis, yang tidak saja gemar mengikuti kegiatan organisasi yang sudah ada, tetapi juga memelopori berdirinya suatu perkumpulan. Bersama kawan-kawan pencinta bola, Hadikusumo mendirikan klub sepak bola 'anak-anak' Kauman yang ia beri nama Kauman Voetbal Club (KVC). Kelak klub ini menjadi Persatuan Sepak Bola Hizbul Watahan (PSHW). Hizbul Wathan adalah nama perkumpulan Gerakan Pramuka Muhammadiyah. Dalam bidang seni, Hadikusumo mendirikan perlumpulan sandiwara yang ia beri nama Stambul.

Sebagai santri Kauman dan santrinya K. H. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo bergabung pula dengan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam reformis pertama di Indonesia. Karir organisasinya terus menanjak. Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah (1926), dan Ketua PP Muhammadiyah (1942–53). Tahun 1922 Gubernur Jendral Hindia Belanda mengangkat Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota Komisi Perbaikan Priesterrad atau Raad Agama yang diketuai oleh Husein Jayadiningrat. Dalam komisi ini Hadikusumo berusaha mendudukan hukum Islam pada posisi yang tinggi dalam negara kolonial. Akan tetapi ia menjadi sangat kecewa, karena pemerintah kolonial tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini, alih-alih menerapkan hukum adat sebagai hukum positif.

Tahun ketika Hadikusumo diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah, sebenarnya dalam posisi Wakil Ketua Muhammadiyah yang masa baktinya belum berakhir. Ketua PP pada waktu itu adalah K. H. Mas Mansur. Masa kepemimpinan Mas Mansur belum habis ketika Jepang datang pada bulan

Maret 1942. Tetapi karena ia dipaksa Jepang untuk menjadi ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) posisi ketua PP Muhammadiyah diserahkan kepada Hadikusumo. Di dalam Putera, Mas Mansur bersama Soekarno, Hatta dan Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai Empat Serangkai.

Di bawah kepemimpinan Hadikusumo, Muhammadiyah berhasil menggali dasar ideologi bagi gerakan. Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan diolah, dirumuskan sedemikian rupa oleh Hadikusumo menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar perserikatan yang kemudian menjadi petunjuk arah gerak Muhammadiyah. Mendapat inspirasi dari muqaddimah ini, Hamka misalnya merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. (<http://www.pkesinteraktif.com>)

Pada 1938, Ki Bagus Hadikusumo bersama Mas Mansur, Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Abdul Kahar Muzakir mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Ia juga terlibat dalam pendirian Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. MIAI adalah sebuah badan federasi organisasi-organisasi Islam sebelum perang. Pada 1943, Hadikusumo memprakarsai pula pendirian Gerakan Rakyat Islam yang direstui Jepang yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia disingkat Masyumi. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari organisasi federasi Islam yang mendahuluinya, MIAI. Masyumi menjadi organisasi yang mempersatukan organisasi-organisasi Islam dengan inti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Nama Masyumi sudah cukup populer di masa pendudukan Jepang, dan ketika merdeka Masyumi berkembang lebih populer setelah Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada bulan November 1945 memutuskan nama ini sebagai satu-satunya partai politik Islam dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam.

Sebagai ketua PP Muhammadiyah, Jepang menganggap penting ketokohan Hadikusumo di hadapan kaum muslimin Indonesia. Itulah sebabnya pada bulan Oktober 1943, Hadikusumo diterbangkan ke Tokyo



bersama Soekarno dan Hatta. Armada ke-16 tampaknya ingin adanya pergerakan yang lebih cepat dibanding Armada 25 di Sumatera dan Angkatan Laut di Indonesia Timur ataupun Tokyo. Dengan alasan ini Soekarno, Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diterbangkan ke Tokyo dengan sponsor Kekaisaran Jepang. Inilah untuk pertama kalinya, Soekarno pergi ke luar negeri atau melihat negara industri. Ini agak nya merupakan pengalaman besar baginya, tetapi upayanya untuk mendapat dukungan Jepang bagi nasionalisme Indonesia agak nya tidak berhasil. Perdana menteri Jepang, Jendral Tojo Hideki menolak penggunaan merah putih dan lagu Indonesia Raya (Rickslefs: 1994: 205).

Ki Bagus menikah dengan Siti Fatimah, putri Raden Kaji Suhud pada usia 20 tahun. Dari isteri pertama ini Hadikusumo memperoleh enam orang anak. Salah seorang di antaranya adalah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi orang nomor satu di Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada zaman Orde Baru. Isteri pertamanya itu meninggal dunia, ketika anak-anak masih kecil. Setelah Fatimah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Setelah dikaruniai tiga orang anak, Mursilah pun meninggal dunia. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga seorang pengusaha) setelah istri keduanya meninggal. Dari istrinya yang ketiga ini ia memperoleh lima orang anak lagi.

Ki Bagus Hadikusumo memimpin Muhammadiyah sebagai Ketua PP selama 11 tahun. Ia wafat pada usia 64 tahun. Oleh jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, Ki Bagus Hadikusumo dianugerahi oleh Pemerintah Republik Indonesia gelar Pahlawan Perintis Kemerdekaan.

HADIKUSUMO DALAM BPUPKI

Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemedekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Syoonbi Tyoosakai* yang dibentuk oleh Pemerintah

Pendudukan Militer Jepang pada bulan Maret 1945, terdiri dari 60 orang anggota, diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua R. P. Suroso. Keenam puluh anggota BPUPKI itu terdiri dari semua golongan yang ada pada waktu itu, yaitu golongan Kebangsaan, golongan Islam, Golongan Kristen, Golongan Hindu dan Golongan Cina. Harapannya, dengan diikut sertakannya berbagai golongan yang ada pada waktu itu hasil-hasil kerja BPUPKI mencerminkan keterwakilan semua golongan di Indonesia.

Sidang-sidang resmi BPUPKI dilaksanakan dalam dua kali masa sidang, yaitu sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, Panitia Kecil mengadakan rapat di Kantor Besar Jawa Hokokai yang dihadiri oleh 38 anggota, untuk membicarakan berbagai hal yang penting sebagai bahan masukan bagi panitia Kecil. Dalam rapat itu dibentuk Panitia Kecil lagi yang terdiri dari 9 orang, yaitu Mohamad Hatta, Muhamad Yamin, Subardjo, maramis, Sukarno, K. H. Abdul Kahar Muzakir, K. H. Wahid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, Haji Agus Salim. Panitia yang sering disebut sebagai Panitia 9 ini berkewajiban menyusun rancangan preambul UUD. Hadikusumo tidak masuk dalam Panitia 9, karena telah ditugasi menjadi Panitia Kecil Perancang UUD.

Keenampuluh anggota BPUPKI itu dibagi habis ke dalam *Bunkakai* atau kelompok kerja yang antara lain terdiri dari Panitia Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar 19 orang diketuai oleh Ir. Sukarno. Sebagian dari panitia Undang-Undang Dasar ditugaskan untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Ki Bagus Hadikusumo duduk di dalam Panitia Kecil ini, bersama anggota-anggota lainnya: KH. Wachid Hasjim, Mr. Muh. Yamin, Sutardjo, Maramis, Oto Iskandardinata, Drs. Mohamad Hatta dan Sukarno sebagai *Syusa* (ketua). Tugas dari Panitia Kecil adalah menghimpun usul-usul tertulis dari para anggota, mengelompokkan dan



kemudian menyusun draf Undang-Undang Dasar.

Panitia Kecil telah mengumpulkan usul dari anggota sebanyak 40 orang. Setelah diperiksa ke 40 usul itu berkaitan dengan 32 persoalan, dan setelah diperas lagi dapat dikelompokkan menjadi 9 golongan. Kesembilan golongan itu ialah:

1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya.
2. Golongan usul yang mengenai dasar
3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi atau federasi
4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara.
5. Golongan usul yang mengenai warga negara
6. Golongan usul yang mengenai daerah
7. Golongan usul yang mengenai agama dan negara
8. Golongan usul yang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul yang mengenai keuangan

Sementara itu oleh Ketua BPUPKI masih diimbau kepada anggota-anggota lain yang belum menyampaikan usul tertulis supaya menyampaikan usulnya masing-masing.

Dalam laporan Ketua Panitia Kecil pada masa sidang ke-dua BPUPKI, tanggal 10 Juli 1945 disebutkan bahwa dalam rapat-rapat Panitia Undang-Undang Dasar telah terjadi kesulitan sehubungan dengan perbedaan pendapat yang tajam antara golongan Islam dengan golongan Kebangsaan, terutama dalam soal hubungan antara agama dan negara. Panitia 9 telah melakukan pembicaraan yang masak dan sempurna dan telah mencapai hasil baik, untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Persetujuan itu termaktub dalam suatu rancangan pembukaan UUD. Rancangan itu berbunyi sebagai berikut:

Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*Risalah Sidang*, h. 95).²

Dalam pembicaraan tentang bentuk negara pada sidang tanggal 10 Juli itu Hadikusumo berpidato sebagai berikut.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tuan Ketua yang termulia, ingin saya memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, yakni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saya rasa penting, karena mungkin sekali di pojok –pojok ada mata-mata musuh banyak. Oleh karena itu saya harap jangan kita mementingkan soal perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan atau perdebatan yang hebat. Jangan. Sebab di pojok-pojok, di belakang kita mungkin ada mata-mata musuh. Itulah yang sangat menguatirkan saat ini. Jadi pembicaraan didasarkan pada isinya saja.

Tuan-tuan yang terhormat, dengan tegas, dengan pendek dan tegas, maka tentang bentuk negara Indonesia yang akan datang dalam perkataan Republik atau Monarchi menurut pendapat saya, sudah tersembunyi setan. Artinya dua buah perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan yang dahsyat dan memuncak sekali, sehingga menyenangkan musuh. Padahal kalau kita memperhatikan, kalau kita mengambil pendapat di *Zandankai*. *Kodangkai* di dalam pembicaraan di rumah, pendek kata di mana-mana isi yang dimaksud adalah sama. Umpamanya ditanyakan apakah negara Indonesia akan dipimpin oleh seorang raja yang turun temurun, semua orang setuju dengan pimpinan yang tidak turun temurun. Seandainya ditanya apakah negara Indonesia akan didasarkan kepada golongan orang kepada rakyat atau kepada seorang saja, semua orang menghendaki agar negara kita harus didasarkan rakyat. Pendek kata tuan-tuan memang ahli negara semua.

2 Diambil dari *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945* (Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995), susunan Saafroeddin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut *Risalah Sidang*.



Semua orang mupakat juga bahwa republik yang akan dibangun akan memakai majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya katakan agar republik yang bersifat begitulah yang dibangun, orang akan menolaknya pula. Karena dalam dua buah perkataan itu sekarang ini, menurut pendapat saya terkandung setan dan iblis. Tentang maksudnya saya sepakat, apa lagi untuk mempercepat datangnya kemerdekaan yang pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta supaya kita segera bersatu. Hendaknya tujuannya saja diambil, dan jangan ditambah dengan republik. Yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun temurun dan dimupakati oleh rakyat, dengan pemerintahan yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama republik itu bisa juga disebutkan dalam bahasa Indonesiannya dengan singkat ialah "kedaulatan rakyat". Kalau perkataan itu tidak disukai, marilah kita cari yang lain. Pendeknya, maksudnya sajalah yang diperlukan. Walaupun perbantahan di sini tidak akan menimbulkan apa-apa karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata-mata musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan tidaklah baik, sungguhpun di dalamnya ada sifat yang baik dan tidak menyebabkan suatu apa, tetapi memberi kesan ke luar yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya. Saya mupakat dengan isinya dan dengan lekas datangnya Indonesia merdeka. Dahulu saya tidak mupakat, tetapi karena kemudian tujuan itu saya rasa benar, saya sekarang mupakat sekali (*Risalah Sidang*, h.105).

Tentang pernyataan kemerdekaan, sidang tanggal 14 Juli 1945, Panitia UUD melaporkan hasil kerja mereka (bagian pernyataan kemerdekaan) kepada pleno BPUPKI oleh ketuanya Soekarno. Dalam laporan itu sekali lagi dibacakan naskah preambuli, yang di antaranya terdapat pernyataan kemerdekaan: "maka rakyat Indonesia dengan ini: **MENYATAKAN KEMERDEKAAN**".

Bagian akhir naskah preambuli yang menyatakan: "dengan berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipersalahkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Menurutnya bagian kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan saja. Hadikusumo mengajukan argumen sebagai berikut.

Di dalam keterangan Tuan Syusa tadi hanya satu perkara yang kecil sekali yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan. Saya menguatkan *voorstel* Kiyai Sanusi dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah swt "bagi pemeluk-pemeluknya" adalah menurut keterangan Kiyai Sanusi tidak ada haknya dalam kata-kata Arab dan menambah janggalnya kata-kata. Jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya "bagi pemeluk-pemeluknya" itu dihilangkan saja. Saya masih ragu-ragu di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan,

dan pada prakteknya maksudnya sama saja (*Risalah Sidang*, h. 241).

Atas argumen Hadikusumo itu Soekarno menjelaskan bahwa kalimat-kalimat itu seluruhnya berdasar pada Ketuhanan. Soekarno melanjutkan argumennya:

Sudahlah, hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu perselisihan di antara dua pihak hilang. Tiap kompromis berdasarkan kepada memberi dan mengambil, *geven* dan *nemen*. Ini suatu kompromis yang berdasar pada memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam panitia soal ini ditinjau kembali sedalam-dalamnya, di antara lain sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasyim dan Agus Salim di antara anggota panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin "Jakarta Charter" yang disertai perkataan tuan anggota yang terhormat Sukiman "gentlement agreement" supaya ini dipegang teguh oleh pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Saya berharap kepada tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia ini (*Risalah Sidang*, h. 241).

Hadikusumo masih tetap pada pendirian perlunya kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Ia mengatakan:

Tuan Ketua, sesudah saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mendapatkan kompromi, yang membuat perkataan menjadi begitu, tetapi saya masih kurang senang. Yaitu kalau kita panjangkan, tadi saya menghaturkan alasan yang enteng.

Tetapi rupanya alasan yang enteng itu, karena entengnya, tidak diterima. Sekarang saya akan menghaturkan alasan yang lebih berat, yaitu saya masih ingat sewaktu di Amerika diadakan *wet* hukuman minuman keras, rupanya umat Islam Indonesia memuji *wet* itu. Sehingga waktu dimusyawarahkan dengan Budi Utomo, yang menceritakan kepada saya adalah almarhum Soegondo, apakah memuaskan sekiranya di Indonesia diadakan *wet* larangan minuman keras untuk orang-orang Islam saja, Budi Utomo waktu itu merasa dihina. Pendapat saya sendiri jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam, dan satu lagi untuk yang bukan Islam, saya kira di dalam satu negara, meskipun prakteknya barang kali sama saja rasa-rasanya kurang enak. Maka saya kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali (*Risalah Sidang*, h. 246).

Soekarno kembali menjelaskan bahwa kata-kata itu merupakan hasil kompromi yang alot, antara golongan Kebangsaan dan golongan Islam. Jadi lebih baik tidak diubah.

Hadikusumo tetap pada pendirian, dengan alasan, "Yang dikemukakan oleh Syusa Panitia itu tidak bisa terjadi. Sebab bagi pemerintah, sungguhpun



menjalankan kewajiban semata-mata, pemerintah tidak dapat menjalankan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Jadi kalau saya, tetap tidak” (*Risalah Sidang*, h. 247)

Melihat persoalan ini cukup penting, ketua, Dr. Radjiman ingin agar keputusannya diambil dengan cara *stem* (voting). Tetapi Abikusno Tjokrosujoso menolak voting itu.

Berkata Abikusno,

Seperti diterangkan oleh ketua panitia, apa yang tertera di situ adalah buah kompromi antara golongan Kebangsaan dan Islam, Sekiranya tiap-tiap kita harus membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan sebagaimana harapan Tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dengan tegas oleh paduka tuan ketua panitia, sudah dinyatakan bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mendapatkan persatuan, janganlah terlihat perbedaan paham tentang soal ini dari *steman*. Itulah tanda yang tidak baik bagi dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh kita mendesak kepada semua golongan yang ada dalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Janganlah sampai nampak pada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan (*Risalah Sidang*, h. 247–8)

Setelah mendengar penjelasan pendapat Abikusno, Hadikusumo pun menyatakan dapat menerima. *Stem* lalu ditiadakan.

Rapat 15 Juli, melanjutkan pembahasan rancangan UUD. Setelah *syusa*, Soekarno memberi pengantar umum pembahasan rancangan UUD, Ketua Radjiman mempersilahkan anggota Panitia Kecil pembuat rancangan UUD, Prof. Dr. Mr. Soepomo untuk menjelaskan pasal demi pasal. Selesai penjelasan pasal demi pasal oleh Soepomo, dilanjutkan dengan diskusi mengenai pasal-demi pasal itu. Dalam kemesempatan ini Tuan Hadikusumo meminta kepada Tuan Soepomo untuk menerangkan makna kata-kata ”dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tampaknya Hadikusumo menganggap bahwa klausul itu tidak dapat dimengerti. Bagaimana dalam satu negara akan dibuat hukum yang berbeda-beda terhadap warga negara yang berbeda agama? Hadikusumo tetap tidak dapat menerima penjelasan bahwa klausul itu merupakan hasil kompromi. Kompromi boleh saja, tetapi kalau tidak

masuk akal harus direvisi. Hadikusumo mendesak Soepomo menjelaskan hal ini, "Lebih dulu saya minta diterangkan oleh paduka Tuan Soepomo, apa arti perkataan 'dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluknya' itu. Arti perkataan itu bagaimana? Supaya diterangkan."

Soepomo tidak diberi kesempatan oleh Radjiman untuk menjelaskan pertanyaan Hadikusumo. Perdebatan ringan antara Radjiman dan Hadikusumo pun terjadi. Radjiman tampaknya tidak sependapat kalau klausul itu dibicarakan kembali, sebab soal agama sudah selesai dalam preambuli, dan Hadikusumo pun sudah mengatakan dapat menyetujui.

Tetapi menurut Hadikusumo, dalam batang tubuh Bab 10 Pasal 28 berbunyi juga demikian. Menurut Radjiman, isinya sama dengan yang dalam preambuli. "Tuan Hadikusumo toh kemarin sudah mengatakan bisa mengerti setelah mendapat penjelasan Tuan Abikusno." Hadikusumo tetap pada pendirian, bahwa kata-kata tersebut harus dijelaskan, karena sungguh-sungguh tidak dapat dimengerti. Bukan karena berkedok, tetapi benar-benar tidak mengetahui. Dalam keadaan tidak satupun anggota maupun ketua yang bersedia menjelaskan makna klausul tersebut, Radjiman minta agar Hadikusumo menanyakan saja kepada panitia kecil yang merumuskan preambuli.

Hadikusumo melanjutkan "perdebatan":

Saya katakan dengan terus terang, bahwa kemarin juga saya terpaksa. Sesungguhnya dengan terus terang, karena perintah yang mulia Tuan Soekarno dan Tuan Hatta: 'sudah, sudah, sudah' saya sendiri belum mengatakan 'sudah'. Terus terang umpamanya saya sudah kalah *stem*, tidak jadi apa. Saya katakan dengan terus terang saja, bahwa saya sesungguhnya tidak mengerti, karena ada dua buah soal. Sekarang saya mau berbicara, bukan tentang preambuli, sesungguhnya perkara preambuli itu kemarin sudah diputuskan. Umpamanya kita bicarakan sekarang antar anggota bersama, apakah tidak bisa diubah? Biasanya putusan rapat *bestuur* boleh diubah dalam rapat. Putusan rapat beberapa anggota boleh diubah oleh putusan kongres. Itulah umpamanya kita mau mengubah. Sekarang ini yang dibicarakan bukan preambuli tetapi bab 10 pasal 28, ini yang saya mau bicarakan. Saya mau bicara tentang hal ini (*Risalah Sidang*, h. 337).

Radjiman masih juga tidak memberi kesempatan Hadikusumo bicara



soal ini. Dengan singkat Rajiman mengatakan, "Haraplah menerima, Tuan Hadikusumo". Kata Hadikusumo:

Sekarang pembicaraan saya buka, hal itu benar termasuk dalam preambule juga, mengenai hukum dasar, kita diberi waktu untuk berbicara. Adanya dasar peraturan minister sudah selaras dengan preambule. Tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan preambule sama sekali.

Radjiman, "Ya, tapi soal minister itu tidak berhubungan dengan prembule sama sekali."

Hadikusumo:

Kalau dipaksakan saya harap jangan ada yang menyesal. Tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi 'berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjaankan syariat bagi pemeluknya'. Kalau sidang mupakat, saya terima. Saya mengatakan itu dengan terus terang saja. Tetapi saya mengatakan saya tidak mupakat, kalau saya tidak boleh berbicara (*Risalah Sidang*, h. 338).

Radjiman, "Saya sudah soal ini, yang sudah kita terima semua dari uraian Tuan Abikusno. Cukup begitu saja tuan-tuan? Rapat ditunda, sekarang kita beristirahat selama 10 menit."

Rapat dibuka kembali setelah istirahat selama 10 menit. Pembahasan selanjutnya

tentang Pasal 28 dengan Bab 7 tentang presiden harus orang Indonesia Asli dan beragama Islam, serta presiden disumpah menurut agamanya. Pembahasan mengenai hal ini rupanya juga melibatkan perdebatan yang seru antara golongan Islam dengan Kebangsaan. Keberatan golongan Islam adalah pada kata-kata "presiden disumpah menurut agamanya." Mengenai hal ini anggota, Kiyai Masykur mengatakan:

.... Lalu saya membaca dalam rancangan UUD ini, yaitu dalam pasal 28 bab 7, bahwa presiden harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa presiden itu beragama apa saja boleh. Dengan demikian maka saya pikir keadaan begini: kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia dikepalai oleh presiden beragama lain Islam, umpamanya, apakah keadaan seperti ini dapat dijalankan dengan baik? Atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya? Dan apakah yang demikian itu tidak jahat? oleh karena itu saya usul, pasal 28 yang berbunyi "wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya", diganti saja dengan

kalimat "agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam". Bahkan faham ini akan lebih ringan, sebab tidak ditulis bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya, sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya saya rasa lebih mudah, apakah salah satu dari dua pasal itu diadakan perubahan, ialah ditentukan di dalam pasal 7, bahwa presiden harus orang Islam, atau ayat di dalam pasal 28 diganti. . . (*Risalah Sidang*, h. 344).

Soekarno mengatakan bahwa yang menjadi pokok masalah Tuan Masykur adalah keberatan pada kata "Presiden bersumpah menurut agamanya" Bagaimana kalau kata tersebut dihapus, menjadi berbunyi: "presiden bersumpah", kata "menurut agamanya" dihapus saja. Ini adalah sebuah kompromi dari panitia. Walaupun demikian, berdasarkan usul-usul dari kedua kelompok Islam maupun Kebangsaan akhirnya disepakati, diubah menjadi "Presiden bersumpah menurut agama".

Dalam pada itu Muzakir berbicara pendek, tetapi isinya sangat mengejutkan. Ia mengatakan,

Saya mau mengusulkan kompromi. Paduka Tuan Ketua, supaya tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada pasal dalam UUD itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam, atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu [memukul meja] (*Risalah Sidang*, h. 347).

Usul Muzakir tersebut ditolak oleh Syusa, Soekarno, tetapi Muzakir masih minta dipertimbangkan. Hadikusumo berbicara,

Saya berlindung kepada Allah dari setan yang merusak. Tuan-tuan dengan pendek sudah berulang kali diterangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab corak 'Islam agama dan negara' itu sudah diterangkan. Begitulah arti perkataan. Kalau *voorstel* itu memang ditolak, artinya tidak berarti senyata-nyatanya negara itu akan netral dalam hal agama. Karena *voorstel* saya, pilih saja yang terang-terang, dari pada saya tidak mengerti dan tidak boleh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Islam, tentang hal pembelaannya, tentang hal ekonominya, tentang hal segala-galanya, mempunyai ideologi sebagaimana yang sudah diterangkan. Jadi saya menyetujui usul Tuan Kahar Muzakir tadi, kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima. Jadi nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam, dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan sedikit-sedikit diambil kompromi seperti diterangkan Tuan Soekarno. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan saja kalau memang ada keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mupakat yang berdasar



agama Islam, minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah yang lebih tegas. Kalau-kalau sudah nyata netral jangan mengambil-ambil perkataan Islam yang rupanya hanya dipakai ujung-ujungnya saja. Orang-orang mengerti betul pengalaman ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan yang rupa-rupanya dipakai ujung-ujungnya saja, tidak nyata-nyata berarti, saya tahu bahwa tidak baik kesannya pada umat Islam. Karena itu saya mupakat dan setuju dengan kehendak Tuan Abdul Kahar Muzakir, coba distem saja dengan terang-terangan, siapakah yang mupakat supaya negara ini berdasar Islam, dan siapa yang tidak.

Atau, oleh karena di sini ada macam-macam agama, supaya diusulkan apakah negara ini berdasarkan agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya? Kristenkah, Islamkah, Budhakah? Atau lainnya lagi, ini barulah kita boleh memilih. Jadi terang dan beres. Saya kira, itu adalah usul yang sebaik-baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ya, ya. Itu pendapat saya yang bulat. Barang kali dengan begitu beres soalnya. Kita menghadapi mata-mata musuh, Tuan-tuan, jangan hendaknya keras-kerasan, tetapi berkepala dingin. Saya minta yang terang saja, dan saya mupakat dengan Tuan Muzakir. Supaya beres, betulkah usul sekarang tentang agama itu. Berdasar agamakah, atau tidak? Ini perlu saya terangkan. Wassalamualaikum w.w. (*Risalah Sidang*, h. 351).

Ketua Radjiman:

Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingat bahwa kita ini mendapat pekerjaan dari pemerintah, jadi kita harus menjalankan kewajiban itu. Harus ada keputusan tentang semua hal yang diindahkan oleh pemerintah. Saya kira bahwa hal itu disetujui. Saya setuju sekali, maka saya tutup sidang malam ini, dan saya tunda sampai besok pagi. Jadi hal yang masih menanti keputusan ini besok pagi tentu dapat diselesaikan dengan perasaan tenang (*Risalah Sidang*, h. 352/254).

Pada sidang hari berikutnya, tanggal 16 Juli 1945, setelah dibuka oleh ketuanya, Dr. Radjiman, Soekarno diminta berbicara pertama. Dalam pidatonya Soekarno, antara lain, mengajak agar semua anggota BPUPKI mengakhiri perdebatan ini. Sebab kalau dibicarakan terus menerus juga tidak akan ada habisnya. Sedangkan kita sama-sama menginginkan agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya dapat terwujud. Soekarno mengajak agar kita semua berkorban demi persatuan bangsa yang segera akan merdeka. Ia mengajak seluruh anggota menyetujui usulnya yang merupakan kompromi dari golongan Kebangsaan dan golongan Islam, yaitu:

...terimalah *clausule* di dalam Undang-undang Dasar bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang

mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 yang berbunyi: "Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya", ayat ke-2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Saya minta apa yang saya usulkan ini diterima bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui bahwa ini adalah pengorbanan yang hebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam (*Risalah Sidang*, h. 357).

Setelah pidato Soekarno ini tidak lagi ada anggota yang mempersoalkan masalah hubungan agama dan negara. Soepomo melanjutkan pembahasan pasal demi pasal yang tersisa, dan tanggapan anggota tampaknya tidak ada yang mengundang perdebatan. Pada bagian akhir dari sidang kedua BPUPKI, Ketua Dr. Rajiman mengatakan,

Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimana tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima berdiri. (Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini. Terimakasih tuan-tuan (*Risalah Sidang*, h. 361).

HADIKUSUMO DAN PPKI

Pada tanggal 6 Agustus bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima, membunuh 78.000 orang. Hari berikutnya, di Jakarta dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tanggal 9 Agustus bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, dan pada hari yang sama Soviet invasi Manchuria. Pada hari yang sama, Soekarno, Hatta dan Rajiman diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Komando Wilayah Asia Tenggara, Laksamana Terauchi Masaichi. Kepada tiga pemimpin Indonesia itu Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang meliputi wilayah bekas wilayah negara Hindia Belanda (*Nederlands Oost-Indie*). Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. Tanggal 14 Agustus Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Sehari berikutnya, tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu. Indonesia dalam suasana tidak menentu, Jepang sudah menyerah, sementara Indonesia belum merdeka, tentara Jepang masih menguasai



wilayah Indonesia, sementara Tentara Indonesia belum terbentuk. Hari berikutnya Gunseikan menerima perintah agar *status quo* sampai Sekutu datang.

Kaum muda menginginkan agar pengumuman kemerdekaan Indonesia segera dilakukan, terlepas dari rencana-rencana Jepang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melakukan. Pagi-pagi tanggal 16 Agustus Soekarno dan Hatta tidak ditemukan di Jakarta. Rupanya mereka diculik ke Rengasdengklok oleh para pemimpin pemuda, untuk memaksa mereka mengumumkan kemerdekaan di luar rencana Jepang. Laksamana Maeda mengimbau kepada para pemuda itu agar dua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta dalam keadaan selamat. Maeda akan mencarikan jalan lain bagi kepulangan tentara Jepang setelah proklamasi kemerdekaan. Malam tanggal 16, Sukarno dan Hatta telah berada di rumah Laksamana Maeda. Di rumah itu, semalaman para pemimpin merumuskan naskah proklamasi. Pagi 17 Agustus, proklamasi kemudian dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

PPKI terdiri dari 19 anggota ditambah 6 anggota baru menjadi genap 25 orang. Ki Bagus Hadikusumo termasuk salah satu anggota panitia ini. Sehari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus diadakan sidang pertama PPKI untuk menetapkan UUD, menetapkan presiden dan wakil presiden dan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang yang direncanakan dibuka jam 9.00 WIB, molor sampai jam 11. Setelah dibuka, Ketua PPKI, Soekarno menjelaskan adanya beberapa perubahan terhadap naskah UUD, dan kemudian meminta kepada Wakil Ketua, Mohamad Hatta untuk menyampaikan perubahan-perubahan tersebut. Telah masuk berbagai usul kepada PPKI yang patut diperhatikan. Hal itu menyebabkan perubahan-perubahan kecil. Yang pertama, menghilangkan pernyataan Indonesia Merdeka. Dengan demikian, naskah preambuli kembali ke teks awal yang dibuat oleh panitia 9. Kedua, mengganti klausul "berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan rumusan baru "...berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Ketiga, menghilangkan kata yang "beragama Islam" dari pasal

6 ayat 1, sehingga berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Keempat, pasal 29 ayat 1, dibuang klausul "dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menyesuaikan dengan perubahan pada preambuli.

Keseluruhan perubahan itu telah mendapatkan kesepakatan dari berbagai golongan. "Ini mempermudah pekerjaan selanjutnya." kata Hatta. Keseluruhan perubahan di atas adalah terkait dengan hubungan agama dan negara. Selain itu masih terdapat beberapa perubahan, misalnya "Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan" ditambah dengan "menurut Undang-undang Dasar". Kemudian ayat 2 pasal 4, wakil presiden tidak lagi dua orang tetapi satu orang saja, demi efisiensi. Dan masih ada beberapa perubahan yang tidak disebut dalam paper ini, karena tidak terkait dengan masalah hubungan agama dan negara.

Setelah Hatta menyampaikan perubahan-perubahan, Soekarno membacakan sekali lagi naskah preambuli yang telah diubah. Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar kata "menurut dasar" setelah "Ketuhanan Yang Maha Esa" dihilangkan saja, sehingga berbunyi "dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab" dan seterusnya. Anggota I Gusti Ketut Puja mengusulkan agar kata-kata "atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa" diganti menjadi "atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa". Kedua usul tersebut dapat diterima secara bulat oleh sidang. (*Risalah Sidang*, h. 418 dan 419) .

KONSEP RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERKEMBANGAN SEJARAH INDONESIA

Sesungguhnya konsep hubungan agama dan negara telah menjadi materi perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis netral agama sejak 1920-an. Kalangan Islam mencita-citakan Indonesia merdeka nanti berdasarkan persatuan yang diciptakan oleh adanya solidaritas Islam yang dianut oleh 90 persen penduduk Hindia Belanda. Sedangkan kaum Kebangsaan mengatakan persatuan itu didasarkan atas cinta tanah



air. Karena itu sepatutnya jikalau golongan Islam mempunyai cita-cita Indonesia merdeka didasarkan atas Islam, sedangkan kaum Kebangsaan pada cinta Tanah Air (Abdullah dan Hisyam, ed. 2003: 161–6).

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara kembali mencuat dalam BPUPKI. Di atas telah dipaparkan sebagian dari perdebatan ini. Intinya masih sama, bahwa Islam adalah agama yang mengandung ideologi negara, dan karena itu tidak mungkin agama dipisahkan dari negara. Sementara itu kaum Kebangsaan menganggap bahwa antara agama Islam dan negara harus dipisahkan, sebab kalau disatukan, berarti mendirikan negara Indonesia bukan sebagai negara persatuan? Memang benar bahwa negara Islam itu akan dapat menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan agama lain, akan tetapi golongan agama kecil-kecil itu tentu tidak dapat mempersatukan dirinya dengan negara. "Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat *a-religieus*," kata Soepomo. "Negara Indonesia yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu, dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan pula oleh agama Islam" (*Risalah Sidang*, h. 40).

Adalah menarik untuk memperhatikan buku karya Luthfi Assyauckanie, berjudul *Islam and the Secular State in Indonesia* (Singapura, ISEAS, 2009), yang membahas perkembangan hubungan agama-negara dalam sejarah Indonesia merdeka. Menurutnya, sejarah Indonesia adalah perkembangan menuju ke arah penyempurnaan tipe hubungan agama-negara. Tidak banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim yang kaum intelektualnya memikirkan dengan serius konsep-konsep politik modern. Indonesia merupakan kekecualian. Intelektual muslim Indonesia selama tiga generasi terakhir telah memikirkan dengan sungguh-sungguh konsep politik modern seperti demokrasi, sekularisasi, pluralisme dan liberalisme. Dalam tahapan-tahapan yang jelas, intelektual Muslim Indonesia memainkan peran menentukan dalam mencoba menerapkan konsep-konsep politik modern di Indonesia sesuai dengan masyarakat

Indonesia yang mayoritas Muslim, di hadapkan pada kenyataan tak terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pluralis.

Assyaukanie membagi *model of polity* Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan agama-negara menjadi tiga model. Pertama merupakan hasil pemikiran para intelektual Muslim Indonesia generasi proklamasi, yaitu yang disebut model “Negara Demokrasi Islam”. Model ini mencitakan sebuah negara Islam, dengan cara memasukkan Islam dalam negara melalui proses demokrasi. Hubungan agama–negara menurut model ini ialah bahwa negara mempunyai peran menentukan dalam kehidupan agama rakyat. Model ini ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, model “Negara Demokrasi Agama”, yaitu negara bersikap netral terhadap agama, tetapi menganggap pentingnya peran agama dalam negara.

Eksponen Model 2 kebanyakan adalah generasi baru muslim yang hadir ke panggung politik di awal 1970-an. Secara genealogis, mereka datang dari lingkungan santri yang sebagian besarnya adalah keturunan dan kerabat eksponen Model 1, baik Masyumi maupun NU. Tetapi tidak seperti orang tua mereka, generasi baru ini kurang *concern* dengan afiliasi ideologi. Dalam soal hubungan agama-negara generasi baru santri ini kemudian terbelah menjadi dua kelompok. Pertama yang cenderung menganggap pentingnya peran agama dalam negara, dan kedua mereka yang melihat hubungan itu tidak begitu penting. Kelompok pertama mengilhami lahirnya Model 2 dan yang kedua menginspirasi Model 3.

Model 3 disebut “Negara Demokrasi Liberal”. Model ini lahir sebagai reaksi terhadap banyaknya masalah hubungan agama-negara yang muncul dalam Model 2. Kritik yang keras disebabkan oleh posisi hegemonik negara atas aktifitas agama rakyat, dan mencoba mencari format baru hubungan agama-negara yang lebih fisibel. Seperti Model 2, Model 3 juga berangkat dari kesadaran sosiologis akan realitas pluralistik rakyat Indonesia untuk menemukan integritas nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme itu. Jika Model 2 prinsip pluralisme berada pada kesadaran agama dan pentingnya peran negara dalam memelihara agama rakyatnya,



sementara mereka menolak sekularisme, maka Model 3 prinsip pluralisme diletakkan pada pemisahan peran agama dan negara. Pluralisme tidak akan jalan jika negara terlampau intervensi pada aktifitas agama rakyatnya.

Pemikiran tentang Negara Demokrasi Liberal di Indonesia tumbuh pesat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Perubahan rezim mengakibatkan makin liberalnya iklim politik, dimana kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi semakin normal. Sejumlah tulisan di media muncul dari para intelektual muda Muslim, mengkritik peran hegemonik negara atas masalah-masalah agama dan mengimbau kaum Muslimin untuk tidak menyerahkan urusan agama kepada pemerintah. Ada dua alasan mengapa mereka mengkritisi situasi ini. Pertama sebagai bagian dari ketidakpuasan mereka atas sistem politik dan ekonomi, pelaksanaan hukum serta peran negara atas agama yang telah dibangun oleh pemerintahan Soeharto. Kedua sebagai respons terhadap munculnya kelompok fundamentalisme Islam, yang agendanya adalah membawa Islam ke dalam negara. Beberapa isu menonjol yang menjadi bahan kritik adalah tuntutan negara Islam, tuntutan memulihkan Jakarta Charter, dan kritik atas RUU yang esensinya mendorong intervensi negara atas kehidupan beragama kaum muslimin.

PENUTUP

Mengenai hubungan antara agama dan negara merupakan perdebatan yang ramai di kalangan kaum Muslimin dan tiada putus dalam sejarah Islam maupun sejarah Islam Indonesia. Prinsip paling dasar dalam hubungan antara agama dan negara yang menjadi perdebatan adalah apakah antara keduanya dipisahkan atau dipersatukan. Apa bila dipisahkan disebut negara sekuler, dan jika dipersatukan menjadi negara teokrasi. Negara sekuler tidak direspon oleh golongan Islam, dan negara teokrasi tidak disukai oleh kaum kebangsaan.

Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh Islam yang terlibat dalam perjuangan anti sekularisasi negara pada saat-saat paling genting dalam sejarah Indonesia. Bersama-sama dengan pemimpin Islam lainnya ia

berjuang, agar Islam masuk dalam negara, bukan melalui jalan paksaan, tetapi demokrasi. Hadikusumo memberi perhatian yang sangat serius terhadap klausul 7 kata dalam Piagam Yakarta dengan argumen bahwa kata-kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu merupakan konsep yang tidak dapat dipahami. Apakah dengan begini, negara akan membeda-bedakan penganut Islam dengan penganut agama lain? Ataupun ini merupakan sugesti halus bahwa orang Islam tidak melaksanakan syari’at agamanya? Karena itu secara elegan Hadikusumo menyatakan, “Saya menyatakan bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi ‘berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjaankan syariat bagi pemeluknya.’” Karena itu, menurut hemat saya, upaya-upaya memulihkan 7 kata tersebut pada masa kini, tidak relevan dengan prinsip yang dipegangi secara kokoh oleh Ki Bagus Hadikusumo.

Aspirasi ‘memasukkan’ agama Islam ke dalam negara Indonesia dengan cara demokrasi seperti disebut di atas boleh disebut gagal, tetapi sekurang-kurangnya para pemimpin Islam dalam BPUPKI berhasil dalam mendorong negara Indonesia tidak menjadi negara sekuler. Dalam perkembangan lebih lanjut perdebatan bentuk hubungan negara-agama tidak saja melibatkan golongan Islam dan Kebangsaan, melainkan antara kalangan pemimpin dan intelektual Islam sendiri. Pemikiran intelektual muslim Indonesia agaknya melangkah lebih maju dibanding banyak negara Muslim lainnya. Hingga kini konsepsi hubungan agama-negara yang dihasilkan oleh pemikiran intelektual Indonesia memang mencapai tingkat yang maju, dalam pengertian semakin ada persesuaian dengan pemikiran modern tentang demokrasi, pluralisme, HAM, persamaan gender, *civil society* dan kebebasan. Sekalipun demikian, tetap saja keislaman Indonesia mewarnai dengan pekat kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat.



Gagasan Kebangsaan Nadjamoeddin Daeng Malewa di Sulawesi Selatan 1907–47

SITI JUNAEDA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Abad ke-20 sering disebut sebagai zaman modern, oleh Furnivall diterjemahkan sebagai zaman "ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan" (Siraishi 1997: 35–6). Salah satu penanda zaman ini adalah perluasan sistem pendidikan Barat untuk menghasilkan bumiputera terpelajar yang diproyeksikan sebagai pegawai pemerintah atau perusahaan swasta. Bumiputera yang mendapatkan pendidikan Barat ini pada akhirnya muncul sebagai kelompok sosial baru yang akrab disebut sebagai elite (Bottomore 2006; bdk. Sutherland 1983).

Melalui pemikiran mereka, ide kebangsaan muncul dan ditransformasikan secara luas dalam masyarakat melalui berbagai bentuk organisasi dan atau partai politik yang saat itu mulai muncul. Dalam organisasi atau partai politik inilah tempat munculnya bibit nasionalisme sebagai sebuah dorongan untuk menentukan nasib sendiri.¹ Nasionalisme dimaknai sebagai upaya untuk membangun karakter dalam menentukan nasib sebuah bangsa (Kohn 1984: 11; bdk. Hobsbawm 1992).

Ide-ide tentang nasionalisme di Sulawesi Selatan ditandai dengan mulai masuknya beberapa organisasi nasional yang membentuk cabang-cabang di Makassar. Makassar bukan hanya sebagai pusat kota administrasi maupun pusat politik tetapi juga menjadi barometer bagi kawasan timur Indonesia

¹Menurut Hans Kohn nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan adanya suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat, dan pada penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda (lihat Kohn 1984: 11). Lebih lanjut, E. J. Hobsbawm berpendapat bahwa antara tahun 1870–1918 adalah masa transformasi nasionalisme, sedangkan puncak nasionalisme terjadi pada kurun waktu 1918–50 (lihat Hobsbawm 1992).

menjadi tempat yang dituju oleh beberapa organisasi nasional. Sarekat Islam merupakan organisasi modern pertama yang didirikan di Makassar pada tahun 1916 disusul dengan Muhammadiyah, Assiratal Mustaqim, NU, PKI, PNI, Partindo, Parindra, dan lain-lain. Selain sebagai tempat dari beberapa organisasi nasional untuk membentuk cabang, di Sulawesi Selatan juga muncul organisasi kedaerahan seperti Perserikatan Selebes, kemudian berubah menjadi Partai Selebes, dan Persatuan Selebes Selatan. Pemaknaan dan penerjemahan ide nasionalisme di Sulawesi Selatan, dapat ditelusuri dari asas maupun program kerja dari masing-masing organisasi tersebut.

Nadjamoeddin adalah salah satu tokoh pergerakan di Sulawesi Selatan yang secara aktif ikut menyebarkan ide nasionalisme dan kebangsaan dengan aktif pada organisasi partai politik yang bercorak lokal maupun nasional. Dia membangun persatuan dalam merealisasikan pergerakan nasional melalui organisasi atau partai lokal dan nasional seperti Perserikatan Selebes, Partai Selebes, Parindra, dan Partai Selebes Selatan. Dalam beberapa tulisan dan pidatonya ia berpendapat bahwa untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Sulawesi khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka tiga hal penting harus terpenuhi. Pertama, persatuan seluruh suku bangsa; kedua, pendidikan yang merata; dan ketiga, sistem perekonomian yang kuat. Ketiga bagian inilah menjadi syarat penting untuk mencapai sebuah bangsa yang kuat dan mandiri.

MEWUJUDKAN PERSATUAN BUMIPUTRA DALAM PARTAI POLITIK

Nadjamoeddin Daeng Malewa mengawali karir politiknya di Sulawesi Selatan dengan bergabung dalam Perserikatan Selebes. Melalui kecakapan dan kemampuan personal yang dimiliki, Nadjamoeddin diberi kesempatan untuk memimpin Cabang Makassar. Lebih dari itu, ia juga didaulat sebagai pimpinan Padoman Besar dalam struktur



Perserikatan Selebes. Nadjamoeddin bersama pengurus yang lain berhasil mengembangkan Perserikatan Selebes sebagai organisasi massa yang bercorak lokal dan menjadikan kebangsaan sebagai azas dari perjuangan organisasi. Masuknya Nadjamoeddin dalam Perserikatan Selebes mampu memberikan warna, sehingga Perserikatan Selebes lebih dinamis. Dinamisasi itu sangat tampak karena Perserikatan Selebes menjadi media untuk mentransformasikan ide kebangsaan Nadjamoeddin di Sulawesi. Ide kebangsaan ini dipropagandakan baik melalui tulisan di berbagai surat kabar, juga diutarakan melalui berbagai pidatonya dalam berbagai forum partai.

Pilihan Nadjamoeddin untuk bergabung dalam Perserikatan Selebes lebih didasari oleh ketertarikannya pada tujuan organisasi ini yang ingin memajukan kepentingan lokal rakyat Selebes sebagai penopang kemajuan pada skala yang lebih besar yaitu nasional Indonesia. Harapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah kemajuan seluruh daerah di Indonesia seperti di Jawa dan Sumatra. Kemajuan sebuah bangsa dapat terwujud ketika persatuan dapat terrealisasi. Cuplikan pidatonya:

Mentjari persatoean dalam pergerakan kebangsaan, itoelah jang teroetama diamalkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa di waktoe sekarang. Kaoem pergerakan kita di Indonesia semoeanja adalah berbesaran hati bahwa semangat persatoean indonesia soedah masoek kemana-mana, djoega pada kita di noesa selebes ini. Semangat itoe soedah melekat di atas bibir tiap-tiap orang pergerakan Indonesia, mendalam kehati tiap-tiap orang Indonesia jang berdjoeang membela keselamatan tanah air dan bangsa mendjadi dasar jang tegoech bagi gerak dan terdjangnya Perserikatan Selebes...

. . . dan wadjib kita koeboerkan segala perasaan kekotaan, kepoelaoean dan keprovincian dan wadjib poela kita insjaf dengan seinsjaf-insjafnja bahwa kita sekalian adalah poeteri-poeteri dan potera-poetera indonesia. Kota-kota seperti Makassar, Manado dll itoe hanjalah masing-masing kota kelahiran kita dan Indonesialah iboe dan negeri kita jang haroes kita tjintai, sebab nasinja jang kita makan dan airnja jang kita minoem. Djadi tidak lebih dari kewadjiban kita djika kita memperhambakan, memperboedakkan diri kita oentoek iboe Indonesia. Tjinta bangsa dan tanah air haroes kita menanam dengan sedalam-dalamnja dalam hati sanoebari kita sekalian . . .²

Nadjamoeddin sangat menyadari bahwa roh dari pergerakan untuk

2 Lihat "Perdjoeangan Kebangsaan," *Soeara Perdamaian*, No.1/I, Maret 1931.

membela tanah air membutuhkan persatuan dari semua belah pihak. Perbedaan-perbedaan daerah asal menjadi tidak penting lagi diperdebatkan dalam rangka perjuangan kebangsaan. Ikut serta dalam perjuangan pergerakan adalah kewajiban bagi seluruh rakyat yang tidak boleh ditawarkan sebagai manifestasi dari kecintaan terhadap Indonesia.

Para pengurus Perserikatan Selebes memiliki latar belakang politik serta latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Pada perkembangannya, perbedaan latar budaya menjadi pemicu munculnya persoalan dalam internal organisasi ini yang bermuara pada konflik antara "utara" dan "selatan".³ Konflik ini akhirnya berujung pada perpecahan dimana Nadjamoeddin yang saat itu menjabat sebagai ketua Perserikatan Seceles Cabang Makassar mengambil alih dan menggantinya dengan nama Partai Selebes. Perubahan cabang Makassar juga diikuti oleh cabang Barranglompo, sehingga pada awal pembentukan Partai Selebes, memiliki anggota sekitar 400 orang dari gabungan Cabang Makassar dan Cabang Barranglompo. Untuk pengembangan partai, segera dibentuk beberapa cabang seperti Cabang Surabaya pada 17 Januari 1932, Cabang Bonthain, Cabang Boetoen, Cabang Palembang, dan Cabang Sungai Gerong (*Barisan Kita*, No. 7, September 1931).

Ketika Nadjamoeddin terpilih menjadi ketua umum pada partai Selebes, pengembangan partai semakin meningkat. Partai Selebes memiliki asas yang sama dengan Perserikatan Selebes. Persatuan dan Kebangsaan tetap menjadi asas partai, demikian juga dengan tujuan yang ingin dicapai tetap pada tiga hal yakni persatuan yang ditopang oleh sistem pendidikan yang merata, kemandirian ekonomi, serta penguatan basis politik sebagai *media* dalam mencapai tujuan pergerakan.

Sebagai upaya untuk pengembangan partai, Nadjamoeddin dan rekan-rekannya bersepakat untuk melebur dalam sebuah fusi yang besar yakni

3 Menurut sensus 1930, sekitar 80 persen penduduk Sulawesi selatan buta huruf dan berbanding terbalik dengan penduduk Sulawesi Utara dan Ambon. Ketua umum Padoman Besar D. Th. N. Lengkong berasal dari Manado (lihat Chaniago 2002: 128-9).



bergabung dengan Parindra. Sayangnya Nadjamoeddin bukan termasuk tipe orang yang cepat puas dengan hasil yang telah dicapainya. Demikian juga dengan bergabungnya Partai Sarekat Selebes yang dipimpinnya ke dalam Parindra, hal ini tidak menjadikan Nadjamoeddin puas dengan apa yang diperoleh selama bergabung dengan Parindra. Salah satu hal yang mungkin membuatnya kecewa dengan Parindra adalah ketika gagal dalam pencalonan dirinya masuk menjadi anggota Volksraad periode periode 1935-1939. Salah satu penyebab gagalnya pencalonan tersebut adalah karena tidak didukung oleh sebagian pengurus pusat (Parindra) di Surabaya yang lebih cenderung memilih Ahmad daeng Siala yang saat itu adalah pengurus Parindra cabang Makassar.

Kekecewaan Nadjamoeddin itu ditunjukkan sikapnya yang memilih untuk memisahkan diri dari Parindra tempat dimana dia mengawali gagasannya untuk memajukan pelayaran bumiputera. Di bawah kepemimpinannya, Nadjamoeddin keluar dari Parindra diikuti oleh 250 orang lainnya pada bulan April 1939 (Harvey: 80; Pawiloy, dkk. 1987: 49). Setelah keluar dari Parindra, Nadjamoeddin segera membentuk partai baru yang bernama Persatuan Selebes selatan. Persatuan dan kebangsaan tetap menjadi asas dari partai baru ini sama ketika mendirikan Partai Selebes maupun Perserikatan Selebes. Meskipun memiliki azas yang sama dengan partai yang pernah dibesarkannya sebelumnya, namun Partai secara tegas menyatakan diri sebagai partai yang loyal terhadap pemerintah. Hal itu dinyatakan secara tertulis pada asas partai poin keempat *Dalam pekerdjaan oentoek mentjapai kemoelia 'an Selebes selatan, maka Persatoean Selebes Selatan bersikap loyal terhadap pemerentahan negeri.*⁴

Pernyataan sikap dari Persatuan Selebes selatan yang terang-terangan menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah Hindia Belanda pada awalnya mengundang banyak pertanyaan dari kelompok pergerakan lainnya di Sulawesi selatan. Nadjamoeddin mengemukakan

⁴ Lihat "Persatuan Selebes Selatan Keterangan Azas," *Pemberita Makassar*, 25 Juli 1939, No. 166, Tahun XXXVII, Lembar Kedua.

alasannya yang memilih bekerjasama dengan pihak pemerintah dilakukan tetap dalam rangka memperjuangkan kemajuan bagi rakyat Selebes Selatan. Kemajuan yang diperjuangkan mencakup kemajuan bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

MEMAJUKAN PENDIDIKAN BAGI BUMIPUTRA

Ketika persatuan bangsa telah terwujud, maka selanjutnya yang harus dipenuhi adalah terwujudnya sistem pendidikan yang merata. Pada tahap inilah Nadjamoeddin bersama rekan-rekannya seperti Lindoe marsajit, Nyonya Lumenta, Salawati daud, D. Th. N. Lengkong melalui Perserikatan Celebes berinisiatif membentuk Perhimpunan Perguruan Rakyat Selebes (PPRS). PPRS adalah lembaga bentukan Perserikatan Selebes yang secara khusus mengurus pendidikan dengan mendirikan beberapa sekolah perguruan nasional dan kursus-kursus. Dalam sebuah laporan PPRS, disebutkan bahwa pada awal tahun 1930, hanya 526 siswa yang diterima pada *Inlandscheschool* (sekolah bentukan pemerintah), sedangkan 215 calon siswa ditolak (*Soeara Perdamaian*, No. 2/I, Juli, 1930).

Kondisi itulah yang menjadikan PPRS ikut berpartisipasi secara aktif dalam memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan. Alasan lain yang lebih penting adalah kemandirian bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan. Nadjamoeddin menjelaskan:

Djikalaoe kita maoe madju, maka djangan menanti-nanti tolongannya orang lain, djikalaoe kita maoe berdiri, djoega djangan menanti-nanti sokongan dari orang lain. Hanya kepertjajaan pada kekoeatan dan kebiasaan sendiri jang akan membawa Iboe Indonesia ketempat jang kita tjita-tjita. Inilah faktor jang penting sekali dan inilah sebab-sebabnja, sampai ditempat jang ketjil-ketjil, timboelnja pergoeroean nasional. Djoega itoelah sebabnja maka PPRS berdiri di kota Makassar, ditengah-tenganja ra'jat Bugis dan Makassar ini.

Djoega boekoe-boekoe yang dipakainja sehari-hari di itoe sekolahan penoeh dengan penghinaan dan merendahkan bangsa kita. Oempamanja sadja itoe boekoe dari Toean Croes jang telah tersohor di seloeroeh indonesia: "De dief" disitoe kita batja, dan soedah tentoe sadja si dief ataoe maling hanja lain perkataan sadja dengan



si Inlanders. Sekali lagi sadja oelangkan, bahwa alat-alat pengadjaran di soewatoe Pergoeroean Barat penoeh dengan penghinaan terhadap perasaan bangsa kita (*Barisan Kita*, No. 2/1, Februari 1931).

Lebih lanjut ia menjelaskan,

Pergoeroean nasional haroes memakai kebangsaan sebagai ia poenya pundament; artinja pedjaran2 jang diberikan kepada moerid2 "haroes tjotjok" dengan kehidoepan dan penghidoepan kita.

Djikalaoe pergoeroean2 ta' memakainja ini, soedah tentoe anak akan tinggal asing terhadap kalangannya sendiri (djadi sama sadja dengan boeah pendidikan Barat) dan ini berarti bahwa sang anak tadi akan ta' mengetahoei keperloeannja biarpoen keperloeannja lahir ataoe bathin ataoe lain perkataan perasaan kebangsaan akan tinggal di bibir sadja (Mars 1931: 3).

Pernyataan ini semakin menegaskan betapa pentingnya memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan bangsa, karena berkaitan erat dengan penguatan nasionalisme bagi bumiputra. PPRS menganggap bahwa yang paling tahu apa yang kita butuhkan adalah diri kita sendiri dan bukan pihak lain. Sangat jelas terlihat bahwa misi PPRS adalah mencapai persatuan bangsa dengan ditopang oleh pendidikan yang merata.

PPRS membuka tiga jenis sekolah pagi yaitu Perguruan Rendah yakni sekolah kelas II ditambah materi bahasa Belanda dan *boekouden*, Perguruan Rendah Penambah (PRP) atau sama dengan *Schakelschool* ditambah materi bahasa Inggris dan *boukhouden*, dan Perguruan Rendah Umum (PRO) atau sama dengan HIS ditambah materi bahasa Inggris dan *bookhouden*. Untuk kelas petang dibuka Taman Pendidik Pengajar Pembantu atau *Normaalcuursus* yang ditempuh selama dua tahun, dan beberapa kursus singkat seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, kursus dagang, kursus *stenografie*, dan *Cursus Algameene Ontwikkeling* (Pengetahuan Umum).

Materi yang diberikan cukup beragam, namun demikian diberikan porsi yang cukup besar bagi materi sejarah. Materi tersebut antara lain Babad Indonesia diajarkan oleh L. Marsajit, Aturan Pemerintahan Negeri oleh H. A. Lumenta, Pergerakan India, Mesir, Tiongkok, dan Pilipina oleh Lengkong, dan Ringkasan Pergerakan Barat atas Pengaruhnya Fransche

Revolutie oleh Nadjamoeddin.⁵ Selain mengajarkan Sejarah Eropa, oleh rekan-rekannya, Nadjamoeddin dipercayakan untuk mengajar Bahasa Belanda oleh karena dibanding dengan temannya, dia dianggap sangat fasih menguasai Bahasa Belanda dibanding lainnya.⁶ Perhatian Nadjamoeddin dalam pendidikan di Sulawesi Selatan menyebar luas hingga di bagian terluar wilayah Sulawesi Selatan yaitu Buton, seperti dinyatakan berikut ini:

Atas oesahanja saudara Nadjamoeddin wakil ketua Padoman Besar maka PS dan PPRS Tjabang Boeton telah didirikan. Inilah adalah soeatoe nationaledaad dari saudara Nadja terseboet karena dimasa ia mengasoh (verlof) ke Boeton ia pergoenakan waktoenja dan tenaganja oentoek memadjoekan bangsa dan tanah air. Akan djasanja itoe kita haroes djoenjoeng tinggi.⁷

Komitmen Nadjamoeddin untuk memajukan pendidikan bagi bumiputra cukup tinggi, hal ini terbukti dengan kepercayaan teman-temannya yang memilihnya sebagai direktur PPRS menggantikan Ny. Ticolau. Kondisi PPRS saat itu cukup buruk dalam masalah keuangan, antara lain utang kepada tukang kayu dan sewa rumah sebesar 110 gulden. Nadjamoeddin selaku direktur baru segera menyelesaikan masalah utang PPRS dengan menggunakan uang pribadinya. Apa yang telah dilakukan oleh Nadjamoeddin ini memperoleh apresiasi positif dari rekannya maupun dari komisi verifikasi yang terbentuk.

Kami Verificatiecommissie berpendapatan pada waktoe pemeriksaan, bahwa verantwoording beliau (Nadjamoeddin) itoe dikerdjakan dengan saksamanja dan sebagaimana moestinja, sehingga kita menjatakan, bahwa pekerjaan orang jang sedemikian itoe, jang sekian berat tanggoengannya, serta dia tiada mengeloe dan dikorbankannya temponja jang akan dipakainja oentoek bersenang-senang, serta tenaganja terhadap kepada bangsa dan tanah airnja, maka ta' dapatlah rasanja kita menilainja, apalagi pekerjaan itoe, pekerjaan jang semoelia-moelianja.⁸

5 Materi yang diajarkan Nadjamoeddin pada perguruan ini kebanyakan tentang sejarah Eropa. Pengetahuannya tentang sejarah dan pergerakan di Barat cukup luas dibuktikan dengan beberapa tulisannya seperti "Philippina Merdeka," yang dimuat dalam *Barisan Kita*, No. 5 s.d. 7, Maret s.d. Mei 1932; "Fascisme di Italie dan Nationale-Socialisme di Djerman," dalam *Soeara Parindra*, Mei 1936; dan "Politiek," *Barisan Kita*, No. 3-4, 15 dan 29 Februari 1932.

6 Sunardjo adalah salah seorang advokat di Makassar dan juga aktif pada organisasi pergerakan di Sulawesi Selatan, *Soelawesi*, No. 25, 22 September 1934.

7 Lihat "Boeton Bangoen dari Tidoernja," *Barisan Kita*, No. 5-6, Juli-Agustus 1931.

8 Kekosongan kas perguruan disebabkan adanya masalah internal PPRS. Komisi verifikasi independent dibentuk untuk memeriksa bendahara Salawati Daud (Halida Djoenaid) yang saat itu mengatakan bahwa buku kasnya hilang. Hasil pemeriksaan komisi verifikasi keuangan perguruan PPRS dimuat secara lengkap dalam *Barisan Kita*, No. 5, 6, 7, Maret, April, dan Mei 1932 (Tahun II).



Perhatian Nadjamoeddin untuk memajukan pendidikan bagi bumiputra juga terlihat pada keinginannya untuk memajukan pendidikan khususnya kaum perempuan. Sekolah yang dimaksud bertujuan untuk memberi bekal keahlian bagi perempuan di Sulawesi Selatan. Sekolah ini diperuntukkan bagi lulusan *Volkschool* yang jenjang pendidikannya 3 tahun (*onderbouw*), dan lulusan HIS atau *Schakelschool* yang jenjang pendidikannya 4 tahun (*bovenbouw*). Untuk jenjang pendidikan 4 tahun diberi keahlian: 1) urusan rumah tangga (*huishouddelijke vakken*); 2) menjahit, bordir, dan menyulam (*handwerken*); 3) menjadi guru sekolah (*Frobel-onderwijzers*). Dalam upayanya itu, Nadjamoeddin berhasil mengumpulkan sejumlah 64 siswa yang akan masuk pada kelas 3 tahun, kelas 4 tahun 70 siswa. Rencana Nadjamoeddin ini diuraikan dalam tulisannya secara detail dilengkapi dengan kurikulum yang akan digunakan (Nadjamoeddin 1940).

Keinginan untuk memajukan kaum perempuan tidak hanya dilakukan lewat pidato maupun tulisan. Nadjamoeddin telah mempraktekkan dalam keluarga dengan memberi kesempatan kepada istrinya Nyonya Hadidjah ikut serta dalam organisasi pergerakan, baik di Perserikatan Selebes maupun di Partai Selebes. Nyonya Hadidjah ikut aktif dalam menggerakkan kaum perempuan Sulawesi Selatan dengan bergabung dalam Serikat Istri Selebes yang terbentuk pada bulan April 1931 di Makassar. Dalam sebuah tulisannya, Ny. Hadidjah menyatakan sebagai berikut:

Pergerakan kaoem isteri adalah pergerakan nasional jaitoe oentoek membakti pada keboetoeahan nasional, pada ra'jat dan tanah air Indoenesia. Kita perempoean jang lebih bisa merasakan kesengsaraan dan kebingoengan dan jang lebih-lebih bisa merasakan ketjintaan pada ra'jat.

Wahai para perempoean, korbankanlah perasaan-perasaanmoe djikalau itoe bertentangan dengan pekerjaan nasional. Koebankanlah ia oentoek keperloean oemoem karena djika tidak begitoe tersia-sialah teriakan tentang ketjintaan kepada bangsa dan tanah air. Koeatkanlah barisan Sarekat Isteri Selebes soepaja dapat kita mempeladjar dan menjelidiki keadaan-keadaan yang boesoeok oentoek memperbaikinja. Moedah-moedahan Iboe Indonesia memperlindoengi kita sekalian dan membri kebidjaksanaan dan ketegoehan soepaja kita bisa membakti dengan sempoerna padanja (Nadjamoeddin 1932).

Pernyataan di atas menunjukkan betapa Nadjamoeddin telah memberikan ruang kepada istrinya untuk ikut aktif dalam dunia

pergerakan. Inilah bentuk keseriusan Nadjamoeddin dalam memajukan kaum perempuan khususnya di Sulawesi Selatan.

MEMBANGUN BASIS EKONOMI KERAKYATAN

Nadjamoeddin melihat ketika Persatuan yang ditopang oleh pendidikan yang merata telah terpenuhi, maka proses berikutnya adalah memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Basis ekonomi menjadi penopang pergerakan untuk mencapai kemandirian bagi terbentuknya sebuah kelas *middendstand* sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar dan mandiri. Dalam sebuah rapat *Protest-Vergadering*, Nadjamoeddin menjelaskan bahwa faktor kapital (ekonomi) menjadi penopang utama dalam sebuah negara. Ia menjelaskan:

... lihatlah sadja pada Amerika Pendoedoe aseli dari Amerika itoe adalah bangsa Indian, akan tetapi bangsa Indian itu terdapat lagi di kota-kota Amerika, hanja di goenoeng-goenoeng sadja, oleh sebab bangsa-bangsa Europa jang moela-moela datang disitoe sebagai tamoe soedah mendapat tanah dan oleh kekoeatan kapitaal maka dalam peperangan economi bangsa Indian kala dan terpaksa lari pergi di goenoeng. Demikianpoen djoega keadaan di Kanada dan di Australie. Djoega keadaan demikian akan terjadi di Indonesia ini, kalau hak tanah kita diberikan pada bangsa lain, soedah tentoe djoega anak tjoetjoe kita oleh kerna kekoerangan kapitaal akan terpaksa tinggal di goenoeng dan bangsa lain jang lebih koeat economienja akan tinggal di kota-kota negeri kita. Oleh kerna itoe, soepaja keadaan demikian tidak akan terdjadi di negeri kita ini, maka soedah pada tempatnja kalau kita menolak permintaan kaoem Indo itoe (*Barisan Kita*, 30 Januari 1932).

Nadjamoeddin menganggap begitu penting fungsi kapital (modal), sehingga wajib dimiliki oleh sebuah bangsa. Dengan modal yang kuat, bangsa dapat menguasai bahkan mengusir bangsa lain, begitu juga sebaliknya. Dari pendapatnya itu, wajar jika ia menganggap bahwa basis ekonomi adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh sebuah bangsa yang besar. Bagi Nadjamoeddin, untuk mencapai kemerdekaan secara politik, terlebih dulu harus merdeka secara ekonomi.

MEMAJUKAN PELAYARAN BUMIPUTRA

Ketika aktif di Parindra, Nadjamoeddin diberi kesempatan untuk merealisasikan gagasannya untuk mengembangkan perekonomian bumiputra. Nadjamoeddin memulainya dengan usahanya memajukan



pelayaran bagi bumiputera yang selama ini telah dimonopoli oleh *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM).⁹ Kebijakan monopoli KPM seperti pemberlakuan pajak yang tinggi sangat merugikan pelayaran bumiputera. Kebijakan ini tidak hanya merugikan pelayaran bumiputra tetapi juga pengusaha kapal kecil Cina.¹⁰ Kebijakan lainnya adalah mewajibkan tiap perahu yang berlayar untuk membayar biaya wewenang tanggungan yang sebelumnya terlebih dahulu harus membayar biaya 40 persen dari barang-barang yang dimuat (Dick 1990: 18–22). Kendati pemilik perahu telah memenuhi kewajiban dengan membayar cukup tinggi kepada KPM tetap tidak ada jaminan asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan barang selama pelayaran. Uang tanggungan akan dinyatakan hilang dan akan masuk ke kas milik pemerintah. Demikian ditulis dalam sebuah koran:

Menjaingi KPM memang bisa dijalankan, tetapi tidak bisa tahan lama, selama poebliək ataoe saudagar2 tiada bersatu hati membantoe oesaha itoe. Kedjadian jang seroepe di atas boekan sadja terdjadi disini akan tetapi dimana-mana tempat, dimana orang Mentjoba menjaingi KPM tetapi kesoedahannya terpaksa toendoek dan KPM mengibarkan bendera kemenangan.¹¹

Menghadapi kondisi di atas, Nadjamoeddin membentuk Roekoen Pelayaran Indonesia (Roepelin) pada November 1935. Roepelin ini memiliki tujuan sebagai berikut (*Soeara Parindra*, No. 1, Januari 1936).

1. Akan bekerdja bersama-sama oentoek mendapat moeatan dengan oepah jang sebaik-baiknja.
2. Akan berdaja oepaja dengan djalan jang sah oentoek mendapat keringanan dari beban-beban pelajaran.
3. Akan menjiarkan pengetahoean tentang pelajaran dan jang berhoeboengan dengan itoe.
4. Akan menggiatkan nafsoe anggautanja oentoek menyimpan oeang pada perserikatan.
5. Menolong anggautanja memberi pindjaman dengan djalan jang moedah dan berarti pendidikan oentoek menjapaikan maksoed-maksoednja jang mendatangkan faedah.

Sejak Roepelin terbentuk, pelayaran bumiputra mengalami

⁹ KPM adalah perusahaan swasta milik Belanda yang melayani jasa pelayaran antarpulau (lihat Dick 1990).

¹⁰ Armada pelayaran pengusaha Cina dijuluki *armada semut*.

¹¹ Lihat berita "Tjara K.P.M. Mengalahkan Saingannya," *Soelawesi*, 15 Desember 1934.

kemajuan yang cukup. Di antaranya adalah trayek pelayaran semakin banyak dan meluas hingga besar. Kemajuan yang dicapai seperti lamanya pelayaran dan semakin meluasnya daerah yang bisa dicapai. Masa pelayaran yang dulunya hanya dilakukan pada musim angin timur (antara bulan April hingga November), maka tempo pelayaran tidak tergantung pada kondisi alam.

... mereka adalah djoeragan La Djato dengan perahunya *Toeroetjinna Kadjoeara* telah berangkat dari Selebes dalam pertengahan boelan desember menoedjoe ke Borneo. ...

... Djoeragan Zain dengan perahoenja *Tjinna Mattola*, telah mentjoba poela berangkat ke Soerabaja dalam moesim barat. ...

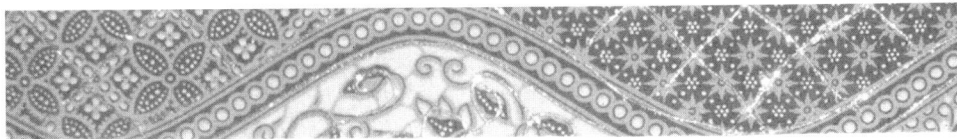
... Djoeragang Tahir dengan perahunja *Senang Hati* tiada hendak ketinggalan poela melakoekan pelajaran dimoesim barat dan sampai ketoedjoean hanja dalam tempo 25 hari. ..."¹²

Perubahan ke arah perbaikan pelayaran bumiputeta juga terjadi pada peningkatan kuantitas armada angkutan. Untuk jenis perahu yang memiliki kapasitas 800 hingga 1000 pikul, diperkirakan kurang dari sepuluh, menjadi lebih dari sepuluh. Jenis perahu yang berkapasitas 500 hingga 700 pikul, jumlahnya telah mencapai ratusan. Perubahan yang sangat signifikan adalah peningkatan secara drastis perahu ukuran mulai 300 pikul hingga 1000 pikul jumlahnja tidak kurang dari 1000 buah. Selain perubahan-perubahan itu, prestasi lain yang dicapai oleh Nadjamoeddin adalah bergabungnya lebih dari 200 perahu layar Bugis dan Makassar dalam organisasi Roepelin. Perahu layar ini dapat terorganisir dan terkontrol secara maksimal dibawah kendali Roepelin.

MERINTIS PEMBENTUKAN KOPERASI

Selain memajukan pelayaran bumiputra, Nadjamoeddin mengembangkan basis ekonomi kerakyatan lain yaitu koperasi. Program ini telah dirintisnya ketika aktif di Parindra dengan membina kampung-kampung untuk dijadikan kampung keperasi. Ia membentuk 54 kampung koperasi di Surabaya, akan tetapi program ini tidak berjalan maksimal.

¹² Lihat petikan "Roch Pelajaran di Soelawesi Selatan," *Soelawesi*, No. 3, 21 April 1934.



Ketika pindah ke Makassar, Nadjamoeddin kembali menghidupkan koperasi dengan membentuk koperasi *Minasa badji*¹³ dimana dia menjadi ketuanya. Sebagai koperasi yang baru dirintis, *Minasa Badji* belum memiliki modal sehingga Nadjamoeddin selaku pimpinan berusaha keras untk memperoleh bantuan dari pemerintah. Usahnya ini membuahkan hasil dan mendapat subsidi dari pemerintah sehingga koperasi ini bisa memiliki omzet sebesar 24.000 gulden. Demikian ia menyampaikan:

... bagaimana baeknja bercooperatie itoe dan apa goenanja Bank Cooperatie, sebagai boektinja Cooperatie itoe (Koperasi *Minasa badji*) jang di Makassar ini mampoe memberi pindjam sebanjak lima roepiah kepada tiap2 pedagang ketjil oentoek dipake mendjadi modal soepaja bertambah madjoe peroesahannja dan semakin banjak diperoleh keoentoengan. . . pedagang2 di negeri Belanda sampe ada poela kaoem pendjoeal sajoer jang mendapat soebsidi. . .” (*Pemberita Makassar*, 7 Desember 1939).

Dengan membentuk koperasi, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki dunia usaha khususnya bagi pedagang yang bermodal kecil. Pemberian modal usaha bagi pedagang kecil dinilai sangat membantu untuk tetap mempertahankan eksistensi para pedagang kecil.

Selain di Makassar, Nadjamoeddin juga memelopori pembentukan koperasi di Selayar sebagai salah satu daerah penghasil kopra terbanyak di Sulawesi Selatan¹⁴ Pembentukan koperasi ini sebagai solusi dari menurunnya tingkat penjualan Kopra dari selayar ke Makassar.

... dari kapal kelihatan dengan njata bahwa poelaoe Saleier itoe penoeh dengan pohon kelapa anak negeri. Pada seorang pedagang anak negeri, jang saya tahoe banyak berdagang kopra dan lain-lain hasil anak negeri poela, jang senantiasa mengirim dengan perahoe lajar, djoeaga ke poelaoe Djawa, saja telah tanjakan apakah sebabnja, maka tidak ada kopra sekarang jang keloear dari poelaoe Saleier, sedang dahoeloe saja tahoe beriboe2 karoeng kopra jang dikirim ke Makassar, tidak sadja dengan perahoe, tetapi poen dengan kapal djoeaga (Malewa 1941).

Kuota minimal aturan yang dikeluarkan Kopra-Fonds makassar ini sulit dipenuhi pedagang kopra Selayar. Kondisi ini mengakibatkan

13 *Minasa Badji* dalam bahasa Makassar berarti adalah sebuah perharapan tentang sesuatu supaya hasilnya baik.

14 Data tentang perdagangan kopra di Sulawesi selatan dapat dilihat pada majalah, *Handels Vereeniging "Makassar" Jaar Verslag over 1929-1930*, Celebes: Drukkerij Makassar; Asba 2007.

munculnya tengkulak-tengkulak kopra. Tengkulak kopra memanfaatkan kondisi ini dengan mengambil keuntungan tinggi. Harga beli tengkulak pada petani hanya 1,50 gulden per 100 kilogram dan dijual dengan harga tinggi.¹⁵ Mendapati kondisi seperti ini Nadjamoeddin memberi solusi dengan menyarankan membentuk sebuah koperasi.

Pada tempatnja sekali kalau anak negeri jang mempoenjai pohon kelapa itoe, mengadakan organisasi jang beroepa productie-cooperatie, soepaja dengan djalán bekerdja bersama-sama, segala kopra mereka dikoempoelkan dan didjoeal bersama-sama langsung ke kopra-fonds di Makassar, sehingga dengan djalán ini, maka soal 25 ton itoe tidak akan mendjadi halangan lagi. Dengan organisasi koperasi sebagai itoe, maka mereka akan mendapat harga jang lebih tinggi daripada sekarang dan bisa poela memperdengarkan keberatan-keberatannja pada jang berwadajib (Malewa 1941).

Pembentukan koperasi ini dimaksudkan untuk meminimalkan kerugian yang dialami oleh petani kopra. Petani kopra diharapkan bisa bekerjasama untuk mengumpulkan kopranya sehingga bisa memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh kopra-fonds Makassar. Kondisi yang sama juga didapati di Gowa, Nadjamoeddin menghidupkan kembali sebuah koperasi yang sudah tidak produktif. Koperasi yang awalnya dibnetuk oleh Daeng Boeang (seorang bangsawan Gowa) ini akhirnya dihidupkan kembali oleh Nadjamoeddin yang dinamai Koperasi Tamalate (Malewa 1941).

Konsentrasi Nadjamoeddin dalam pembangunan basis ekonomi kerakyatan terus dilakukan hingga pasca-kemerdekaan 1945. Ketika ia menjabat perdana menteri NIT dan juga sebagai menteri perekonomian, pengembangan basis ekonomi kerakyatan menjadi kebijakan penting dalam program kerjanya.

15 Harga tersebut sangat rendah jika dibandingkan harga di Batavia yang berkisar dari 2,80 gulden sampai 3,25 gulden per 100 kilogram. Harga 1,50 gulden itu belum termasuk upah buruh sehingga petani hanya memperoleh harga netto 0,70 gulden. Aturan kouta minimal yang dikeluarkan Kopra-Fonds Makassar berbeda dengan di Batavia. Di Batavia tidak ada aturan minimal penjualan harus 25 ton sehingga pemilik kopra bisa menjual kopranya meskipun hanya satu karun (Malewa 1941).



MENGUSUNG GAGASAN FEDERAL SEBAGAI BENTUK KETATANEGARAAN INDONESIA

Ketika terpilih menjadi Perdana Menteri NIT yang sekaligus merangkap sebagai menteri perekonomian, dalam manifes politiknya Nadjamoeddin menyampaikan kelebihan bentuk negara federal dan beberapa hal yang berhubungan dengan tanggungjawabnya sebagai menteri perekonomian. Bentuk federal dianggapnya sebagai sebuah solusi bagi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Selain itu bentuk federal juga dianggap sebagai evaluasi dan perbaikan atas bentuk ketatanegaraan yang sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda selama ini. Jarak yang jauh antara pusat dan daerah akan memberi pengaruh yang cukup signifikan atas besarnya kekuasaan yang bisa diserahkan kepada daerah.

Keyakinan Nadjamoeddin akan segala kelebihan dari bentuk ketatanegaraan yang federatif ini begitu kuat. Menurutnya, federasi menjadi sebuah syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita bagi kemandirian sebuah negara. Mandiri secara politik terlebih lagi kemandirian dalam hal ekonomi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini disampaikannya pada bagian penutup dari manifes politiknya:

Akan tetapi sekali lagi pada penoetoe pemandangan ini, pemerintah berkehendak memberitahoekan bahwa sebagai sjarat moetlak oentoek mewedjoedkan toedjoean dan tjita2 jang dianoetnja itoe ialah bentoek negara jang federatief. Tidak ada cara jang lain jang bisa melindoengi kita terhadap pemeliharaan jang tak sepertinja jang akibatnja memang telah lama kita alami itoe. Tak ada lain tjara lagi jang memoengkinakan kita akan meniadakan segala kekoerangan2 kita di atas berbagai-bagai lapangan, tak ada lain tjara oentoek mengembangkan soesoenan perekonomian dan keinginan2 kita jang menghendaki kehidoepan dan penghidoepan sesoeai dengan perasaan dan kebiasaan2 sendiri, tak ada poela lain tjara jang dapat mendjaga kita terhadap bahaya jang pasti akan menarik kita kedalam kekatjaoean ekonomi disoeatoe bagian, jang kita sendiri soedah mentjegahnja dengan melaloei djalan2 jang legaal. Dan oleh karena ini telah mendjadi kejakinan pemerintah jang sesoenggoehnja sangat prinsip ini akan melipoeti seloeroeh kebidjaksanaannja maka ia menaroeh kepertjajaan sepenoeh2nja bahwa didalam tindakan2nja ia akan mendapat sokongannja bahagian jang terbesar dari golongan2 bangsa di Indonesia Timoer dan daripada badan jang mewakilinja itoe (*Negara Baroe*, 24 April 1947).

Dengan sistem federal, Indonesia yang kelak terdiri dari beberapa negara bagian akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara bagian untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini akan menunjang percepatan pembangunan di masing-masing negara bagian. Terkait dengan kedudukannya sebagai menteri perekonomian, Nadjamoeddin pernah mengusulkan pembentukan atau pengadaan suatu dana pembangunan yang secara khusus untuk meningkatkan perdagangan dan perkapalan dengan modal 5 juta gulden (Agung: 85–7). Hal ini dilakukan untuk memajukan usaha pelayaran masyarakat pribumi yang telah dirintisnya ketika membentuk Roepelin.

Usaha yang pernah dirintis Najamuddin Daeng Malewa pada tahun 1930-an untuk memajukan pelayaran pribumi, setidaknya telah kelihatan hasilnya sekitar tahun 1947. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membentuk sebuah otorita pemilik kapal bersama. Mula-mula dibentuk Maskapai Kapal Sulawesi Selatan (MKSS) yang kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan (PPSS) dan Pelayaran Rakyat Indonesia (Perindo) di Manado Sulawesi Utara.

Menurutnya, dalam memajukan pembangunan politik, tidak bisa tidak harus didahului dengan pembangunan bidang ekonomi yang kokoh. Cita-citanya adalah menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang layak dalam pembangunan ekonomi. Sehingga apa yang menjadi tujuan jangka panjangnya untuk mewujudkan suatu kelas menengah (*middenstand*) dapat tercapai. Pandangan Najamuddin Daeng Malewa dalam memajukan pembangunan di bidang ekonomi dapat ditelaah dari cuplikan pidatonya berikut ini:

... Kewadjiban kita ialah mengoeatkan dan mendjahterakan Negara Indonesia Timoer. Tujuan kita ialah menaikkan tingkat kemadjoean dan kema'moeran dari ra'yat banyak. Toedjoean kita ialah menghapoeskan keadaan yang tidak sama terhadap lain-lain Negara agar soepaya kita tidak sadsja mendjadi parter yang sama harga menoeroet hoekoem tetapi djoega yang sama harga didalam hal ekonomis, financieel dan cultureel.¹⁶

16 Pidato ini disampaikan oleh Nadjamuddin Daeng Malewa di hadapan parlemen Negara Indonesia Timur. Secara lengkap naskah pidato ini dimuat pada harian *Negara Baroe*, 24 April 1947.



PENUTUP

Pada dasarnya gagasan kebangsaan Nadjamoeddin di Sulawesi Selatan dapat disederhanakan menjadi tiga pokok pikiran utama. Pertama, persatuan. Yang dimaksud persatuan adalah hilangnya batas-batas kesukuan di antara bangsa di Indonesia yang kemudian dilembagakan dalam sebuah organisasi atau partai politik. Inilah yang menurut Nadjamoeddin dianggap sebagai dasar dari identitas kebangsaan. Kedua, pendidikan. Memajukan pendidikan bagi bumiputra menjadi hal yang sangat penting karena menjadi gerbang utama dalam membuka wawasan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik sehingga masyarakat dapat menjadi peka terhadap segala perubahan yang terjadi disekitarnya. Ketiga, basis ekonomi. Ekonomi menjadi bagian vital bagi sebuah bangsa agar mampu menjadi bangsa yang kuat dan mandiri sehingga bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain.

DAFTAR ACUAN

- Asba, Rasyid (2007), *Kopra Makassar: Perebutan Pasar dan Daerah: Kajian Sejarah Politik Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bottomore, T. B. (2006), *Elite dan Masyarakat*, terj. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Chaniago, J. R. (2002), "Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dan Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatra Timur Tahun 1950," Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada.
- Dick, H. W. (1990), *Industri Pelayaran Indonesia: Kompetisi dan Regulasi*, terj. Jakarta: LP3ES.
- Gde Agung, Ide Anak Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Sinar Harapan [tahun terbit tidak tercatat].
- Harvey, Barbara Sillars (1984), *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, terj. Jakarta: Grafiti.
- Hobsbawm, E. J. (1992), *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kohn, Hans (1984), *Nasionalisme, Arti dan Sejarah*, terj. Jakarta: Erlangga.
- Mars, L. (1931), "Pergoeroean Kebangsaan," *Barisan Kita*, No. 5-6, Tahun I, Juli/Agustus.
- Nadjamoeddin (1940), "Daeng Talele School," *Pemberita Makassar*, 10 Februari.
- Nadjamoeddin, Hadidjah (1932), "Taman Kepoetrian," *Barisan Kita*, No. 3-4, Tahun II, 15 dan 29 Februari.
- Marewa, Daeng Nadjamoeddin (1941), "Sepandjang Pesisir Selebes-Selatan," *Pemberita Makassar*, 4 Februari.
- Pawiloy, Sarita, dkk. (1987), *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan (17 Agustus 1945–17 Agustus 1950)*. Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45.
- Siraishi, Takashi (1997), *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*, terj. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutherland, Heather (1983), *terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, terj. Jakarta: Sinar Harapan.

Sang ‘Bengal’ dari Serdang

Politik ‘Civil Disobedience’

Sultan Sulaiman Shariful Alamshah 1880–1942

RATNA
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

Sulaiman Shariful Alamshah merupakan sultan kelima dan terakhir dari Kesultanan Serdang,¹ putra tunggal Sultan Basyaruddin dengan Encik Rata, perempuan dari kalangan biasa yang berasal dari Pantai Cermin. Ia lahir di Rantau Panjang pada 19 Januari 1865, delapan bulan sebelum kedatangan ‘Expeditie tegen Serdang en Asahan’ dari Batavia untuk melumpuhkan Rantau Panjang, ibu negeri Kesultanan Serdang. Lahir dan tumbuh ketika tradisi dan konstelasi politik di kawasan ini berubah.

Ayahnya Sultan Basyaruddin dikenal sebagai sultan yang berani membawa bendera Aceh ketika menemui Elisa Netscher—residen Belanda di Riau—yang tiba di Kuala Serdang pada 16 Agustus 1862. Pengibaran bendera Aceh itu adalah wujud penolakannya terhadap pernyataan bahwa Serdang berada di bawah Siak.² Serdang pada waktu itu memang sedang tidak berada di bawah Siak, tetapi bagian dari Aceh. Akan tetapi, pada akhirnya sultan harus terjerat dalam rantai kekuasaan kolonial. Ia harus menandatangani *acte van erkenning*. Hanya saja ketika harus membubuhi stempel pada tandatangannya, Sultan Basyaruddin tetap mencantumkan kata-kata sebagai *wazir* Sultan Aceh.

Hal itu membuat Netscher tersinggung dan mengancam akan

1 Konflik yang terjadi di Kesultanan Deli (1723) merupakan titik awal munculnya Kesultanan Serdang. Ketika itu Tuanku Umar melancarkan protes atas penabalan Tuanku Panglima Gandar Wahid sebagai pengganti ayah mereka yang telah wafat. Tuanku Umar merasa berhak atas tahta Deli karena ibunya adalah permaisuri Sultan.

2 Salah satu perjanjian Siak yang ditandatangani pada 1 Februari 1858 antara Belanda dan Sultan Siak adalah pernyataan tunduk Siak beserta daerah taklukannya dari Asahan hingga Tamiang kepada pemerintah kolonial (lihat Schadee 1918: 73–4).

menyerang Serdang dengan senjata yang ada di kapalnya. Akhirnya sultan bersedia menghapus kata-kata itu dan sebaliknya Belanda bersedia mengakui Sultan Basyaruddin sebagai Sultan Serdang dengan wilayahnya meliputi Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang.

Hanya berselang sembilan bulan, yaitu pada 1863, ayah Sultan Sulaiman ini mulai menunjukkan sikap menentang. Ia kembali menjalin hubungan dengan Aceh. Menyambut dengan sukacita kedatangan pasukan Aceh yang dipimpin oleh Raja Cut Latief ke Rantau Panjang. Peristiwa inilah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial mengirim *Expeditie* 'tegen Serdang en Asahan' yang tiba di Rantau Panjang pada 1 Oktober 1865.

Sultan Basyaruddin yang sempat bertahan selama lima hari dapat dilumpuhkan. Sejak kekalahannya itu, gerak-gerik sultan dibatasi walaupun ia masih berkuasa. Pada masa-masa itu sultan lebih banyak menghabiskan waktunya di mesjid, menjadi orang yang *tawaddu* hingga akhir hayatnya (1882).

CIVIL DISOBEDIENCE

"Raja mati Raja menanami." Begitulah akhirnya. Sesuai dengan syarat adat, hari itu juga Sulaiman yang ketika itu masih berusia 15 tahun ditetapkan sebagai pengganti ayahnya, Sultan Basyaruddin.

Pengangkatan Sulaiman tidak mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial sehingga dianggap tidak sah. Memang pengangkatan Sulaiman tidak mengikuti aturan pemerintah kolonial, yang harus terlebih dulu mendapat persetujuan pejabat kolonial Belanda setempat. Hal itulah yang menyebabkan kedudukan Sultan Sulaiman sejak 1880 hingga 1887 seolah-olah menggantung sehingga mempengaruhi pandangan dan sikap Sulaiman kelak terhadap kolonial.

Walaupun belum diakui oleh pemerintah kolonial, langkah pertama



Sultan dalam pemerintahannya adalah menuntut pengembalian beberapa daerah Serdang³ yang diambil oleh Belanda. Pengambilalihan itu dilakukan Belanda pada masa pemerintahan ayahnya sebagai hukuman karena dianggap telah “membangkang” terhadap pemerintahan kolonial. Meski usia Sulaiman belum genap 18 tahun, peristiwa yang terjadi pada tahun kedua pemerintahannya itu (1882) menandai awal politik *civil disobedience*, suatu bentuk pembangkangan sejalan dengan gagasan “aktif berjuang tanpa kekerasan.”⁴ Strategi ini merupakan bentuk perlawanan Sultan Sulaiman terhadap perluasan kepentingan kolonial di daerahnya.

Strategi politik *civil disobedience* dalam berbagai cara kemudian menjadi corak kebijakan pemerintahan Sultan Sulaiman di bawah kekuasaan kolonial. Tidak mengherankan kebijakan ini kelak kerap menjadi bahan perbincangan di kalangan pejabat kolonial di Serdang, malah dalam laporan serah terima jabatan kata-kata “agar berhati-hati bila berhubungan dengan sultan ini” selalu dituliskan.⁵ Disebutkan, Sultan selalu melancarkan protes, mengemukakan keberatan dan tidak pernah membiarkan pemerintah Belanda terlalu jauh mencampuri urusannya.

Ketika pusat pemerintahan Serdang dan *controleur* Belanda di Rantau Panjang harus dipindahkan karena sering dilanda banjir, Sultan mengabaikan ajakan *controleur* untuk membangun ibu kota bersama di Lubuk Pakam. Sultan lebih memilih Perbaungan sebagai ibu kota baru Kesultanan Serdang. Penolakan Sultan Sulaiman itu menjadi hal yang kurang menguntungkan bagi rezim kolonial karena letak Perbaungan yang

3 Wilayah Serdang yang diambil alih oleh pemerintah kolonial pada masa Sultan Basyaruddin adalah Padang, Bedagai, dan Denai. Ketika harus menetapkan batas antara Kesultanan Serdang dan Deli, sesuai Bijblad 7465 tahun 1882 (masa Sulaiman) Sungai Batangkawis ditetapkan sebagai batas. Hal itu merugikan Serdang karena dua wilayah Serdang yang berada di utara sungai (Petumbak dan Sungai Tuan) dikeluarkan dari Serdang.

4 Istilah ini dipopulerkan oleh Tengku Luckman Sinar (almarhum), salah seorang putra Sultan Sulaiman.

5 Cerita tentang aksi pembangkangan Sultan Sulaiman tercantum dalam beberapa *Memorie van Overgave* (MvO, naskah serah terima jabatan) pejabat kolonial seperti Residen Sumatra Timur J. A. Ballot yang menulis, “Sultan Serdang itu selalu menunjukkan keberatannya (kepada kita) dan secara terus-menerus menunjukkan keti-dakpuasannya itu” (MvO Residen van Sumatra Oostkust, J. A. Ballot 1905–10).

jauh dari Lubuk Pakam, membuat pengawasan terhadap sultan menjadi lebih sulit.⁶

Siasat diplomatis selalu dijalankan sultan ini saat berhadapan dengan kolonial. Sultan yang selalu bersedia menerima siapa saja pejabat Belanda yang datang ke istana tetap mengakomodasi setiap permintaan pemerintah kolonial. Sesudah mendengarkan, ia tidak akan langsung memu-tuskannya. Akan tetapi ia akan meminta waktu beberapa hari untuk memutuskannya. Apabila waktu yang ditentukan telah tiba dan pejabat Belanda menanyakannya, maka sultan berlaku seolah-olah lupa dan tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada pejabat kolonial itu.⁷

Satu peristiwa yang terjadi pada 1938 dikenang warga Serdang sebagai peristiwa penting. Pada tahun itu, ketika menandatangani kontrak politik baru di Batavia, keengganan Sultan untuk hadir dalam upacara resmi itu ditunjukkan dari cara berpakaianya. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran seorang raja, melainkan stelan putih seperti tanda orang sedang berkabung (Moenzier 1998: 25). Berdasarkan penuturan putra Sultan, Rajih Anwar, yang ikut bersamanya, setiba di lokasi upacara gerak-gerik Sultan Sulaiman diawasi dengan ketat. Ketika upacara penandatanganan dimulai, Sultan Sulaiman yang tidak mengenakan pakaian kebesaran raja ditempatkan pada bagian ujung barisan. Di belakang tempat duduknya, selain Tengku Rajih Anwar, dua polisi pengawal berjaga-jaga. Pada waktu itu dipesankan untuk tidak berbuat di luar batas kepentingan. Itulah yang membuatnya marah. Saat penandatanganan, Sultan berdiri dan langsung dihadap pengawal. Sultan yang sudah berusia 73 tahun menerobos rentangan tangan pengawal itu sambil membentak, “Aku mau kencing.”⁸

Peristiwa itu menjadi catatan tersendiri di hati anak-anak muda Serdang. Sehubungan dengan peristiwa itu Tengku Nurdin dalam biografinya

6 Lihat MvO Controleur van Serdang, J. Reuvers (1921–3).

7 Lihat MvO Controleur van Serdang Hulu, de Kock (1910).

8 Wawancara dengan Tengku Luckman Sinar, Medan, 5 April 2010; berdasarkan penuturan Tengku Mahkota Serdang, Rajih Anwar, kepada Tengku Luckman Sinar.



menuliskan bahwa “atok sultan” pernah mengatakan “pemerintah Hindia Belanda telah mengikat leher raja-raja dengan rantai emas” (Moenzier 1998). Seorang tengku pada masa itupun mengingat, bagaimana cucu Sultan yang bernama Tengku Ziwar menyemangati anak-anak muda Serdang dengan cerita pada tahun 1983 itu.

Politik *civil disobedience* yang dijalankan oleh Sultan Sulaiman dalam menghadapi kekuasaan kolonial di wilayahnya tidak terbatas hanya pada sikap atau tindak tanduk. Agar tidak terlalu tergantung dengan pemerintah kolonial, Sultan melakukan “perlawanan” melalui tindak-tindak sosial. Sultan mencoba melakukan perubahan untuk menyejahterakan rakyat dan negerinya melalui kegiatan yang pada masa itu mungkin merupakan sesuatu yang luar biasa, tetapi masuk akal, dan manusiawi. Adapun perubahan yang dilakukan Sulaiman untuk menyejahterakan dan memajukan rakyatnya adalah sebagai berikut.

MENATA SISTEM PERTANIAN BARU

Istilah *bendang* cukup populer di Serdang hingga saat ini walaupun istilah itu sudah ada jauh sebelumnya bersamaan dengan pengembangan sistem pertanian baru oleh Sultan Sulaiman. Bendang bermakna sawah. Bersawah memang bukan hal yang baru bagi warga Serdang. Pada masa lalu, untuk memperoleh beras orang Melayu membuka huma. Hasil yang diperoleh dengan cara ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani itu sendiri.

Hal itu mendorong Sultan untuk melakukan perubahan pada sistem pertanian di Serdang. Diawali dengan membuka areal persawahan di Rantau Panjang (1898). Dipilihnya ibu kota Serdang ini menjadi areal persawahan disebabkan oleh air yang berlimpah dan dinilai sesuai untuk sawah *takung*. Untuk mengubah kampung lama yang tergenang air itu menjadi areal persawahan raksasa, Sultan Sulaiman mengeluarkan biaya

sebesar 10.000 dollar Singapura untuk berbagai keperluan, mulai dari penyediaan benih padi sampai pembangunan tanggul air. Sawah yang dipanen satu tahun sekali tidak dapat bertahan lama karena kerusakan hutan di hulu sungai Serdang akibat pembukaan perkebunan yang belum dapat ditangani dengan baik. Areal persawahan ini selalu disapu banjir tiap kali musim hujan.

Kegagalan tersebut tidak membuat Sultan berhenti berusaha. Lima tahun kemudian (1903), ide membuka pertanian sawah dengan sistem irigasi menjadi pilihannya. Untuk mewujudkan impiannya, Sultan mendatangkan orang Banjar dari Kalimantan. Mereka dapat didatangkan ke Serdang karena hubungan baik Sultan Sulaiman dengan Sultan Banjar. Para petani Banjar ini dipimpin oleh Haji Mas Demang.

Untuk melancarkan proyek tersebut Sultan menyediakan areal pertanian seluas 2000 bahu (14.192.000 meter persegi) dengan biaya mencapai 1.200.000 dollar. Dengan lahan dan dana yang disediakan oleh sultan itulah dibangun proyek persawahan irigasi di Perbaungan yang kemudian dikenal dengan istilah *bendang*.

Sistem pertanian irigasi tersebut memberikan hasil yang memuaskan bagi Kesultanan Serdang sehingga Serdang dikenal sebagai daerah lumbung padi untuk kawasan Keresidenan Sumatera Timur.⁹ Menjadi daerah lumbung padi utama merupakan prestasi yang harus ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial, karena Sultan telah membuktikan bahwa ia mampu melakukan tanpa meminta sokongan dari kolonial. Sultan tetap berupaya memperkenalkan dan meningkatkan produksi beras dengan menjadikan *bendang* sebagai ruang aktualisasi budaya.

Hasil padi yang diperoleh disimpan di gudang padi istana di bawah pengawasan seorang kepala gudang, sedangkan beras disimpan tersendiri di gudang yang berbeda. Cara itu membuat persediaan padi kerajaan

9 Wawancara dengan Tengku Rustam Effendi, Medan, 3 Januari 2008; wawancara dengan Tengku Syahrwardi, Medan, 12 Januari 2008.



tidak pernah habis.¹⁰ Rakyat sultan yang membutuhkan padi dapat memperolehnya secara gratis. Mereka hanya datang menghadap sultan, menyampaikan keinginannya dan dengan secarik surat dari sultan beras dari gudang akan berpindah ke tangan mereka. Setiap orang hanya diizinkan memperoleh beras sebanyak satu kaleng (15 kilogram) saja.

Serdang *kanaal* merupakan pencapaian monumental Sultan Sulaiman. Sebelum Rantau Panjang diubah menjadi sawah, berkali-kali beliau menuntut pemerintah untuk ikut bertanggung jawab atas banjir yang menenggelamkan kampung di sepanjang Sungai Serdang. Tuntutan atas masalah itu pernah tersiar dalam surat kabar di Batavia.¹¹ Setelah mendesak cukup lama, Sultan Sulaiman mengambil inisiatif untuk menanggulangi masalah banjir itu sendiri.

Pada 1937, Sultan Sulaiman dengan anggaran terbatas namun cukup untuk memulai pekerjaan besar meluruskan aliran Sungai Serdang sepanjang tujuh kilometer. Ia sendiri yang meletakkan pancang pertama dan membakar sumbu dinamit agar tanggul penahan meledak sehingga dapat mengaliri alur Sungai Serdang yang sudah diluruskan itu. Serdang *kanaal* ini menyelamatkan beberapa kampung, lebih dari 10.000 hektar persawahan di sekitarnya dan mengairi sawah lain di tepian sungai yang sebelumnya dapat dilalui kapal api dari Selat Melaka itu. Manfaat kanal juga dirasakan oleh perkebunan di sekitarnya, sebab itu Sultan tidak pernah segan “memaksa” pengelola kebun termasuk Deli Spoorweg Maatschappij untuk turut memberi kontribusi yang pantas.

Kanal, sawah atau bendang di Serdang masih dapat dirasakan hingga kini meski pengelolaannya tidak lagi berada di bawah kerabat Sultan Serdang. Prestasi Sultan Sulaiman telah menjadi catatan sendiri bagi pejabat kolonial, van Kempen. Ia menuliskan, Sultan Serdang menaruh

10 Persediaan padi Kesultanan Serdang tidak pernah habis. Tumpukan padi setinggi sekitar 6 meter memenuhi gudang seluas 20 x 20 meter. Wawancara dengan Tengku Syahrwardi, Medan, 10 Juli 2008.

11 Lihat *N.R. Courant* dan *Algemeen Handelsblad*, Batavia, 18 Maret 1929.

perhatian besar kepada kepentingan rakyatnya. Ia menghabiskan banyak uang untuk membangun instalasi air bersih, jaringan irigasi untuk mengairi persawahan yang terletak di sekitar Simpang Tiga (dan menyerahkan kedua fasilitas itu untuk dapat digunakan rakyatnya). Sultan juga mempunyai areal persawahan di Simpang Tiga Perbaungan yang dibangun dengan biaya sendiri, para penduduk setempat dapat mengerjakan sawah-sawah itu dengan membayar iuran dengan jumlah yang telah ditetapkan (dibayarkan setelah panen).¹²

‘OPEN DOOR’ PENDIDIKAN MODERN DAN MEMAJUKAN KESENIAN

J. Ballot, Residen Sumatera Timur, memberi apresiasi kepada Sultan Sulaiman atas usahanya memajukan pendidikan dengan kekuatan sendiri. “Sultan Serdang selalu berusaha memberikan pendidikan untuk masyarakat banyak, setiap tahun ada saja sekolah kampung yang didirikan di tiap-tiap Kampung Serdang,” begitu tertulis dalam laporan serah terima jabatan residen ini.¹³ Jika merujuk pada masa ketika Ballot menulis laporan itu, terlihat bahwa kebijakan Sultan Sulaiman membangun sekolah dimulai bersamaan dengan pelaksanaan politik Balas Jasa.¹⁴ Inilah mungkin salah satu bentuk pembangkangan itu, tak perlu menunggu Belanda kalau mau mendirikan sekolah begitu alasan Sultan. Sekolah dasar (*Serdang School*) Belanda memang sudah berdiri di Perbaungan tetapi karena ada terbatas, Sultan Sulaiman mendirikan apa yang dikenal dengan nama Sekolah Melayu.

Sekolah Melayu tiga tahun yang didirikan pada 1911 merupakan jawaban Sultan Sulaiman atas perubahan yang melanda Serdang. Jika

12 Lihat MvO Controleur van Serdang, van Kempen (1912: 22). Residen G. Schaap juga melaporkan hal yang sama (lihat *TBG*, 2de Serie, Deel XX; lihat juga MvO Assistent Resident Deli en Serdang, W. P. F. L. Winkel, 1921–5).

13 Lihat MvO Resident van Sumatra Oostkust, J. Ballot (1905–10).

14 Politik Balas Jasa, atau Politik Etis, mulai diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20, dengan program edukasi, kolonisasi, dan irigasi (lihat Locher-Scholten 1996: 230–7).



sekolah yang dikelola pemerintah kolonial di Perbaungan dikhususkan untuk anak-anak bangsawan maka sekolah yang dibangun sultan dibuka untuk semua kalangan. Semua orang mendapat kesempatan untuk sekolah. Sekolah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara bertahap dibangun di berbagai tempat, yaitu Simpang Tiga Perbaungan, Galang, Petumbukan, Rantau Panjang, Tanjung Morawa, Dalu Sepuluh, Batang Kwis, Serbajadi, Silandak, Gunung Paribuan, Gunung Meriah, Tiga Juhar, Rambei, Durian Tinggung, Gunung Rinteh, Tadukan Raga, Pantai Cermin, Araskabu, Ramunia, Bandar Gubung, Kotarih dan (kampung) Sennah.¹⁵

Selain Sekolah Melayu, Sultan Sulaiman juga membangun sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak bekas kuli kontrak dari Jawa yang tidak terikat kontrak lagi. Bahasa pengantar untuk sekolah yang berlokasi di beberapa perkebunan Serdang ini pun menggunakan bahasa Jawa. Sekolah Perkebunan, demikian orang-orang menyebutnya. Di Bangun Purba, daerah penghubung antara Serdang Hulu dan Serdang Hilir, Sultan Sulaiman mendirikan *Ambachtschool* (sekolah kejuruan bidang pertanian). Di daerah ini terdapat banyak perkebunan besar dan karena alasan itu Sultan membuka sekolah yang berdiri di atas tanah 1.000 bahu ini. Untuk mendirikan 'sekolah pertukangan' ini beliau menganggarkan dana sebesar 10.000 gulden (Basarsyah II 2003: 45).

Sultan Sulaiman pula yang menanggung seluruh biaya dari kegiatan belajar di sekolah-sekolah Melayu termasuk membayar gaji guru. Mengenai guru, Sultas menjatuhkan pilihan pada kelompok masyarakat yang berpengalaman, kebanyakan berasal dari Mandailing dan Minangkabau. Para guru yang disapa *engku* oleh murid-muridnya umumnya lulusan *Kweekschool* atau Sekolah Guru di Padangsidempuan, Padangpanjang atau Bukittinggi.

Sekitar dasawarsa pertama tahun 1900-an Sultan Sulaiman menuntut

15 Lihat MvO Controleur van Serdang, J. de Ridder (1933).

pendirian HIS (*Hollands Inlandsche School*) di Serdang. Menurut Sultan, jika ada sekolah lanjutan akan mudah bagi murid lulusan sekolah kerajaan untuk melanjutkan pelajaran tanpa harus meninggalkan Serdang. Selama ini mereka terpaksa melanjutkan sekolah di *Delische School* di Medan (Schadee, t.t.: 40). Usaha Sultan Sulaiman berhasil meski harus menunggu cukup lama. Baru pada 1916, setelah menunggu lebih dari 10 tahun, HIS berdiri di Perbaungan.

HIS Perbaungan dipimpin oleh seorang guru berkebangsaan Belanda. Sebagian besar muridnya adalah putra-putri Sultan Sulaiman, kerabat diraja, pembesar Serdang, ditambah murid-murid dari kalangan orang biasa yang memiliki prestasi cemerlang. Satu hal yang tak disukai Sultan Serdang, sekolah lanjutan ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sultan melarang murid-murid yang berasal dari kalangan bangsawan menggunakan bahasa itu di lingkungan istana. Sultan tak ingin pengaruh bahasa itu terlampau jauh merasuki istana yang dijaganya sungguh-sungguh sejak dahulu.

Pertumbuhan pesat Sekolah Melayu di Serdang tidak membuat pendidikan agama dilupakan, siapa pun anak-anak Serdang yang mengecap sekolah sekuler diwajibkan pula untuk mengaji pada sore hari. Di madrasah-madrasah Serdang (kira-kira setingkat *ibtidaiyah*) selain membaca Al-Quran murid-murid pun diajarkan mampu menulis dan membaca huruf Jawi.

Setelah menamatkan pengajian pada madrasah, murid terbaik dapat melanjutkan ke maktab Sjairus Sulaiman, sekolah agama lanjutan bergengsi pada masa itu. Para guru di madrasah Sjairus Sulaiman seperti Tuan Guru Syekh Haji Zainuddin, Tengku Fachruddin dan H. A. R. Sjihab, salah seorang pendiri al-Jam'iatul al-Washliyah, adalah ulama-ulama terkemuka di Sumatra Timur. Sebagai seorang yang peduli terhadap pendidikan dan arti penting pendidikan, Sultan selalu memberikan dorongan kepada keluarganya agar mengikuti pendidikan di luar jalur formal, seperti



mengikuti kursus bahasa Inggris atau seni musik dan tari sehingga hal ini telah menjadi semacam keharusan terutama bagi putra-putri dan kerabat istana.

Sultan Sulaiman dikenang sebagai penguasa di Sumatra Timur yang menaruh perhatian besar pada kesenian. Oleh beberapa penggiat kebudayaan, Sultan digelar *mecenas* atau sponsor dan penaung kegiatan kesenian. Besarnya perhatian Sultan Sulaiman pada berbagai bentuk kesenian didasari pada kegemarannya pada alat musik. Sultan merupakan seorang *violist* otodidak yang pada waktu senggangnya meluangkan bermain biola “seribu” (*Stradivarius*). Selain bermusik, Sultan Sulaiman pun menaruh perhatian besar pada seni tari dan seni pertunjukan.

Ronggeng menjadi tarian primadona di Istana Serdang, namun bukanlah ronggeng yang dikenal kebanyakan orang. Serdang mengenalkannya dengan nama ‘Ronggeng Istana’, yang sangat atraktif. Tarian ini dibawakan oleh sepasang penari lelaki dan perempuan saling berhadapan tetapi tidak bersentuhan. Tarian yang bisa berlangsung tanpa henti ini diselingi dengan nyanyian dan pantun yang didendangkan para penari secara berbalasan. Sultan selalu memberi kesempatan pada penonton yang sebagian besar adalah anak-anak dan kerabatnya untuk ikut meronggeng mengikuti lantunan irama lagu Mak Inang Pulau Kampai atau Lagudua. Putra Sultan, Tengku Putra Mahkota Rajih Anwar, adalah pengubah gerakan ronggeng hingga menjadi tarian istana (Agustono 1993: 75).

Ronggeng memang berkembang pesat di masa Sultan Sulaiman. Untuk melestarikan tarian itu, pada setiap tahun Sultan mengadakan perlombaan. Perlombaan dapat diikuti oleh kelompok tari di wilayah Kesultanan Serdang. Lomba meronggeng yang jadi kalender tahunan itu memang tidak menawarkan hadiah besar tetapi bisa menghidupkan berbagai kelompok ronggeng dan menarik orang banyak untuk ikut serta. Peronggeng yang dinyatakan menang dalam ajang kontes mendapatkan kesempatan meronggeng di istana atau tampil dalam acara-acara resmi

kerajaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan pada masa itu kelompok ronggeng di Serdang tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Galuh Gumit, Galuh Dinar, Galuh Johor, Siti Cina, Sarminah dan Ramlah menjadi kelompok ronggeng yang paling ditunggu-tunggu masyarakat.

Selain ronggeng, warga Serdang mengenal baik gambus atau zapin. Seni musik dan tari ini dibawakan oleh penari lelaki saja diiringi irama yang cepat menghentak. Sultan Sulaiman pun disebut-sebut menyenangi tarian ini karena rentak iramanya yang gembira. Inilah tarian yang biasa ditarikan anak-anak lelaki kader kesenian Serdang jika mereka bertemu Sultan Sulaiman di istana.¹⁶

Seni tradisi Melayu lain yang mendapat tempat di hati Sultan dan rakyat Serdang ialah makyong. Seni teater ini dikenalkan Sultan Kedah kepada Sultan Sulaiman ketika mengunjungi negeri itu pada akhir abad ke-19. Tengku Mahmud, Regent Kedah, yang merasakan ketertarikan Sultan Sulaiman pada kesenian ini menghadiahkan seperangkat peralatan teater beserta para pemain makyong sebagai tanda persaudaraan. Sebagaimana tema teater istana, cerita makyong berkaitan dengan kehidupan di seputar istana. Peran maupun tokoh utama dalam makyong adalah peran raja, permaisuri, putra mahkota, putri raja, prajurit dan dayang-dayang (Sinar 1977: 39). Makyong membawa pesan moral dan pendidikan melalui ceritanya bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan.

Pada 1913, Sultan membentuk kelompok teater bernama Teater Bangsawan Sri Indera Ratu. Tengku Syamsu, pemusik istana yang lahir dan besar dari ‘sanggar seni’ di Istana Serdang diangkat sebagai pemimpin kelompok teater itu. Kelompok teater yang biasanya menggelar pentas *keliling* di kota-kota besar di Hindia Belanda dan Malaya ini mementaskan beberapa naskah teater Barat yang populer masa itu selain cerita dari dunia tutur Melayu, Arab, dan India.

¹⁶ Tengku Syahruwardi mengatakan bahwa ia beberapa kali diminta Sultan untuk menarikan gambus atau zapin di hadapan Sultan. Wawancara dengan Tengku Syahruwardi, Medan, 10 Juli 2008.



Oleh karena sering pentas di hadapan penonton asing, Sri Indera Ratu pun terbiasa mementaskan sandiwara dalam berbagai bahasa. Jika sedang pentas di wilayah Malaya mereka menggunakan bahasa Melayu, dialog berbahasa Inggris di Singapura, sedangkan di wilayah Hindia Belanda bahasa Melayu atau kadang-kadang berbahasa Belanda. Barangkali oleh karena tuntutan pasar itu, para pemain teater asli Serdang dituntut membuka diri untuk bakat-bakat dari luar Serdang. Orang-orang asing dengan beragam latar belakang diberi kesempatan untuk berperan. Ada Singhala dari Srilanka, orang Goa dari India, beberapa warga Indo-Eropa dan Filipino. Mereka lebih dikenal dengan nama tokoh yang mereka perankan seperti Romeo, Juliet, Ophelia, Desdemona, Miranda atau Rosalind.

Bila terkadang berada di Perbaungan, Teater Bangsawan Sri Indera Ratu ini menggelar pertunjukan secara gratis di alun-alun istana Serdang selama tujuh malam berturut-turut (Baharsyah II 2007: 51–2). Bagi Sultan Sulaiman, pertunjukan itu merupakan persembahan rutin untuk rakyat Serdang yang hampir tak mungkin menyaksikan Sri Indera Ratu *manggung* di luar. Pementasannya menjadi sarana komunikasi antara istana dengan rakyat Serdang. Sultan sering menaruh pesan tertentu dalam dialog yang dimainkan, seperti “jangan terbuju rodri,” “raja lalim raja disanggah, raja adil raja disembah,” atau “berani karena benar takut karena salah.”

Popularitas Teater Bangsawan Sri Indera Ratu ini hanya bertahan selama sekitar 15 tahun (1920–35). Migrasi orang-orang dari Sumatra Timur, perkembangan surat kabar, pertumbuhan bisnis percetakan, bioskop dan lainnya, sedikit-banyak mempengaruhi pertunjukan Sri Indera Ratu dan kelompok teater lain yang jumlahnya bertambah banyak.

Hasrat berkesenian Sultan Sulaiman diwujudkan juga dengan membentuk *Brass Band Sultan Serdang*. Band kontemporer ini dibentuk dan dibiayai penuh Sultan Sulaiman sedangkan untuk pengurusan diserahkan pada Tengku Moenzir, pemusik asli serdang yang mahir meniup clarinet dan saksofon (Basarsyah II 2007: 383). Tengku Moenzir menjadikan

rumahnya sebagai markas sekaligus tempat latihan setiap dua minggu sekali dan sebuah balai di istana Serdang sebagai tempat gladi resik pertunjukan. Pemain Brass Band, berasal dari berbagai kalangan, latar belakang sosial dan kultural, dari putra bangsawan sampai anak tukang sepeda.¹⁷ Tidak ada yang membedakan, tak ada pembatasan, semuanya diperlakukan sama. Brass Band Sultan Serdang juga menjadi resmi yang selalu tampil dalam upacara-upacara resmi kerajaan, misalnya pada saat perayaan *jubilee* emas pemerintahan Sultan Sulaiman (1931).

Serampang XII sebagai tarian asli Melayu yang dikenal luas di Nusantara berasal dari Serdang. Sauti atau Guru Sauti adalah warga Serdang yang mencipta sekaligus penggubah tarian legendaris itu. Saat pertama kali dipertontonkan dalam acara *Muziek en Toneel Vereniging Andalas* tanggal 9 April 1938 di Grand Hotel Medan, tarian itu memukau penonton. Pada 1941, ketika beberapa daerah wilayah Serdang dilanda banjir dan membutuhkan dana besar untuk menanggulangnya, *Committee Bandjir Serdang* mengundang Guru Sauti untuk menarik Serampang XII itu untuk kedua kali di hadapan para pembesar, dari kalangan kerajaan, pejabat *gubernemen* dan *ondernemer* (Sinar 1977: 65).

Dalam bermusik, Sultan tak pernah berhitung. Seperangkat alat musik terdiri dari *drum*, harmonium, piano, tambur, klarinet, saksofon, *trumpet*, trombon disediakan di ruang musik dan dapat digunakan siapa saja. Di ruang yang jadi lokasi impian anak-anak muda ini terdapat pula seperangkat gamelan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono VII kepada Sultan Sulaiman ketika mengunjungi keraton Ngajogjakarta Hadiningrat pada 1937.

Menyangkut pendidikan nonformal lain, Sultan Sulaiman membuka kelas kursus untuk masyarakat di istana atau beberapa tempat di Perbaungan. Kelas yang ditempatkan di istana ini adalah kursus remaja putri, terutama membuat masakan khas Melayu. Kelas kursus yang diperuntukkan bagi

¹⁷ Wawancara dengan Tengku Syahrwardi, Medan, 12 Januari 2008.



gadis yang belum menikah dengan harapan kelak berumah tangga tidak canggung lagi mempersiapkan makanan untuk suaminya.¹⁸ Disebutkan pula ada kursus kerajinan, meskipun tidak berwujud kelas kursus sesungguhnya karena kegiatan membuat beraneka macam barang kerajinan ini dilakukan di bengkel Ohori.

Adalah hal yang tidak memungkinkan dalam kondisi di bawah tekanan kekuasaan penjajah, kreativitas seni dapat berkembang di Serdang kalau tidak ada peran dan perlindungan dari Sultan Sulaiman. Dorongan Sultan agar anak-anak Serdang dapat memainkan alat musik dan menarik jenis tarian yang menjadi lambang keluhuran budi dan tradisi telah menjadikan Serdang sebagai gudang para pemusik dan penari. Oleh karena itu tidak mengherankan, sesudah kemerdekaan anak-anak Serdang menjadi bagian terbesar dari Korps Musik TRI dan tulang punggung acara-acara kesenian di RRI Sumatra Utara, dan TVRI. Tradisi ini berlanjut sampai kini melalui Sanggar Sinar Budaya.

UPAYA MENYEHATKAN RAKYAT

Sama seperti ketika pendidikan modern diperkenalkan, tanggapan Sultan Sulaiman terhadap sistem pengobatan modern cukup besar, apalagi wabah penyakit seperti puru, malaria dan cacar kerap melanda warganya pada setiap pergantian musim (Basarsyah II, dkk. 2008: 52). Keinginan untuk mengajarkan cara hidup sehat dan mengatasi penyakit mendorong Sultan membangun balai pengobatan di setiap luhak negeri Serdang. Dimulai dari luhak Bangun Purba, kemudian menyebar ke luhak-luhak lainnya, meskipun pada akhirnya balai-balai pengobatan ini belum mampu mengatasi beberapa penyakit karena kekurangan tenaga medis dan obat-obatan.

Meskipun demikian rumah sakit yang bisa menampung lebih banyak orang dibangun pada 1935 di Simpang Tiga Perbaungan. Rumah sakit ini menjadi tempat rujukan bagi orang-orang yang

18 Wawancara dengan Umi Kulsum, Pantai Cermin, 6 Januari 2008.

berasal dari Serdang Hilir. Warga dari Serdang Hulu di rujuk ke rumah sakit Galang.¹⁹ Pengelolaan rumah sakit Perbaungan dipercayakan kepada Dr. Sutan Namora Siregar. Jika rumah sakit itu diperuntukkan bagi pasien yang menderita penyakit umum, pasien yang mengidap penyakit yang dianggap menakutkan saat itu dirujuk ke panti Lau Simomo, Pulau Sicanang yang dibangun khusus bagi penderita kusta. Sultan membebaskan warganya dari kewajiban membayar biaya pengobatan bagi penderita penyakit kusta, tbc, jiwa, dan mereka yang berobat ke rumah sakit kerajaan.²⁰ Pada 1937, Sultan Sulaiman menganggarkan dana sebesar 2.400 gulden bagi pasien gangguan jiwa.

Bermacam penyakit serius, baik yang diderita oleh Sultan, rakyat, dan kuli-kuli perkebunan dirujuk ke rumah sakit besar di Medan. Oleh karena biaya yang dikeluarkan cukup besar, Sultan Sulaiman mengajak pihak perkebunan agar secara bersama-sama menyisihkan sebagian laba mereka untuk mendirikan rumah sakit besar dengan mengundang dokter dan tenaga medis dari luar daerah. Sultan yang menyediakan lahan tanpa konsesi untuk tapak lokasi rumah sakit bagi *ondernemen* yang ingin mendirikan rumah sakit. Gagasan Sultan Sulaiman diterima oleh beberapa administratur dan beberapa perkebunan bergabung mendirikan rumah sakit di Tanjung Morawa, Adolina, Sungai Buluh, Tanah Raja, Tanah Abang, Petumbukan, Pelintahan, dan Bandar Negeri.

Hingga Perang Dunia II meletus, balai-balai pengobatan dan rumah sakit kecil di penjuru Serdang terus melayani siapa saja yang memerlukan pengobatan meskipun tercatat hanya ada dua dokter yang mengawasi semua unit kesehatan itu, yaitu Dr. R. M. Sutomo lalu digantikan Dr. Sutan namora Siregar yang mulai menjalankan tugas-tugas koleganya sejak 1916.

19 Lihat MvO Controleur van Serdang, J. de Ridder (1931).

20 Lihat MvO Controleur van Serdang, J. Gerrisen (1938: 15).



DAFTAR ACUAN

- Agustono, Budi (1993), "Kehidupan Bangsawan Serdang 1887–1946," Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada.
- Basarsyah II, Tuanku Luckman Sinar (2003), *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*. Medan: Yandira Agung.
- (2007), *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatra Timur*. Medan: tanpa nama penerbit.
- Basarsyah II, dkk. (2008), *Mahkota Adat dan Budaya Melayu Serdang*. Medan: Kesultanan Serdang.
- Locher-Scholten, Elsbeth (1996), *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877–1942*, terj. Jakarta: Djambatan.
- Moenzier, Izharry Agusjaya (1998), *Tengku Nurdin: Bara Juang Nyala di Dada*. Jakarta: Yayasan Penerbit Biografi Indonesia.
- Schadee, W. H. M. (1918), *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*, Deel I. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instituut.
- (t.t.), *Kroniek 1916*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut.



Kepemimpinan Perempuan Pejuang Bali Ida I Dewa Agung Istri Kanya pada Masa Kolonial Belanda

COKORDA ISTRI SURYAWATI

Keikutsertaan perempuan dalam setiap aspek kehidupan manusia di dunia tidak dapat diabaikan. Di samping sebagai ibu dan istri yang merupakan peran kodrati kaum perempuan dimanapun juga, dalam keadaannya sekarang kehidupan kaum perempuan juga semakin berkembang di segala bidang, sehingga kegiatannyapun sesuai dengan tuntutan jaman, baik dari masyarakatnya maupun dari lingkungan disekitarnya. Keikutsertaan kaum perempuan dimasa perang kemerdekaan, bahkan jauh sebelum itu setidaknya-tidaknya membawa perubahan yang tidak sedikit dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.

Demikianlah dalam pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia terutama pada masa-masa revolusi fisik, seluruh lapisan masyarakat pada umumnya ikut serta bahu-membahu bersama pemuda patriot dan jelas pada waktu itu perempuan pun turut bahkan terjun dan terlibat bersama-sama para pejuang lainnya, mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa yang dicintainya. Bahkan diakui, tanpa keikutsertaan perempuan, perjuangan mungkin tidak akan berhasil dengan baik. Hal itu sejalan dengan kenyataan, bahwa dalam peperangan misalnya perempuan mau tidak mau sering harus terlibat oleh keadaan yang memaksa. Atas dasar itu maka situasi dan kondisi suatu tempat atau waktu banyak berpengaruh dan menentukan peranan perempuan.

Ungkapan putra dan putri atau laki perempuan menurut Dharma Putra tak disingkirkan ataupun ditiadakan, namun menunjukkan adanya pandangan yang menempatkan laki dan perempuan setara. Ada semacam kesadaran yang percaya bahwa kemajuan suatu masyarakat harus dicapai

dengan melibatkan laki-laki dan perempuan, putra dan putri. Kalau laki-laki diberikan peluang untuk maju, maka kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada perempuan.

Berkaitan dengan pernyataan diatas, sesungguhnya ada beberapa tokoh perempuan pejuang yang muncul khususnya di Bali seperti Jero Jempiring, Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Sagung Wah, dan lain-lain. Mereka sudah mampu berjuang secara fisik di Medan Perang menyamai laki-laki pada jamannya. Salah satu diantara perempuan pejuang tersebut yaitu Ida I Dewa Agung Istri Kanya dari Klungkung berjuang secara fisik di Medan Perang pada waktu Perang Kusamba pada 1849.

Ida I Dewa Agung Istri Kanya adalah seorang yang ahli strategi perang, karena strateginya yang jitu berhasil membunuh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Michiels. Kelebihan yang dimiliki oleh Ida I Dewa Agung Istri Kanya dibandingkan perempuan pejuang lainnya ialah Beliau adalah seorang Raja/Ratu, ahli strategi perang dan juga seorang Rakawi (Pujangga Keraton). Sebutan sebagai seorang Rakawi dikarenakan Beliau mampu menciptakan atau melahirkan karya sastra berupa “Pralambang”, “Bhasa”, “Wewatekan”. Ketiga peran tersebut diatas erat kaitannya dengan kekuasaan seorang Raja yang tidak dapat dipisahkan dari faktor kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin Ida I Dewa Agung Istri Kanya menganut paham kepemimpinan Asta Brata (Delapan Landasan Menuju Kebenaran).

Dalam kepemimpinannya Ida I Dewa Agung Istri Kanya sudah memikirkan dan mengutamakan kepentingan rakyat, ia memerintah sangat adil dan bijaksana. Sebagai seorang pemimpin, ia telah menampakkan keberaniannya, sikap keras kepala, dan pantang menyerah dalam melawan musuh, sehingga oleh birokrat Belanda mendapat julukan “Perempuan Besi” pada abad ke-19. Tidak itu saja yang tampak pada dirinya, kebijakan yang dilakukan pun memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi rakyat Klungkung. Dengan keberadaan yang dimiliki ia dapat memberi



nuansa baru bahwa perempuan dapat disejajarkan dengan laki-laki dalam beberapa hal bahkan jauh sudah terjadi di masa lampau yaitu pada abad ke-19.

Sudah banyak yang dilakukan oleh Ida I Dewa Agung Istri Kanya demi bangsa dan negerinya tercinta agar terbebas dari serangan kaum penjajah. Dalam meniti kariernya Ida I Dewa Agung Istri Kanya telah berbuat maksimal namun belum Nampak adanya kepedulian masyarakat maupun pemerintah untuk memunculkannya kepermukaan. Mengapa hal itu sulit dilakukan? Nah inilah yang perlu mendapat jawaban dan menjadi tugas kita bersama.

Dalam konteks gender ada anggapan dari seorang pakar Prof. Dr. L.K. Suryani yang dimunculkan dalam harian *Bali Post*, mengatakan bahwa demikian besarnya peranan para perempuan pejuang, sehingga sebutan kesatria juga pantas diberikan kepada perempuan sebab mereka terbukti dapat menempatkan perannya bersama-sama dengan kaum laki-laki berjuang sampai titik darah penghabisan. Berdasarkan apa yang telah digambarkan yang telah digambarkan diatas, telah terbukti bahwa para perempuan pejuang dalam beberapa hal belum mendapat pengakuan walaupun para pejuang perempuan Bali telah mampu menunjukkan existensinya secara fisik (dalam perjuangan) maupun nonfisik (pemikiran atau ide yang bermanfaat). Mengapa? Karena selama ini belum banyak ditulis, didokumentasi dan sebagainya. Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengungkapnya.

PERGOLAKAN POLITIK KERAJAAN KLUNGKUNG ABAD KE-19

Klungkung merupakan sebuah kerajaan dari delapan atau sembilan kerajaan di Bali selama abad ke-19. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Bangli, Payangan, Gianyar, Klungkung, Badung, Mengwi,

Tabanan, Jembrana dan Buleleng. Wilayah Kerajaan Klungkung berbatasan dengan wilayah kerajaan lainnya seperti Karangasem (Bagian Timur), Bangli (Bagian Utara), Gianyar (Bagian Barat), Samudera Indonesia (Bagian Selatan). Secara Geografis wilayah kerajaan Klungkung dibagi dua yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan luasnya kurang lebih 600 kilometer persegi, terdiri dari bukit-bukit sebagai bagian dari pegunungan Bali Tengah. Perbukitan itu terletak di perbatasan Kerajaan Gianyar, Bangli dan Karangasem. Di daerah-daerah pegunungan terletak Desa Dawan, Payangan, Tampak Siring, sedangkan Kusamba, Klungkung, Gelgel dan Banjarangkan terletak di dataran rendah dekat pantai. Ibu kota Klungkung sendiri terletak kira-kira 5 kilometer dari pantai selatan.

Wilayah Kerajaan Klungkung bagian kepulauan terdiri dari pulau-pulau yang terletak diantara Selat Badung dan Samudera Indonesia. Pulau-pulau itu adalah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dengan luas sekitar 222 kilometer persegi. Menurut perkiraan Van Bloemen Waanders yang pernah mengadakan perjalanan di Bali dan Lombok pada 1856, jumlah penduduk Kerajaan Klungkung adalah 46.000 orang. Untuk terlaksananya sistem pemerintahan yang baik dan teratur, wilayah kerajaan dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu kemandan setingkat kecamatan sekarang, desa dan banjar. Struktur birokrasi Kerajaan Klungkung secara struktural dapat digambarkan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Raja sebagai penguasa tunggal yang dapat berlaku turun temurun. Di bawah raja adalah pemerintahan tingkat kemandan dibawah pimpinan seorang Punggawa atau Manca. Jabatan ini hampir seluruhnya ditempati oleh bangsawan dari anggota keluarga Raja. Di bawah Manca atau Punggawa terdapat jabatan Perbekel yang mengepalai Desa. Apabila pejabatnya berasal dari bangsawan disebut Perbekel Gede, kalau bukan bangsawan disebut Pemekel saja. Struktur terbawah dari birokrasi kerajaan adalah tingkat banjar dibawah pimpinan Kelian.

Kondisi Kerajaan Klungkung pada abad ke-19, tidak terlepas dari



keadaannya pada abad ke-17 dan abad ke-18. akibat dari terjadinya suatu kekacauan pada tahun 1650, negara-negara vassal ingin membebaskan diri dari kekuasaan Raja tertinggi, yang sebelum tahun 1950 ada di Keraton Gelgel. Pasal-pasal tersebut memerdekakan diri dan menyatakan diri sebagai raja yang berdaulat penuh atas wilayahnya. Munculah kerajaan-kerajaan kecil di Pualu Bali yang dahulu pernah bersatu dibawah kepemimpinan tertinggi di Gelgel. Kerajaan-kerajaan itu adalah Buleleng, Tabanan, Gianyar, Mengwi, Bangli, Payangan, Karangasem, Klungkung dan Badung. Masing-masing kerajaan ini memegang hak otonomi dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja masing-masing. Raja-raja menganggap Klungkung sama statusnya dengan raja-raja lain (Sidemen 2001:58).

Pada abad ke-17 dan abad ke-18 Klungkung belum berhasil menempati peranannya untuk menyatukan Bali karena justru pada masa-masa itu terjadi peperangan memperebutkan kekuasaan tunggal oleh raja-raja di Bali. Klungkung sendiri sering terseret ikut dalam perang perebutan kekuasaan tersebut. Keterlibatan Klungkung dalam perang-perang ini dimulai pada tahun 1800 ketika Klungkung berhasil menempatkan Kerajaan Bangli dibawah kekuasaannya. Klungkung diakui sebagai yang tertinggi karena ia adalah pewaris Dinasti Kresna Kepakisan dan pewaris sah Keraton Gelgel (Utrecht 1962: 97).

Situasi politik kerajaan mulai tidak stabil dan terjadi berbagai konflik dalam tubuh negara. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perpecahan dan persatuan dalam sistem kenegaraan yang telah terbangun dengan baik pada masa-masa sesudahnya. Munculnya situasi politik yang tidak stabil ini telah terasa pada awal-awal berakhirnya Raja Dalem Dimade menjadi raja karena telah meninggal dunia. Kekacauan pun terus terjadi dan intrik dalam perebutan kekuasaan terus berlangsung didalam Kerajaan Gelgel. Selama 36 tahun mulai dari tahun 1650 sampai tahun 1686 mengalami krisis dan puncaknya adalah ketika terjadi pemberontakan dan perebutan

kekuasaan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti dari Vassal Mengwi. Ketika terjadi pemberontakan I Gusti Agung Maruti para Bahudanda (Pembesar Kerajaan) kembali ke daerah kekuasaannya masing-masing dan menyatakan diri bebas dari ikatan dengan Gelgel. Mereka menyatakan bebas dari kekuasaan I Gusti Agung Maruti dan bukan dari kekuasaan Dalem Dimade sebagai raja yang sah.

Pemberontakan I Gusti Agung Maruti berhasil menduduki istana negara. Melihat kekacauan seperti itu Raja Dalem Dimade berusaha dan berhasil meloloskan diri dari serangan pemberontak dan melarikan diri ke Guliang, wilayah Kerajaan Gianyar pada saat itu. Demikian pula Putra Raja bernama Dewa Agung Jambe dapat diselamatkan. Berkat bantuan dari beberapa kerajaan yang masih setia dengan Kerajaan Gelgel seperti Kerajaan Gianyar, Badung dan lainnya, pemberontakan dapat dipadamkan. I Gusti Agung Maruti tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan akhirnya lengser dari Singgasana dan berakhirlah kekuasaan I Gusti Agung Maruti.

Setelah kerajaan dapat dikuasai kembali maka kepemimpinan di Kerajaan Gelgel menjadi berubah dengan diangkatnya Putra Mahkota Raja Gelgel yakni Dewa Agung Jambe menjadi Raja menggantikan Ayahandanya Dalem Dimade. Kerajaan Gelgel pasca pemberontakan secara fisik sangat kacau karena terjadi kerusakan yang amat parah. Melihat situasi politik pada saat itu Raja Dewa Agung Jambe memutuskan untuk memindahkan istana kerajaan ke Klungkung dengan ibukotanya bernama Semarapura. Dengan demikian pindahnya kerajaan Gelgel ke Klungkung menandai berakhirnya kekuasaan Gelgel (Utrecht 1962: 96).

Berdirinya Kerajaan Klungkung memberikan kesempatan kepada para Anglurah Agung untuk membebaskan diri dari kekuasaan tertinggi yang sebelum tahun 1960 (?) ada di Keraton Gelgel. Mereka memerdekakan diri dan menyatakan diri sebagai Raja yang berdaulat penuh atas wilayahnya. Berdaulatnya pasal-pasal yang dulunya adalah berada dibawah



kepemimpinan tertinggi Gelgel kini kepemimpinan tersebut berada pada raja di wilayahnya masing-masing. Ini berarti bahwa telah terjadi perubahan peta perpolitikan di Bali.

Pada permulaan abad ke-19 Pulau Bali telah terpecah menjadi 9 kerajaan kecil seperti tersebut diatas. Sebenarnya Dewa Agung tidak rela melihat dan membiarkan politik Pulau Bali seperti itu. Klungkung tidak berdaya mencegah perpecahan Pulau Bali, karena kekuatan militer kerajaan pada umumnya lebih lemah bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Piliang, bahwa telah terjadi suatu sistem kekuasaan dan dominasi politik yang dipegang oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial lainnya (Piliang 2005: 24).

Walaupun telah terjadi perubahan peta perpolitikan pada abad ke-19, namun pada tataran yang lain tampak simbol Kerajaan Klungkung tetap menjadi pusat dalam urusan keagamaan. Kedudukan Kerajaan Klungkung dalam urusan politik luar negeri juga tampak masih memiliki legitimasi yang lebih tinggi daripada kerajaan-kerajaan lain walaupun telah tampak terjadi pergeseran kekuasaan sentralistik dan mengarah pada kekuasaan yang otonom pada masing-masing kerajaan yang ada di Bali. Untuk bisa melihat bahwa legitimasi dan kedudukan Klungkung masih lebih tinggi daripada kerajaan-kerajaan di Bali dapat dilihat dari aktivitas dalam urusan luar negeri masih membawa peranan yang tetap sentral dalam urusan keamanan. Selama abad ke-19 telah sering kali diadakan berbagai kesepakatan baik secara bilateral maupun multilateral dengan kerajaan-kerajaan di Bali, disamping itu pula perjanjian-perjanjian dagang dengan kerajaan pemerintah Hindia-Belanda.

Situasi politik di Kerajaan Klungkung pada awal abad ke-19 masih mengalami situasi peperangan yang tidak kunjung reda. Bali terpecah menjadi 9 kerajaan. Perpecahan ini tampaknya membawa keprihatinan besar terhadap Pulau Bali, Klungkung dibawah pemerintahan Dewa Agung berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap kesembilan kerajaan yang

telah tersebut diatas. Strategi Klungkung dalam menjalankan misinya tersebut yakni dengan cara diplomasi dengan mengundang para raja-raja untuk mau melakukan kerjasama diikuti dengan mengadakan perjanjian-perjanjian. Usaha Raja Klungkung dalam melakukan diplomasinya tidak sia-sia. Setapak demi setapak strategi diplomasinya dapat mengikat para raja untuk mengadakan perjanjian seperti halnya pada perjanjian antara Gianyar, Badung, Tabanan, yang disahkan pada hari Rabu Kliwon Pahang tahun 1751 Çaka (1829 Masehi), status Raja Klungkung sebagai pimpinan tertinggi diakui oleh ketiga raja tersebut. Begitupula diadakan perjanjian antara Bangli, Payangan, Badung dan Mengwi yang disahkan pada hari Rabu Pon tahun 1759 Çaka (1837 Masehi), Raja Klungkung mulai memperoleh legitimasinya kembali. Title Ida Cokorda Ida I Dewa Agung menempatkan kembali Raja Klungkung pada status sebagai penguasa selama hayat dikandung badan.

Perjanjian-perjanjian yang telah disahkan tersebut, di samping untuk memperoleh legitimasi kekusaan Klungkung yang tertinggi namun juga bertujuan untuk menyatukan Bali dan secara bersama-sama menghadapi ancaman Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Lewat perjanjian-perjanjian tersebut, Klungkung membawa peran besar terhadap berbagai kebijakan luar negeri. Raja-raja yang mengadakan kontak dan kontrak dengan pihak luar dalam hal ini Belanda harus terlebih dahulu memohon pertimbangan dan persetujuan dari raja tertinggi yakni Raja Klungkung.

KEPEMIMPINAN SERTA PERJUANGAN IDA I DEWA AGUNG ISTRI KANYA

Menurut Tjok Istri Putra Astiti, salah seorang pakar gender bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain, dapat menjadi panutan, dapat pula sebagai penggerak atau pendorong serta mampu mengintegrasikan anggota kelompok masyarakat yang



dipimpinnya. Bila dikaitkan dengan kata perjuangan tidak akan terlepas dari makna yang terkandung didalamnya sebagai suatu upaya atau langkah-langkah menuju terwujudnya jiwa, semangat nasionalisme dan patriotisme seseorang demi mempertahankan tanah air dan bangsanya dari ancaman musuh. Sikap dan jiwa seperti itu dimiliki oleh Ida I Dewa Agung Istri Kanya seorang tokoh pejuang dari kerajaan Klungkung.

Ida I Dewa Agung Istri Kanya adalah putri tunggal dari pasangan Ida I Dewa Agung Putra Kusamba (Ida I Dewa Agung Putra Pertama) dengan Permaisuri Ida Anak Agung Istri Ayu Made Karang dari Puri Karangasem. Tokoh Ida I Dewa Agung Istri Kanya muncul sebagai Raja ketujuh dari kerajaan Klungkung pada waktu Perang Kusamba tahun 1849. Beliau sering juga disebut dengan nama Ida I Dewa Agung Istri Balemas. Penyebutan tersebut dipengaruhi oleh berbagai unsur yang salah satunya adalah lokasi tempat tinggal. Dalam kesehariannya Ida I Dewa Agung Istri Kanya lebih banyak meluangkan waktunya di Balemas. Balemas adalah salah satu bagian dari lokasi yang penting dan menempati status setingkat lebih rendah dari ruangan Raja (Pesarean Gede). Karena beliau tinggal bersama adiknya di Balemas maka sering disebut dengan nama Ida I Dewa Agung Istri Balemas.

Ida I Dewa Agung Istri Kanya adalah seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam jajaran pemerintahan. Beliau memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahan, maka ayahnya memberikan kepercayaan terhadapnya dalam meneruskan kepemimpinan Raja Ida I Dewa Agung Putra Kusamba. Pada waktu Perang Kusamba tahun 1849 pasukan Belanda dibawah pimpinan Mayor Jenderal Michiels, hendak menghancurkan benteng Goa Lawah dan benteng pertahanan di Kusamba. Jika keduanya sudah jatuh ketangan Belanda, tidak ada lagi benteng pertahanan yang cukup kuat yang dapat membendung arus gerak pasukan Belanda yang akan menyerang Kota Klungkung (Wirawan 2002: 5). Pada waktu inilah Istri Kanya sangat

besar peranannya dalam mengatur strategi perang. Sebagai seorang Ratu Istri Kanya dibantu oleh seorang Mangkubumi yang cerdas dan cekatan bernama Dewa Agung Ketut Agung (Sidemen 1984: 100). Dewa Agung Ketut Agung dan Anak Agung Made Sangging banyak membantu Istri Kanya dalam menyusun strategi dan membangun kekuatan.

Dalam keadaan yang sedang tegang, Istri Kanya memanfaatkan situasi tersebut untuk dapat memberikan pertimbangan yang terbaik untuk raja. Dalam memberikan pertimbangan maupun ide-ide yang cemerlang, Istri Kanya boleh dikatakan adalah sosok perempuan yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Sebelum menjadi Raja Istri Kanya telah terlihat kepiawaiannya dalam bidang politik dan sastra. Dalam bidang politik sudah tentunya dituntut kecerdasan yang luar biasa untuk menyusun suatu strategi perang dan taktik perlawanan yang dapat mematahkan semangat lawan. Itu semua dimiliki oleh Istri Kanya sebagai seorang Raja Putri. Peranan Istri Kanya sebagai sosok perempuan pada saat itu dapat dikatakan strategis, karena apa yang menjadi pemikiran Beliau dapat mempengaruhi kebijakan atau dapat memberi andil terhadap keputusan yang dikeluarkan dalam posisinya sebagai raja.

Salah satu faktor penting bagi seorang raja dalam mengembangkan kekuasaannya ditentukan oleh faktor kepemimpinannya. Kerajaan Klungkung merupakan sebuah negara yang di dalamnya dipimpin oleh seorang raja yang tidak lain adalah Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Istri Kanya sebagai seorang raja merupakan representasi dari rakyat yang dipimpin dan dikuasai. Raja memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan Istri Kanya menganut kepemimpinan "Asta Brata", dapat dipetik dari epos besar Ramayana yang mengandung paham delapan landasan kebenaran untuk berpijak sebagai seorang pemimpin rakyat.

Adapun dalam ajaran "Asta Brata", kepemimpinan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut.



- a) Indra Brata yaitu merupakan cerminan pemikiran Raja atau Pemimpin kepada rakyat dengan adil. Raja atau pemimpin memberikan pertimbangan dengan adil dalam segala hal pada rakyatnya;
- b) Yama Brata yaitu kepemimpinan ini dapat menggambarkan bahwa seorang Raja atau Pemimpin dapat mengadili serta menghukum orang yang berbuat jahat dan telah berani melakukan pelanggaran terhadap ketentraman umum, sesuai dengan perbuatannya tanpa pilih kasih;
- c) Surya Brata yaitu model kepemimpinan dimana seorang pemimpin mampu memberikan penerangan dalam hubungan lahir bathin kepada rakyatnya;
- d) Chandra Brata, cermin seorang pemimpin yang ramah tamah selalu menunjukkan ketenangan kepada rakyatnya baik dalam keadaan senang maupun kesusahan. Kepemimpinan ini tidak lepas dari pribadi yang memiliki keyakinan hidup menyala-nyala tentang keagungan bangsa dan negaranya;
- e) Bayu Brata (Angin), bentuk kepemimpinan ini dimana seorang pemimpin mampu memberikan kesejahteraan kepada bawahannya ataupun rakyatnya;
- f) Kuwera Brata (Dana Brata) yaitu kepemimpinan dimana seorang pemimpin tidak baik bersikap berlebihan terhadap kekayaan serta kemakmuran yang dimiliki;
- g) Baruna Brata yaitu kepemimpinan dimana seorang pemimpin dengan persenjataan yang lengkap yang dimiliki dapat bertugas dengan baik dalam menghadapi musuh;
- h) Agni Brata yaitu kepemimpinan dimana seorang pemimpin memiliki semangat yang berkoba-berkobar ibarat api serta keberanian yang luar biasa, pantang menyerah dalam menghadapi bahaya.

Dengan segala keterbatasan manusia tidak sulit bagi para pemimpin

bangsa untuk mewujudkan delapan landasan kebenaran untuk berpijak bagi seorang pemimpin rakyat. Tentunya didalam menganut "Asta Brata" hendaknya menyesuaikan dengan sikon masing-masing orang. Sehubungan dengan hal tersebut bentuk kepemimpinan yang telah diterapkan dan dimiliki oleh Ida I Dewa Agung Istri Kanya adalah Indra Brata, mewujudkan adanya keadilan bagi rakyat; Bayu Brata, raja memberi kesejahteraan bagi rakyat; Surya Brata, raja dapat memberi penerangan lahir bathin kepada rakyat dan Agni Brata sikap seorang pemimpin yang berani, pantang menyerah dalam menghadapi bahaya. Itulah kepemimpinan yang telah dimiliki serta diterapkan oleh Istri Kanya dalam konsekuensinya sebagai pemimpin.

Terkait dengan kepemimpinan Istri Kanya dalam perjuangan tentunya strategi kebijakan yang telah dilakukan adalah memperkuat benteng-benteng kerajaan yang berada disebelah barat kerajaan Klungkung yaitu Banjarangkan, Gel-gel dan jumpai dibagian selatan, dan Kusamba dibagian Timur. Istri Kanya memerintahkan untuk memusatkan kekuatan benteng Kusamba di Pura Goa Lawah yang terletak pada lereng bukit menghadap ke pantai. Disamping karena letaknya yang strategis sebagai benteng alam juga karena Pura Goa Lawah dianggap akan memberikan perlindungan dan kekuatan magis terhadap seluruh laskar yang ditempatkan didalam dan sekitar Pura itu.

Langkah-langkah strategis atau kebijakan lainnya seperti menutup celah sempit yang memisahkan daerah perbukitan dengan pantai. Celah itu ditutup dengan tembok tebal yang dibuat dari tumpukan batu yang direkat dengan tanah liat, ditutup dengan kaktus, dan pohon berduri lainnya seperti pandan (*Pandanus*), dan jeruju (*Diliveria clicifulia*). Hampir seluruh bukit ditumbuhi pohon jenis berduri seperti bekul (*Zizyphusjuzuba*), dan bangiang (*Ginelina vilosa*) (Wietze 1859: 98). Tembok ini disambung sepanjang pantai dan berakhir didepan Pura Goa Lawah. Tembok pagar ini dimaksudkan sebagai penghalang apabila musuh berhasil menerobos benteng Goa Lawah.



Istana Kusamba diperkuat oleh Laskar Bayangkara, dalam istilah Bali disebut Tabeng Dada, peming (Laskar Berani Mati), dan pecalang (Pasukan Inti Istana) yang bersenjatakan beberapa pucuk bedil, keris, tombak, dan bambu runcing (Gelanggang) (Nypels 1887: 221). Ida I Dewa Agung Istri Kanya memutuskan untuk merebut kembali Kusamba dan serangan akan dilakukan pagi-pagi menjelang tanggal 25 Mei 1849. Pada malam hari pukul 03.00 Laskar Klungkung menyerang perkemahan Belanda di Istana Kusamba. Serangan ini diikuti dengan pembakaran bagian-bagian desa dekat puri. Pertempuran malam memaksa Belanda menggunakan peluru cahaya (*Lightcogel*).

Dalam huru-hara itu peming Klungkung menyusup masuk puri dan berhasil menembak roboh Jenderal Michiels. Jenderal Michiels dinyatakan gugur setelah mengalami amputasi dikaki kanan diatas Kapal Etna (Wietze 1859: 110). Walaupun pasukan Belanda berhasil mengahului Laskar Klungkung meninggalkan Kusamba, kematian Jenderal yang dikaguminya, menyebabkan semangat tempurnya menurun. Bagi Laskar Klungkung, walaupun gagal merebut kembali Kusamba, kematian sang Jenderal merupakan kemenangan moral.

Dalam kondisi yang kacau dan menyedihkan Istri Kanya masih sempat berupaya menugaskan pendampingnya yaitu Anak Agung Ketut Agung mengirim utusan ke Batavia untuk menyampaikan informasi yang berbunyi, “Kerajaan kami telah hancur jangan mengadakan serangan kembali dan maaf atas terbunuhnya Jenderal Michiels.” Penyampaian informasi tersebut bertujuan untuk mengamankan serta membentengi rakyat Klungkung dari ancaman musuh yang membahayakan. Di sinilah terlihat kehebatan Istri Kanya sebagai seorang raja dalam menyusun strategi maupun kebijakan dalam perjuangan pada waktu Perang Kusamba.

Bila dikaji dari konteks gender bahwasanya tidak saja raja-raja pendahulu dari Istri Kanya yang kebetulan laki-laki yang mampu memimpin strategi perang, seorang perempuan pun tidak kalah hebatnya

seperti yang dilakukan oleh Istri Kanya yang pada waktu Perang Kusamba mampu mengambil peran sebagai raja sekaligus pejuang.

PENUTUP

Sesungguhnya kepemimpinan Ida I Dewa Agung Istri Kanya telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap situasi dan kondisi mengenai tingkat kedudukan perempuan. Tidak hanya laki-laki yang mampu menjadi raja, perempuan bisa eksis dalam pemerintahan. Dalam kepemimpinannya, Ida I Dewa Agung Istri Kanya sangat menentang intervensi Belanda dalam bentuk apapun. Sebagaimana diketahui, kepemimpinan Asta Brata telah dipedomani oleh Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Setiap langkah dalam menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Asta Brata mengandung filosofinya sendiri. Seorang raja seperti Ida I Dewa Agung Istri Kanya memiliki kekuasaan cukup besar dalam masa kepemimpinannya sudah tentu tidak akan mengabaikan makna apa yang terdapat pada setiap ajaran-ajaran mengenai kepemimpinan.

Ajaran Asta Brata (delapan landasan kebenaran) untuk berpijak sebagai pemimpin rakyat selalu dipedomani oleh raja Hindu di Bali termasuk Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Dalam menghadapi intervensi Belanda, Istri Kanya telah merancang strategi kepemimpinan yang mampu mengimbangi perilaku Belanda terhadap kerajaan yang berada dibawah kekuasaannya. Melihat ketegasan dan keberaniannya dalam menghadapi Belanda, kepemimpinan yang dianut mengacu kepada kepemimpinan tradisional Asta Brata yaitu Indra Brata, Chandra Brata, dan Agni Brata. Kepemimpinan Indra Brata mencerminkan bahwa seorang pemimpin mampu memberkan kesejahteraan pada rakyat; kepemimpinan Chandra Brata mencerminkan dimana seorang pemimpin mampu bersikap hormat terhadap orang suci maupun para pendeta; dan kepemimpinan Agni Brata mencerminkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pemberani dalam



menghadapi musuh bahkan berani menghancurkan musuh sekaligus.

Dilihat dari konteks gender, tidak hanya laki-laki yang mampu memimpin suatu perjuangan, bahkan jauh di masa lampau perempuan seperti Ida I Dewa Agung Istri Kanya sudah mampu memimpin sebagai raja bahkan berjuang di medan perang menyamai laki-laki. Dengan keeksisan Ida I Dewa Agung Istri Kanya dalam kepemimpinan serta perjuangannya menentang Belanda dapat memberi dampak atau makna yang terlahir dari jiwa patriotisme yang tinggi yang berawal dari adanya keterikatan terhadap kelompok. Tidak itu saja yang dapat ditunjukkan, hal-hal penting lain seperti kewibawaan, rasa kebersamaan (solidaritas), kemandirian, serta keberanian untuk mengadakan perubahan ini sangat mendukung Istri Kanya sebagai seorang raja.

Bila dilihat dari kajian gender, tidak hanya laki-laki yang memiliki keberanian seperti itu bahkan perempuan pun mampu mengimbangi laki-laki menurut konteks kemampuan masing-masing. Bahkan, jauh di masa lampau perempuan sudah mampu berbuat maksimal demi mengangkat martabat, derajat bangsa, dan negerinya.



Tokoh Pejuang Kemerdekaan Willem Reawaru dan Peristiwa RMS di Maluku

JOHN A. PATTIKAYHATU
UNIVERSITAS PATTIMURA

Dewasa ini kita telah menjadi bangsa yang terhormat dan merdeka. Bangsa yang sedang berjuang untuk membangun masa depan yang lebih baik, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan kemerdekaan yang mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945, telah ditebus dengan harga yang mahal sekali. Sejarah telah mencatat bahwa, kita telah kehilangan putra-putri terbaik dalam merintis, mencapai, maupun menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Perjuangan itu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan tak terkecuali juga dari daerah Maluku. Willem Reawaru adalah salah satunya. Ia telah dihargai dan dicatat sebagai tokoh perintis dan pejuang kemerdekaan di daerah Maluku oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga oleh Pemerintah daerah Maluku.

Tulisan ini bertujuan untuk mengisahkan riwayat perjuangan dan jasa-jasa Willem Reawaru untuk diketahui oleh masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat mewarisi nilai-nilai kepahwanan dan keteladanannya, dalam rangka penguatan *nation building* menuju masyarakat adil dan makmur. Pokok-pokok bahasan makalah berkisar pada (1) identitas tokoh Willem Reawaru, (2) kegiatannya dalam politik, (3) perjuangan mempertahankan kemerdekaan, (3) menentang tindakan separatis Republik Maluku Selatan, (4) pemberontakan Republik Maluku Selatan, (5) Reawaru gugur sebagai pahlawan angsa, dan (6) hakikat cita nilai perjuangan Wim Reawaru Bagi Generasi Penerus.

RIWAYAT WILLEM REAWARU

Willem Reawaru atau Wim Reawaru lahir pada 2 April 1910 di Pulau

Ambon dari keluarga Petani di Negeri (Desa Waai). Istrinya seorang putri keturunan bangsawan dari kota Solo, Jawa Tengah, bernama R. A. Supiana. Dua sejoli ini tidak mempunyai anak, namun mempunyai beberapa anak angkat dari saudara dan iparnya. Seluruh anak-anak dan semua handai tolan memanggil bapak Wim dengan nama julukan “Patje”. Sedangkan Ibu Supiana dipanggil dengan nama panggilan “Majte”. Sifat-sifat pribadi bapak Wim sangat tegas dan disiplin terhadap anak-anak, dan ramah terhadap semua keluarganya. Demikian pula sama halnya dengan Ibu Matje.

Tamat pendidikan dasar pada Ambonsche Burger School di Kota Ambon, Wim tidak melanjutkan studi lagi. Ia mulai bekerja pada perusahaan pelayaran di Belanda yaitu KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschapij) di Ambon. Pimpinan dan pegawai dari perusahaan tersebut sebagian besar adalah orang Belanda atau orang-orang Ambon yang “blandis”, dan tindakan diskriminasi ras selalu menjadi perhatian Wim dan teman-teman dekatnya.

Sejak mudanya perasaan nasionalismenya mulai muncul karena banyak membaca buku-buku sejarah yang berisi peristiwa-peristiwa pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Beberapa di antaranya adalah karangan-karangan Bung Karno yang mengecam imperialisme dan kolonialisme, serta Perang Pattimura tahun 1817. Rupanya semangat patriotisme dan kepahlawanan Thomas Matulesy Kapitan Pattimura begitu meresap dalam jiwa Wim. Untuk mengenang perjuangan Pattimura, ia dengan kendaraan becak menuju pantai Batu Capeu di Negeri/Desa Amahusu dengan karangan bunga yang akan disanjung pada pusara Pahlawan Pattimura yang digantung ditempat tersebut. Tempat ini kemudian menjadi tempat keramat bagi diri beliau sendiri karena sebelum dibunuh, ia menitipkan suatu wasiat kepada keluarga, bahwa jika nanti terbunuh pusaranya harus dibuat pada tempat pusara Pahlawan Pattimura di Batu Capeu itu.

Pada waktu mulai terjun dalam dunia politik, Wim bersahabat karib dengan tokoh pejuang yang radikal yaitu Alexander Jacob Patty yang



menentang politik kolonial Belanda. Pertemanan dengan A.Y. Patty ini, sangat lebih mempengaruhi perasaan nasionalisme yang sedang tumbuh dalam jiwa Wim Reawaru karena itu ia tidak suka bekerja sama dengan Belanda dan akhirnya berkarier sebagai seorang swasta.

TERJUN DALAM DUNIA POLITIK

Perjuangan secara modern untuk membebaskan bangsa dan Tanah Air Indonesia dari penjajah Belanda pada permulaan abad ke-20 terkenal sebagai “Pergerakan Nasional”. Perjuangan baru ini memakai cara yang sangat berbeda dengan cara-cara perjuangan abad-abad yang lalu. Untuk membina persatuan nasional maka wadah yang dipakai adalah dengan pembentukan partai politik dan perserikatan. Wadah-wadah itu dibentuk oleh golongan cendekiawan/intelektual yang lahir dari didikan Belanda. Mereka mengerti akan cara-cara perjuangan modern dan membimbing serta memimpin rakyat. Merekalah yang kemudian mendirikan berbagai organisasi modern itu.

Dalam hubungan dengan berdirinya organisasi-organisasi politik itu, orang Maluku juga mulai sadar terutama golongan intelek yang berada di Pulau Jawa maupun Ambon. Pada 9 Mei 1920 seorang tokoh politik yang terkenal yaitu Alexander Jacob Patty mendirikan “Serekat Ambon” di Semarang. Inilah organisasi pertama dari orang-orang Ambon yang bersifat politik. Tujuannya untuk memajukan kemakmuran penduduk Ambon. Setapak demi setapak A. J. Patty membawa Serekat Ambon lebih mendekati ide-ide Nasionalisme, dan semakin menjadi revolusioner, serta radikal terhadap Pemerintah Belanda. Pada 1922, Serekat Ambon masuk dalam “Radical Concentration”. Di Pulau Jawa Serekat Ambon makin maju dan di kota-kota besar dibuka cabang. Ide-ide Serekat Ambon terus disiarkan melalui majalah *Mena Muria*. Serekat Ambon juga mempunyai bagian khusus untuk wanita yang terkenal sebagai Ina Tunj atau “Wanita Mulia”.

Di daerah Maluku ide-ide Serekat Ambon disambut pula oleh

masyarakat melalui tokoh-tokoh pergerakan didaerah yang terkenal pengaruhnya seperti E. U. Pupella, Wim Reawaru, D. Ayawaila, J. Tupamahu, J. D. Poetiray, J. L. Matulatuwa dan lain-lain. Mereka adalah pembantu A. J. Patty, ketika ia tiba di Ambon tahun 1923. Mereka mengelilingi negeri-negeri di Ambon dan Lease serta mempropagandakan ide-ide Serekat Ambon. Dimana-mana mulai berdiri *kring-kring* Serekat Ambon. Perjuangan untuk memasuki Ambon Raad yaitu semacam dewan perwakilan masyarakat kota Ambon yang dibentuk Pemerintah Belanda pada tahun 1921. A. J. Patty terpilih dengan sukses meskipun mendapat tantangan keras dari Regenten Bond. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi politik yang cita-cita politiknya bertentangan dengan politik Serekat Ambon. Lawan-lawan politiknya memfitnah dan menuduh A. J. Patty dan Serekat Ambon melanggar hukum dan berbahaya bagi pemerintah. Ia kemudian ditangkap dan diadili oleh Raad van Justitie di Makassar tahun 1924. Pada tahun 1925 Gubernur Jenderal memutuskan ia dibuang ke Bengkulu kemudian ke Boven Digul di Papua.

Mega mendung menyelimuti suasana politik di Maluku dan di Jawa setelah A. J. Patty dibuang keluar Ambon. Di Jakarta, tokoh intelektual muda Mr. J. Latuharhary memimpin dan membawa Serekat Ambon bersama-sama dengan organisasi politik lainnya dengan satu tujuan yaitu Indonesia merdeka. Di Ambon Serekat Ambon tetap eksis meskipun mendapat tantangan dari lawan-lawan politiknya yaitu Regenten Bond dan Moluksche Politiek Verbond. Reorganisasi diadakan dan D. Ajawailla menjadi pemimpin dengan arahan dari pusat oleh Mr. J. Latuharhary. Tokoh politik yang radikal dan bijaksana ini meninggal dunia 27 Desember 1927 dan diganti oleh E. U. Pupella, juga seorang nasionalis. Ia dibantu oleh teman-teman seperjuangannya seperti Ot Pattimaipau dan Wim Reawaru, tokoh pejuang yang radikal dan tidak mau berkompromi dengan Belanda.

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Maluku juga



berkobar dan disambut oleh masyarakat terutama para pemuda dan tokoh pejuang di daerah terutama Ambon. Berita proklamasi diterima pula oleh para pemuda di Ambon, tetapi mereka tidak bisa segera bertindak secara bersenjata, akan tetapi jalan yang ditempuh disesuaikan dengan kondisi politik dan militer di Ambon. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu, tanpa instruksi dari pusat (Gubernur Mr. J. Latuharhary), rakyat di daerah Maluku mulai membentuk dan mengorganisir laskar-laskar perjuangan rakyat untuk membela proklamasi 17 Agustus 1945.

Di Ambon para pemimpin pergerakan rakyat seperti E. U. Pupella, Wim Reawaru, Hamid bin Hamid dan lainnya mulai berusaha menyusun masa rakyat guna menentang Belanda yang baru datang itu. Pada bulan Desember 1945 mulai diadakan rapat-rapat konsolidasi yang dihadiri oleh mereka yang berpikiran nasionalis dari organisasi-organisasi Romusha, Heiho, dan juga KNIL dan Polisi. Tujuan rapat tersebut ialah untuk mengorganisasikan kekuatan menyerang tentara Belanda dalam Kota Ambon dan sekitarnya. Selain itu pemimpin-pemimpin tersebut di atas berhasil membentuk Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang diserahkan pimpinannya kepada Paul Maitimu, M.Q.Marulapey dan kawan-kawannya. Mereka berhasil membentuk Barisan Pembela Indonesia (BPI) yang kemudian diganti namanya menjadi Pasukan Terpendam. Anggota-anggotanya terdiri dari bekas Heiho, KINL, Seimedon dan Para Pemuda. Selain itu di Ambon berhasil pula dibentuk Pemuda Republik Indonesia Maluku di bawah pimpinan Abdul Kadir Tuakia.

Di samping usaha membentuk laskar perjuangan rakyat, diusahakan pula dibentuk organisasi politik untuk persatuan perjuangan. Sebagai seorang nasionalis, E. U. Pupella segera mengambil inisiatif membentuk suatu partai yang dapat menyalurkan dan mengumpulkan aliran-aliran nasionalis di dalam masyarakat Ambon dan Maluku. Pada 17 Agustus 1946 sebelum terbentuk Dewan Maluku Selatan, Partai Indonesia Merdeka (PIM) diresmikan pendiriannya dalam suatu rapat umum bertempat digedung kesenian darurat kepunyaan Wim Reawaru. Di dalam peresmian

hadir pembesar-pembesar Belanda. Pada latar belakang podium terpasang bendera Merah Putih dan upacara dimulai dengan hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Belanda *Wilhalmus* kemudian lagu kebangsaan *Indonesia Raya*.

Sebagai program pokok dan PIM diputuskan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi untuk sementara sesuai dengan kondisi dan situasi, perjuangan harus dicapai dengan cara parlementer. Di dalam pemilihan umum untuk memilih keanggotaan dewan Maluku Selatan terpilih E. U. Pupella, Wim Reawaru dan A. Wairisal. Suara mereka dalam dewan tersebut sangat mempengaruhi semangat nasionalisme para pejuang. Kemudian setelah Negara Indonesia Timur (NIT) didirikan, Pupella dipilih menjadi salah seorang anggota untuk mewakili Maluku Selatan.

Selain Pupella dan Pattimaipau, PIM juga mempunyai seorang tokoh revalusioner dan radikal yaitu Willem atau Wim Reawaru. Pejuang ini mempunyai suatu keunikan dalam politik perjuangannya. Jika Pupella sering menempuh jalan parlementer, maka Reawaru lebih berkonsentrasi ke arah perlawanan bersenjata. Ketika pergerakan di Indonesia Timur mulai meruncing dengan tercapainya perjanjian KMB, Reawaru segera membentuk semacam laskar rakyat yang terdiri dari anggota-anggota PIM. Organisasi pemuda yang telah dibentuk yaitu Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) diambil alih kepemimpinannya, dan dilatih dasar-dasar kemiliteran bagi anggota-anggotanya setiap hari. Sesuai jadwal pelatihan, setelah selesai baris-berbaris dan bagaimana mempergunakan senjata (tiruan dari bahan kayu), mereka setiap sore melapor kepada Wim Reawaru sebagai Komandan Pasukan. Barisan pemuda pelopor ini sebagian besar berasal dari kampung-kampung di Pulau Ambon. Selanjutnya didalam proses pertumbuhan PIM, Reawaru menginginkan agar PIM segera diubah menjadi pasukan pelopor. Akan tetapi usul ini tidak dapat diterima oleh Pupella dan kawan-kawan karena situasi dan kondisi masyarakat Maluku dengan tentara KNIL sebagai tulang punggung kolonialisme tidak bisa dihadapi oleh pemuda kita yang tidak terlatih dan persenjataan yang buruk.



Rapat PIM diadakan sampai dua kali untuk membicarakan usul Reawaru. Pupella tetap pada pendiriannya dan bersedia turun dari jabatan ketua kalau usul ini diterima. Namun sampai dua kali ia tetap dipilih sebagai ketua PIM karena aliran-aliran dalam PIM lebih berpikir secara logis dan magnetis didalan menilai situasi.

Setelah semua organisasi perjuangan baik berupa laskar-laskar perjuangan rakyat maupun organisasi politik PIM dapat dibentuk dan mengkonsolidasi diri, maka suatu perjuangan nasional mulai diadakan untuk mempertahankan Proklamasi dan Negara Republik Indonesia. Di daerah Maluku perjuangan ini direncanakan secara fisik bersenjata maupun Parlamenter. Sejak tahun 1946 perjuangan mempertahankan Proklamasi dan mempertahankan Negara Republik Indonesia berjalan terus sampai dengan perumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) pada akhir 1950. Pada waktu pemberontakan RMS banyak diantara para pejuang yang menjadi korban antara lain Wim Reawaru.

MENENTANG TINDAKAN SEPARATISME RMS

Awal persoalan RMS sebenarnya adalah alam pikiran dari segelintir orang-orang Ambon yang berkuasa pada masa NIT. Salah satu kelompok atau partai yang memelihara alam pikiran itu adalah Gabungan Sembilan Serangkai yang dipimpin oleh Dolf Metekohy dari Makkassar. Cabang-cabangnya tersebar di mana-mana tetapi terutama berperan di Ambon. Selain itu terdapat orang-orang yang tergabung dalam Partai Timur Besar yang juga berpusat di Makassar. Secara nyata alam pikiran separatis dari orang-orang Ambon itu pada mulanya dapat dilihat dalam Konverensi Denpasar di Bali pada tahun 1946. dan pikiran ini terus terpupuk oleh partai itu selama tokoh-tokoh mereka berkuasa dalam aparat NIT.

Pandangan separatisme di Ambon sendiri pertama kali terlihat dalam Dewan Maluku Selatan. Namun demikian, pikiran separatis ini terlalu lemah dan kurang mendapat dukungan, jika dibandingkan dengan ide Negara Kesatuan Indonesia. yang dipimpin oleh E. U. Pupella dan Wim

Reawaru. Tokoh-tokoh yang terkemuka dikalangan separatis adalah beberapa tokoh intelektual yang justru tidak pernah ikut dalam pergerakan Nasional. Mereka itu yang pertama adalah Ir. J. Manusama, yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Ambonsche Burger School. Dialah yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang dari partai separatis itu untuk membicarakan pembubaran NIT pada bulan april 1950. Kemudian ternyata bahwa dia juga yang merupakan salah seorang yang memprakarsai Proklamasi RMS. Pada 1953 ia dapat melarikan diri ke Negeri Belanda dan berusaha mendapat dukungan luar negeri untuk maksudnya. Tokoh berikut adalah Mr. Dr. Ch. R. S. Soumokil. Tokoh ini tidak dikenal dalam masa Pergerakan Nasional. Pada waktu itu ia berada di Surabaya bersama-sama dengan Mr. J. Latuharhary. Namun ia tidak pernah mengambil bagian dalam pergerakan rakyat yang dipimpin oleh Sarekat Ambon atau organisasi lainnya. Sama halnya dengan Manusama ia tidak dekat dengan rakyat pada masa-masa yang penting dalam sejarah Indonesia. Ketika ia pindah ke Makassar ia memang menjadi anggota Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku akan tetapi keanggotaannya hanya proforma saja.

Tokoh-tokoh tersebut sebenarnya jauh dari arus sosial dan politik masyarakat Indonesia pada waktu itu. Mereka tidak mengerti aspirasi-aspirasi rakyat banyak, sebab mereka lahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat kolonial. Mereka terpisah dari dari kelompok orang-orang Ambon di kota-kota besar di Jawa, dan juga terpisah dari arus perkembangan sejarah yang terkenal yaitu Pergerakan Nasional. Status mereka yang terpisah itu secara hukum diresmikan juga dengan diberikannya kedudukan *gelijkgesteld* kepada mereka. Menurut status kewarganegaraan Hindia Belanda, mereka adalah orang Eropa atau orang-orang Belanda. Atas dasar hak ini mereka diperlakukan sama seperti orang-orang Belanda, dan mendapat hak-hak istimewa. Oleh masyarakat mereka disebut “blandis” atau kebelanda-belandaan. Mereka inilah yang memaksa rakyat di Ambon pada waktu itu untuk menentang arus perkembangan sejarah. Mereka termasuk orang-orang terpelajar tapi tidak



mengenal keadaan masyarakat mereka sendiri. Mereka tidak melihat dan menyadari bahwa masyarakat kolonial itu sedang runtuh dan akan lenyap selama-lamanya.

Dibandingkan dengan pimpinan Maluku yang lain yang meskipun tidak berpendidikan akademis seperti E. U. Pupella, Wim Reawaru, Ot Pattimaipau, dan lain-lain, maka mereka tersebut belum berarti apa-apa. Tokoh-tokoh seperti Pupella dan kawan-kawan itu sementara berada di tengah masyarakatnya dan mengerti keinginan dan cita-cita rakyat. Golongan Belanda khawatir terhadap perkembangan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka berada dipihak kolonial dan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang dengan pengorbanan pribadi yang besar memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Kini kemerdekaan itu telah didapatkan, dan kekuasaan kolonial tempat mereka bergantung selama ini akan pergi. Hilanglah cita-cita kehidupan mereka untuk “door de eeuwen trouw,” setia dari abad ke abad kepada penguasa kolonial. Mereka takut kepada bayangan sendiri, takut digilas oleh rakyat yang selama itu mereka jauhi dan pandang rendah. Karena itu mereka berusaha melindungi diri, dan benteng itu adalah RMS yang merupakan sisa-sisa dari kubu pertahanan kolonial yang sedang runtuh.

Selain tokoh-tokoh Belanda itu terdapat pula suatu kelompok masyarakat lainnya, yakni anggota KNIL terutama mereka yang berasal dari Ambon. Sebagai tentara profesional Belanda, mereka menganggap bahwa pilihan yang diberikan kepada mereka menurut KMB tidak menyenangkan. Mereka diharuskan memilih menjadi organisasi APRIS atau kembali ke masyarakat. Pilihan pertama tidak mudah karena mereka akan disatukan dengan anggota-anggota TNI yang semula mereka perangi. Untuk kembali ke masyarakat mereka harus meninggalkan segala hak dan kemegahan yang diberikan kepada mereka sebagai anggotab KNIL. Keahlian mereka hanya berperang. Kehidupan militer telah berakar pada diri mereka. Dan ini tidak mungkin untuk dirubah segera menjadi petani atau pekerja lain. Selain itu penyelesaian yang diambil oleh pihak Belanda terhadap tuntutan-tuntutan mereka tidak memuaskan pula. Dengan

demikian anggota-anggota KNIL dari suku Ambon ini membawa akibat yang jauh menyusahkan masyarakat.

PEMBERONTAKAN RMS

Pandangan politik segelintir kaum intelektual Ambon yang blandistis serta ketidakpuasan anggota KNIL tersebut bertemu di kota Ambon pada 1950. Meskipun mereka secara historis dan sosiologis terasing dari masyarakat, namun mereka masih dapat menggerakkan RMS. Hal ini dapat dicatat pula dari situasi dalam masyarakat di Ambon pada waktu itu. Kalau diteliti struktur politik di Maluku khusus Ambon pada waktu itu sangat lemah. Tidak ada suatu pimpinan kenegaraan yang tegas dari pihak yang berkuasa di NIT. Jaringan pemerintahan daerah dan administrasinya juga belum kuat karena kerusakan material dan moral sebagai akibat Perang Dunia II. Dalam keadaan “kekosongan kekuasaan” inilah orang-orang dan kelompok tersebut dapat memperlak rakyat Maluku untuk mengejar kepentingan pribadinya dan menyeret rakyat penderitaan yang tak terhingga.

Sebelum Soumokil tiba di Ambon, Ir. Manusama telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang dari partai separatis untuk membicarakan pembubaran NIT. Pada tanggal 18 April 1950 di lapangan Esplanade (Lapangan Merdeka sekarang) diadakan rapat raksasa, dan Manusama mempropagandakan perjuangan Maluku yang merdeka sesudah NIT dibubarkan. Untuk mematangkan keadaan, pasukan KNIL Baret Merah dan Hijau (Pasukan Elit) mulai meneror rakyat yang dicap sebagai orang-orang Merah Putih yang harus dibasmi. Pada 20 April 1950, Soumokil meninggalkan Makassar dan tiba di Kota Ambon. Kemudian bersama Manusama dan pemimpin pemimpin KNIL, mereka mulai memprakarsai Proklamasi RMS, dengan ancaman para Baret, serta paksaan dari Soumokil-Manusama kepada pejabat kepala daerah Residen J. A. Manuhutu dan wakil ketua Dewan Maluku Selatan A. Wairisal. Mereka mendesak agar memproklamasikan berdirinya RMS. Kedua tokoh nasionalis ini menolak tapi tidak berdaya. Pada malam hari 25 April 1950



Residen J. A. Manuhutu terpaksa membacakan naskah proklamasi yang telah dibuat oleh Ir. Pesuarissa bersama-sama Soumokil dan Manusama. Isi Proklamasi tersebut adalah berdirinya Republik Maluku Selatan lepas dari kedaulatan NIT dan RIS. Dengan demikian para pemrakarsa Proklamasi berhasil melaksanakan niatnya, dan tanggal 26 April 1950 diberitahukan secara resmi ke Makassar dan Jakarta, di mana sebelumnya telah disiarkan melalui radio.

Dalam waktu yang singkat dibentuk kabinet pertama dan angkatan perang RMS, Serta dibuat Undang-undang Dasar sementara. Anehnya yang diangkat menjadi Presiden adalah J. A. Manuhutu dan perdana menteri adalah A. Warissal. ini membuktikan betapa kedua pemrakarsa pembentukan RMS yaitu Soumokil dan Manusama benar-benar adalah para petualang politik yang pengecut. Soumokil dalam hal ini hanya menjadi Menteri Luar Negeri dan Manusama Menteri Pendidikan. Setelah aparat pemerintahan diatur, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama semua wilayah kecamatan di Maluku Tengah dikunjungi pasukan Angkatan Perang RMS. Di ibu kota kecamatan diturunkan bendera Merah Putih dan diganti dengan Sang Empat Warna.

GUGUR SEBAGAI PAHLAWAN BANGSA

Di kota Ambon dan daerah sekitarnya pasukan RMS mulai mengadakan aksi-aksi teror terhadap rakyat yang dianggap pro Republik Indonesia, terutama para pemimpin pergerakan. Mereka yang pertama-tama ditangkap Kelompok Baret, ialah Wim Reawaru, pemimpin PIM kota Ambon, yang adalah juga pemimpin Barisan Pemuda Pelopor dan ketua badan perjuangan Pembebasan Irian Barat. Seperti diketahui, Wim Reawaru adalah tokoh pergerakan yang sangat ekstrem. Ia berprinsip bahwa kolonialisme harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Karena itu PPI diusahakan sebagai suatu barisan pelopor dari para pemuda. Sebagai wakil PIM didalam Dewan Maluku Selatan bersama E. U. Pupella dan Tjokro, Wim terkenal sebagai tokoh radikal dan seorang orator yang ulung. Karena sifat-sifat patriotisme dan nasionalisme itulah, maka Wim sangat

dimusuhi oleh tentara separatis RMS. Apalagi Wim selalu menjuluki mereka sebagai “anjing Belanda” dalam pidato-pidatonya.

Tokoh yang berwatak Kapitan Pattimura itu dijabloskan ke dalam penjara bersama pembantu-pembantunya yaitu Dahlan, Muhammad Nur, Raja Ketapang Miring di Seram Barat Hasan bin Tahir, Kopral Pattiasina dan lain-lain. Kemudian pada waktu subuh ditanggal 23 juli 1950, para pejuang ini diangkut secara rahasia ke sebuah dusun dekat kampung Liang Pulau Ambon di dekat pantai. Mereka disiksa dan dianiaya secara sadis oleh para baret RMS. Wim Reawaru dipukul sampai patah tulang rusuknya. Kemudian rambut gondrongnya yang konon akan dicukur pada waktu Republik Indonesia menang, dipotong dan disuruh untuk dimakan oleh para Baret. Bertiga yang lain dianiaya secara hebat pula. Sesudah itu ditembak dan mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah kolam. Kolam atau pusara maut yang misterius ini setahun kemudian baru dapat ditemukan oleh keluarga dan kawan-kawan seperjuangannya.

Kisah pencarian dan penemuan kolam maut yang menyimpan jenazah para pahlawan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada subuh pagi tanggal 23 Juli 1950, si Barabah seorang petani Buton mendengar deru mobil dan berhenti di pantai dekat paparisa (gubuk) tempat membuat garam. Para baret mencari rumahnya untuk meminjam pacul. Si barabah merasa aneh bahwa untuk apa pacul ini dipinjam. Ia lalu memanjat pohon kelapa dan mengintip dari kejauhan. Kemudian ia mendengar bunyi tembakan yang berarti ada pembunuhan oleh baret. Peristiwa yang terjadi ini, ia rahasiakannya dan kemudian baru diberi tahukan kepada rombongan keluarga yang sedang mencari jejak para pejuang ini dan dipimpin oleh ipar Wim yaitu Bapak Thom Pattiasina. Dengan susah payah dan hamper putus asa akhirnya lubang maut itu ditemui. Penggalian yang pertama menemui mayat Wim Reawaru yang identitas tubuhnya dikenali oleh sang istri Ibu Suprianah. Kemudian menyusul kawan-kawan seperjuangan Wim. Mereka semua dikafankan dengan bendera Sang Merah Putih dan disemayamkan di Aula Korem 25 Ambon.



Wim Reawaru dikuburkan di lokasi Batu Capeu (Amahusu) sesuai dengan wasiatnya kepada keluarga. Lokasi ini merupakan penggantungan mayat Thomas Matulelessy Kapitan Pattimura Pahlawan Nasional. Kemudian atas permintaan Kolonel Busiri Panglima Kodam XV Pattimura dan pemerintah, jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Oleh karena jasa-jasa dan pengorbanannya kepada nusa dan bangsa Indonesia, maka Wim Reawaru dihargai Pemerintah Republik Indonesia sebagai perintis dan pejuang kemerdekaan di daerah Maluku.

HAKIKAT CITA NILAI PERJUANGAN WIM REAWARU BAGI GENERASI PENERUS

Kekuatan dan daya juang yang mengorbankan semangat rakyat Indonesia, merupakan modal perjuangan berdasarkan nilai-nilai luhur yang jelas sudah tercantum dalam falsafah Pancasila yang kita jadikan dasar bagi Negara Indonesia dan *nation building*. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai budaya yang memperjuangkan kemerdekaan, harga diri, harkat dan martabat manusia dan bangsa, demokrasi, keadilan sosial, serta persatuan dan kesatuan segenap lapisan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan dan kepemimpinan yang dapat diangkat dari perjuangan Wim Reawaru itu antara lain sebagai berikut.

1. Patriotisme yang menyala-nyala untuk membebaskan tanah tumpah darah dan rakyat Indonesia dari cengkraman kelaliman dan penindasan penjajahan.
2. Pengorbanan yang besar dari para pemimpin perjuangan yaitu pengorbanan jiwa raga sebagai kosenkuensi logis dari cita-cita untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonseia.
3. Tanggung jawab dari para pemimpin dalam memimpin rakyat dilandasi pasa iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa yang menjadi pelita hidup bagi rakyat yang berjuang.

PENUTUP.

Nilai-nilai dan keteladanan Wim Reawaru patut diwariskan pada generasi muda, sebagai motivasi ditengah arak-arakan pembangunan nasional dalam memperkuat pengamalan terhadap Pancasila. Perjuangan Wim Reawaru, sanagat erat dengan nilai persatuan dan solidaritas, patriotisme, nasionalisme, religious, responsif, terhadap permasalahan bangsa, dan merupakan nilai-nilai yang relevan dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kini. Nilai-nilai itu hendaknya menjadi bahagian yang untuh dari sikap generasi muda Indonesia. Nilai ini juga merupakan ukuran bagi kita untuk mengoreksi hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi perjuangan terdahulu, dan juga menjadi alat penggerak untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.





**Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta 2013**

ISBN : 978-602-1289-04-4